

**pustaka-indo.blogspot.com**

## **KRISIS BUDAYA?**

Oasis Guru Besar  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI



# **KRISIS BUDAYA?**

**Oasis Guru Besar  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI**

**EDITOR  
RIRIS K. TOHA SARUMPAET**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2016

Krisis Budaya? Oasis Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
UI/Riris K. Toha Sarumpaet (ed.); ed.1 - Jakarta: Yayasan Pustaka  
Obor Indonesia, 2016

xvi + 352 hlm; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-979-461-977-3

Judul

*Krisis Budaya? Oasis Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
UI*

Riris K. Toha Sarumpaet (ed.)

Copyright © 2016 Riris K. Toha Sarumpaet

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights reserved

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Anggota IKAPI DKI Jakarta

Cetakan pertama: Februari 2016

YOI: 870.33.54.2015

Desain Sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230

Tlp. 021-31926978; 31920114

Faks: 021-31924488

E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)

[http: www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

## DAFTAR ISI

Prakata	
	<i>Riris K. Toha Sarumpaet</i> ..... vii
Pengantar	
	<i>Toeti Heraty Noerhadi</i> .....xi
Bab I	Menelusuri Akar Kepemimpinan Nusantara
	<i>Agus Aris Munandar</i> ..... 1
Bab II	Pemimpin Pembangun Budaya Intelektual
	<i>Apsanti Djokosujatno</i> .....37
Bab III	Amnesia Budaya sebagai Gejala Krisis dalam Kebudayaan Indonesia
	<i>Benny H. Hoed</i> .....57
Bab IV	Budaya Berdemokrasi di Indonesia dan Jepang dalam Euforia- Slogan-Proses dan Realitas
	<i>I Ketut Surajaya</i> .....77
Bab V	Krisis Budaya dan Gerakan Messianistis
	<i>Hariani Santiko</i> .....121
Bab VI	Krisis Kebudayaan Indonesia Masa Kini
	<i>Okke Kusuma Sumantri Zaimar</i> .....131
Bab VII	Krisis Kepemimpinan dan Kearifan Lokal yang Diabaikan Diabaikan
	<i>Parwatri Wahjono</i> .....151

Bab VIII	Perlu Dibangun Ragam Bahasa Politik yang Santun <i>Muhadjir</i> .....	187
Bab IX	Catatan Ringkas tentang Krisis Kebudayaan <i>Sapardi Djoko Damono</i> .....	205
Bab X	Krisis Identitas <i>Noerhadi Magetsari</i> .....	217
Bab XI	Naskah Kuna sebagai Sumber Kearifan Lokal dan Pengetahuan Budaya Indonesia: Solusi untuk Membaca dan Memahami Produk Budaya Indonesia <i>Titik Pudjiastuti</i> .....	245
Bab XII	<i>Proxy War</i> dalam Perspektif Sejarah Indonesia <i>Susanto Zuhdi</i> .....	265
Bab XIII	Wawasan Kebangsaan: Sebuah Keniscayaan <i>N. Jenny M.T. Hardjatno</i> .....	285
Bab XIV	Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah <i>Achadiati</i> .....	305
Bab XV	Telaah Krisis Kebudayaan <i>Toeti Heraty Noerhadi</i> .....	325
Indeks	.....	345

# PRAKATA

*Riris K. Toha Sarumpaet*

Sebelum rapat dimulai, sambil menunggu rekan-rekan yang masih mengakhiri kuliah dan menyelesaikan tugas lainnya, kami di Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (DGB FIB UI) biasanya ngobrol ngalor-ngidul, bercurah pendapat, berunek-unek tentang berbagai hal. Dari bertanya kabar, tentang segala hal, termasuk obat-obatan, ihwal mahasiswa, fakultas, juga Universitas, hingga apa yang terjadi di jalanan, Indonesia, tentu saja mancanegara. Waktu serupa ini selalu menyenangkan dan dinantikan. Hal yang hangat bisa diperdebatkan, bisa berulang sampai menunggu rapat selanjutnya. Demikianlah adanya dengan pemikiran yang pembaca hadapi kali ini.

Dari obrolan seolah gerutuan tentang “apakah yang sedang terjadi di Indonesia”, meningkat ke pentingnya pembicaraan tentangnya dalam sebuah rapat yang khas. Laiknya dalam keluarga dan kelompok manusia biasa, kerisauan tadi diperbincangkan kembali, dipertanyakan ulang, dan kami sampai pada kesimpulan bahwa diperlukan himpunan pemikiran tentang krisis budaya yang melanda Indonesia.

Itu terjadi pada tahun 2012. Sudah lama sekali! Kami berkumpul, dengan –atas permintaan bersama– pertama mendengarkan paparan dari Prof. Soerjanto Poespowardojo tentang situasi yang ada dan bagaimana itu dipunculkan sebagai sesuatu (yang) krisis. Saya ingat Prof. Soer datang dengan poin-poin yang bagi saya pribadi sangat membuka cakrawala. Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta memastikan bahwa segala sesuatu akan lancar. Beberapa anggota DGB FIB UI segera menyerahkan tulisannya. Yang lain, seperti Prof. Sapardi D. Damono yang sangat produktif, tulisannya, karena menunggu waktu terbit yang

sungguh lama, sempat diterbitkan di tempat lain. Hal paling parah, Prof. Benny Hoedoro Hoed tak sempat menyaksikan tulisannya berjudul “Amnesia Budaya sebagai Gejala Krisis dalam Kebudayaan Indonesia” karena Tuhan telah memanggilnya tahun lalu. Ada yang sudah menyiapkan naskah tetapi menarik kembali. Beberapa di antara kami dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada krisis di Indonesia. Beberapa tidak menyatakan secara benderang. Ada yang menunjukkan bahwa pembicaraan itu tidak menarik lagi baginya. Ada pula yang mengesankan apatisisme. Singkatnya, ada ketidaksepakatan tentang apakah krisis itu, adakah krisis itu, dan bagaimana krisis itu. Sebagai keluarga, kami bertengkar mengenai pikiran dan pendapat termasuk perasaan kami tentang krisis kebudayaan di Indonesia. Berpikir mengenai Indonesia, sebagai manusia mandiri maupun kelompok, kami kerepotan menemukan satu kata. Mungkin, antara lain, sebabnya kenapa buku ini memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikannya. Yang pasti, kehangatan perbincangan dan kerisauan tentang budaya di Indonesia telah menunjukkan bahwa kebudayaan adalah “alat untuk bertengkar” kita. Ia sangat aktual.

Pertanyaannya, dalam berbicara tentang kehidupan (bersama), haruskah kita sekata? Benarkah Bahasa mempersatukan kita? Adakah budaya yang ragam mempersatukan kita atau -bisa- sebaliknya? Buku ini, seperti berbagai buku lain yang merenungi gerak hidup manusia Indonesia, dengan sederhana dan salah tingkah mencoba memahami gaduh seru lucu haru yang ada dan mengatakan apa yang menyengkit dan membuatnya amnesia.

Jelas, Indonesia kaya raya. Namun, kita tak acuh bahkan tidak hendak mengenal apalagi mengakuinya. Masalah bahasa. Ketakmengertian budaya dan jati diri. Persoalan kesadaran bangsa. Kekayaan budaya, termasuk kearifan lokal yang menjadi slogan belaka. Wawasan kebangsaan? Dirasakan adanya bahaya partikularisme dan relativisme budaya. Kita bahkan tak hirau dengan kemungkinan *proxy war*. Dipastikan tiadanya pembangunan budaya intelektual bangsa. Apa itu revolusi mental berkaitan dengan demokrasi dan ideologi yang berkebudayaan? Berkaca melulu pada kemasakinian, media massa



disasar dan ditemukan betapa bangsa kita parah dalam hal hukum dan keuangan, pendidikan, demikian juga politik. Disadari juga, “politik hiruk pikuk” memerlukan tata tertib yang dikonvensikan untuk wacana politik, wacana lisan bidang pemerintahan, dan debat politik, agar terbangun ragam bahasa politik yang santun dan terbangun pula kerja sama yang santun.

Belum ada pemimpin yang mempunyai visi atau wawasan masa depan. Dengan mengajukan teladan 13 raja masa silam Nusantara, buku ini sesungguhnya mempertanyakan kecakapan pimpinan pemerintah. Ia bahkan mengajukan model penanggulangan konflik yang perlu ditiru. “Kesenjangan sosial, ketidakharmonisan, dan kegoncangan kosmis” menyarankan perlunya pemimpin bangsa yang “tanggap, tatag, dan tanggon”.

Apakah yang perkara? Siapakah kita sesungguhnya? Krisis identitas? Berulang kembali kita membicarakan tonggak budaya seperti bendera, NKRI, Sumpah Pemuda, Bineka Tunggal Ika, Pancasila, Bahasa Indonesia, yang kesemuanya ternyata kita lupakan karena terkecoh oleh sengat gemerlap gairah mengejar masa depan.

Dengan mengacu Sumpah Pemuda “yang dikeramatkan” itu, buku ini mengatakan bahwa yang “berkuasa dalam negara kesatuan kita ini adalah primordialisme dan teritorialisme” serta sektarianisme. “Kita memelihara krisis, dan bersenjatakan semua jenis “krisis” itulah kekuatan politis di negeri kita ini berusaha habis-habisan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan agar mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, dalam jenis apa pun. Proses semacam itu tampak sangat jelas dalam semua tingkat tata pemerintahan.” Dalam krisis yang memusat pada penyalahgunaan kekuasaan, kita ingin kembali pada nilai agama, kearifan lokal, atau ekonomi Pancasila. Benar kita perlu penangkal, yang, bagaimana pun, harus melalui proses pendidikan. Pertanyaannya: sudahkah dan seberapa banyak ilmu-ilmu budaya dan humaniora telah berkarya dan bermakna untuk bangsanya?

Saya berharap kelima belas bab dalam buku ini dapat menunjukkan kepada pembaca apa yang menjadi soal, kompleksitas dan kemultidimensionalan perkara hidup dan budaya kita, apa yang

perlu dipertengorkan dan dipertimbangkan dalam upaya membangun bangsa dan memastikan hakikat dan martabatnya. Dengan kondisi yang ada, globalisasi, dan teknologi canggih yang membuat mulut ternanga dan kehidupan pun terbawa, kemajuan pesat yang tak mempertanyakan ketertinggalan apalagi kesiapan, dan pemerintahan yang gamang, buku ini bertanya: akan ke manakah kita sebagai bangsa yang ber-”budaya krisis” bergerak dan menuju?

Saya sangat berterima kasih kepada semua sejawat terkasih di DGB FIB UI, teman-teman seperundingan, sepertengkar, dan sepertungganggalangan saya untuk kemajuan pengetahuan dan peradaban. Terima kasih untuk semua guru besar yang menuliskan pikirannya dan Sejawat lain yang walau tak hadir tulisannya di dalam buku ini, turut menyempurnakannya melalui perdebatan yang girang di fakultas. Khusus saya sampaikan penghargaan yang tinggi pada Prof. Soerjanto Poespowardojo yang selalu spontan dan gembira melandasi pertimbangan dan celoteh kami dalam sebuah argumentasi yang baik, menarik, sekaligus mendidik. Penghargaan besar dan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Prof. Toeti Heraty Noerhadi yang tanpa pikir panjang dalam kesibukannya yang tinggi menuliskan pengantar untuk buku yang pembaca hadapi ini.

Buku ini tak mungkin terbit kalau bukan karena bantuan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Terima kasih banyak kepada pimpinan Fakultas yang selalu cepat tanggap menolong geliat kami yang sangatlah lambat. Juga, terima kasih besar saya sampaikan kepada Ibu Kartini Nurdin dan kawan-kawan pelaksana di Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang selalu sabar dan setia.

Semoga buku ini bermanfaat.

Depok, 12 Februari 2016

**Riris K. Toha Sarumpaet**

Ketua Dewan Guru Besar

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

## PENGANTAR

*Toeti Heraty Noerhadi*

Sewaktu muncul niat menerbitkan buku ini, terbersit topiknya adalah perihal krisis. Dan, sebagai Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, tentunya topik menjadi berkaitan dengan Krisis Kebudayaan. Namun, saat-saat itu kiranya telaah terasa diperlukan sebagai perasaan kegagalan atau keputusan, karena 12 tahun Reformasi belum juga terbukti keberhasilannya – apalagi kini tahun 2016 – setelah 18 tahun, lebih beralasan lagi mewujudkan niat menerbitkan buku ini .

Diawali dengan tema pertama, *kepemimpinan* – terbersit bahwa Reformasi memerlukan kepemimpinan yang berhasil membawa kita meninggalkan, atau keluar dari rezim Orde Baru, tetapi kiranya masih kabur menghadapi arah tujuan. Corak kepemimpinan oleh **Agus Aris Munandar** dikaitkan dengan kepemimpinan Nusantara. Kepemimpinan Nusantara bermula sejak kerajaan-kerajaan timbul tenggelam, setelah pengaruh warisan kebudayaan India diterima nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah bertolak dari data dalam bahasa lokal dan bukan bahasa Sanskerta, disimpulkan sistem kerajaan Nusantara merupakan ciptaan sendiri dengan menyebutkan enam ciri ragam kepemimpinan dan tiga kendala yang dihadapi seperti yang diperlihatkan oleh Airlangga, Ken Arok, Kertarajasa, Jayanagara, dan Sri Waturenggong.

Setelah sekilas menunjuk pada kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, **Apsanti Djokosujatno** menyebutkan bahwa presiden baru kita adalah seorang *intelektual*, dalam kategori intelektual tradisional versi Gramsci, yaitu golongan “intelektual yang menyebarkan ide dan berfungsi sebagai mediator antara massa dan rakyat dengan kelas atasnya”. Selain itu, ”Joko Widodo menunjukkan *gentlemanship* yang tinggi, barangkali kini

Joko Widodo menjadi orang yang tepat, untuk menaruh harapan”, demikian **Apsanti** mengakhiri tulisannya.

Kemudian sebaliknya, bukan karena suatu intelektualitas yang menjadi “kekurangan” kepemimpinan melainkan gejala lain, yaitu “kehilangan”, bahkan patologis sifatnya ialah gejala amnesia (kehilangan ingatan). Apa yang hilang dari ingatan? Menurut **Benny H. Hoed**, amnesia menyangkut makna. Upaya mengobati *amnesia budaya* harus dilaksanakan, khususnya di kalangan kelas menengah dan bawah. Amnesia tersebut terutama sebagai gejala kehilangan makna karena lupa akan berbagai tonggak budaya berupa benda, manusia, peristiwa, atau unsur nonfisik, seperti bahasa dan gagasan (misalnya, rumusan Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, peribahasa, bahasa) Untuk itu, pemerintah dan elit politik perlu mengembangkan *anchorage* guna menjadi pedoman bagi generasi muda sebagai upaya “mengingatkan” makna berbagai tonggak budaya.

Kalau telah disebut amnesia budaya menyangkut *anchorage* pada masa lalu, maka masa depan yang masih harus dihadapi adalah proses berdemokrasi di Indonesia yang masih harus melalui proses panjang jika dibandingkan dengan di Jepang. Siapa lagi kalau bukan **I Ketut Surajaya**, penulisnya.

Kembali pada kepemimpinan, ada imbauan, aspirasi, harapan yang dibebankan pada seorang “*Ratu Adi*”, yang messianistik, demikian **Hariani Santiko**. *Ratu Adi* tampil seperti pada Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825-1830 yang malah menjerumuskan kita dalam kubang kolonisasi intensif suatu kulturstelsel yang baru melunak pada tahun 1870 lewat politik etis penjajah kerajaan Belanda.

Alur dilanjutkan oleh **Okke Zaimar**, yang mengambil lompatan jauh ke masa kini dengan gelombang teknologi informasi. Vitalitas kehadiran perkembangan media massa di satu pihak memperluas wawasan kita, tetapi di pihak lain mendangkalkan fenomena yang kita alami bersama. Apa penangkalnya dan perlukah? Jawaban oleh **Parwati Wahjono** ialah dengan *kearifan lokal* yang ternyata telah dilupakan. Kearifan lokal itu berupa keteladanan sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur, mengerti, peduli, dan menghargai sesama dengan penuh kasih. Ajaran-ajaran tersebut meskipun lahir pada zaman feodal tetapi bisa diterapkan, tanpa kecuali

pada pemimpin masa kini yang juga merupakan abdi rakyat, abdi bangsa dan negara, dan juga abdi Tuhan yang harus menjaga keseimbangan kosmos dengan harmonis. Gagasan ini rupanya perlu pula diperkuat oleh **Muhadjir** yang mengetengahkan perlunya *bahasa santun* dalam situasi konflik, terutama pada “Politik Hiruk-pikuk di Indonesia” sambil mengacu pada beberapa teori linguistik disampaikan bahwa strategi kesopanan harus diterapkan, misalnya, lewat ujaran. Seorang pembicara hendaknya berlaku sopan, arif, dermawan, memuji, rendah hati, dan meminimalkan ketidaksetujuan, sesuai dengan teori Leech (1983).

**Sapardi Djoko Damono** kembali pada Sumpah Pemuda sebagai tumpuan pertimbangan untuk mengatasi saat-saat berbahaya yang memerlukan penanganan segera atau krisis. Kita kembali pada tujuan Sumpah Pemuda yang menyatakan keyakinan Persatuan Indonesia dengan dasar persatuannya; kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Kebudayaan ternyata bukanlah perekat terbaik untuk menyatukan kita. Namun, kita wajib berterima kasih dan bersyukur bahwa bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa persatuan, tanpa protes yang berarti. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan bahwa kebudayaan kita adalah ranah untuk bertengkar. Tak pelak lagi bila **Sapardi Djoko Damono** mengatakan bahwa kita pandai-pandai menggunakan bahasa untuk bertengkar, tepatlah kembali ke **Muhadjir** yang menganjurkan bertengkarlah dengan santun.

**Noerhadi Magetsari** membicarakan manusia sebagai pendukung kebudayaan dan bila kita mengalami krisis, manusia pun ikut menderita. Penderitaan *subyek budaya* itu mengacu pada *identitas* yang dikaitkan dengan masalah gender, berakar pada kelas, ras, etnisitas (kesukuan), dan orientasi seksual. Atas dasar itulah maka identitas dapat dikatakan bersifat jamak, bahkan hibrid. Kini merujuk pada identitas, tampaknya kita perlu mempertimbangkan sebab-musabab yang disebut sebagai kausalitas sirkuler (*circular causality*), yaitu manusia membentuk budaya tetapi juga budaya membentuk manusia.

Salah satu topik menjelang akhir adalah tentang Naskah Kuno oleh **Titik Pudjiastuti** dan pentingnya sebagai sumber kearifan loral dan pengetahuan budaya Indonesia, apalagi bila dicari relevansinya untuk krisis kebudayaan. Sayangnya kepedulian atas naskah kuno ini lebih sering dilakukan oleh pihak asing, sehingga lewat pedagang di Ciputat pernah

ditawari kesediaan membeli naskah seharga tiga miliar. Namun, kita perlu lebih pahami soal naskah kuno ini tidak saja dari kandungan isi atau sebagai teks yang menjadi obyek ilmu filologi, melainkan pula dari benda obyek fisiknya, yaitu lontar, dluwang, bamboo, kulit kayu, dan rotan yang menjadi obyek kodikologi. Kodikologi mencakup kajian bahan, tinta jilidan, sampul, dan iluminasi. Kesemuanya menunjukkan keterampilan teknologi tinggi. Sementara itu, bagi kearifan lokal dan khususnya kandungan budaya, kita didedahkan bukan lewat teknik menggurui lewat contoh yang persuasif. Bagi pendidikan karakter atau jati diri budaya Indonesia, hal ini pun sangat masih relevan, apalagi terkait “krisis” kebudayaan, yang ingin kita atasi.

Perang sering tidak dapat dihindari, dan **Susanto Zuhdi** menyebutkan dengan mengutip Leon Trotsky: “*maybe you are not interested in war, but war is interested in you*”, lalu apa hubungannya dengan apa yang disebut olehnya sebagai “*Proxy War*”. Ternyata perang proksi atau *proxy war* adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti, biasanya negara kecil atau *nonstate actor*, Ormas, LSM, kelompok masyarakat atau individu. Satu keterangan penting pula ialah pihak pengganti dimanfaatkan, merupakan potensi yang terdapat di wilayah negara yang menjadi sasaran.

Menjelang proklamasi kemerdekaan 1945 Republik Indonesia, kita melawan musuh Jepang, Inggris dan Belanda, dalam ihwal baik pembentukan Negara Federal maupun agresi militer, bukan lagi merupakan perang konvensional melainkan suatu perang proksi apalagi dengan perang gerilya, sebagai perlawanan dari pihak Republik Indonesia. Perspektif historis perang proksi di Indonesia digambarkan sangat menarik, tetapi lebih menarik lagi bila perang ini kini tertuju pada “elite mafia” di bidang korupsi, narkoba, dan terorisme di negeri tercinta dewasa ini. Bagaimana perwujudannya sangat relevan untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada saat saat ini.

Perjalanan diteruskan oleh **N. Jenny M.T. Hardjatno** yang memfokuskan pembahasan pada wacana wawasan kebangsaan sebagai suatu keniscayaan. Keniscayaan itu menyangkut revitalisasi menghadapi partikularisme dan relativisme budaya, bahkan politik primordial. Bukannya niscaya pula kita mempertimbangkan teknologi informasi dan

dampak globalisasi. Setelah menyentuh teori kebangsaan atau nasionalisme Smith (2003:6, disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan akan tetap ada jika terdapat proses imajinasi dan keyakinan suatu komunitas yang selalu dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan. Tanpa hal ini maka kesadaran kebangsaan akan lenyap. Kemudian bahwa perlu ditumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan implementasi ajaran serta keyakinan agama.

Mantan Dekan FIB UI, **Akhadiati**, memotret kekhawatiran kian mengecilnya peranan bahasa daerah, misalnya, bahasa Jawa dalam konteks budaya secara umum dan kesusastraan secara khusus. Achadiati Ikram, yang menggambarkan suatu situasi, ketika keberhasilan memperoleh bahasa kesatuan, mempunyai dampak pada punahnya bahasa daerah, suatu dampak yang tidak diperhitungkan, sekaligus mengingatkannya pada ungkapan Prof. Anton M. Moeliono : “*That is the price we have to pay*”. Pernyataan itu dilengkapi dengan sambungan oleh Achadiati “*for having a national language*” yang menunjuk pada akibat bahwa penggunaan bahasa daerah mulai terkikis. Kemudian menarik kita telusuri sejarah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, melalui penelitian epigrafi dan filologi. Penelitian epigrafi menyebutkan lebih dari 290 prasasti yang tersebar ditemukan di Sumatra, Jawa, Madura, dan Bali (Boehari 2012). Bahkan, tampak mulai awal abad ke-4 berkembang suatu “kosmopolis sanskerta”, dengan peninggalan abad ke-5 prasasti berbahasa sanskerta di Kutai. Setelah itu, bahasa Melayu pun berkembang sejak abad ke-7, dalam kerajaan Sriwijaya yang meninggalkan teks tertua tahun 683, dan ke depan pada zaman Majapahit yang saat itu di kawasan Nusantara telah berkembang pula bahasa Melayu sebagai *lingua franca*. Baik Melayu klasik dan akhirnya Melayu pasar berperan dalam sejarah, juga pada penyebaran agama Islam maupun Kristen. Dalam pada itu, naskah sebagai obyek filologi masih memperhitungkan peranan sastra lisan sehingga dari prasasti, ke khazanah naskah, kemudian ke sastra lisan, terbentang kekayaan sejarah bahasa baik sejarah bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.

Tulisan terakhir mengembalikan masalah krisis kebudayaan pada masing-masing sektor kebudayaan atau *cultural universals* sesuai dengan diagram Koentjaraningrat (1953) yang sewaktu itu belum mempertimbangkan baik hubungan manusia dengan lingkungan alam, maupun hubungan antara

kekuasaan dan keadilan. Apa nilai kekuasaan dan keadilan dapat dianggap terintegrasi dalam cultural universal kekerabatan, dalam suatu komunitas yang meluas ke masyarakat.

Akhirnya, kita kembali ke Reformasi dengan kegagalannya, yang tergambarkan dalam tulisan **Toeti Heraty Noerhadi** perihal krisis kebudayaan merasa perlu mengacu kembali ke-7 *cultural universals* dan harus mengalami perubahan lebih kontemporer, mengalami inovasi menjadi delapan *cultural universals* lalu melalui banyak gagasan tokoh, misalnya, Amartya Sen, Martha Nussbaum, kemudian Mochtar Pabotinggi, Daniel Dakidae, dan Rocky Gerung yang mengemukakan peran dimensi kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penangkalnya. Sebagai penutup tulisan ini, kita kembali ke keniscayaan suatu “revolusi mental” pada “subyek budaya” untuk melawan arus yang sudah dikuasai “elite mafia”. Hal tersebut “didukung” pula oleh kesenjangan dalam masyarakat kepemilikan yang semakin buruk di Indonesia (lihat, Gini-coeffisien). Apa ada relevansi untuk krisis kebudayaan?

Jakarta, 20 November 2015

**Toeti Heraty Noerhadi**



# **Bab I**

## **MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA**

*Agus Aris Munandar*

### **Abstrak**

Di kepulauan Nusantara pada masa silam banyak kerajaan silih berganti berdiri, berkembang, dan runtuh. Kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh setelah pengaruh kebudayaan India datang dan diterima oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Sebenarnya sistem kerajaan tersebut hanya melanjutkan saja tradisi pemerintahan yang telah berkembang dalam era protosejarah.

Dalam masa perkembangan kerajaan-kerajaan, terdapat para raja yang berdasarkan bukti-bukti tertulis dipandang cakap dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan menggunakan sejumlah kriteria yang telah ditentukan, maka dipilih beberapa orang raja untuk dibicarakan pemerintahannya dalam telaah ini. Kriteria itu adalah:

- a. Raja pertama yang dipandang sebagai pendiri kerajaan atau yang berhasil menjayakan kerajaannya;
- b. Raja yang mempunyai peranan besar dalam dinamika politik sezaman;
- c. Raja yang mengembangkan pengaruhnya hingga ke luar wilayah kerajaannya;

- d. Raja yang berperan dalam pengembangan peradaban dan sejarah kebudayaan.

Atas dasar kriteria tersebut, maka dipilihlah 13 orang raja yang memerintah di berbagai kerajaan dan dalam periode yang berbeda-beda di Nusantara. Hasilnya sangat menarik, terdapat beberapa catatan positif yang patut diteladani oleh para pemimpin Indonesia sekarang atau masa mendatang, dan ada juga catatan negatif yang sebaiknya dihindari oleh para pemimpin Indonesia. Jadi, dengan mengacu pemerintahan para raja masa silam, krisis kepemimpinan, sifat, corak, dan gaya pemimpin Indonesia dapat kiranya disesuaikan dengan keadaan zamannya. Hal yang pasti bangsa Indonesia telah mengenal para pemimpin yang luar biasa sejak masa silam.

Kata Kunci: raja, kerajaan, nusantara, Hindu-Buddha, pemerintahan, prasasti.

## **/01/ Pengantar**

Menurut catatan berbagai sumber sejarah, sejak masa silam di Nusantara telah banyak penguasa atau raja yang berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Para penguasa tersebut ada yang memerintah di awal era sejarah Indonesia, dalam masa Hindu-Buddha, zaman kerajaan-kerajaan Islam prakolonial dan juga ketika kolonialisme telah mencengkeram Nusantara masih terdapat penguasa yang menjadi pujaan rakyatnya karena berbagai sisi positifnya. Telaah ini membatasi diri pada pembicaraan tentang para penguasa (raja) yang memerintah dalam masa Klasik Indonesia (abad ke-5—15 M), terutama para raja yang berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaannya.

Sumber telaah yang digunakan adalah prasasti-prasasti yang dipahatkan pada batu (*gupala prasasti*) atau logam (*tamra prasasti*).

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

Oleh karena itu, data yang diperoleh pun akan sangat terbatas. Pada zaman yang lebih muda dalam abad ke-13—15 M, terdapat beberapa karya sastra yang dapat digunakan juga untuk menyokong kajian ini. Karya sastra yang dimaksudkan, misalnya, adalah *Nāgarakṛtāgama* dan *Pararato*. Sebagaimana banyak didiskusikan bahwa dewasa ini Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan dalam berbagai tatarannya, konon sekarang bangsa Indonesia kekurangan negarawan yang pemimpin, atau pemimpin yang mampu bertindak sebagai negarawan. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak perlu didiskusikan, apabila saja bangsa Indonesia masa kini mau menengok ke belakang ke masa silam, bahwa banyak tokoh pemimpin masa silam yang dapat dijadikan teladan bagi sosok pemimpin masa sekarang. Sudah barang tentu para pemimpin masa silam tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Hal itu tentu akan dibicarakan dalam kajian ini, sehingga diharapkan dapat diacu hal-hal yang baik dari para pemimpin tersebut dan meninggalkan hal-hal yang negatifnya, atau berupaya memperbaiki atau tidak mengulang segala kekeliruan yang pernah dibuat oleh para pemimpin masa lalu.

Banyak raja atau penguasa dari masa Klasik Indonesia yang memerintah kerajaannya dengan baik dan dipuja oleh rakyatnya, tetapi telaah ini hanya membicarakan 13 tokoh raja terlebih dahulu yang dipandang penting dalam zamannya. Beberapa kriteria yang dapat dikemukakan untuk menampilkan 13 tokoh raja tersebut adalah:

- a. Raja pertama yang dipandang sebagai pendiri kerajaan atau yang berhasil menjayakan kerajaannya;
- b. Raja yang mempunyai peranan besar dalam dinamika politik sezaman;

- c. Raja yang mengembangkan pengaruhnya hingga ke luar wilayah kerajaannya;
- d. Raja yang berperan dalam pengembangan peradaban dan sejarah kebudayaan.

Berdasarkan sejumlah kriteria tersebut telaah ini menampilkan 13 orang raja untuk ditinjau dari segi kepemimpinan dalam pemerintahannya sebagai upaya mencari akar positif bagi kepemimpinan nasional. Raja-raja itu ialah:

1. **Mulawarmman**, memerintah dalam abad ke-5 di Kutai Kuno/ Kutai Martapura, Kalimantan Timur.
2. **Purnawarmman**, memerintah dalam abad ke-5 di Tarumanagara (wilayah Jawa bagian barat).
3. **Sanjaya**, memerintah dalam abad ke-8 di Mataram (Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian timur).
4. **Gajayana**, memerintah dalam abad ke-8 di Kañjuruhan (Jawa Timur).
5. **Śrī Jayanaśa**, memerintah dalam abad ke-8 di Śrīwijaya (Sumatra Selatan dan Jambi)
6. **Śrī Dharmmodayana Warmadewa**, memerintah abad ke-10 di Balidwipamandala
7. **Śrī Dharmmawangsa Airlangga**, memerintah antara tahun 1019–1043 di Kahuripan, Wwatan Mas, Jawa Timur.
8. **Śrī Ranggalā Rājasa Bhattara sang Amurwabhumi**, memerintah awal abad ke-13 di Tumapel yang kemudian disebut Singhasari, Jawa Timur.
9. **Kṛtanagara** memerintah antara tahun 1268–1292 di Kutharaja Singhasari, Malang, Jawa Timur.

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

10. **Kṛtaraja Śa Jayawarddhana** raja pertama Majapahit di wilayah Jawa bagian timur, memerintah antara tahun 1293–1309.
11. **Rājasanagara** atau Hayam Wuruk, penguasa Majapahit di puncak kejayaannya antara tahun 1350–1389 M.
12. **Niskala Wastukancana**, raja Sunda yang berkedudukan di Kawali, Ciamis, memerintah antara tahun 1371–1475 M.
13. **Dalēm Śrī Waturenggong**, penguasa Gelgel antara tahun 1460–1558 M, berkuasa di Bali, Lombok, Sumbawa, dan Blambangan (ujung timur Jawa Timur).

Demikianlah bahwa 13 orang raja dari masa Klasik Indonesia tersebut akan ditinjau satu per satu dari segi pemerintahannya baik dari aspek positif ataupun aspek negatifnya berdasarkan data yang tersedia.

Dalam bagan sederhana alur pikir kajian ini adalah sebagai berikut:



Tinjauan terhadap pemerintahan seorang raja dapat dilakukan tentu saja melalui sumber tertulis yang tersedia. Tinjauan tersebut dilakukan dari dua sudut pandang, yaitu sisi positif dan sisi negatif dari pemerintahan seorang raja, artinya akan ditinjau gambaran pemerintahan 13 orang raja yang pernah berkuasa dalam masa Hindu-Buddha di Indonesia baik dari hal yang patut diteladani ataupun hal-hal yang sebaiknya tidak diikuti.

Sebenarnya dalam masa Jawa Kuno telah dikenal adanya 8 sikap atau tindakan yang harus dijalankan oleh seorang raja, apabila hendak melaksanakan pemerintahannya dengan baik. “Delapan Tindakan Raja” itu dinamakan dengan ***Astabrata*** dan tercantum dalam kitab *kakawin Ramayana* (abad ke-9 M). Dalam uraian kisah *Ramayana* sebenarnya ajaran ***Astabrata*** pernah diungkapkan oleh Rama kepada Bharata (adik tirinya), pada waktu Bharata diminta memerintah di Ayodhya untuk mewakili Rama yang sedang mengembara. Dalam kesempatan itu Rama hanya mengajarkan dua sikap raja yang hendaknya seperti sifat Dewa Rawi (Surya) dan Sasangka (Candra) (Soewito-Santoso 1980, I: 86).

Uraian yang panjang lebar tentang ***Astabrata*** terdapat pada *sargga* XXIV: 51–60 yang diajarkan Rama kepada Wibhisana, setelah ditaklukkannya Alengka oleh bala tentara Rama dan Rama menunjuk Wibhisana menjadi penguasa baru di Alengka setelah kematian Rahwana. Dinyatakan oleh Rama bahwa dalam diri seorang raja bersemayam 8 dewa, raja harus bertindak sesuai dengan tugas masing-masing dewa sesuai dengan kondisi yang diperlukannya. Delapan dewa itu sebenarnya ***Astadikpalaka*** (8 dewa penjaga mata angin) yang kemudian diacu oleh raja untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dewa-dewa itu ialah:

1. Kuvera (dewa kemakmuran)
5. Yama (dewa maut)

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 2. Candra (dewa bulan) | 6. Surya (dewa matahari)           |
| 3. Indra (dewa hujan)  | 7. Varuna (dewa laut membawa paśa) |
| 4. Agni (dewa api)     | 8. Vayu (dewa angin)               |

Dapat ditafsirkan bahwa para raja Jawa Kuno agaknya mengacu kepada ajaran *Astabrata* dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Bahkan, ketika Majapahit runtuh, raja-raja di Bali masih mengenal ajaran *Astabrata*, puri-puri Agung di Bali tempat persemayaman raja ditata sesuai dengan letak dewa-dewa *Astadikpalaka* yang dikenal pula dalam ajaran *Astabrata* (Munandar 2005). Agaknya dalam melakukan analisis terhadap pemerintahan para raja masa lalu, ajaran *Astabrata* dapat dijadikan acuan atau tolok ukurnya, selain memperhatikan juga berita-berita sezaman ketika raja itu berkuasa (prasasti & karya sastra), untuk kemudian dapat disimpulkan sisi baik dan sisi buruk dari kekuasaan raja. Dalam telaah singkat ini tidak dibicarakan perihal pemerintahan para raja yang didasarkan kepada ajaran *Astabrata*, karena kajian tentang hal itu telah banyak dilakukan oleh para ahli terdahulu. Kajian ini hanya mengungkapkan beberapa catatan tentang pemerintahan para raja berdasarkan uraian prasasti-prasastinya, sumber tertulis sezaman, dan juga berita asing (Tiongkok) yang dapat mendukung data yang telah ada.

Hasil tinjauan terhadap pemerintahan dan kepemimpinan para raja kemudian dirumuskan menjadi beberapa postulat yang berkenaan dengan cara pemerintahan mereka. Demikianlah kajian ini akan berusaha menyajikan postulat-postulat positif dan negatif dalam hal pemerintahan seorang raja sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi kepemimpinan nasional yang tegas dan berwibawa di masa kini bahkan di masa mendatang.

## 2. Tinjauan Pemerintahan Para Raja

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tinjauan dilakukan berdasarkan data yang tersedia, berupa prasasti dan juga sumber tertulis lainnya, yaitu karya sastra dan juga berita asing. Mengenai uraian prasasti yang digunakan dalam kajian ini dapat berupa informasi yang memang disebutkan di dalam uraian, atau juga informasi yang bersifat tafsiran dari uraian yang ada. Jika suatu zaman belum ditemukan sumber tertulis selain prasasti, maka tinjauan hanya dilakukan dengan berlandaskan uraian prasasti-prasasti yang tersedia saja.

### 2.1 MULAWARMMAN

Di Tanah Kutai, Kalimantan Timur memerintah raja Mulawarmman, nama kerajaannya sampai sekarang belum diketahui, jadi kerap dinamai saja dengan Kutai Kuno. Mulawarmman meninggalkan tujuh prasasti, dipahatkan pada batu pipih yang didirikan tegak. Sebab itu, prasasti-prasasti itu dinamai dengan *Yupa* tapi tidak mencantumkan angka tahun. Dalam masa India kuno, *Yupa* batu biasanya didirikan sebagai pengikat hewan yang akan dikorbankan untuk upacara pemujaan dewa. Tulisan yang digunakan adalah aksara *pasca-Pallava* dengan bahasa Sanskerta, berdasarkan bentuk hurufnya diperkirakan prasasti-prasasti *Yupa* Mulawarmman tersebut berasal dari sekitar tahun 400 M (Poerbatjaraka 1952: 8).

Masa akhir pemerintahan Mulawarmman dan juga kerajaannya tidak diketahui, karena tidak ada sumber tertulis lain yang dapat dijadikan acuan historiografi Kutai Kuno. Berdasarkan tinggalan arkeologis yang ditemukan di Goa Gunung Kombeng di wilayah Kutai juga, dapat ditafsirkan bahwa pada masa silam, *sangat mungkin setelah era Mulawarmman*, pernah berkembang agama Hindu-Śaiva. Tinggalan arkeologis tersebut berupa sejumlah arca dari *pantheon*



## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

Hindu-Śaiva yang terdiri dari Śiwa Mahādewa, Parwatī, Gaṇeśa, Wisnu, dan lainnya lagi.

Berdasarkan uraian prasasti-prasasti *Yupa* dapat diketahui bahwa selama Mulawarmman berkuasa terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan, sebagai berikut

1. Mulawarmman mau menerima pengaruh kebudayaan luar (India) untuk kemajuan penduduk di wilayahnya dengan cara mendatangkan para brahmana ke Kutai Kuno.
2. Melakukan ritual keagamaannya dengan baik.
3. Menghormati kaum brahmana yang merupakan kalangan terdidik dan cerdas cendekia.
4. Menghormati leluhurnya dengan menyebutkan ayahnya Aswawarman, dan kakeknya Kudungga.
5. Agaknya sang raja tidak mengembangkan kekuasaan dan pengaruhnya ke wilayah sekitarnya, tidak ada bukti-bukti arkeologis lain yang mendukung tesis tersebut. Hal itu mungkin disebabkan penduduk Kalimantan Timur masa itu masih sangat sedikit.
6. Ia juga tidak memikirkan kelangsungan kerajaannya, sehingga lenyap dalam sejarah dan tidak ada beritanya lagi.

### 2.2 PURNNAWARMMAN

Raja tersebut memerintah di Kerajaan Tarumanagara sekitar abad ke-5, Tarumanagara merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India yang pertama kali berkembang di Tanah Jawa. Wilayah Tarumanagara diperkirakan di Jawa bagian barat meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sekarang, terutama di area pantai utaranya. Hingga sekarang belum ditemukan bukti kuat bahwa Tarumanagara

juga berdaulat hingga ke pedalaman Jawa bagian barat melebihi wilayah Bogor, sebab prasasti yang paling selatan ditemukan di daerah Pandeglang (Banten) dan Bogor saja.

Sama dengan Kutai Kuno masa perkembangan selanjutnya Tarumanagara juga tidak diketahui lagi, jadi Tarumanagara hanya mengenal seorang raja saja, yaitu Purnnawarmman dan Kutai Kuno juga hanya memiliki seorang raja saja, Mulawarmman. Hanya saja selain berita dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan Purnnawarmman, berita lain yang terbatas diperoleh dari catatan orang-orang Tiongkok yang menyatakan adanya utusan Taruma (*To-lo-mo*) yang datang ke Cina di awal abad ke-7 M, tapi agaknya bukan dalam periode pemerintahan Purnnawarmman lagi (Sumadio 1984: 43).

Berdasarkan uraian prasasti-prasastinya dapat diketahui adanya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar dapat diteladani atau dihindari, yaitu:

1. Raja Purnnawarmman melaksanakan ritual agamanya dengan cara memberikan persembahan ribuan sapi dan minyak kental (*ghu*) kepada kaum brahmana yang ada di Tarumanagara. Agama yang dipeluk Purnnawarmman sangat mungkin Weda-Brahmana belum melaksanakan ibadat pemujaan Hindu-Śaiva (Santiko 2011).
2. Menjaga wibawanya dengan pernyataan menjadi “panji bagi segala raja” (Prasasti Cidanghyang).
3. Memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membuat saluran air Gomati yang ditafsirkan sebagai upaya untuk mengatasi banjir yang datang tiap tahun (Prasasti Tugu).
4. Raja tersebut berdasarkan berita prasastinya dapat ditafsirkan sangat ekspansif memperluas wilayah kekuasaannya ditafsirkan dari uraian Prasasti Ciaruteun dan Kebon Kopi. Sifat ekspansif

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

yang diperlihatkan oleh Purnnawarmman mungkin harus dilakukan oleh sang raja, jadi pada masanya sifat ekspansif mungkin bukan sisi negatif. Di masa modern sekarang sifat ekspansif dari seorang pemimpin negara dipandang sebagai negatif, sebab jika seorang pemimpin bersifat ekspansif maka akan mengancam ketenteraman kawasan di mana suatu negara berada.

5. Tidak menjaga tradisi pemerintahan kerajaan, sehingga sampai sekarang belum ditemukan kembali prasasti-prasasti yang berkenaan dengan Tarumanagara dari raja-raja pengganti Purnnawarmman. Lenyapnya kerajaan itu dalam sejarah Indonesia masih belum jelas benar penyebabnya, tidak ada bukti untuk melakukan interpretasi secara baik.

### 2.3 RAKAI MATARAM SANG RATU SANJAYA

Adalah raja pertama dari Kerajaan Mataram Kuno, untuk meninjau pemerintahannya terdapat dua sumber tertulis penting yang dapat dijadikan acuan, yaitu Prasasti Gunung Wukir berangka tahun 654 Śaka (732 M) dan kitab *Carita Parahyangan* yang digubah di awal abad ke-16 M. Prasasti Gunung Wukir merupakan prasasti satu-satunya dari Sanjaya yang ditemukan hingga sekarang, diharapkan di masa mendatang dapat ditemukan prasasti lain dari era yang sama. Mengenai *Carita Parahyangan* yang disusun jauh di masa kemudian setelah Sanjaya memerintah, masih dapat digunakan juga sebagai sumber sejarah, mengingat apa yang diuraikan dalam kitab itu ternyata sejalan dengan berita prasasti yang otentik. Dengan demikian uraian Sanjaya dalam *Carita Parahyangan* dapat dijadikan bahan pelengkap pengetahuan tentang raja Mataram Kuno yang pertama tersebut.

Sebagai penguasa tentunya Sanjaya mempunyai sisi positif dan negatif dalam pemerintahannya. Sisi positif hampir ditemukan seluruhnya dalam uraian prasasti Gunung Wukir, sedangkan sisi negatif dapat ditemukan dalam uraian *Carita Parahyangan*. Dalam *Carita Parahyangan* juga ditemukan beberapa segi positif dari kebijakan pemerintahan Sanjaya. Beberapa catatan dari era pemerintahan Sanjaya di Mataram Kuno adalah:

Menurut Prasasti Gunung Wukir beberapa segi positif dari pemerintahan Sanjaya, yaitu

1. Memuliakan Trimurti, terutama Śiwa Mahādewa;
2. Menghormati para brahmana bijaksana; dan
3. Menciptakan keamanan yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya.

Dalam pada itu Kitab *Carita Parahyangan* menyatakan bahwa Sanjaya “senantiasa menjaga enam kehormatan raja, membangun tempat-tempat suci untuk pemujaan, membangun desa-desa, dan berbakti dihadapan Batara Upati...” (Munandar 2004: 46).

Adapun enam kehormatan raja yang disebutkan dalam *Carita Parahyangan* sangat mungkin mengacu kepada ajaran tentang raja yang baik menurut kitab *Brhadaranyaka Upanishad*. Salah satu kitab *Upanishad* tersebut mengajarkan bahwa raja yang baik harus mampu:

- a. Menjaga martabat kebangsawanan;
- b. Memiliki jiwa dan kehidupan luhur;
- c. Memiliki sifat melindungi kehidupan, melindungi yang lemah dan terluka;
- d. Bersifat seperti matahari yang memberikan anugerah;
- e. Menghancurkan dengan sinarnya; dan
- f. Melindungi kehidupan kaum pertapa.

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

Seluruh makhluk akan hidup bahagia apabila mereka dilindungi oleh raja, sebagaimana anak-anak yang dilindungi oleh orang tuanya (Gonda 1969: 3).

Berdasarkan berbagai sumber tertulis yang ada, dapat pula ditafsirkan bahwa Sanjaya mempunyai beberapa sisi negatif dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu:

1. Menurut *Carita Parahyangan* Sanjaya kerap melakukan peperangan, bahkan sampai ke luar Jawa, ke Khmer, dan Cina (Champa).
2. Sanjaya tidak mengeluarkan prasasti lagi selain Prasasti Canggal, sehingga sukar untuk menelisik perannya lebih jauh lagi sebagai raja dalam masa Jawa Kuno.

### 2.4 GAJAYANA

Penguasa kerajaan pertama di wilayah Jawa bagian timur, nama kerajaannya adalah Kañjuruhan. Ia hanya meninggalkan satu-satunya prasasti, yaitu Prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760 M, beraksara Jawa Kuno dan menggunakan bahasa Sanskerta. Diuraikan bahwa Kerajaan Kañjuruhan mempunyai raja bernama Dewa Simha, ia berputra laki-laki berjudul Limwa, setelah menjadi raja bergelar Gajayana. Pada masa pemerintahan Gajayana ia mendirikan bangunan suci untuk memuliakan Rsi Agastya, dan pada tahun 760 itu diadakan pergantian arca Agastya yang semula dari kayu cendana digantikan dengan arca dari batu hitam.

Tidak ada sumber kajian lain untuk membicarakan Kerajaan Kañjuruhan dengan rajanya Gajayana, kecuali Prasasti Dinoyo saja. Sampai sekarang belum dijumpai sumber karya sastra yang dapat dijadikan data pendukung untuk membahas Kañjuruhan. Oleh karena

itu, pengetahuan tentang kerajaan tersebut beserta para penguasanya sangat terbatas.

Beberapa hal yang patut dicatat dari masa pemerintahan Raja Gajayana menurut uraian Prasasti Dinoyo adalah:

1. Menjalankan agamanya dengan baik;
2. Menghormati para pendahulunya;
3. Dicintai oleh keluarga dan rakyatnya;
4. Tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidup kerajaannya, sehingga hilang tidak ada beritanya lagi dalam sejarah. Sampai sekarang belum ditemukan adanya prasasti lain dari Raja Gajayana; dan
5. Gajayana tidak dikenal di wilayah lain, kesan yang diperoleh adalah bahwa Gajayana hanyalah penguasa lokal.

## 2.5 ŚRĪ JAYANAŚA,

Memerintah dalam abad ke-7 di Śrīwijaya (Sumatra Selatan dan Jambi), berita tentang tokoh ini diperoleh dari Prasasti Kedukan Bukit bertarikh 605 aka/683 M dan Prasasti Talang Tuo tahun 606 Ś/684 M. Berdasarkan data yang dapat ditafsirkan dari prasasti-prasasti itu tokoh Śrī JayanaŚa ternyata mempunyai banyak jasa dalam menjalankan pemerintahan di Śrīwijaya. Beberapa hal yang yang dapat diungkapkan perihal raja tersebut berdasarkan berita prasasti adalah:

1. Mengajukan pemeliharaan lingkungan hidup, menanam pohon-pohon yang banyak manfaatnya bagi manusia;
2. Mengajarkan sifat-sifat kebaikan yang senantiasa harus dilaksanakan oleh semua orang seperti kerajinan, pengetahuan

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

akan berbagai jenis kesenian, ethos kerja yang tinggi, memiliki pengetahuan, ingatan, dan kecerdasan;

3. Mengajarkan sifat kesetiaan dalam keluarga, kesetiaan dan saling menasihati antarteman, dan kesetiaan kepada negara;
4. Mencegah berbagai tindak kekerasan dan penyelewengan; dan
5. Menekan upaya yang merongrong kewibawaan raja dan kerajaan dengan cara mengeluarkan prasasti-prasasti persumpahan, hal itu berarti juga upaya untuk menjaga integritas negara.

Tafsiran lain yang cukup penting adalah bahwa Raja dan rakyat Śrīwijaya lebih percaya diri dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terbukti mereka memilih untuk mengeluarkan prasasti-prasastinya dalam Bahasa Melayu Kuno, bukan dengan bahasa Sanskerta yang berasal dari luar Nusantara.

### 2.6 ŚRĪ DHARMMODAYANA WARMADEWA

Raja Śrī Dharmmodāyana Warmadewa (Udayana) memerintah Bali bersama permaisurinya, yaitu Ratu Gunapriyadharmapatnī. Pemerintahan bersama itu menurut uraian berbagai prasasti berlangsung antara tahun 911–923 (989–1001 M), agaknya Gunapriyadharmapatnī wafat terlebih dahulu antara tahun 1001 hingga tahun 1011 M. Raja Udayana melanjutkan pemerintahannya sendiri hingga tahun 933 /1011 M (Goris 1948: 6, 1965: 23–4, Sumadio 1984: 298). Setelah meninggal raja dan ratu tersebut didharmakan di kompleks candi pahat Gunung Kawi, Tampak Siring. Beberapa catatan penting yang berkenaan dengan Raja Udayana adalah:

1. Dharmmodayana memerintah bersama dengan istrinya, suatu hal yang tidak dijumpai dalam pemerintahan raja-raja Indonesia kuno lainnya;

2. Memerintah Bali dengan tenang tidak ada uraian prasasti yang menyatakan adanya konflik atau peperangan yang terjadi di masa pemerintahannya; dan
3. Agaknya ia telah mempersiapkan penggantinya, yaitu anaknya yang bernama Anak Wungsu, adik Airlangga sebagai penerus kuasanya.

## 2.7 ŚRÎ DHARMMAWANGSA AIRLANGGA

Airlangga ialah salah seorang raja yang terkenal dalam periode Indonesia Kuno, raja tersebut dipandang sebagai tokoh yang bekerja keras dan berupaya untuk memulihkan kembali keadaan Jawa bagian timur dalam paruh pertama abad ke-11. Pada waktu itu Jawa bagian timur terpecah-belah ke dalam beberapa negara kecil yang saling memerangi. Dengan susah payah Airlangga berhasil mempersatukan kerajaan Mataram warisan Pu Sindok dan memerintah dengan berkedudukan di Wwatan Mas. Airlangga memerintah antara tahun 1019–1043, di akhir masa pemerintahannya Airlangga terpaksa membagi dua kerajaannya menjadi Janggala dan Panjalu dengan alasan yang masih belum dapat dijelaskan secara pasti.

Beberapa catatan yang berkenaan dengan raja Airlangga adalah:

1. Walaupun Airlangga bukan asli berdarah Jawa, karena ibunya dari Jawa (Gunapriyadharmapatnî) dan ayahnya raja Bali, raja Dharmodayana Warmadewa, ia mempunyai kepercayaan diri kuat untuk mampu memerintah di Jawa bagian timur;
2. Airlangga adalah seorang raja Jawa Kuno yang mengembangkan kekuasaannya secara pasti berkat dukungan kaum brahmana yang telah dikenalnya ketika ia bertapa di hutan-hutan daerah pegunungan (*wanagiri*);



## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

3. Airlangga tentunya ahli strategi perang, karena ia senantiasa memperoleh kemenangan dalam setiap pertempuran; dan
4. Airlangga kemudian membagi kerajaannya menjadi dua dengan bantuan Mpu Bharadah, kerajaan itu adalah Janggala yang beribu kota di Kahuripan dan Panjalu yang beribu kota Daha.

Pembagian kerajaan oleh Airlangga memang merupakan suatu kenyataan sejarah. Namun, yang masih menjadi permasalahan adalah alasan pembagian tersebut. Banyak teori dikemukakan perihal alasan di balik pembagian kerajaan oleh Airlangga, antara lain, menyatakan bahwa ketika Airlangga telah menjadi raja, muncullah Mapanji Garasakan yang sangat mungkin adalah anak Dharmmawangsa Tguh raja terdahulu yang tewas dalam huru-hara *pralaya* yang diakibatkan oleh serangan Raja Wurawari. Garasakan menuntut takhta kepada Airlangga karena yang sebenarnya berhak atas kerajaan adalah dirinya. Dengan berat hati terpaksa Airlangga membagi dua wilayah kerajaannya dengan batas Sungai Brantas, untuk anak-anaknya sendiri dan untuk keturunan Dharmmawangsa Tguh (Sumadio 1984). Para ahli sejarah kuno tidak membeberkan dengan jelas perihal siapa yang berkuasa di Janggala dan Panjalu, apakah anak keturunan Airlangga yang menguasai Janggala dan keluarga Dharmmawangsa Tguh yang berkuasa atas Panjalu, atau sebaliknya, tidak diketahui secara pasti sampai sekarang.

Pada pokoknya Airlangga adalah raja besar pada zamannya, ia berhasil membangun kejayaan kerajaannya dengan mengeluarkan banyak prasasti. Airlangga juga senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membuat bendungan Waringin

Sapta, dan membangun tanggul-tanggul Sungai Berantas yang kerap mendatangkan banjir di musim penghujan.

## 2.8 ŚRI RANGGAH RAJASA BHATTARA SANG AMURWWABHUMI,

Memerintah di awal abad ke-13 di Tumapel, Jawa Timur. Julukannya yang terkenal dalam kitab *Pararaton* ialah Ken Angrok. Ken Angrok merupakan raja pertama Singhasari (1222–1227 M) dan juga dapat dipandang sebagai *wangsakara* (pendiri dinasti) Rajasa, hal yang menarik adalah tidak adanya prasasti otentik yang dikeluarkan oleh raja ini. Berita terbanyak perihal dirinya justru berasal dari satu-satunya sumber, yaitu *Pararaton*. Bahkan, judul lengkap kitab itu adalah *Sĕrat Pararaton atawa Katuturanira Ken Angrok* (Brandes 1920), menunjukkan bahwa memang kitab itu merupakan kisah dari Ken Angrok.

Dapat diketahui pula bahwa isi *Pararaton* terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama, membicarakan tokoh Ken Angrok hingga ia meninggal dan bagian kedua menguraikan para raja keturunannya yang memerintah di Singhasari dan juga Majapahit. Walaupun kitab *Pararaton* selesai digubah pada tahun 1535 Śaka/1613 M, jadi *Pararaton* ditulis jauh setelah peristiwa-peristiwa sejarah terjadi dalam abad ke-13 (zaman Tumapel-Singhasari), berita yang diuraikannya dapat dikatakan sejalan dengan sumber otentik lainnya seperti *Nāgarakṛtāgama* dan prasasti-prasasti masa awal Majapahit hingga keruntuhannya.

Berdasarkan uraian *Sĕrat Pararaton* dapat dicatat adanya hal-hal penting dari era Ken Angrok, yaitu:

1. Ken Angrok bekerja keras dengan memanfaatkan berbagai peluang untuk menjadi penguasa tertinggi (raja) dan

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

membentuk kerajaan baru (Singhasari), bahkan mampu menggantikan Kadiri sebagai pusat kekuasaan sebelumnya;

2. Menghargai dan menghormati kaum agamawan dan cerdik pandai, melindungi mereka untuk menjalankan pemerintahan Singhasari;
3. Menurut kitab *Pararaton*, Ken Angrok dipandang sebagai penjelmaan Brahma, Wisnu, Siwa sekaligus sehingga dalam waktu singkat mampu mendirikan pusat kekuasaan baru. Ken Angrok dipandang sebagai pendiri dinasti baru di Jawa Timur, keturunannya terus berkuasa hingga zaman Majapahit;
4. Hal yang negatif dari Ken Angrok adalah melakukan pembunuhan-pembunuhan kepada Mpu Gandring dan Kebo Hijo, kedua orang yang selayaknya tidak perlu ditewaskan; dan
5. Pilih kasih dalam pergaulan keluarga antara anak tiri (Anusapati) dengan anak-anaknya sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Anusapati untuk membunuh Ken Angrok lewat orang suruhannya (*Pengalasan* dari Desa Batil) pada suatu senja di kedaton Singhasari.

## 2.9 KĚTANAGARA

Raja KĚtanagara memerintah antara tahun 1268–1292 di Kutharaja Singhasari, sekarang di daerah Malang, Jawa Timur. Raja KĚtanagara ialah keturunan Ken Angrok, raja pertama di Tumapel yang kemudian berganti nama menjadi Singhasari. KĚtanagara merupakan raja terakhir Singhasari yang juga dapat dipandang sebagai raja besar pada zamannya, pengaruh kuasa Singhasari dirasakan hingga Sumatra, Semenanjung Malaya, dan juga Champa. Sekurangnya dua kali utusan Kubhilai Khan datang ke Jawa (Timur) untuk meminta KĚtanagara menyatakan tunduk kepada Cina (Tiongkok) dengan

mengirimkan upeti setiap tahunnya. Sebagai raja yang merdeka dan bebas, tentu ia tidak akan mau mengirimkan upeti kepada kaisar bangsa Mongol yang sedang berkuasa di Cina.

Utusan pertama datang, permintaan Kubhilai Khan tidak diindahkan oleh Kṛtanagara, kemudian menyusul datang utusan kedua yang bernama Meng-chi. Kṛtanagara sangat marah dengan kedatangan utusan Kaisar Cina di istana Singhasari yang kedua kalinya, ia melukai wajah Meng-chi dan mengusirnya untuk kembali ke Cina. Akibat perbuatannya itulah maka pada tahun 1292 menyeranglah tentara Cina ke Jawa, tujuannya jelas untuk menghukum raja Jawa yang lancang telah menghina Kubhilai Khan dengan melukai utusannya.

Menurut berbagai sumber sejarah yang dapat diketahui hingga sekarang, raja Kṛtanagara mempunyai beberapa catatan positif dan negatif dalam pemerintahannya sebagai berikut

1. Memiliki sikap bangga sebagai raja Singhasari dan menjaga martabat serta wibawanya tersebut dengan baik, terbukti ia menolak dengan tegas permintaan Kubhilai Khan untuk mengirimkan upeti ke Cina sebagai tanda takluk Jawa kepada kekuasaan Cina;
2. Mengembangkan pengaruh Singhasari ke luar Jawa melalui pembentukan kemitraan dengan Melayu (dengan mengirimkan arca Amoghapa a) dan Champa (lewat pernikahan putri Jawa dengan penguasa Champa);
3. Menjalankan kehidupan keagamaannya dengan baik, sampai akhir hayatnya ia sedang melaksanakan ritual Tantrayana di lingkungan kaputren di istana Singhasari;
4. Mengadakan mutasi para pejabat kerajaan dengan tidak memperhitungkan untung-ruginya sehingga menimbulkan

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

ketidakpuasan para pejabat dan menjadi pangkal terjadinya konflik;

5. Mengerahkan tentara Singhasari secara besar-besaran ke luar Jawa (*pamalayu*) menyebabkan lemahnya kekuatan kerajaan tersebut dari dalam; dan
6. Sangat percaya kepada para pejabat bawahan Singhasari, Kṛtanagara yakin tidak akan terjadi pemberontakan terhadap kekuasaannya. Oleh karena itu, ketika ada laporan bahwa tentara Jayakatwang mengadakan huru-hara di utara kota, Kṛtanagara tidak langsung percaya.

Pada akhirnya Kṛtanagara tewas di kedatonnya, akibat serangan tentara Glang-glang yang datang dari arah selatan (Kadiri). Menantunya, yaitu Raden Wijaya yang kelak bergelar Kṛtarājasa Jayawarddhana pendiri kerajaan Majapahit melarikan diri menyingkir dari istana Singhasari dengan disertai teman-temannya yang setia. Raden Wijaya kemudian mengungsi ke Madura, dan atas anjuran Arya Wiraraja, sang Adipati Madura, Raden Wijaya membuka hutan Trik atas seizin Jayakatwang sang pemenang. Sejarah selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Majapahit dengan segala permasalahannya.

### 2.10 KṚTARĀJASA JAYAWARDDHANA (Raden Wijaya)

Raja pertama Majapahit di wilayah Jawa bagian timur, memerintah antara tahun 1293–1309. Kṛtarājasa Jayawarddhana dikenal dalam *Pararaton* dengan nama Raden Wijaya. Wijaya dalam bahasa Jawa Kuno artinya menang, maka nama Raden Wijaya sangat sesuai dengan tokoh tersebut yang memang senantiasa menang dalam pertempuran dan akhirnya dapat mendirikan Majapahit. Selama masa awal pemerintahannya, Majapahit masih dalam suasana yang

belum stabil, sebab terjadi pemberontakan Ranggalawe dan Nambi yang cukup mengganggu pemerintahan kerajaan yang baru tumbuh tersebut.

Beberapa keistimewaan pemerintahan dari Kṛtarāja Jayawarddhana adalah:

1. Mendapat dukungan penuh dari teman-teman seperjuangan Kṛtarāja Jayawarddhana sehingga mampu menyingkirkan berbagai rintangan sehingga dapat mendirikan kerajaan Majapahit;
2. Percaya diri secara penuh, mungkin karena ia menganggap dirinya sebagai titisan dewa, dilindungi oleh Dewa Śiwa dan Wisnu;
3. Ia senantiasa mendengar nasihat dari berbagai pihak sehingga ia mampu melaksanakan nasihat tersebut dengan baik; dan
4. Kṛtarāja Jayawarddhana adalah seorang ahli strategi kenegaraan dan peperangan yang baik, karena itu ia mampu mendirikan Majapahit.

Kelemahan Kṛtarāja Jayawarddhana yang dapat ditafsirkan dari berbagai sumber sejarah sezaman adalah:

1. Setelah menjadi raja Kṛtarāja tidak mampu meredam konflik di antara para pengikutnya sehingga timbul berbagai pemberontakan, misalnya, pemberontakan Ranga Lawe dan Nambi; dan
2. Kṛtarāja tidak mampu secara tepat menempatkan para pengikutnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga timbul rasa ketidakpuasan di antara para pengikutnya.

## 2.11 RĀJASANAGARA (Hayam Wuruk)

Adalah raja Majapahit terbesar, cucu KṛtarajaŚa Jayawarddhana. Hayam Wuruk memerintah antara tahun 1351–1389 M, dalam masa pemerintahannya Majapahit berada di puncak kejayaannya. Beberapa hal yang menjadikan Rājasanagara mampu memerintah dengan baik adalah:

1. Mempunyai menteri-menteri yang cakap dan memadai dalam melaksanakan tugas masing-masing;
2. Pemerintahannya didukung oleh keluarga kerajaan secara penuh, tidak ada konflik kepentingan di lingkungan anggota dinasti Rājasa; dan
3. Dalam masa pemerintahannya Majapahit mempunyai kitab perundang-undangan nasional yang dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh pejabat kerajaan dan seluruh penduduk kerajaan. Kitab undang-undang itu dinamakan dengan *Kutaramanawadharma-sastra* atau disebut juga kitab *Agama*.

Dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk terdapat juga beberapa kelemahan yang dapat ditafsirkan dari berbagai sumber sejarah sezaman. Kelemahan yang dapat dicatat itu adalah bahwa

1. Hayam Wuruk sangat mempercayai penuh peranan tokoh mahapatih Wilwatikta, yaitu Gajah Mada, sehingga ada kebijakan Gajah Mada yang mungkin tidak diketahui oleh anggota keluarga raja;
2. Dalam masa kekuasaannya Hayam Wuruk tidak banyak mengeluarkan prasasti sehingga tidak diketahui aktivitas raja tersebut berdasarkan sumber otentik yang sezaman; dan

3. Hayam Wuruk tidak mempersiapkan penguasa Majapahit selanjutnya, sehingga sepeninggalnya Hayam Wuruk langsung terlibat dalam perang saudara yang lama dan melelahkan (Perang *Paregreg*). Perang itu menyebabkan Majapahit mulai merosot kewibawaannya.

## 2.12 NISKALA WASTUKANCANA

Memerintah di Jawa bagian barat sebelah timur, kerajaan yang disebutkan dalam prasasti-prasastinya adalah Sunda. Menurut uraian naskah *Carita Parahyangan*, Niskala Wastukancana memerintah cukup lama, sekitar 104 tahun. Ia memerintah setelah terjadinya peristiwa Bubat pada tahun 1357 M hingga pertengahan abad ke-15. Dalam masa pemerintahannya yang cukup lama itu masyarakat Kerajaan Sunda Kuno hidup dalam keadaan sejahtera, hingga akhirnya Sunda harus memindahkan ibu kotanya ke arah barat Jawa Barat, yaitu di Pakuan Pajajaran yang diperkirakan terletak di Bogor sekarang.

Beberapa keistimewaan pemerintahan Niskala Wastukancana adalah:

1. Sangat mendalami agamanya (Hindu-Sunda Kuno);
2. Menjaga warisan leluhur dan mengembangkan pusat-pusat keagamaan, dengan mendirikan berbagai *kabuyutan*, salah satunya adalah kabuyutan di Gunung Galunggung;
3. Tidak ada sumber sejarah yang menyatakan bahwa dalam masa pemerintahan Niskala Wastukancana terjadi kekacauan atau bencana di lingkungan Kerajaan Sunda; dan
4. Dalam masa pemerintahan Wastukancana agama Islam telah marak berkembang di pantai utara Jawa bagian barat, walaupun demikian tidak ada berita telah terjadi konflik antara Kerajaan



Sunda yang masih bercorak Hindu-Buddha dengan para pemeluk agama baru tersebut.

### 2.13 DALEM SRI WATURENGGONG

Sri Waturenggong ialah penguasa Gelgel yang berhasil menguasai seluruh Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, dan Jawa Timur bagian timur (1460–1558 M). Dalam masa pemerintahannya datanglah seorang brahmana dari Majapahit yang bernama Dang Hyang Nirartha. Menurut sumber-sumber sastra Bali, Dang Hyang Nirartha sangat dihormati oleh Waturenggong dan menjadi penasihat raja tersebut sehingga ia sukses mengembangkan kuasanya. Ia berada dalam kisaran masa keruntuhan Majapahit, dan ia menyaksikan pula banyaknya para pendatang dari Jawa (Majapahit) yang hijrah ke Bali setelah wilayah-wilayah Majapahit di Jawa Timur berangsur-angsur ditaklukkan oleh Demak.

Beberapa hal penting dalam masa pemerintahan Sri Waturenggong di Gelgel adalah:

1. Ia dapat dianggap sebagai raja Bali terbesar dalam zaman Madya, ia berhasil menyatukan seluruh pulau itu di bawah pemerintahan Gelgel;
2. Ia sangat memuliakan kaum agamawan dan orang-orang yang dituakan, terutama ia sangat menghormati Dang Hyang Nirartha yang dipandang sebagai guru dan penasihat dalam pemerintahannya;
3. Mempunyai keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan, terbukti ketika ia membentuk pasukan elite “*Dulang Mangap*” yang dapat dikirimkan oleh Gelgel ke Jawa bagian timur. Berkat kehebatan “*Dulang Mangap*” itulah, Gelgel mampu mengembangkan pengaruh kuasanya hingga Pasuruan

di Jawa Timur. Dalam masa pemerintahannya pergerakan tentara Demak ke timur dapat dihentikan di Pasuruan dan tidak mampu menuju Blambangan;

4. Ia memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sangat mungkin sistem pengairan Subak terbakukan dalam era Sri Waturenggong. Penghasilan sawah-sawah di Bali meningkat, rakyat hidup makmur, sehingga Gelgel di Bali dapat memperhatikan keadaan zaman peralihan Nusantara yang ditandai dengan maraknya penyebaran agama Islam. Pengembangan pengaruh kuasa Sri Waturenggong ke Nusa Tenggara dan Jawa bagian timur sebenarnya dapat dianggap sebagai upaya membendung penyebaran agama Islam hingga Pulau Bali; dan
5. Waturenggong menolak secara halus penyebaran Islam di Bali. Karena itu, agama Islam tidak pernah berkembang di Bali pada masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Wibawa Waturenggong juga sangat mungkin berpengaruh untuk mengurungkan niat para penyebar Islam dari Sulawesi Selatan untuk menyiarkan agama itu dalam abad ke-16 di Bali.

Dalam bidang kesenian, masa pemerintahan Sri Waturenggong dapat dianggap sebagai era pembangunan dasar-dasar kesenian Bali yang lebih mandiri. Dalam masa Gelgel kesenian Hindu-Buddha dari Majapahit diolah kembali dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakatnya. Bentuk pengolahan tersebut kemudian melahirkan kesenian Bali yang cukup *njlimet* yang berbeda dengan seni Hindu-Buddha di Jawa Timur dalam zaman Majapahit. Hasilnya, dapat dinyatakan bahwa bentuk berbagai karya seni Bali masa kini adalah hasil pengembangan lebih lanjut dari zaman Gelgel yang dasar-dasarnya telah digelar dalam zaman Sri Waturenggong.

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

Demikianlah uraian tentang sistem pemerintahan raja-raja Nusantara di masa Klasik, terdapat aspek-aspek positif dalam menjalankan pemerintahannya dan juga dapat ditemui sisi-sisi negatifnya. Raja-raja itu memerintah di zaman yang berbeda-beda, tetapi dapat dipastikan bahwa mereka semuanya berupaya untuk menjayakan kerajaannya dan berupaya membuat rakyatnya hidup sejahtera. Hal-hal positif itulah yang selanjutnya dibincangkan dalam telaah singkat ini.

### /03/ Kelengkapan Kerajaan

Menurut kitab pemerintahan India Kuno, *Arthashastra* yang digubah oleh pujangga Kautilya (350–283 SM), terdapat tujuh hal penting yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau kerajaan yang berdaulat. Mengingat Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara menerima kebudayaan India dan bercorak budaya India Kuno, maka persyaratan kerajaan yang disebutkan dalam *Arthashastra* selayaknya juga diikuti oleh kerajaan-kerajaan dan para raja masa Hindu-Buddha di kepulauan Indonesia. Suatu kerajaan harus memiliki tujuh bagian penting, yaitu:

1. Adanya seorang penguasa (*Raja*);
2. Adanya para pejabat kerajaan/brahmana, menteri (*Amatya*);
3. Adanya wilayah kerajaan dan penduduknya (*Janapada*);
4. Adanya kota/benteng tempat kedudukan raja (*Durga*);
5. Memiliki harta kerajaan (*Kosa*);
6. Mempunyai bala tentara (*Danda*);
7. Mempunyai sejumlah sekutu (*Mitra dan*)

(Munoz 2009: 144-145)

**Tabel Kelengkapan Beberapa Kerajaan Masa Hindu-Buddha  
di Nusantara Berdasarkan Kitab Arthasastra**

Nama Kerajaan	Raja	Amatya (pejabat ker.)	Janapada (wilayah & penduduk)	Durga (kota & benteng)	Kosa (harta)	Danda (tentara)	Mitra (sekutu)
Kutai Kuno (Abad ke-5-6 M)	✓	✓	✓	—	?	?	?
Tarumanagara (Abad ke-5-6 M)	✓	✓	✓	—	?	✓	?
Kanjuruhan (Abad ke-8 M)	✓	✓	✓	—	?	?	?
Mataram Kuno (Abad ke-8-10 M)	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓
Sriwijaya (Abad ke-8-12 M)	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓
Sunda Kuno (Abad ke-13-15 )	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kadiri (Abad ke-12 M)	✓	✓	✓	✓	?	✓	?
Singhasari (Abad ke-13 M)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Majapahit (Abad ke-14-15)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Melayu (Abad ke-14-15)	✓	✓	✓	?	?	?	✓

**Keterangan:**

- : memiliki komponen termaksud
- : tidak memiliki komponen termaksud
- ?: belum diketahui secara pasti

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tiga komponen pertama yang menjadi syarat berdirinya kerajaan, yaitu ada raja (penguasa) sebagai pemimpin, para pejabat kerajaan, dan penduduk, dimiliki oleh semua kerajaan. Lokasi kota dengan benteng adalah sesuatu yang tidak lazim di Nusantara, tidak seperti kota-kota India dan di Eropa yang dikelilingi tembok benteng, kota kerajaan di Nusantara tidak pernah dilaporkan adanya tembok benteng

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

mengitarinya. Dalam tabel terlihat bahwa Sunda Kuno, Kadiri, Singhasari, Majapahit dan Melayu ditandai sebagai kota yang dapat diduga lokasinya di ruang geografi, tapi bukan berarti kota yang berbenteng.

Lokasi kota permukiman Kutai Kuno, Tarumanagara, dan Kañjuruhan tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan dekat dengan temuan kepurbakalaan yang berhubungan dengan kerajaan tersebut. Lokasi kota Sriwijaya memang sudah dapat diperkirakan, yaitu di area Palembang, tetapi tetap belum dapat diketahui kedudukan aslinya. Ibu kota Mataram Kuno mungkin berlokasi di daerah Kedu, tapi tepatnya masih belum dapat diketahui. Apalagi Mataram kuno menurut prasasti-prasastinya pernah berpindah-pindah ibu kota yang dinamakan dengan Medang (Mdang), seperti *Mdang i bhumi Mataram*, *Mdang i Poh pitu*, *Mdang i Watugaluh*, dan *Mdang i Mamratipura*, di mana lokasi-lokasi itu sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti.

Ibu kota Sunda Kuno yang berkembang dalam abad ke-8–13 berada di wilayah Priangan Timur, tapi belum diketahui lokasi pastinya, sedangkan Ibu kota Sunda Kuno dalam abad ke-14–15 dapat diperkirakan dengan saksama di kota Bogor sekarang. Adapun kota Daha sebagai ibu kota Kadiri dan Kutharaja sebagai tempat kedudukan raja Singhasari dapat diperkirakan juga, Daha di bagian timur kota Kediri sekarang, sedangkan Kutharaja ada di wilayah utara Malang. Kota Majapahit tidak diragukan lagi berada di situs Trowulan, Mojokerto. Mengenai Malayupura di Sumatra Barat, tempat kedudukan Adityawarman raja Melayu di abad ke-14 belum dapat diketahui lokasi tepatnya, mungkin berada di sekitar kota Pagarruyung.

Dalam pada itu harta dan tentara tentunya dimiliki oleh setiap kerajaan masa Hindu dan Buddha, hanya saja data yang berkenaan dengan kedua hal itu tidak dimiliki oleh beberapa kerajaan. Mengenai berita adanya tentara dalam masa Kutai Kuno tidak diperoleh dalam uraian prasasti-prasasti Yupa, berita yang diuraikan dalam prasasti justru tentang upacara keagamaan. Prasasti-prasasti Tarumanagara juga tidak memberitakan adanya tentara dari raja Purnnawarmman. Namun, informasi tentang gagah beraninya sang raja sehingga menjadi panji bagi segala raja lain, menyiratkan Tarumanagara mempunyai bala tentara sehingga mampu mengembangkan kekuasaannya sampai ke pedalaman Jawa bagian barat dan Banten. Prasasti Dinoyo (760 M) dari Kerajaan Kañjuruhan tidak memberitakan adanya bala tentara kerajaan, agaknya kerajaan pertama di Jawa bagian timur tersebut tentunya memiliki tentara juga. Begitupun Kerajaan Malayunya Adityawarman tidak memberitakan dalam prasasti-prasastinya perihal adanya tentara, tentunya kerajaan itu memiliki tentara tapi data prasasti yang berhubungan dengan tentara belum dijumpai.

Ihwal negara sahabat dari kerajaan-kerajaan di masa silam diuraikan dalam prasasti dan berita-berita yang berkenaan dengan Kerajaan Sriwijaya, Mataram Kuno, Sunda Kuno, Kadiri, Singhasari dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan paling awal di Nusantara seperti Kutai Kuno, Tarumanagara, dan Kañjuruhan menurut uraian prasastinya tidak memberikan informasi tentang adanya negara-negara sahabat. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada negara sahabat, melainkan karena data yang belum ditemukan, maka informasi tentang negara sahabat yang sezaman masih belum dapat diketahui.

Komponen-komponen pembentuk kerajaan yang disebutkan dalam kitab *Arthashastra* sebenarnya tetap tidak berubah hingga masa modern sekarang. Bahwa benar setiap negara secara minimal harus memiliki tujuh komponen kenegaraan, dan dari tujuh komponen

dasar itu kemudian dikembangkan berbagai kelengkapan negara lainnya sesuai keperluan. Data yang termaktub dalam tabel adalah bukti bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara telah mempunyai tradisi sistem pemerintahan yang memadai, sehingga kerajaan-kerajaan dapat bertahan selama minimal 1 abad bahkan lebih.

#### **/04/ Epilog**

Banyak yang bisa dipetik dari masa pemerintahan raja-raja masa silam di Nusantara, terutama dari era perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha sebagaimana yang dibincangkan dalam telaah ini. Berdasarkan data yang telah tersaji, maka raja siapapun dan memerintah di kerajaan mana pun senantiasa berkuasa untuk memimpin rakyatnya. Sebenarnya penduduk Nusantara sejak zaman protosejarah, sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha telah teratur, ada pemimpinnya, ada "*kokolot*" (dukun/*shaman*), orang yang dituakan karena pengetahuannya, para petugas penjaga keamanan, dan ada rakyat biasa. Gambaran seperti itu masih terlihat hingga sekarang di beberapa kebudayaan suku-suku yang masih hidup sederhana, seperti di kalangan etnik Kanekes (Baduy), Tengger, orang Rimba di Jambi, dan orang To Pembuni di Sulawesi.

Ketika orang-orang India datang ke Nusantara mereka tidak berhadapan dengan penduduk pribumi yang biadab, melainkan pribumi yang telah beradab. Sistem kerajaan dapat segera diterima, sebab nenek moyang orang Nusantara sejatinya telah mengenal sistem pemerintahan, hanya saja konsep penataan kerajaan dan susunan para pejabatnya kemudian diperkaya dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Perkembangan selanjutnya dari kerajaan-kerajaan itu sangat Nusantara, menurut berbagai prasasti banyak nama jabatan di Kerajaan Sriwijaya, Mataram, hingga Majapahit yang menggunakan julukan bahasa lokal, bukan bahasa Sanskerta, misalnya, ada pejabat

yang dinamakan “*mantri er haji*”, “*panggil hyang*”, “*senapati sarwajala*”, pejabat tinggi *rakryan mahamantri i hino, i halu, i sirikan*, dan lain-lain. semuanya bukan dari konsepsi sistem kerajaan India, melainkan ciptaan orang Nusantara sendiri.

Dapat kiranya ditafsirkan berdasarkan telaah singkat ini bahwa:

1. Para raja masa silam berupaya memerintah sebaik mungkin dan berupaya membuat rakyatnya hidup sejahtera (misalnya, yang diperlihatkan oleh Raja Purnawarman, Airlangga, Hayam Wuruk, dan Niskala Wastukancana);
2. Raja harus mampu melakukan pembinaan ke dalam negerinya, mengeratkan hubungan antarpejabat kerajaan, setia kepada negara, dan menjaga kebajikan rakyatnya (diperlihatkan oleh Śrī Jayanaśa, penguasa Śrīwijaya, Hayam Wuruk di Majapahit, dan Niskala Wastukancana di masa Sunda Kuno);
3. Para raja tersebut sangat taat melaksanakan agamanya, dalam hal ini agama Hindu dan Buddha, menghormati kaum brahmana dan para penasihat yang dituakan dalam masyarakat masa itu (diperlihatkan oleh semua raja yang menjadi lingkup perbincangan);
4. Raja-raja harus bertindak tegas untuk melenyapkan musuh-musuh negara atau yang akan membuat kekacauan negara seperti yang diperlihatkan oleh Airlangga, Ken Angrok, Kṛtarāja Jayanagara, dan Sri Waturenggong;
5. Raja-raja harus mempunyai hubungan dengan negara lain secara baik, misalnya, Kṛtanagara yang membina hubungan dengan Melayu dan Champa, Hayam Wuruk dalam masa kejayaan Majapahit, dan Sri Waturenggong di masa Bali Madya; dan
6. Raja-raja mampu membaca situasi dan kondisi zamannya, untuk memprediksikan nasib kerajaannya di masa mendatang



## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

yang dekat atau masa depan yang masih jauh (diperlihatkan oleh raja Sanjaya, Niskala Wastukancana, dan Sri Watuenggong).

Butir-butir itulah yang mutlak dapat dijadikan teladan bagi pemimpin Indonesia masa kini dan mendatang. Hal-hal baik dalam pemerintahan telah dicontohkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia beberapa abad yang silam, tradisi pemerintahan yang tegas, berwibawa, sejahtera, hubungan baik dengan negara lain, bukan konsep modern dalam pemerintahan Indonesia, melainkan telah dikenal sejak zaman protosejarah hingga zaman sejarah paling awal di masa Hindu-Buddha! Walaupun demikian harus pula diperhatikan beberapa tindakan raja masa silam yang dianggap tidak layak dan harus dihindari oleh para pemimpin Indonesia selanjutnya. Jadi, sepatutnya juga bercermin kepada tindakan yang dipandang negatif untuk tidak diikuti lagi. Berdasarkan kajian ringkas ini, terdapat beberapa tindakan para raja yang sepatutnya harus dihindari, yaitu:

1. Tidak membuka peluang untuk menyiapkan pengganti dan sebagai pemimpin negaranya di masa selanjutnya. Kerajaan-kerajaan awal lenyap begitu saja dalam sejarah tanpa ada berita yang jelas seperti yang dialami Kutai Kuno, Tarumanagara, dan Kañjuruhan;
2. Tidak waspada dengan kondisi dalam negeri yang “hangat”, tidak memperhatikan hubungan antarpejabat yang tidak harmonis dan saling menjatuhkan, seperti yang terjadi dalam masa pemerintahan Krtanagara dan Raden Wijaya di awal Majapahit. Terjadilah perlawanan dan pemberontakan, menentang perintah raja secara terang-terangan; dan
3. Penguasa seharusnya tidak mempercayai peranan seorang tokoh yang menjadi pejabat pembantunya, tidak ada istilah “tangan

kanan atau tangan kiri” penguasa, hal itu akan membahayakan pemerintahan sendiri, seperti yang diperlihatkan oleh Hayam Wuruk dan ibunya Ratu Tribhuwanottunggadewî terhadap Gajah Mada. Gajah Mada ternyata mempunyai agenda sendiri dalam menjalankan pemerintahannya, walaupun agenda tersebut tidak membahayakan Majapahit, tapi cukup mengganggu kedudukan raja.

Memang kondisi pada waktu para raja memerintah dahulu berbeda dengan kondisi Indonesia sekarang, kondisi ketika Raja Sanjaya berkuasa di abad ke-8 juga jauh berbeda dengan kondisi zaman ketika Airlangga memerintah di abad ke-11. Kondisi dan jiwa zaman tentunya berpengaruh dalam corak pemerintahan para raja. Namun, tetap saja ada hakikat penting yang senantiasa terus berlanjut dalam sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau pejabat lainnya, presiden, perdana menteri, kanselir, kerajaan berkonstitusi atau apa pun bentuknya. Bahwa pemerintahan dengan berbagai aktivitasnya sebenar-benarnya hanyalah berpihak kepada rakyat yang diperintahnya, bukan kepada siapa pun, bukan pula kepada sistem negara, apalagi kepada sang penguasa sendiri.

## KEPUSTAKAAN

- Gonda, J.. 1969. *Ancient Indian Kingship from The Religious Point of View*. Leiden: E.J.Brill.
- Munandar, Agus Aris. 2004. *Sang Tohaan: Persembahan Untuk Prof.Dr. Ayatrohaedi. Beberapa Kajian Pernaskahan dari Perspektif Arkeologi*. Bogor: Akademia.
- . 2005. *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke-14—19*. Jakarta: Komunitas Bambu.

## MENELUSURI AKAR KEPEMIMPINAN NUSANTARA

- . 2011. "Pendharmaan Sri Dharmmodayana Warmadewa", makalah dalam *Seminar Nasional 1000 Tahun Wafatnya Prabu Udayana: Menggali Nilai Kearifan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Pusat Kajian Bali, Universitas Udayana, Denpasar.
- De Casparis, G.J.. "Beberapa Tokoh Besar dalam Sejarah Asia Tenggara dari kira-kira 1000–1400 M", dalam *Amerta: Berkala Arkeologi* 16. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. ISSN 0215–1324. Halaman 38–46.
- Munoz, Paul Michel. 2009. *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Prasejarah-Abad XVI)*. Yogyakarta: Mitra Abadi.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng.. 1952. *Riwayat Indonesia. Djilid I*. Djakarta: Jajasan Pembangunan.
- Putra, I.B.Rai. 1995. *Babad Dalem*. Denpasar: Upada Sastra.
- Santiko, Hariani. 1989. "Waprakeswara: Tempat Bersaji Pemeluk Agama Weda?", dalam *Amerta: Berkala Arkeologi* No.11: 1–8. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- . 2011. "Agama Veda di Nusantara", dalam Riris K. Toha-Sarumpaet (Editor), *Ilmu Pengetahuan Budaya dan Tanggung Jawabnya: Analekta Pemikiran Guru Besar FIB UI*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Halaman 136–152.
- Soewito-Santoso. 1980. *Ramayana Kakawin*. 3 Volumes. Issued under Auspices of The Institute of SEA Studies Singapore and International Academy of Indian Culture, New Delhi.
- Sumadio, Bambang (Editor Jilid). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia II: Jaman Kuna*. Jakarta: Balai Pustaka.



## Bab II

# PEMIMPIN PEMBANGUN BUDAYA INTELEKTUAL<sup>1</sup>

*Apsanti Djokosujatno*

### Abstrak

Budaya intelektual suatu bangsa mendasari perilaku, kecenderungan, produk, dan martabatnya, serta jelas memperkuat daya tahan hidupnya. Tulisan ini secara sederhana memperlihatkan peran penting pemimpin Negara, termasuk para pejabatnya, dalam membangun budaya intelektual bangsanya, melalui perbandingan sederhana antara perjalanan sejarah dua negara yang berjauhan: Indonesia dan Prancis. Prancis bukan hanya salah satu Negara yang terkemuka dalam hal seni budaya, ia juga unggul dalam bidang intelektual. Dari abad ke abad para pemimpinnya secara konsisten membangun dan mempertahankan lembaga-lembaga yang membina segi intelektual bangsa itu. Dewasa ini negara itu unggul dalam banyak bidang dan

---

1 Kata intelektual bisa merujuk ke semua orang tapi juga bisa merujuk ke suatu perincian tertentu. Dalam Oxford, *Advanced Learner's Dictionary*, arti kata *intellect* (intelekt) adalah *"the ability to think in a logical way and understand things"*, dan kata *intellctual* berarti *a well educated and enjoying activities in which you have to think seriously about things*. Yang penting intelek bukan *intelligentia* – suatu kelompok sosial tertentu di Rusia – juga tak bersangkutan dengan gelar-titel keserjanaan maupun jabatan. Saya rasa definisi yang dibuat oleh Seymour Martin Lipset yang menekankan fungsi ini bisa dijadikan pegangan dalam topik ini, yaitu "mereka yang menciptakan, menyebarluaskan, dan menjalankan kebudayaan". (Mutahir 2011: 3)

menghasilkan teori sosial, budaya, dan sastra yang canggih yang menjadi inspirasi dunia. Sebaliknya, Indonesia, yang di suatu masa disegani oleh dunia, sekarang dikategorikan sebagai bangsa yang terpuruk, termasuk nomor satu dalam hal korupsi, nomor paling bawah dalam hal sumbangan ilmiah. Para pemimpin Indonesia belum sempat, kurang, atau tak memperhatikan pembangunan bidang ini, apalagi melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan.

Kata kunci: intelektualitas, pemimpin, pejabat, pendidikan.

*Le Siècle des Intellectuels* merupakan sebuah buku tebal yang mengungkapkan peranan besar yang telah dilakukan oleh para intelektual Prancis pada abad XX dalam mengubah sikap dan perilaku bangsa Prancis. Winock, sang pengarang, menyatakan bahwa, “*Notre siècle (...) aura été proprement le siècle de l’organisation intellectuelle, de haines politique. Ce sera un des grands titres dans l’histoire morale de l’humanité.*”<sup>2</sup> Dalam kaitan dengan para intelektual Eropa lain di masa itu dan sebelum masa itu, tiga sosok intelektual terkemuka dia sorot dalam buku itu: Maurice Barrès, André Gide, dan Jean-Paul Sartre. Yang pertama, memainkan peran di masa *affaire Dreyfus* sampai Perang Dunia Pertama; yang kedua, antara kedua Perang Dunia; yang ketiga, setelah Libération, setelah Prancis bebas dari penjajahan Jerman. Menyangkut Barrès, Winock mengutip kalimat Leon Blum yang, antara lain, berbunyi: “*(...) M. Barrès a créé et lancé dans le monde, qui l’a recueilli, non pas l’armature provisoire d’un système, mais quelque chose qui tenait plus profondément à notre vie, un mode d’esprit inconnu, une forme de sensibilité nouvelle.*”<sup>3</sup>

---

2 Abad kita benar-benar merupakan abad organisasi intelektual, kebencian-kebencian politis. Itu akan menjadi judul besar dalam sejarah moral umat manusia.” (Winock 2004: 197)

3 “Saudara, Barrès telah menciptakan dan menyerahkan pada dunia yang menyambutnya, sesuatu yang lebih dalam bagi kehidupan kita, bukan kerangka sementara suatu sistem, sesuatu yang belum kita kenal, suatu kepekaan baru..”

## PEMIMPIN PEMBANGUN BUDAYA INTELEKTUAL

Kalimat tersebut sebenarnya juga menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh André Gide dan Jean-Paul Sartre bagi bangsa Prancis.

Winock bukan satu-satunya dan bukan yang pertama menulis mengenai peranan intelektual. Setidaknya semua masih ingat bahwa Abad Pencerahan, juga disebut abad para filsuf, merujuk sekelompok intelektual Prancis yang berusaha keras memerangi ketidaktahuan (*ignorance*), takhayul, fanatisme. Dan para intelektual tersebut mulai menerbitkan ensiklopedia, menulis pamflet, karya sastra, untuk membangun manusia yang lebih baik: berpengetahuan luas, berwawasan luas, kritis, dan bertoleransi. Peranan intelektual dalam pembangunan bangsa juga dibahas dari masa ke masa oleh para pemikir politik dan filsafat, seperti Ernest Renan, Teilhard de Chardin, dan Gramsci, masing-masing dengan pandangan dan situasi yang berbeda. Namun, semua mengisyaratkan bahwa budaya intelektual tak dibentuk oleh sejumlah intelektual saja, melainkan membutuhkan petinggi atau pejabat yang menghargai dan mempertimbangkan pendapat mereka, dan di lain pihak, juga masyarakat yang mau mendengarkan dan memahami pemikiran mereka. Dalam hal terakhir itu, pendidikan menjadi kunci utama. Masyarakat yang cerdas akan mudah mendengar dan memahami wacana cerdas. Bertens menyatakan bahwa pendidikan sangat penting dalam membangun budaya intelektual; masyarakat dan pejabat yang lahir dari masyarakat memang harus dibentuk melalui pendidikan, seperti halnya sang intelek sendiri. Namun, sekali lagi, pendidikan memerlukan pejabat-pejabat yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi bangsanya. Dan, terutama, pejabat tinggilah yang mempunyai wewenang untuk merestui dan memungkinkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan.

Prancis, dari abad Pencerahan sampai sekarang, berjaya dalam hal budaya, terutama budaya intelektualnya. Prancis bukan

hanya menjadi, atau pernah menjadi, salah satu mercu suar dunia dalam hal seni, mode, gastronomi, melainkan pemikiran-pemikiran politis, teori-teori budaya yang canggih dan inovatif juga muncul di Prancis, memukau dunia. Nama-nama seperti Baudrillard, Derrida, Bourdieu, berkibar-kibar di langit intelektual, mencerahi dan mengilhami seluruh dunia. Namun, kita mungkin tak pernah memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi, atau kurang mengetahui pembentukannya. Para pemimpin dan pejabat Prancis dari abad ke abad bekerja membina situasi yang tepat untuk melahirkan tokoh-tokoh intelektual bangsanya. Mereka tidak lahir begitu saja, benihnya dikandung dan dipupuk selama berabad-abad oleh para pemikir sebelum mereka, yang diresmi dan difasilitasi oleh pemimpin-pemimpin Prancis, mulai dari raja, sampai ke presiden, menteri, serta para pejabat yang lebih rendah. Bisa dikatakan para raja, presiden, dan pejabat Negara Prancis melihat aspek intelektual bangsanya sebagai suatu prestise kepemimpinan.

Kepemimpinan dalam hal budaya di Negara itu telah dimulai pada Abad Pertengahan, sebelum nasionalisme yang seperti sekarang ini muncul. Meskipun di masa itu para pemimpin masih mengutamakan peluasan wilayah dengan jalan berperang, mereka juga belajar dari Negara atau wilayah yang mereka serang dan mereka duduki.<sup>4</sup> Pembangunan gereja yang megah dengan arsitektur gotik di Abad Pertengahan sebenarnya diilhami oleh gereja-gereja di Negara-negara yang mereka lewati dalam ekspedisi militer mereka dan yang mereka duduki. Para raja di abad itu mengimpor arsitek dan

---

4 “(...) M. Barrès menciptakan dan melemparkan pada dunia, yang menerimanya, bukan kerangka sementara sebuah pemikiran, melainkan sesuatu yang mengendap secara mendalam dalam kehidupan kami, sebuah sikap baru, sebuah mode d’esprit yang belum kami kenal, sebuah kepekaan baru.”

Maurice Barrès merupakan tokoh intelektual penting Prancis yang diberi kehormatan untuk mendapat “*funérailles nationales*”, pemakaman dengan kebesaran dari Negara. (Winock 1997: 9).



seniman Italia untuk membangun gereja, menciptakan patung dan lukisan di Prancis, dan dengan cara itu mereka membuat seniman-seniman Prancis belajar dan membiasakan bangsa Prancis dengan keindahan dan kecanggihan. Patung dan lukisan itu menampilkan kebijaksanaan manusia pada zamannya, misalnya, pentingnya ilmu pengetahuan diwujudkan dalam sosok Prometheus, yang patung dan lukisan dirinya memenuhi museum-museum di Eropa.

Pada abad XVI, abad kelahiran humanisme, Prancis mempunyai François I (memerintah tahun 1515-1549) yang tak hanya menciptakan kemakmuran, melainkan juga membina kehidupan budaya bangsanya, khususnya seni. Dia adalah salah satu raja besar yang dalam sejarah Prancis, yang meskipun tak mendapat pendidikan humanis, disebutkan melakukan perubahan kultural yang besar. Pemuda humanisme ini dikenal pula dengan julukan raja Renaissance, satu periode penting dalam perkembangan kebudayaan Prancis. Dia menjadi pelindung seniman-seniman besar. Leonardo da Vinci diundangnya ke Paris, begitu pula Andrea del Sarto, Benvenuto Cellini, ahli perhiasan emas. Mereka menghias Paris dengan bangunan dan hasil seni, dan mengajarkan rakyat Prancis untuk hidup dalam keindahan. François sendiri adalah seorang sastrawan. Ia menulis sajak yang cukup bermutu. Abad itu, antara lain, melahirkan Rabelais, pengarang humanis besar, Montaigne, bapak esai.<sup>5</sup> Dia mempunyai perpustakaan besar dan mengangkat Guillaume Budé, seorang tokoh humanis terkenal, sebagai kepala perpustakaannya. Edict de Nantes yang ditandatanganinya merupakan salah satu usaha untuk memperkaya perpustakaannya dengan peraturan yang mewajibkan semua buku yang dijual di Prancis mengirimkan satu eksemplar untuk perpustakaannya. Perpustakaan tersebut dia buka untuk semua

---

5 Montaigne (1533-1592) menerbitkan *Essais* pada 1580, buku penting yang menjadi bagian dalam potret resmi presiden François Mitterand.

cendekiawan dari seluruh dunia untuk memastikan penyebaran pengetahuan. François I pula yang menetapkan penggunaan bahasa Prancis sebagai bahasa administratif yang resmi, menggantikan bahasa Latin. Tak heran bila di masanya lahir seorang Du Bellay yang menulis *Défense et Illustration de la Langue Française* (1567), sebuah pamflet yang menghimbau para penyair untuk membela dan memperkaya bahasa Prancis dan untuk menyaingi bahasa Latin dan Yunani yang waktu itu dianggap memegang hegemoni “internasional”.

Abad XVII menyaksikan pendirian Académie Française,<sup>6</sup> sebagaimana disebutkan di atas dan merebaknya *salon littéraire* (temu sastra) yang dihadiri juga oleh para pejabat tinggi. Kesusastraan dianggap sebagai hiburan yang paling intelektual pada masa itu, dan membawa *prestise* bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Bangsa Prancis belajar banyak dari kesusastranya dan kesusastraan dunia. Bersama sastranya, bahasa Prancis mekar dan menguasai dunia diplomasi Negara-negara Eropa. Sampai dengan abad XIX para diplomat negara-negara Eropa menguasai bahasa Prancis dan menganggap hal itu sebagai bagian dari kecanggihan dunia diplomasi internasional. Dengan keterperinciannya dalam hal tata bahasa dan kosa kata, bahasa Prancis juga sekaligus membentuk sikap teliti dan waspada pada penggunaannya, sesuai dengan semboyannya “*clair et distinct*”, jelas dan terperinci.

Louis XIV (1660-1715) adalah raja besar kedua yang memungkinkan budaya Prancis mencapai masa keemasan di zamannya. Ia seorang raja otoriter. Sikap itu selalu disebut dalam buku sejarah Prancis mana pun, tetapi raja ini menghargai sastra

---

6 Académie Française merupakan lembaga bahasa Prancis yang berwibawa, yang sampai sekarang masih beroperasi menjaga dan membina bahasa serta kesusastraan Prancis. Anggotanya yang berjumlah 40 orang dipilih dari kalangan cendekiawan dan pakar terkemuka dari berbagai bidang yang berprestasi dan telah menulis sejumlah buku bertaraf internasional.

dan seni lainnya, dan selama pemerintahannya yang stabil dan kuat, kesusastraan dan seni lain juga berkembang dengan pesat. Pada awal pemerintahannya Académie Française didirikan. Sebelum dia, Cardinal de Richelieu yang terpelajar dan percaya pada pentingnya bahasa dan pendidikan menekankan bahwa menguasai rakyat hanya bisa dilakukan bila bahasa dikuasai. Académie Française yang didirikannya merupakan lembaga bahasa yang sampai sekarang masih disegani, dengan empat puluh anggota yang dipilih di antara para pakar dari semua bidang ilmu yang telah menghasilkan buku-buku bertaraf internasional.

Abad XVII juga memancarkan sendi-sendi kesusastraan Prancis melalui Classicisme dan Baroque, dua aliran kesusastraan kuat dalam sejarah sastra Prancis. Filsuf besar humanisme, Pascal, tampil di abad itu dengan karyanya *Les Provinciales* pada 1656-1657. Racine, Corneille, dan Molière, adalah dramawan besar pada masa yang sama, yang karya-karyanya sangat digemari masyarakat, berisi kritik terhadap perilaku manusia-manusia pada zamannya dan nilai-nilai yang tak dapat diandalkan lagi.

Pada abad XVIII Prancis sepenuhnya menampilkan diri sebagai juara pemikir kelas dunia. Abad yang disebut sebagai Abad Pencerahan itu melahirkan pemikir-pemikir politik, budaya, pendidikan. Montesquieu, *Trias Politica* dan gagasannya tentang demokrasi dipelajari serta diterapkan di seluruh dunia; Diderot, *Bapak Ensiklopedia*, kamus lengkap yang pada intinya merupakan sarana perluasan wawasan dan pengetahuan; Rousseau pemikir pendidikan; Voltaire yang gigih memerangi ketidaktahuan, fanatisme agama, dan takhayul, dengan berbagai jenis tulisan populer. Tokoh-tokoh revolusioner semacam itu hanya bisa menyuarakan dan menyiarkan gagasannya jika mendapat peluang untuk melakukannya. Berarti ada cukup banyak kelunakan dan kebebasan berpendapat di

Prancis yang diberikan oleh penguasa di masa itu. Pikiran-pikiran pencerahan itulah, antara lain, yang mencetuskan Revolusi Prancis yang menjangkiti negara-negara lain di seluruh dunia.<sup>7</sup> Abad yang sama juga menyaksikan terbitnya *Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen*, Deklarasi hak-hak Manusia dan warga negara.

Gejolak dan badai politik dan sosial melanda Prancis hampir selama tiga perempat abad di abad XIX, tapi berujung dengan periode yang disebut *La belle Epoque*, masa yang indah. Masa kemakmuran itu terutama merupakan akibat penemuan teknologi, seperti mesin uap, piranti fotografi, dan sinema. Ilmu pengetahuan nyaris menggantikan Tuhan di masa itu. Sekali lagi seorang intelektual, Saint Simon, menjadi pencerah zaman dengan semangat keilmuan.

Puncak peran intelektual dalam pembangunan bangsa Prancis tentu dua abad terakhir, abad XX dan abad XXI yang baru mulai. Di abad XX semua presiden Prancis adalah penulis buku, begitu pula staf dan para pejabat tingginya: tanda bahwa menulis sudah menjadi budaya yang menulang sumsum di Prancis. Salah satu di antara presiden penulis itu adalah François Mitterand yang memperlihatkan minat besar pada arsitektur. Banyak pemugaran bangunan lama yang dia lakukan, termasuk pemugaran museum Louvre. Sebuah piramid dari kaca, karya seorang arsitek Cina, mempercantik museum tersebut. Dan hal itu menyebabkan sang presiden dijuluki Mitterramses, nama yang berbau dinasti firaun Mesir. François Mitterand, yang banyak menulis buku ini, juga berusaha mengembangkan kecintaan bangsanya pada kesenian, seni bangunan, dan seni lukis.

---

7 Dalam buku kedua dari kuartenarius *Bumi Manusia*, saat Minke, sang tokoh utama, bertemu dengan Ter Haar, seorang wartawan Belanda, di kapal yang membawanya ke Jakarta, juga keterlibatannya dengan beberapa orang asal Tiongkok yang berusaha mengumpulkan dana untuk membiayai revolusi di Tiongkok.

## PEMIMPIN PEMBANGUN BUDAYA INTELEKTUAL

Tak semua negarawan, pejabat tinggi Prancis yang penting disebutkan dalam tulisan ini. Juga tak semua peristiwa yang menentukan dalam pembangunan budaya Prancis dikemukakan. Pada dasarnya, dari abad ke abad, tak ada pemimpin yang mengubah kebijakan-kebijakan untuk tujuan pembangunan intelektual Prancis. Contoh yang jelas adalah Academie Française yang masuk ke usia 5 abad, yang sampai sekarang masih tetap membina bahasa dan kesusastraan Prancis dengan kegiatan-kegiatan yang sama. Setiap tahun lembaga tersebut memberikan penghargaan karya sastra terbaik dan menyelenggarakan pesta bahasa. Tak ada pengurangan dana atau tindakan yang menyusutkan kewibawaan lembaga tersebut dalam sejarah rangkaian pemerintahan pemimpin-pemimpin yang silih berganti di Negara itu. Singkat kata ada kesinambungan kebijakan dalam pembangunan intelektual bangsa Prancis dari satu pemimpin ke pemimpin lain.

Sekarang, marilah kita renungkan situasi yang sedang terjadi di Negara kita. Di semua bidang dan tataran terjadi kekacauan dan penurunan mutu, termasuk bidang pendidikan. Beberapa kata yang mempunyai pengertian negatif menjadi aktual dan kata kunci dalam teks-teks kritik, misalnya, kata: “amburadul” dan “pembiaran”. Di bidang pemerintahan memang terjadi berbagai bentuk ketakpedulian – yang dipopulerkan dengan pembiaran – dan korupsi dalam berbagai bentuk. Undang-undang dasar dilanggar, dan hukum tak diterapkan dengan benar. Begitu pula di tingkat universitas. Semua kebijakan pemerintah yang diciptakan untuk mengangkat mutu akademis dan intelektual, seperti akreditasi, keharusan penulisan ilmiah untuk kenaikan pangkat, evaluasi pengajar, umumnya menemui jalan buntu, dalam pengertian bahwa tindakan tersebut hanya dilakukan sebagai formalitas saja oleh pemimpin maupun anggota akademis. Kebijakan-kebijakan itu, alih-alih menghasilkan perubahan yang

positif dan bermutu, justru menghasilkan berbagai jenis rekayasa komersialisasi, penipuan, korupsi. Penyebabnya amat banyak dan kompleks, apalagi bila keadaan sudah parah begini, selain tak adanya kontrol, salah satu di antaranya, adalah pendidikan. Setelah presiden Sukarno, belum ada pemimpin yang serius melakukan pembangunan budaya intelektual dengan benar dan berkesinambungan, terutama dalam bidang pendidikan.

Indonesia baru mempunyai enam presiden setelah mencanangkan kemerdekaan pada tahun 1945, tujuh dengan yang baru saja dilantik, yang belum dapat dinilai kinerjanya. Dari enam presiden itu hanya satu yang tampil sebagai intelektual: Presiden Sukarno. Intelektualitasnya sangat menonjol dan sasarannya bukan hanya bangsanya tapi dunia. Ia berusaha menyatukan Asia, dan membuat dunia mengakui kekuatan Asia yang bersatu. Kita juga tak akan lupa bahwa dia adalah salah satu pelopor nasionalisme Indonesia, yang didasari oleh keyakinannya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa akan membawa bangsa ini ke kemerdekaan sejati. Dan kita juga tak akan lupa bahwa ia adalah pembela rakyat yang tertindas. Dalam hal itu, Sukarno bisa disamakan dengan tokoh-tokoh “pencerah” Prancis Abad XVIII. Peter Dale Scott menggunakan kata “pencerah” itu untuk Sukarno, dan menegaskan relevansi abadi konsep-konsep Sukarno yang nasionalis dan humanis, antara lain, Pancasila.<sup>8</sup> Begitu pula Bob Herring, penulis lain dalam *100 Tahun Bung Karno*, memberikan penilaian yang sama “(...) persepsi Sukarno yang jernih dan menarik terhadap konsep-konsep pemikiran Tionghoa, India, Jepang yang lebih pas bagi tradisi intelektual Indonesia” masih relevan dan perlu dipertimbangkan kembali untuk diterapkan di masa sekarang.<sup>9</sup> Lama sebelum “multikulturalisme” menjadi jargon

---

<sup>8</sup> Isak 2001: 26.

<sup>9</sup> Isak 2001: 82.

## PEMIMPIN PEMBANGUN BUDAYA INTELEKTUAL

para sosiolog dan budayawan kita, Bung Karno telah menghayati dan menerapkannya dalam tindakan dan tulisan-tulisannya dengan bahasanya sendiri.

Pemikiran Sukarno yang luas dan membangun jiwa terlihat dari pidato-pidatonya yang penuh retorika, bertabur gagasan bijak pemikir-pemikir dunia, memperlihatkan bahwa ia banyak membaca, berwawasan luas. Ia selalu menumbuhkan semangat rakyatnya untuk berswasembada dan untuk mempunyai harga diri. Bagi penulis, juga sangat menarik penggunaan bahasa Indonesianya. Bung Karno selalu memilih kata yang tepat yang dapat menimbulkan kesan yang kuat pada pendengarnya, menciptakan simbol-simbol yang mengesankan, seperti Sarinah dan Marhaen. Ia juga membuat akronim-akronim menarik dan sukar dilupakan. Itu dapat dianggap sebagai sumbangan intelektual untuk bahasa Indonesia.

Sayangnya masa pemerintahannya atas Negara Kesatuan yang betul-betul baru, baru lahir, baru merdeka, baru bersatu, menghadapi banyak tantangan dan berbagai masalah. Banyak pihak, golongan dan etnik harus didengarkan dan dipuaskan. Banyak yang harus dilakukannya dalam semua bidang pemerintahan, tanpa pendahulu yang bisa digunakan sebagai titik awal, sumber informasi, dan ukuran. Banyak musuh yang ingin menjatuhkannya, terutama kelompok yang mempunyai “kekuasaan riil”, yaitu militer.

Presiden Sukarno juga menulis buku dengan antara lain yang mengesankan, *Di Bawah Bendera Revolusi* dan *Sarinah*, yang merupakan renungan tentang peran dan sumbangan wanita Indonesia sebagai pembangun bangsa. Orang-orang di sekitarnya seperti Bung Hatta, Yamin, Syahrir, juga datang dari kalangan intelektual, kalangan menengah atas yang beruntung mendapat pendidikan tinggi di Belanda yang keras, ketat, dan selektif. Mereka adalah “priyayi intelek” yang disegani rakyatnya.

Gagasan-gagasan Presiden Sukarno yang hebat membuat Indonesia mencuat di mata dunia, dihargai, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. GANEFO, CONEFO, ASEAN, adalah beberapa gagasan persatuan ASEAN-nya yang terwujud. Kita mempunyai rasa hormat pada para pemimpin semacam itu. Rasa hormat seperti itu sekarang lenyap tak berbekas

Ketika beliau wafat, dalam rangkuman berita-berita berbagai surat kabar pada tahun 1970 dan pernyataan bela sungkawa dari para kepala Negara asing, hal yang ditekankan, selain jasanya sebagai pejuang kebebasan bangsanya, perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, perjuangannya bagi keadilan dan kebebasan di dunia, strateginya yang gigih, adalah usahanya untuk menumbuhkan identitas nasional. Belum lahir lagi seorang intelektual seperti itu.

Di bawah pemerintahan Soeharto, suasana sosial yang ditumbuhkan lain lagi. Kenyataan memperlihatkan bahwa yang terjadi setelah 20 tahun masa pemerintahannya adalah kekacauan dalam semua bidang, “krisis multi-dimensional”, menurut istilah Buchori. Dalam bukunya yang berjudul *Evolusi Pendidikan di Indonesia*, dengan runtut Buchori memperlihatkan bahwa strategi pemerintahan Soeharto dalam pembangunan bangsa, tepatnya dalam hal pendidikan, menuju ke krisis itu<sup>10</sup>. Soeharto dalam usahanya mengejar kekurangan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan yang terus-menerus diperparah dengan pertambahan jumlah penduduk yang pesat, lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Sosok presiden pendiam ini juga lebih suka dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya secara total, dan tentu saja militer yang di masa pemerintahannya mempunyai hak untuk “berdwifungsi”. Soeharto melenyapkan peranan teknokrat-intelektual, yang dianggapnya tak

---

10 Buchori 2009.



penting dalam proses pembangunan. Dan mulailah bermunculan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)<sup>11</sup>. Maka pudarlah perilaku dan martabat bangsa ini.

Pemerintahan Soeharto ditandai dengan slogan “dahulukan pembangunan ekonomi, politik adalah urusan nanti”, sebagai reaksi terhadap program pemerintahan Sukarno yang dianggap gagal menyejahterakan rakyat. Slogan itu diperjelas dengan adagio “sandang, papan, pangan” yang selalu muncul dalam pidato-pidatonya. Kesejahteraan dinilai secara sempit hanya dari tiga kebutuhan dasar manusia itu. Bersamaan dengan merajalelanya dwifungsi militer yang kebablasan, terciptalah suasana materialistis yang dangkal. Bersamaan dengan hancurnya pendidikan, Soeharto yang mempunyai kecenderungan untuk hanya mengumpulkan orang-orang yang mendukungnya di sekitarnya, melenyapkan peranan para teknokrat intelektual. Suara para intelektual tak didengarkan. Dan bersamaan dengan itu, pembinaan aspek intelektual rakyat pelan-pelan menyusut lalu menghilang. Dalam bukunya yang telah disebutkan di atas, Buchori menggambarkan dengan detail perkembangan ke arah kehancuran itu.<sup>12</sup> Para pakar asing yang melakukan riset di Indonesia segera melihat bahwa “intelektual di Indonesia dihinakan”. Pada masa itu, sesuai dengan contoh yang diperlihatkan para pejabat, rakyat terutama berlomba menumpuk harta dengan cara sesingkat-singkatnya: korupsi merajalela. Memang Indonesia yang prihatin dengan swasembadanya pada zaman Sukarno menjadi terlihat makmur di masa Soeharto, terutama kelompok tertentu. Pembangunan fisik memang terlihat, tapi benar-benar fisik, sementara pembangunan manusia sebagai manusia terabaikan.

---

11 Buchori 2009: 113.

12 Buchori 2009: 109.

Meskipun demikian, memang perlu dicatat bahwa para petani mendapat angin dan dorongan dengan berbagai penghargaan untuk kegiatan pertanian: hadiah Kalpataru yang sekarang tak ada lagi. Media televisi cukup lama tak berminat menyiarkan program pembinaan pertanian dan memperkenalkan petani yang berhasil: acaranya penuh dengan selebritas dan sinetron murahan. Memang kita tak akan lupa pada TAPOS, peternakan presiden yang besar di Bogor. Namun, semua itu tak menciptakan suasana intelektual.

Secara berangsur keputusan-keputusan mengenai persoalan ekonomi dan politik (*political economic decisions*) ada di tangan Presiden Soeharto dan orang-orang dekatnya. Pada tahap ini peranan para teknokrat-intelektual dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Maka mulailah bermunculan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mula-mula hanya merusak ekonomi mikro, tetapi pada akhirnya juga menyeret ekonomi makro ke dalam suatu keterpurukan.<sup>13</sup>

Pemerintahan Soeharto, yang sangat didukung militer dan militerisme, membungkam suara para intelektual. Contoh yang jelas adalah pembekuan karya Pramoedya, kuartenarius *Bumi Manusia*, oleh pemerintah Orde Baru tersebut dengan alasan bahwa karya tersebut mengandung ideologi komunis yang waktu itu dimusuhi pemerintah dan dianggap meracuni masyarakat. *Bumi Manusia* menampilkan sosok intelektual Minke yang berusaha mendidik bangsanya dengan korannya, *Medan*, untuk menjadi manusia Indonesia yang mampu bersaing dengan Barat, yang diwujudkan dalam sosok Nyai Ontosoroh. Dan tentu saja Minke sangat anti penjajahan dan penindasan. Minke sendiri merupakan “inkarnasi” dari seorang pejuang nasionalis sejati, yaitu Tirto Adhi Surjo, wartawan Koran *Medan Priyayi*. Juga seorang intelek pejuang.<sup>14</sup> Sebaliknya, Nyai Ontosoroh adalah pengusaha gesit

<sup>13</sup> Buchori 2009: 113

<sup>14</sup> Mutahir 2011: 166-167.

## PEMIMPIN PEMBANGUN BUDAYA INTELEKTUAL

yang intelek, menggemari novel dan filsafat. Ia juga melambangkan manusia internasional yang berhasil di mana pun ia berada.

Kepemimpinan Habibie yang amat singkat jelas tidak dapat memulihkan keadaan. Apalagi ia terlalu lama tinggal di Jerman. Rakyat hanya ditinggali kesan mengenai kecintaannya yang besar pada teknologi. Sebagaimana diketahui, kedekatannya dengan presiden Soeharto menyebabkan ia mendapat dukungan pemerintah untuk mendirikan Nurtanio, pabrik pesawat terbang Indonesia. Juga terjadi pengiriman lulusan SMA ke beberapa perguruan tinggi luar negeri, Prancis, Jerman, Amerika, khususnya untuk bidang eksakta seperti teknologi. Namun, lulusan luar negeri tersebut ternyata tak dihargai oleh bangsanya sendiri. Semangat dan gagasan-gagasan mereka yang inovatif diabaikan bahkan sering dilecehkan. Mereka tak dapat menerapkan ilmunya di Negara sendiri, dan banyak di antara mereka yang akhirnya kembali ke Negara tempat mereka menimba ilmu dan bekerja di sana. Tanpa budaya intelektual kita tak dapat menghargai orang yang memiliki ilmu.

Bila kita buat rekapitulasi, semua pemimpin kita membawa kita ke suatu arah tertentu. Presiden Sukarno, yang tentu masih sibuk dengan peralihan kekuasaan, ingin membawa bangsanya ke arah intelektualisme, membuat bangsa Indonesia bangga sebagai bangsa berbudaya. Presiden Soeharto mementingkan ekonomi dan agraria untuk memakmurkan rakyatnya. “Sandang, papan, pangan” adalah moto yang berulang muncul dalam pidatonya. Pertanian mendapat perhatian besar. Sayangnya hal-hal yang baik tak berkelanjutan. Yang jelas faktor budaya sepenuhnya dilupakan. Setiap kurun waktu kepemimpinan kebijakan berubah drastis, tak ada kebijakan baik yang berkelanjutan.

### **Renungan Penutup untuk Masyarakat Universitas**

Pemimpin memegang peranan penting membangun budaya intelektual. Merekalah yang menyetujui, memfasilitasi, mendorong, dan menciptakan suasana tertentu yang kondusif untuk pengembangan budaya intelektual bangsanya, karena pembangunan budaya intelektual membutuhkan biaya besar, pengawasan, kerja keras, kebijakan tertentu yang kontinu. Namun, pembangunan budaya intelektual tak bisa berdiri sendiri. Meskipun sangat bergantung pada para pejabat, para akademikus juga mempunyai banyak andil dalam pembangunan bangsa. Apalagi banyak pejabat dilahirkan dari dunia universitas. Sebagai kelompok akademis kita bertanggung jawab pada pembangunan budaya intelektual bangsa kita, supaya tidak lahir pemimpin tirani yang membawa masyarakat ke arah krisis dan kekacauan, apalagi di dunia pendidikan.

Cukup banyak tulisan mengenai dunia intelektual di Indonesia. Salah satu dibuat oleh Afrisal Mutahir yang mencoba menerapkan teori arena Bourdieu atas kiprah intelektual masyarakat akademik Indonesia bagi kemaslahatan bangsanya. Dia memperlihatkan dalam perbandingan data jumlah doktor dan guru besar yang meningkat drastis di abad XXI dengan produk ilmiahnya. Reformasi membawa berkah dengan peningkatan secara drastis jumlah sarjana, magister, dan doktor. Pada 2006 jumlah profesor di Indonesia sudah mencapai 5.000 orang. Saya masih ingat bahwa pada 2001 jumlahnya belum mencapai 1.000 orang. Keadaan itu menjelaskan konsekuensi strategi pemerintahan Soeharto yang cenderung meningkatkan pendidikan berdasar kuantitas bukan kualitas, serta sikapnya yang anti-intelektual. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah sarjana, magister, dan doktor, jumlah penelitian juga meningkat. Sayangnya jumlah artikel dan penelitian mereka yang merupakan sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat sangat rendah. Di samping itu, jumlah penelitian yang

## PEMIMPIN PEMBANGUN BUDAYA INTELEKTUAL

bermutu rendah pula. Hal itu menegaskan bahwa para akademikus, khususnya pengajar universitas, tidak mandiri. Mereka berpihak pada “kepentingan-kepentingan sesaat”. Mereka menulis untuk proyek, yang menjamin lolosnya usulan penelitian dan dananya. Sangat jarang intelektual yang menyuarakan kepentingan umum apalagi yang membentuk intelektual kolektif sebagaimana dikonsep oleh Bourdieu. (Mutahir 2011: 182-187)<sup>15</sup>.

Sebagai anggota *civitas academica*, kita wajib membangun budaya intelektual yang positif untuk keberlangsungan dan pembangunan universitas pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebabnya, kitalah yang mencetak manusia-manusia yang akan berkarya di masyarakat, yang pada gilirannya akan membangun masyarakatnya. Setidaknya dengan berpegang pada semboyan universitas yang luhur – “veritas, probitas, iustitia” – dalam menjalankan semua jenis kegiatan akademis, kita terlibat dalam pembangunan budaya intelektual untuk menjaga nilai dan kebenaran. Dan itu bukan pekerjaan satu/dua semester atau satu/dua tahun akademis, melainkan pekerjaan rutin sepanjang hayat, sepanjang masa, yang harus dilakukan oleh semua unsur universitas, terutama para pemimpin dan pengajarnya, dengan jujur dan penuh pengabdian.

Presiden baru kita adalah seorang intelektual, dalam kategori intelektual tradisional versi Gramsci, yaitu golongan “intelektual yang menyebarkan ide dan berfungsi sebagai mediator antara massa

---

15 Tujuan Mutahir adalah melihat arena intelektual Indonesia sebagaimana Bourdieu melihat arena intelektual Prancis, dan menyatakan bahwa dia belum memahami Bourdieu dengan tepat, karena bahasanya yang sukar. Yang terlepas dari pengetahuan Afrisal Mutahir adalah bahwa konteks sejarah arena intelektual Prancis yang dibangun dari abad ke abad melalui pendidikan borjuis dan bahasa yang ketat. Dalam hal pengertian mengenai “kebenaran” serta nilainya, bangsa Prancis juga menghayatinya melalui agama mereka dari abad ke abad.

dan rakyat dengan kelas atasnya”.<sup>16</sup> Ia berwawasan luas dan terbuka. Selama menjabat sebagai walikota Solo dan gubernur Jakarta, Joko Widodo telah memperlihatkan kesadaran dan kemauan baiknya untuk membangun manusia. Semua pembangunan fisik yang dilakukannya, pembangunan kota Solo dan Pluit, misalnya, jelas sekali menuju pada pendidikan dan kemaslahatan manusia yang menggunakannya. Dia memberi nilai pada manusia. Selain itu dia menunjukkan *gentlemanship* yang tinggi, yang juga terlihat ditampilkan oleh pendukung-pendukungnya. Meskipun dihina dan dikecam oleh lawan-lawannya, ia tak pernah menampakkan kekasaran atau usaha membalas. Sosok presiden baru ini mengingatkan kita pada Bung Karno yang juga sportif, bermartabat, dan teguh memegang prinsip, sosok yang dirindukan oleh bangsa ini. Ia juga mencanangkan “Revolusi Mental” yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Kita mempunyai harapan besar pada Presiden ketujuh ini, yang beberapa kali mengutip puisi Wiji Thukul, untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, tangguh, dan berbudaya.

## KEPUSTAKAAN

- Biet, Christian, Jean Paul Brighelli, Jean Luc Rispail. 1982. *XVII-XIIe Siècle*. Paris: Magnard.
- Buchori, Mohtar. 2009. *Evolusi Pendidikan di Indonesia. Dari Kweekschool sampai ke IKIP: 1852-1998*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Carpentier, Jean & François Lebrun. (ed). 2011. *Sejarah Prancis Dari Zaman Prasejarah Hingga Akhir Abad ke-20*.
- Isak, Joesoef (ed.). 2001. *100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Legge, John D. 1996. *Soekarno, Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

---

<sup>16</sup> Mutahir, 2011: 5.

PEMIMPIN PEMBANGUN BUDAYA INTELEKTUAL

- Mutahir, Arizal. 2011. *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu*. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2000. *Bumi Manusia*. Jakarta: Hasta Mitra.
- . 2000. *Anak Semua Bangsa*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Winock, Michel. 1997. *Le Siècle des Intellectuels*. Paris: Seuil.





## Bab III

# AMNESIA BUDAYA SEBAGAI GEJALA KRISIS DALAM KEBUDAYAAN INDONESIA<sup>1</sup>

*Benny H. Hoed<sup>2</sup>*

### Abstrak

#### **Amnesia Budaya: Tonggak Budaya yang Terlupakan**

Perwujudan kebudayaan dapat berupa gagasan, tingkah laku, ataupun artefak (benda buatan/ciptaan manusia). Dalam kehidupan sosial, sejumlah perwujudan budaya dapat mengingatkan kita pada gagasan atau peristiwa pada masa lalu. Ditinjau dari kaca mata semiotik Peirce, gejala itu dapat dilihat sebagai *representamen* (atau tanda) yang berdasarkan pengalaman seseorang (atau sekelompok orang) kemudian dapat menimbulkan reaksi mental (disebut *obyek*) dan selanjutnya dapat menimbulkan penafsiran oleh orang (atau sekelompok orang) tersebut. Proses ini dikenal dengan istilah *semiosis* yang dalam konteks ini berkaitan dengan masa lalu.

Reformasi pada tahun 1998 ternyata merupakan sebuah revolusi, yakni penjungkirbalikan berbagai nilai, norma, dan struktur. Beberapa hal penting yang dapat kita catat (yang pada masa Orde Baru tidak ada) adalah demokrasi parlementer, sistem multipartai, kebebasan pers, kebebasan berekspresi (termasuk unjuk rasa),

---

1 Tulisan ini diambil dari sebagian paparan dalam Kuliah Inaugurasi penerimaan saya sebagai anggota Komisi Kebudayaan AIPi (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), Jakarta, 19 April 2013 dengan perubahan dan penambahan.

2 Guru Besar Emeritus, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

pemisahan *Trias Politica* yang lebih konsisten, dan otonomi/desentralisasi pemerintahan. Sekarang, Reformasi telah kita jalani selama satu dekade lebih. Perubahan sedang memberikan dampaknya pada proses penyesuaian sosial budaya dalam masyarakat kita. Masyarakat masa kini seakan kewalahan hidup dalam masa penyesuaian sosial budaya pascareformasi. Salah satu hal penting yang terjadi adalah adanya sejumlah tonggak budaya yang sebenarnya penting untuk memelihara kaitan masa kini dengan sejarah. Upacara-upacara untuk memperingati sejumlah tonggak budaya sering diabaikan. Akibatnya, makna dari tonggak-tonggak itu secara berangsur-angsur terlupakan. Secara metaforis, ini saya sebut sebagai “amnesia budaya”. *Amnesia* adalah istilah yang diambil dari bidang kedokteran. Singkatnya, amnesia berarti kehilangan memori, baik ke belakang (*retrograde*) maupun menghubungkan masa depan dengan masa lalu (*anterograde*). Kalau amnesia dialami oleh perseorangan, dampaknya hanya pada diri orang itu. Akan tetapi kalau amnesia dialami oleh suatu masyarakat, maka masyarakat berarti masyarakat itu melupakan sejarah dan akibatnya juga kehilangan kemampuan untuk melihat ke masa depan yang mestinya harus didasari oleh pengetahuan tentang masa lalu. Dalam hal ini, amnesia tidak sekadar melupakan, melainkan tidak memahami makna sesuatu yang ada di luar dirinya atau memahami secara beraneka ragam. Ini merupakan gejala “semiosis khaotis” (*chaotic semiosis*). Amnesia budaya dapat juga disebut sebagai “krisis semiosis”. Apabila disertai dengan krisis di bidang kehidupan lainnya, amnesia budaya merupakan salah satu gejala dalam krisis budaya.

Dalam kehidupan sosial budaya representamen dapat kita sebut *tonggak budaya* karena merupakan tonggak yang mengingatkan kita pada gagasan atau peristiwa tertentu dari masa lalu atau “sejarah”. Yang menarik adalah tonggak budaya memberikan reaksi mental dan penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan pendidikan dalam riwayat hidup setiap orang (atau setiap kelompok orang) (cf. *Habitus*, Bourdieu 1994: 151–155). Ini merupakan gejala krisis semiosis atau gejala semiosis khaotis.

## AMNESIA BUDAYA SEBAGAI GEJALA KRISIS

Dalam konteks *patron-client*, ada cara untuk mengobati amnesia budaya ini. Tonggak budaya biasanya diberi makna oleh *patron* agar memberikan reaksi mental dan tafsiran yang diinginkan. Cara ini disebut *anchorage* (Barthes 1977: 38–41). Patron adalah pemerintah dalam seluruh jajarannya. Pemerintah harus memiliki daya untuk memandu masyarakat dalam melihat ke masa depan negara kita. Ini memerlukan pemimpin yang berwawasan jauh ke depan. Kelihatannya pemimpin seperti ini belum kita lihat pada saat ini. Karena tonggak budaya berkaitan dengan masa lalu, maka pengingatan akan maknanya merupakan upaya untuk memelihara kaitannya dengan sejarah. Ada sejumlah peristiwa sejarah yang harus dimaknai dengan makna tertentu untuk membawa masyarakat kita melihat masa depan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya, konsep “Bhinneka Tunggal Ika”, Bendera Merah Putih, Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, dan sejumlah monumen serta nama pahlawan. Sejarah harus memberikan makna tentang jerih payah pendahulu kita membangun republik ini. Sejarah bahkan harus memperlihatkan berbagai peristiwa jauh di masa lampau sebagai bukti kearifan dan kejeniusan para pendahulu kita. Bagaimana pendahulu kita secara arif (*wisely*) dan cerdas (*intelligently*) menghadapi dan mengemas kebudayaan luar yang masuk ke Nusantara sehingga menjadi milik sendiri serta cocok dengan budaya yang hidup pada masa itu.

Berbagai perwujudan kebudayaan penting pada masa kini pada suatu kaum atau bangsa merupakan tonggak budaya yang dapat berguna untuk memelihara sejarah. Dengan memelihara sejarah, kita terhindar dari amnesia *anterograde*, yakni kemampuan memaknai masa depan dalam kaitan dengan masa lalu.

Kata Kunci: tonggak budaya, amnesia budaya, *retrograde*, *anterograde*, *representamen*, *patron*, *anchorage*, dan Pancasila, *Bhinneka*.

## 1. Amnesia Budaya

Masyarakat Indonesia dalam sejarah merupakan bagian masyarakat budaya Nusantara. Sejak abad keempat (masuknya Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen) kita sudah mengalami gejala yang sekarang disebut “globalisasi”. Pada abad ke-20 dan ke-21, arus globalisasi berlangsung dengan kecepatan yang sangat tinggi dan memberikan pengaruh yang lebih luas dan lebih dalam pada kehidupan masyarakat kita. Globalisasi ekonomi yang kemudian diikuti dengan globalisasi budaya telah membawa kita pada kehidupan pascamodern yang ditandai oleh dominasi media dan konsumerisme (cf Baudrillard 1988). Namun, globalisasi tidak mungkin dibendung. Globalisasi budaya harus dikelola dengan arif (*wisely*) dan cendekia (*intelligently*).

Sejak berabad-abad kita dimasuki oleh kebudayaan dari “Utara”, seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dari berbagai kajian filologis sudah dapat kita baca (beberapa di antaranya dapat kita temukan dalam Chambert-Loir 2010) bangsa kita tidak hanya mampu menyerap, melainkan sekaligus mengolah arus kebudayaan dari luar sehingga menjadi milik sendiri tanpa kehilangan akarnya. Dari sementara kajian filologis terekam bahwa kita seakan sudah memiliki episteme, yakni “toleransi” dan “kemampuan mengadaptasi”. Dewasa ini, warisan budaya yang sangat berharga itu cenderung dilupakan. Istilah “toleransi” sering diucapkan, tetapi makin kurang dipahami maknanya dan bahkan praktik sosial sejauh ini memperlihatkan berbagai tindakan yang justru tidak toleran. Tawuran antarkaum, baik yang berlatar suku bangsa, agama, dan kelompok kepentingan yang lain (termasuk mahasiswa dan pelajar) makin sering terjadi. Pertikaian yang cenderung tidak menghargai esensi demokrasi antarelit politik juga sedang mewarnai kehidupan bangsa kita. “Adaptasi” sering masih pada tahap meniru.

## AMNESIA BUDAYA SEBAGAI GEJALA KRISIS

Oleh karena itu, sangat penting bagi bangsa kita untuk tidak mengalami amnesia budaya, yakni lupa akan warisan budaya kita. Sayangnya amnesia budaya sudah terjadi dan karenanya perlu “diobati”. Upaya mengobati amnesia budaya ini merupakan apa yang saya sebut sebagai “mengelola arus globalisasi dengan arif dan cendekia”. Dalam upaya ini, kita perlu mengenali kearifan yang tersimpan dalam lubuk budaya kita. Hal ini seharusnya merupakan bagian dari strategi kebudayaan kita.

Istilah amnesia saya pinjam dari bidang kedokteran dengan penyesuaian. Ada dua jenis amnesia: (1) amnesia *retrograde*, yakni “tidak ingat atau lupa akan segala sesuatu sebelum terjadinya amnesia” dan (2) amnesia *anterograde*, yakni “tidak dapat mengaitkan informasi baru ke dalam masa lalu yang relevan untuk masa depan”. Amnesia budaya di sini bersifat sosial dan kultural. Hanya sebuah metafora.

Amnesia budaya merupakan salah satu gejala *krisis budaya*. Krisis budaya berarti terjadinya perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial budaya yang berpotensi membahayakan hari depan masyarakat. Dalam konteks ini, gejala krisis yang terjadi adalah *mulai terlupakannya* berbagai peristiwa sejarah dan kearifan lokal yang telah membuat negara dan bangsa Indonesia bereksistensi dan dihormati oleh dunia luar. Dalam situasi perkembangan konsumerisme simbolis dan hedonisme, makin terlihat adanya gejala amnesia budaya. Simbol-simbol baru tumbuh bersamaan dengan arus globalisasi (cf. Baudrillard 1988). Perlu dicatat peran penting iklan yang membawa masyarakat kita pada gaya hidup konsumeristik dan penciptaan simbol-simbol baru (Suratminto *et al.* 2011). Akibatnya, simbol-simbol lama terlupakan. Di sinilah mulai terjadi amnesia budaya. Amnesia budaya merupakan gejala (me)lupa(kan) sejarah sehingga generasi baru kita lupa bahwa bangsa ini telah dengan susah payah dibangun oleh para pendahulu kita dari masyarakat yang berserakan menjadi bangsa yang mempunyai

negara, bendera, lagu kebangsaan, dan undang-undang dasar. Amnesia budaya merupakan gejala kehilangan “lanjutan ingatan kolektif” dan sekaligus mengalami “kekacauan makna” dalam ingatan kolektif itu (Cf. Funkenstein 1989 : 9-12). Kekacauan makna berpotensi menimbulkan krisis dalam kehidupan sosial budaya bangsa kita.

Masyarakat luas dewasa ini seakan lupa - atau tidak tahu - bahwa kehidupan masa kini dibangun di atas endapan budaya masa lalu. Ini merupakan perjalanan sejarah yang sangat panjang. Perjalanan ini tentu saja bukan sesuatu yang terjadi dengan mulus. Sejumlah pengorbanan telah dilakukan oleh mereka yang telah menjadi bagian dari sejarah. Kita juga bisa mundur ke dalam sejarah kuna sejak sebelum kedatangan Hindu, Islam, dan Kristen ke bumi Nusantara ini. Dasar-dasar toleransi dan keterbukaan pada kebudayaan lain sudah dibangun pada abad keempat. Agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk ke Nusantara “menyatu” dengan sistem kepercayaan yang sudah ada lebih dulu dan menjadi budaya baru yang lebih maju. Keragaman budaya sudah merupakan kenyataan hidup yang dialami sejak berabad-abad.

Pemahaman tentang berbagai tonggak budaya, yang mengingatkan kita ke masa lalu terlihat makin melemah, sehingga generasi masa kini seakan tidak dapat menempatkan dirinya dalam kaitan dengan masa lalu. Ini merupakan amnesia *retrograde* dan sekaligus *anterograde*. Dalam keadaan amnesia seperti itu, generasi baru mencari simbol-simbol baru dengan mencari tonggak-tonggak budaya kontemporer seperti Lady Gaga, J-lo, Obama, Osama, dan K-Pop. Upaya ini dilakukan tanpa kemampuan untuk menggunakan masa lampau sebagai pegangan atau koordinat untuk melangkah ke depan membawa bangsa dan negara kita ke arah kehidupan yang bermartabat.

## 2. *Anchorage*: Memaknai Tonggak Budaya

*Anchorage* adalah unsur verbal yang menghubungkan gambar dengan konteksnya. Barthes (1978: 38–39) mengemukakan “ (...) *all images are polysemous* (...)”. Ini berarti setiap gambar dapat dimaknai sesuai dengan pengalaman, pendidikan, keyakinan yang memaknainya. Gambar tanpa *anchorage* dapat bersifat multitafsir. Agar gambar itu memperoleh makna tertentu, biasanya diberikan penjelasan dengan tulisan (*caption*). Cara ini disebut oleh Barthes *anchorage* (Barthes 1978: 38). Dengan *anchorage* makna gambar dibatasi (*constrained*). Menurut Barthes, setiap masyarakat mempunyai cara untuk memberikan makna tertentu pada tanda yang maknanya mengambang. Cara ini merupakan *anchorage* dalam arti yang lebih luas.

*Anchorage* dalam konteks ini merupakan tindakan sengaja untuk “membangun ingatan kolektif dan memberi makna” pada “tonggak budaya nasional” agar menjadi koordinat untuk memandang masa kini dan masa depan (cf. Funkenstein 1989: 9–12). Yang dimaksud dengan “tonggak budaya nasional” adalah berbagai peristiwa sejarah, konsep, bahasa, monumen, dan tokoh yang mengingatkan kita pada kearifan lokal yang dewasa ini cenderung terlupakan oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kita tidak melakukan kesalahan dalam memaknainya sehingga mampu mengelola globalisasi dengan arif dan cendekia. *Anchorage* adalah upaya untuk memahami sejarah dan kearifan lokal agar bangsa kita memahami baik kesalahan maupun keberhasilan pendahulunya di masa yang lalu. Paling sedikit, *anchorage* merupakan upaya “mengingat” bahwa berbagai tonggak budaya perlu diingatkan eksistensi dan maknanya agar tidak terkikis oleh gejala amnesia budaya.

Situasi dewasa ini memperlihatkan adanya kecenderungan perlemahan makna dari sejumlah tonggak penting dalam kehidupan sosial budaya kita. Bahkan, sudah mulai terjadi gejala masyarakat tidak tahu lagi makna sejumlah tonggak budaya yang seharusnya mengingatkan kita pada berbagai peristiwa atau kearifan yang terbentuk di masa lalu. Secara khusus akan dibicarakan di sini bagaimana makna tonggak budaya yang mengambang dan bahkan terlupakan. Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan untuk mengingatkan makna berbagai tonggak budaya kepada generasi pascareformasi agar tidak terlupakan. Ancangan semiotik dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut di atas. Marilah kita lihat tonggak budaya seperti yang akan kita lihat dengan kacamata semiotik (Barthes 1978).

Dalam setiap masyarakat terjadi proses pemberian makna. Setiap gejala di luar dirinya diberi makna dan penafsiran sesuai dengan pengalaman, pendidikan, dan kecenderungan warga itu. Tonggak budaya, sebagai salah satu jenis tanda dewasa ini maknanya cenderung tidak diketahui masyarakat. Tonggak budaya, yang maknanya strategis dan penting untuk melihat sejarah dan memandang ke hari depan, diperlukan *anchorage* yang diarahkan oleh Negara melalui Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR. Pada saat ini arahan itu lemah dan bahkan hampir tidak ada. Kelas menengah sibuk dengan konsumsi simbolisnya, sedangkan elit politik sibuk memupuk kekuasaan dan saling menyerang. Mereka lupa akan tugas mulia sebagai pemandu masyarakat untuk menghadapi masa depan. Atau memang tidak ada tokoh (tokoh-tokoh) yang mampu melakukannya? Tidak ada negarawan yang mampu mengilhami dan membawa warganya untuk tidak mengalami penyakit amnesia budaya: *retrograde* dan *anterograde*? Akibatnya, warga tidak memahami makna tonggak-



## AMNESIA BUDAYA SEBAGAI GEJALA KRISIS

tonggak budaya yang strategis dalam kehidupan bangsa kita. Gejala ini dapat membawa kita pada krisis budaya.

Saya menengarai bahwa berbagai tonggak budaya yang terdapat di negeri kita menjadi kehilangan makna. Kehilangan makna ini merupakan gejala amnesia budaya yang dapat “membahayakan bangsa”. Warga kehilangan “koordinat” dalam meneruskan kehidupan bangsa dan negara. Padahal, hukum alam menentukan bahwa pemimpin dan elit politik yang sekarang akan digantikan oleh generasi penerusnya. Secara logis, mereka akan digantikan oleh kelas menengah usia muda masa kini. Dewasa ini krisis makna itu sudah dapat dirasakan dan sudah waktunya elit politik melupakan perseteruan mereka untuk melakukan upaya *anchorage* agar amnesia budaya tidak berkepanjangan. Kalau tidak dilakukan sesuatu, generasi penerus kita akan menjadi generasi yang tidak memiliki koordinat untuk meneruskan kehidupan bangsa ini. Namun, perlu dicatat bahwa upaya *anchorage* bukan indoktrinasi. *Anchorage* merupakan upaya “mengingat” akan eksistensi dan makna dari berbagai tonggak budaya.

Dalam tulisan ini, saya hanya akan berbicara tentang beberapa tonggak budaya yang strategis. Dengan demikian, saya hanya akan berbicara tentang, Pancasila, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan 1945, para pahlawan, Bahasa Indonesia, dan bangunan bersejarah. Ini tidak berarti bahwa tonggak-tonggak budaya yg lain tidak penting.

### (1) Pancasila

*Anchorage* yang pertama dan utama harus dilakukan terhadap Pancasila sebagai tonggak budaya yang harus dimaknai sebagai “landasan filosofis bagi kehidupan sosial budaya dan bagi kehidupan

masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pancasila bukan sekadar pilar, melainkan landasan filosofis bagi pilar-pilar yg sering dipercakapkan, yakni Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan 1945, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Bahasa Indonesia, dan para pahlawan. Semua itu saya sebut “tonggak budaya” nasional. Toleransi antarbudaya dan antarsistem kepercayaan merupakan inti dari Pancasila. Generasi penerus kita, yang pada saat ini mengisi tempat pada lapisan “kelas menengah”, dan generasi muda di bawahnya, cenderung berisiko kehilangan arah dalam menghadapi masa depan Bangsa dan Negara ini. Selanjutnya tonggak budaya yang penting adalah lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita adalah Negara Bangsa, sebuah negara yang terbentuk dari berbagai suku bangsa (kelompok etnik), bahasa, budaya, dan sistem kepercayaan. Negara dan bangsa Indonesia berbasiskan suatu masyarakat plural dan multikultural. Prinsip toleransi merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa.

## **(2) Sumpah Pemuda**

Perjuangan melawan penjajah dan pernyataan *Sumpah Pemuda* merupakan landasan yang nyata bagi terbentuknya Negara Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan tonggak budaya kedua yang harus diberi *anchorage* oleh pemerintah dan elit politik kita, yakni peristiwa sejarah yang ditandai dengan “pelepasan baju kedaerahan utuk menjadi Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia”. Makna lanjutannya adalah “masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat plural dan multikultur harus menjadi landasan kehidupan Negara Bangsa”. Pemaknaan tentang Pancasila, lambang negara, dan Sumpah Pemuda sebagai tonggak budaya yang perlu selalu diingatkan kepada generasi

penerus kita agar tidak kehilangan arah dalam melanjutkan kehidupan bangsa ini.

### **(3) Proklamasi Kemerdekaan RI**

*Proklamasi Kemerdekaan Indonesia* yang merupakan peristiwa sejarah penting pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak budaya penting lainnya yang harus diberi makna secara *anchorage* oleh Negara. Makna peristiwa itu adalah “lahirnya suatu negara bernama Indonesia yang dinyatakan merdeka secara sepihak oleh wakil Bangsa Indonesia”. Kemerdekaan kita bukan lah pemberian dari bangsa lain, tetapi sesuatu yang direbut dari bangsa penjajah. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 telah menjadi tonggak yang maknanya memberikan semangat bagi para pejuang kita untuk merebut kemerdekaan dari kekuatan kolonial Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang dilakukan setiap tahun merupakan upaya *anchorage* yang harus selalu dilakukan, baik secara resmi kenegaraan, di sekolah-sekolah, maupun pada tataran tak resmi di lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Pemaknaannya harus selalu diingatkan dari generasi ke generasi. Berkaitan dengan ini, Sukarno-Hatta juga merupakan dua nama pahlawan yang menjadi tonggak budaya yang membawa nama sebagai “proklamator” yang secara sepihak menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Makna ini harus selalu diingatkan agar kedua nama itu tidak sekadar menjadi nama sebuah bandara internasional di wilayah Provinsi Banten.

### **(4) Pahlawan**

Indonesia memiliki sejumlah *pahlawan* yang sebelum tahun 1945 berjuang dengan cara mereka sendiri melawan kekuatan kolonialis Belanda. Banyak di antara mereka yang berakhir dengan dibuang

atau dikucilkan oleh Belanda, tetapi perjuangan mereka memberikan makna yang penting bagi kita sebagai penerus. Perjuangan mereka sebagian besar memang bersifat lokal, tetapi dengan memahami perjuangan dan pengorbanan para pahlawan itu, kita diingatkan semangat untuk menjadi “pemilik tanah air kita sendiri”. Beberapa nama dapat kita sebut di sini, yakni Imam Bonjol, Cut Nyak Dhien, Pangeran Diponegoro, Pattimura, dan Jenderal Sudirman. Nama-nama itu merupakan tonggak budaya yang harus selalu diingatkan kepada generasi kita dan penerus kita melalui pendidikan formal dan pendidikan politik. Apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita itu menjadi dasar bagi Undang-Undang Dasar kita tentang “tanah, air, dan bumi” Indonesia.

Perjuangan fisik dan diplomatik yang selama ini dilakukan oleh pendahulu kita pascaproklamasi dan berskala nasional harus selalu diingatkan agar kita tidak melepaskan “sejengkal pun” tanah air kita kepada bangsa lain. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa ada kesinambungan dalam perjuangan melawan penjajahan. Apakah elit politik kita telah melakukan apa yang diamanatkan oleh para pendahulu kita? Apakah negosiasi tentang masuknya modal asing telah selalu dilandasi oleh makna tersebut? Makna ini perlu selalu diingatkan bahkan kepada kelas menengah dan elit politik kita, khususnya Pemerintah Pusat dan Daerah yang mempunyai wewenang hukum agar “tanah, air, dan bumi” kita tidak jatuh ke tangan bangsa lain. Sebenarnya, adalah tugas pemerintah dan elit politik kita untuk mempertahankan makna ini dalam kebijakannya dan meneruskannya melalui pendidikan formal dan pendidikan politik. Pada masa krisis ini, elit politik kita masih terlalu berfokus pada memperjuangkan kekuasaan. Padahal, krisis memerlukan upaya khusus dari elit politik – dan kelas menengah – untuk melakukan *anchorage* bersama dengan pemerintah guna menyelamatkan bangsa kita dari krisis makna.

### **(5) Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah**

Tidak kurang pentingnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan tonggak budaya yang penting. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, 17 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Ini merupakan peristiwa penting yang harus dimaknai sebagai “salah satu kekayaan bangsa Indonesia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa”, alat pemersatu yang harus dihargai setinggi-tingginya.

Tidak semua bangsa diberi rahmat seperti bangsa Indonesia. India menetapkan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional, tetapi secara *de facto* fungsi ini tidak sepenuhnya ditempati oleh bahasa itu. Seperti diketahui, India memiliki jumlah bahasa etnik yang cukup banyak dan masih merupakan alat komunikasi intraetnik yang efektif. Banyak di antara kelompok etnik di negara itu tidak menguasai bahasa Hindi. Bahasa Inggris masih merupakan bahasa yang berfungsi dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Belgia memiliki dua bahasa nasional – Prancis dan Vlaams – yang penutur aslinya masih bersaing dalam memberikan status kepada bahasa masing-masing. Pernah terjadi bentrokan antarpemututur bahasa itu. Semua dokumen resmi dan nama jalan serta bangunan resmi harus menggunakan kedua bahasa itu. Swis memiliki tiga bahasa resmi, yakni Prancis, Jerman, dan Italia. Ketiga bahasa itu harus digunakan sebagai bahasa pada dokumen resmi dan nama-nama resmi. Kanada memiliki dua bahasa nasional, yakni bahasa Inggris dan Prancis. Di negara ini pun semua dokumen dan nama resmi harus menggunakan kedua bahasa itu. Dari contoh Belgia, Swis, dan Kanada, kita dapat memperkirakan akibatnya pada anggaran negara, baik untuk jumlah dokumen maupun penerjemahan.

Bangsa Indonesia harusnya mensyukuri rahmat Tuhan ini, yakni bahasa Indonesia. Namun, apa yang kita saksikan sekarang adalah melemahnya kesetiaan dan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Dewasa ini bahasa Inggris cenderung menduduki fungsi referensi kultural, yakni sebagai bahasa gengsi internasional. Ini tentu membahayakan kelangsungan hidup bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik pada ranah resmi, akademis, maupun perniagaan. Kadar kebanggaan dan kesetiaan pada bahasa Indonesia tersaingi oleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris seharusnya menjadi alat bukan tujuan.

Rahmat lain yang harus kita syukuri adalah tetap berlangsungnya kehidupan bahasa daerah yang tidak menjadi alat komunikasi semata, melainkan juga sebagai wadah budaya lokal yang berharga (cf. Gobard 1976). Rahmat ini sudah mulai terlupakan sehingga generasi muda di berbagai daerah cenderung tidak menguasai lagi bahasa etniknya. Meskipun demikian, sebenarnya pemerintah daerah perlu tetap memberikan perhatian pada bahasa daerah sebagai aset kebudayaan etnik yang menyimpan kearifan lokal (sikap dan tindak bijak dalam kehidupan sosial) dan kejeniusan lokal (teknologi lokal tradisonal yang masih relevan dalam menghadapi lingkungan hidup). Kearifan lokal dan kejeniusan lokal itu tersimpan dalam bahasa yang mewujud pada dongeng, cerita, pepatah, istilah kekerabatan, istilah dan nama budaya kuliner, istilah dalam arsitektur, nama dalam seni tenun, tata nama dalam busana, dan berbagai perwujudan verbal lain yang menjadi wahana kebudayaan suatu masyarakat.

Jadi, bahasa Indonesia dan daerah yang dipelihara dan hidup sesuai dengan fungsinya masing-masing pun merupakan kearifan lokal yang harus kita angkat menjadi kearifan nasional.

## (6) Bangunan Bersejarah

Bagaimana dengan sejumlah monumen dan candi serta bangunan peninggalan sejarah? Hemat saya perlu dikembangkan sistem dan metode pemaknaannya berupa *anchorage*. Masa lampau merupakan koordinat bagi menatap dan melangkah ke masa depan. Kita belajar dari kesalahan masa lalu untuk tidak mengulangnya pada masa kini, apalagi di masa depan. Kita belajar dari berbagai kearifan pendahulu kita agar dapat melangkah lebih baik di masa kini maupun untuk ke masa depan. Apa makna tonggak budaya seperti Borobudur, Mendut, Trowulan, Batu Malin Kundang, Monumen Pahlawan Revolusi, Makam Sunan Gunung Jati, Sunan Demak, dan Sunan Kudus, untuk menyebutkan hanya beberapa di antaranya. Sejumlah monumen kuno dan rumah serta bangunan lama yang berkaitan dengan sejarah masa kolonial masih banyak kita dapati di pelbagai daerah di Indonesia. Adalah tugas pemerintah daerah untuk memberikan *anchorage* pada tonggak-tonggak budaya itu agar generasi muda di daerah tidak kehilangan pedoman untuk meneruskan kehidupan suku bangsa di daerahnya sebagai bagian dari negara dan bangsa Indonesia.

Masih banyak tonggak budaya yang dapat disebutkan di sini. Namun, kiranya cukup beberapa contoh di atas dikemukakan untuk menjelaskan bahwa berbagai tonggak budaya di tanah air kita harus mendapat perhatian dari pemerintah dan elit politik agar mereka dan kita semua tidak menanggung dosa karena generasi penerus kita tidak mengenal maknanya atau kehilangan makna sehingga mereka mengalami amnesia budaya *retrograde* dan *anterograde* yang akan membuat mereka tersesat atau kehilangan koordinat di dalam meneruskan kehidupan bangsa kita.

### 3. Kelas Menengah sebagai “Generator”

Telah dikemukakan bahwa apa yang disebut sebagai “kelas menengah” memang hadir dalam kehidupan masa kini dan bahkan jumlahnya makin berkembang. Namun, seperti juga telah dikemukakan dalam berbagai tulisan dan pernyataan para pakar, indikatornya masih ekonomi. Juga dampaknya pada masyarakat adalah ekonomi. Marilah kita terima ini sebagai kenyataan. Para cendekiawan (di dalam dan di luar lembaga pendidikan tinggi dan riset) perannya dalam peningkatan kualitas hidup masih belum banyak berarti. Sejumlah di antaranya terkooptasi oleh kehidupan politik melalui keikutsertaannya dalam partai politik.

Jadi, apa yang harus dilakukan? Kalau sekadar lupa, yang bisa dilakukan adalah mengingatkan. Akan tetapi, kalau amnesia *anterograde* yang terjadi, diperlukan upaya khusus yang sifatnya jangka panjang dan konsisten untuk menghilangkan gejala amnesia tersebut. Salah satu caranya adalah melakukan tindakan yang kita sebut *anchorage* (Barthes 1978: 38–39). Dalam hal ini kelas menengah – yang di dalamnya terdapat elit politik – merupakan faktor penting yang dapat melakukan *anchorage* karena menjadi anutan bagi kelas di bawahnya dan dapat memengaruhi kelas di atasnya.

### 4. Beberapa Sarana Anchorage

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana untuk melakukan *anchorage*. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah pendidikan formal (sekolah, perguruan tinggi), pendidikan nonformal (kursus, paket pelatihan, pendidikan politik), dan pendidikan informal (antara lain, dalam keluarga, media massa, atau museum). Di samping lembaga pendidikan, sarana yang dapat dipergunakan untuk melakukan *anchorage* adalah museum. Dalam arti luas, museum



juga dapat dipandang sebagai lembaga pendidikan nonformal atau informal. Museum merupakan tempat yang menyimpan berbagai tonggak budaya yang berupa artefak atau pun teks (asli atau replika) yang menyimpan informasi tentang berbagai gagasan, kearifan, serta kepercayaan yang dapat digali untuk memberikan makna kepada para pengunjungnya. Para pengunjung dapat berupa anak usia sekolah, mahasiswa, ataupun umum. Keterangan tertulis ataupun lisan tentang apa yang terdapat dalam museum merupakan *anchorage* yang harus menjadi pedoman bagi generasi penerus untuk dapat memandang ke belakang serta melihat ke depan. Jadi, museum merupakan salah satu manifestasi dari pendidikan. Peran penting juga dapat dimainkan oleh media massa dalam menyebarluaskan upaya *anchorage*. Media massa merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan nonformal dan informal.

## 5. Penutup

Globalisasi ekonomi dan budaya yang tengah melanda masyarakat kita tidak dapat kita cegah. Yang dapat kita lakukan adalah mengelolanya secara arif dan cendekia. Salah satu caranya adalah melalui upaya mengobati amnesia budaya yang sedang terjadi dan merupakan gejala krisis dalam kebudayaan kita. Terjadinya amnesia budaya pada makin banyak kalangan, khususnya di kalangan kelas menengah (termasuk elit politik) dan bawah, terutama di kalangan kaum muda, merupakan gejala yang dapat membawa kita ke dalam krisis budaya. Wujud krisis budaya dalam konteks pembicaraan kita adalah terjadinya amnesia budaya, yakni gejala kehilangan makna karena lupa akan berbagai tonggak budaya strategis yang menjadi koordinat bagi bangsa kita untuk membangun masa depan masyarakat yang bermartabat. Tonggak budaya yang dibicarakan di atas dapat berupa benda, manusia, peristiwa, atau unsur nonfisik seperti bahasa dan

gagasan (misalnya, rumusan Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, peribahasa, bahasa). Dalam pembicaraan kita telah saya kemukakan beberapa bentuk *anchorage* yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan elit politik kita guna menjadi pedoman bagi generasi muda dalam meneruskan kehidupan Bangsa Indonesia selanjutnya. *Anchorage* bukan indoktrinasi, melainkan upaya “mengingat” makna berbagai tonggak budaya, baik pada tataran nasional maupaun daerah.

Di pelbagai negara maju dan berkembang sistem *anchorage* ini sudah dilakukan. Ada yang dengan cara sangat canggih dan ada pula yang masih dengan cara yang sederhana. Di negara-negara itu, bahkan di Tiongkok, peran budayawan, sejarawan, arkeolog, seniman, dan media sangat besar. Upaya mereka harus kita puji dan dijadikan contoh betapa usaha meneruskan makna demi memberikan koordinat bagi generasi muda memandang ke depan itu dilakukan dengan kesadaran akan hari depan suatu negara dan bangsanya. Dalam hal ini, kelas menengah kita menduduki tempat yang strategis. Pemaknaan tonggak budaya tidak selalu harus memberikan contoh yang baik, melainkan juga yang tidak baik. Dengan demikian, mereka tidak akan mengalami bukan sekadar amnesia budaya *retrograde*, tetapi juga – terutama – *anterograde*. Bagi saya, amnesia budaya yang terjadi dewasa ini sudah merupakan gejala krisis budaya. Masyarakat kita, khususnya generasi penerus, harus disadarkan akan kesalahan yang harus dihindari dan keberhasilan di masa lalu yang harus menjadi teladan agar dapat melangkah ke depan membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara dan bangsa yang bermartabat.

Demikianlah, sejumlah pandangan yang ingin saya sampaikan. Pandangan ini tentunya belum tuntas. Namun, diharapkan dapat memicu pemikiran di kalangan kita. Semoga tulisan bermanfaat bagi kita semua.

## KEPUSTAKAAN

- Barthes, R. 1978. *Image, Music, Text*. New York: Hill and Wang (terjemahan dari bahasa Prancis oleh S. Heath dari judul asli *Image, musique, texte*. 1977).
- Baudrillard, J. 1988. *America*. London/New York: Verso (terjemahan dari bahasa Prancis *Amérique*. 1986).
- Bourdieu, P. 1994. *Raisons pratiques*. Paris: Seuil.
- \_\_\_\_\_. 1970. *La société de consommation*. Paris: Gallimard.
- Chambert-Loir (ed.). 2009. *Sadur. Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta/Bandung: Kepustakaan Populer Gramedia/ Ecole Française d'Extrême-Orient/Forum Jakarta-Paris/ Pusat Bahasa/ Universitas Padjadjaran.
- Funkenstein, A. 1989. "Collective Memory and Historical Consciousness" dalam *History and Memory*. Vol.1. No. 1. Bloomington: Indiana University Press.
- Gobard, H. 1976. *L'aliénation linguistique: analyse tétraglossique*. Paris: Flammarion.
- Suratminto, et al. 2011. *Iklan dan Pembentukan Selera: Kajian Iklan Pascareformasi*. Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi. Universitas Indonesia.



## Bab IV

# BUDAYA BERDEMOKRASI DI INDONESIA DAN JEPANG DALAM EUFORIA-SLOGAN- PROSES DAN REALITAS

*I Ketut Surajaya*

### Abstrak

Ada beberapa hal yang menjadi pemikiran terkait dengan judul tulisan ini, antara lain, secara geografis, Indonesia dan Jepang keduanya negara kepulauan. Yang satu terletak dan “dibelah” garis khatulistiwa, beriklim tropis dengan dua musim ekstrem, panas dan hujan, dan yang satu lagi subtropis dengan empat musim: musim semi, panas, gugur, dan dingin. Latar belakang etnik dan bahasa berbeda. Indonesia pluralis, Jepang homogen. Latar belakang budaya keagamaan, religi, dan kepercayaan kedua negara termasuk kebudayaan Timur (*oriental*), berlandaskan spiritualis dan panteis untuk membedakannya dengan latar belakang budaya Barat (*occidental*) dalam pemahaman klasik. Bentuk negara, sistem politik, dan pemerintahannya, Indonesia berbentuk Republik Kesatuan, sistem perwakilan demokrasi presidensial, dan kepala negara serta pemerintahan adalah presiden; sedangkan Jepang adalah Negara Kekaisaran, sistem perwakilan demokrasi liberal parlementer dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri dan Kaisar sebagai simbol pemersatu bangsa. Menurut hemat saya, topik ini sangat relevan dalam upaya memahami proses perkembangan budaya berdemokrasi di kedua negara yang keduanya mempunyai latar belakang yang

berbeda, tapi ada juga kesamaan, yakni adanya pengaruh-pengaruh peradaban luar yang senantiasa berproses sepanjang zaman.

Kata Kunci: Indonesia, Jepang, tropis, subtropis, homogen, pluralis, *oriental*, *occidental*, panteis, spiritualis, demokrasi presidensil, demokrasi liberal parlementer.

### **Spiritualisme dan Panteisme**

Spiritualisme dan Panteisme digunakan dalam konteks Protokolisme dan globalisme.

Terminologi ini merupakan pilihan penulis untuk membedakan lokalisme dan globalisme pada awal persinggungan budaya pada awal abad dengan globalisasi yang terjadi pascarevolusi informasi tahun 1960-an. Terminologi ini dipakai untuk menjelaskan bahwa sejak awal peradaban manusia telah terjadi interaksi antar-kebudayaan dan agama yang berbeda serta berproses secara lambat dalam konteks spiritualisme dan panteisme. Perubahan-perubahan lambat ini terjadi secara terus-menerus sepanjang zaman, yang membedakannya dengan globalisasi pascarevolusi informasi, yang perubahan-perubahannya berproses secara cepat. Dengan demikian, menurut hemat saya, sejak zaman purbakala lokalisme telah bersentuhan dengan globalisme, walaupun sifatnya masih terbatas. Hal ini disebabkan spiritualisme dan panteisme tidak tercerabut sepenuhnya dari budaya lokal, walaupun telah berkembang budaya yang bersumber pada industri T3 (transportasi, telekomunikasi, dan turisme) yang memicu globalisasi.

Dalam sejarah perkembangan kebudayaan dan sosial Jepang sebelum masuknya agama Buddha ke negeri ini sekitar abad ke 7 di masyarakat sederhana purba Jepang, telah berkembang ajaran yang bersumber pada syamanisme, mitologi Shinto, dan kepercayaan-kepercayaan lokal khususnya di wilayah kepulauan. Pengaruh Agama

Kristen di negeri ini pada abad ke-16, hanya dalam kurun waktu singkat dan pernah dilarang oleh rezim penguasa karena alasan politik pada masa “penyatuan” Jepang oleh Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi.<sup>1</sup> Penyatuan di sini adalah Oda dan Toyotomi berhasil menundukkan semua tuan tanah daerah (*daimyoo*) yang telah “mengaveling” Jepang pada masa Perang 100 tahun (*sengoku*), sepanjang abad 16. Di sisi lain, dalam era seterusnya tetap berkembang ajaran Konghuchu yang melandasi ajaran *Bushido* pada Zaman Edo, walaupun agama Buddha pun tetap eksis berdampingan dengan Shinto.<sup>2</sup>

Baik agama Buddha maupun Shinto pernah dijadikan agama negara. Agama Buddha menjadi agama negara pada Zaman Nara dan Heian, dengan dibangunnya kuil-kuil megah Buddha Todaiji di Nara, Kyoto dan di berbagai wilayah. Pada Zaman Meiji (1868-1912) Shinto dijadikan agama negara yang dikenal dengan sebutan *Kokka Shinto* dan dilepaskan lagi sebagai agama negara. Pasca Perang Dunia II, kebebasan beragama dijamin oleh negara berdasarkan konstitusi negara 1947.<sup>3</sup> Agama Islam memang tidak berkembang pesat di Jepang sepanjang sejarah awal perkembangan agama-agama dunia. Dalam sejarah persebaran agama-agama besar, persebaran dimulai dari Timur Tengah yang merupakan tanah kelahiran agama Islam,

---

1 Pada masa perang antara tuan tanah seluruh negeri selama 100 tahun (*sengoku jidai*) pada abad 14-15, kapal-kapal dagang Portugis diizinkan berlabuh di Hirado Nagasaki, dengan kompensasi perdagangan senjata api yang amat dibutuhkan Oda Nobunaga dalam rangka menundukkan musuh-musuhnya untuk menghindarkan Jepang dari kekuasaan para *daimyou* lokal. Pada masa ini Jepang belum mempunyai kesatuan politik terpusat kecuali kekuasaan politik tuan tanah militer lokal dikenal dengan *han*, setingkat provinsi feodal. (lihat I Ketut Surajaya, *Pengantar Sejarah Jepang I*, (Jakarta, Fakultas Sastra UI, 1993), *passim*).

2 *Bushido* yang berarti (*bushi*=kaum samurai, *do*=jalan), adalah ajaran etika dan moral kaum satria (*samurai*).

3 Dalam Konstitusi Negara Jepang 1947, pasal 20 dinyatakan, antara lain, Negara tidak dapat mencampuri urusan beragama warga negara, dan kantor-kantor dan fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan untuk keperluan aktivitas keagamaan.

Kristen, dan Yahudi; sedangkan dari tanah India yang merupakan tempat kelahiran agama Hindu, Buddha, menjadi episentrum persebaran kedua agama tersebut. Perlu dicatat bahwa, sebelum persebaran agama-agama besar tersebut ke wilayah-wilayah lainnya, dalam hal ini dalam persebarannya ke arah Timur, di wilayah-wilayah tertentu telah terdapat agama atau religi lokal, seperti Konghuchu dan Tao di Cina, serta Shinto di Jepang.

Di Indonesia telah hidup kepercayaan animisme, dinamisme dalam berbagai sebutan nama atau terminologi kepercayaan lokal. Agama Islam menyebar ke Timur, antara lain, ke India Asia Tenggara termasuk kepulauan Nusantara, ke Barat, antara lain, ke Amerika, Eropa, arah ke Selatan, antara lain, ke Afrika, arah Utara ke Rusia. Persebaran ke Asia Tenggara tidak sederas ke arah Timur, seperti ke Cina Timur, Korea, dan Jepang. Masuknya Agama Islam ke Jepang baru berproses kemudian setelah terjadi gerakan modernisasi di Turki dibawah pimpinan Kemal Ataturk.<sup>4</sup>

Persebaran Agama Yahudi ke Barat meliputi, antara lain, Amerika, Eropa dan ke Utara sampai Rusia. Persebaran Agama Hindu ke Asia Tenggara termasuk ke Nusantara, Agama Buddha menyebar ke Barat, ke Eropa, ke Asia Tenggara termasuk Nusantara, ke Timur Laut ke Cina, Korea, dan Jepang. Agama Buddha yang masuk ke Cina juga mengalami persebaran ke Nusantara. Konghuchu yang bersumber di Cina menyebar ke Korea, Jepang, dan juga Asia Tenggara termasuk Nusantara. Sementara itu, Agama Kristen yang tersebar ke Eropa, Amerika, Rusia, Asia Timor terutama Korea, juga sampai di Indonesia.<sup>5</sup>

Persebaran agama-agama yang rumit ini hanya dijelaskan secara garis besar berdasarkan sejarah persebaran melalui “silk road”

---

4 I Ketut Surajaya, *Pengantar Sejarah Jepang I*, (Jakarta, Fakultas Sastra UI, 1993), *passim*.

5 Ibid, *passim*



jalur sutera darat yang membentang dari Cina sampai Eropa dan jalur sutera laut yang membentang dari Mediterania, Lautan Hindia, Selat Malaka sampai Laut Jawa dan Lautan Pasifik. Persebaran Agama Islam melalui jalan sutera jalur laut, khususnya ke arah Utara, menghadapi hambatan karena terjadi banyak gangguan di laut, misalnya, oleh bajak laut Jepang (*wakoo*) yang menguasai Laut Jepang sampai Laut Cina Selatan. Itulah salah satu faktor penghalang persebaran agama Islam ke Jepang terhambat, sehingga kapal-kapal dagang Islam yang berlayar dari Laut Mediterania, berbelok ke Selatan, sampai ke pesisir Pulau Sumatra dan Jawa, setelah mengarungi Samudera Hindia dan Selat Malaka.<sup>6</sup>

### **Negara Terbuka dan Negara Tertutup**

Berdasarkan latar belakang sejarah ini dapatlah dikatakan bahwa kepulauan Nusantara telah memiliki latar belakang budaya lokal pluralis dan dalam perkembangan selanjutnya berproses dalam pengaruh-pengaruh agama yang berasal dari luar, seperti Hindu, Buddha, Konghuchu, Islam, dan Kristen. Walaupun demikian, budaya lokal ini tetap eksis selama masa kekuasaan politik ekonomi kolonial Belanda selama kurang lebih “350 tahun”. Dengan kata lain, Indonesia telah terbuka bagi kepentingan-kepentingan asing, sebagai pemasok komoditas hasil bumi, seperti lada, cengkeh, rempah-rempah, kopi, kina, teh, dan karet. Ironisnya, selama kurun waktu itu, pemerintah kolonial membiarkan eksistensi kebudayaan-kebudayaan lokal, beserta tradisi dan tatanan masyarakat tradisional, malah di atas tatanan ini, pemerintah kolonial melaksanakan eksploitasi kolonialnya.

---

<sup>6</sup> Ibid.

Di satu sisi, dalam kondisi “kompradorisasi” feodalisme dan kolonialisme, Indonesia berada dalam kondisi “terkungkung” oleh kekuasaan kolonial, atau sebagian besar masyarakat Indonesia berada pada kondisi “kegelapan” dari paham demokrasi modern secara substantif. Hal ini ditambah lagi oleh kondisi masyarakat yang secara tradisional melaksanakan kehidupan sehari-hari di bawah pengaruh masyarakat feodal yang dimanfaatkan oleh penguasa kolonial. Dengan kata lain, telah terjadi “pemanfaatan” beberapa penguasa feodal lokal oleh penguasa kolonial Belanda. Di sinilah letak perbedaan substantif antara Negara Indonesia yang terbuka dan Negara Jepang yang tertutup.

Dalam sejarah feodalisme di Indonesia, para raja atau sultan berasal dari keturunan kelas bangsawan sipil, berbeda dengan Jepang, dengan feodalisme berada pada tatanan masyarakat militer (*buke houken shugi*). Pada masa berada di bawah penjajahan kolonial Belanda selama kurang lebih 350 tahun, Indonesia merupakan “negara terbuka”. Sebaliknya, selama sekitar 360 tahun Jepang melaksanakan kebijakan “pintu tertutup” (*sakoku*). Sejak Bakufu menerapkan politik “sakoku” bagi bangsa-bangsa asing—kecuali Tiongkok dan Belanda—di Jepang telah terbentuk “identitas nasional” di bawah pemerintahan Tokugawa. Kapal-kapal dagang bangsa Belanda seperti kapal-kapal VOC, yang menguasai perdagangan laut Nusantara, oleh pemerintahan Bakufu Tokugawa, diperbolehkan berlabuh terbatas hanya di pulau kecil Dezima, di ujung Barat kota Nagasaki, dari pelayaran niaganya di Nusantara. Pembatasan ini didasarkan atas kekhawatiran pemerintah Bakufu terhadap terganggunya tatanan “identitas nasional” masyarakat feodal tersebut dari pengaruh-pengaruh luar.<sup>7</sup>

---

7 Selama masa Sakoku, hubungan Batavia-Nagasaki telah dijalin melalui transportasi laut kapal-kapal VOC yang mengangkut komoditas rempah-rempah dan singhah di Dezima

Pada masa pemerintahan rezim Tokugawa inilah feodalisme militer berproses, dalam masyarakat yang telah dibesarkan oleh dan memiliki landasan kuat agama tradisional Shinto dan Buddha, ajaran-ajaran Konghuchu, dan Neo Konghuchu. Dalam proses ini lahir dan berkembang ajaran *Bushido* yang berintikan nilai kesetiaan, pengabdian, pengorbanan, dan keberanian yang menjadi dasar etika kaum satria (*samurai*) yang dalam hal ini mengendalikan politik dan pemerintahan. Ajaran klasik Jepang yang menjadi identitas negeri matahari ini seperti *kokugaku* (*kokugaku=national polity*) tetap eksis. *Kokugaku* yang bersumber pada mitologi (beranotasi) atas kronikel sejarah masa purba (*Kojiki-den*) memperkuat identitas bangsa, yang pada gilirannya merupakan cikal bakal nasionalisme Jepang. Identitas tradisional ini kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan nasionalisme modern, ultra-nasionalis, fasis sipil, dan militer yang berproses melewati masa-masa Restorasi Meiji, Demokrasi Taisho, dan masa Showa, sampai kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.<sup>8</sup> Perlu dicatat bahwa, walaupun Jepang masih tetap dijuluki “negara matahari terbit” sampai dewasa ini, identitas yang lahir dari sejarah Jepang yang “kelam” seperti imperialisme, militerisme, dan fasisme telah berakhir bersamaan dengan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Pascaperang, identitas itu telah berubah menjadi “Jepang yang demokratis, cinta damai, dan masyarakat harmonis”.<sup>9</sup>

Dalam sejarah peradaban manusia seantero dunia, secara umum nilai substantif “demokrasi” berdasarkan ajaran agama-agama telah ada. Hanya saja nilai-nilai ini masih terselubung tertutup oleh nilai-

---

Nagasaki sepanjang pelayaran ke Eropa.

8 Lihat I Ketut Surajaya, *Demokrat Yoshino Sakuzou, Penentang Gigih Komunisme, Anarkisme dan Militerisme*, (Jakarta, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995), *passim*.

9 Sejak ditetapkan UUD Negara Jepang pada 1947, asas-asas perdamaian, penolakan terhadap perang, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, secara eksplisit dicantumkan dalam UUD Negara Jepang.

nilai otokratik berdasarkan mitos-mitos yang membelenggunya dan sekaligus telah menjadi tradisi. Kita mengetahui secara umum bahwa teori-teori negara, pemerintahan, kekuasaan, termasuk demokrasi yang dikemukakan oleh para filsuf terkenal sejak Zaman Yunani Kuno, masih tetap dijadikan acuan oleh kaum cerdik cendekiawan dalam pembahasan masalah-masalah yang menyangkut negara, pemerintahan, demokrasi, dan hak asasi manusia.<sup>10</sup> Padahal, dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, utamanya dalam sejarah perkembangan masyarakat, manusia senantiasa menghadapi gejolak internalnya sendiri (*buawana alit*=mikro kosmos), berhadapan dengan dinamika eksternal, yaitu masyarakat dengan berbagai institusinya, alam, dan seluruh isinya (*buwana agung*=makrokosmos).

Dinamika ini ada kalanya bersifat antagonistik yang senantiasa mengalami pasang surut karena sumber dinamika ini lahir dari pergolakan pikiran dan jiwa internal manusia tersebut. Berbagai pandangan para filsuf besar yang disebutkan di atas masih tetap relevan dalam upaya memahami perubahan-perubahan besar yang senantiasa bergulir di atas bumi ini. Di sini tidak saya uraikan secara luas pandangan-pandangan mereka yang memang sudah menjadi pengetahuan umum kalangan terpelajar. Pengaruh pemikiran besar para filsuf tersebut telah memberi warna pula pada proses dan dinamika pemikiran di negara tertutup dan negara terbuka.

### **Ideologi yang Berkebudayaan**

Apakah ideologi lahir dari kebudayaan? Atau kebudayaan melahirkan ideologi? Menurut hemat saya ideologi lahir dalam kebudayaan.

---

10 Untuk uraian ringkas mengenai inti ajaran para filsuf ini, seperti Pythagoras, Democritus, Socrates, Plato, Aristoteles, Rousseau, Hobbes, Locke, Adam Smith, Hegel, Marx, Mill, Nietzsche, Dewey, lihat, antara lain, S.E. Frost, J.R., *Basic Teaching of The Great Philosophers, A Survey of Their Basic Ideas*, (New York, Revised Edition, Anchor Books, A Division of Random House, Inc), h. 175-206.

Gagasan, ide-ide, pemikiran terlahir dari nilai-nilai budaya dalam arus perubahan yang senantiasa tarik-menarik. Pemikiran besar yang merupakan arus deras yang melanda suatu masyarakat dapat bersumber pada mitologi, atau dinamika pemikiran modern yang lahir dari manusia tertentu yang telah ditempa dalam pengalaman-pengalaman hidup yang dialami masyarakat. Ideologi *Tennoisme* Jepang lahir dari mitologi, ditulis dalam *Kojiki*, selanjutnya berproses menjadi *Kokugaku (national polity)*. Feodalisme berantitesis melahirkan pencerahan, ketamakan manusia melahirkan kapitalisme, dan antitesis kapitalisme melahirkan komunisme, sedangkan *otoritarian* berantitesis dengan *totalitarian*, demikian seterusnya. Tesis (baca ideologi) Pancasila berantitesis atau bersintesis dengan nilai-nilai apa? Dalam hal inilah menurut hemat saya, Pancasila lahir dari ramuan pemikiran dan nilai-nilai kebudayaan Nusantara yang telah berproses dalam konteks tesis-antitesis-sintesis.

Telah banyak diskusi dan argumentasi yang mempersoalkan ideologi. Bahkan, penganut pemikiran globalisasi, mengklaim bahwa globalisasi melahirkan "deideologisasi". Menurut mereka, berakhirnya perang dingin sejak tahun 1990-an dilatarbelakangi oleh proses-proses perubahan besar di dunia. Perubahan besar dimaksud, antara lain, gerakan *Perestroika* oleh Gorbachev di Uni Soviet yang meruntuhkan ideologi komunisme dan melahirkan Negara Republik Rusia. Demikian juga runtuhnya tembok Berlin menandakan telah terjadi perubahan besar di negeri yang pernah dipisahkan menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur lantaran perbedaan ideologi antara komunisme dan demokrasi Pasca-Perang Dunia II.

Di Jepang ideologi "*Tennoisme*" telah "dihabisi" oleh MacArthur ketika Jepang dipaksa menyerah tanpa syarat kepada Sekutu berdasarkan Deklarasi Postdam. Pada masa pendudukan Sekutu di bawah SCAP dengan Jendral Douglas MacArthur sebagai

Panglima Tertinggi *GHQ (General Head Quarter)* di Tokyo, Kaisar Hirohita dipanggil MacArthur ke Hotel Imperial Tokyo untuk menghadapnya. Dengan gaya militer yang angkuh, sambil mengisap cangklong cerutnya dan memegang tongkat komando, MacArthur memerintahkan kaisar untuk memproklamasikan ke seluruh rakyat Jepang, bahwa "Kaisar adalah manusia biasa dan bukan keturunan Dewi Matahari, Amaterasu Oomikami". Kaisar kemudian melaksanakan perintah ini. Dengan pernyataan Kaisar ini, maka secara politis ideologi kekaisaran dipaksa untuk diakhiri.

Seorang pakar Sejarah Pemikiran Jepang, almarhum Profesor Maruyama Masao menyatakan bahwa, walaupun ideologi *Tennoisme* yang dimanfaatkan fungsinya sebagai mobilisasi politik oleh para tokoh militer di pemerintahan semasa perang telah dihapus, namun, ideologi *Tennoisme* dalam fungsinya sebagai ideologi sosial dan budaya masih tetap eksis sampai dewasa ini.<sup>11</sup> Dengan demikian, menurut hemat saya ideologi demokrasi Jepang yang eksis sekarang tetap tidak tercerabut dari akar budaya Jepang, walaupun sistem demokrasi parlementer yang diterapkan di Jepang Pasca-Perang Dunia, merupakan adopsi dan kombinasi antara sistem demokrasi modern model Inggris dan Amerika.

Substansi ideologi yang berbudaya adalah adanya nilai-nilai harmoni yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarah politik dan sosial Jepang, ideologi-ideologi radikal ekstrem, antara lain, ideologi ultranasionalisme yang dianut oleh organisasi *Genyousha (Dark Ocean Society)* dan *Kokuryukai (Amur River Society)*<sup>12</sup>, Zaman Meiji, gerakan-gerakan militer dan fasis sipil *anracho-*

---

11 Ideologi *Tennoisme* dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mobilisasi rakyat pada masa Perang Jepang Cina I (1894-1895), Perang Jepang Rusia (1904-1905), Perang Cina-Jepang II (1937-1945), Perang Pasifik (1941-1945).

12 Mengenai *Genyousha* dan *Kokuryukai*, lihat, I Ketut Surajaya, "Nasionalisme Jepang" dalam *(Jurnal ASJI)* Vol.I. Th.I, Juli-Desember, 1993), h.-23, dikutip dari, h. 261-264.

*sindicalis*, komunis sepanjang Zaman Taisho-Showa sebelum perang, dan gerakan "tentara merah" *Zengakuren* tahun 1960-an, semuanya kandas karena ditentang oleh pemerintah dan masyarakat Jepang.<sup>13</sup> Walaupun sistem demokrasi parlementer berlaku umum dalam negara-negara yang menganut sistem ini, dalam implementasinya di Jepang sistem ini didukung oleh budaya politik di negeri tersebut. Dengan perkataan lain, ideologi demokrasi dan perdamaian Jepang dewasa ini adalah ideologi yang berbasis budaya.

Bagaimana halnya dengan ideologi Pancasila yang lahir di negeri ini? Bung Karno "penggali" Pancasila bahkan telah berulang kali mengatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio Politik, dan Sosio Ekonomi. Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong. Dalam kehidupan sehari-hari, saya melihat bahwa, Trisila, Ekasila belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara nyata sebagaimana fungsi ideologi yang bersifat mobilisasi politik, ekonomi sosial yang masif. Pancasila bahkan sebagian masih merupakan euforia dan slogan, malahan pada masa "Orde Baru" dipreteli sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan politik aliran sempit yang pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan perkataan lain, Pancasila belum sepenuhnya menyatu dengan kehidupan berbudaya bangsa Indonesia, berbeda dengan Ideologi Sosial dan budaya Jepang seperti disebutkan di depan. Tetapi yang mirip dengan fenomena ideologi Jepang adalah ideologi-ideologi radikal ekstrem, tidak mendapat ruang gerak hidup yang panjang di negeri ini.

Sejarah telah mencatat bahwa gerakan-gerakan radikal ekstrem seperti Peristiwa Madiun 1948, Pemberontakan PRRI-Permesta, Darul Islam Indonesia, Gerakan 30 September 1965, semuanya kandas

---

13 I Ketut Surajaya, *Demokrat Yoshino Sakuzo Penentang Gigih Anarkisme, Komunisme dan Militerisme Jepang*, (Jakarta, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995), *passim*.

ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sudah tentu kekuatan dan konstelasi politik negaralah yang paling berperan dalam penolakan ideologi-ideologi radikal dimaksud. Berdasarkan pengalaman sejarah, saya berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia lebih mendambakan kehidupan yang dilandasi nilai-nilai harmoni dan kedamaian yang telah terkandung dalam ideologi Pancasila. Dengan kata lain, ideologi Pancasila seharusnya berimplementasi dalam konteks budaya Indonesia.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang harmonis yang berlatar belakang budaya, demografis, etnik, bahasa, seni, kepercayaan, agama yang pluraris tersebut, maka nilai-nilai kebaikan, toleransi, empati, cinta kasih, damai, persaudaraan merupakan kebutuhan rohani setiap manusia, karena setiap manusia akan merasa lebih aman dan tenang dalam kelompok harmoni yang lebih besar. Kelompok besar ini adalah bangsa Indonesia yang lahir dalam nilai-nilai budaya Nusantara. Mentalitas kebersamaan dan saling kebergantungan, saling berkorban, saling asah-asih-asuh inilah yang dapat menumbuhkan kembangkan bahkan menyuburkan mentalitas dan budaya demokrasi berlandaskan Pancasila.

Pada hakikatnya, agama-agama yang ada di Indonesia, secara substantif mengajarkan nilai-nilai tersebut menurut akidah masing-masing.. Agama-agama yang masuk ke Nusantara seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghuchu telah memperkaya budaya masyarakat Nusantara yang telah multikultural, serta membentuk mentalitas yang berkeadaban. Patut diakui bahwa mentalitas, perilaku dan tindakan-tindakan radikal ekstrem eksklusif masih terdapat dalam lapisan-lapisan tertentu masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hal ini adalah suatu proses yang wajar dalam pemikiran dan gerakan keseimbangan antara mentalitas yang sarat kepentingan dan keinginan materialistis, serta pemikiran dan keinginan pengimbangnya



yang bersifat spiritual. Sebagai contoh, keseimbangan yang sepadan dengan harmoni, dapat dianalogikan dengan alat timbang bandul tradisional. Apabila alat timbang ini kosong, maka akan terjadi keseimbangan antara bandul kiri dan bandul kanan. Apabila salah satu bandul kelebihan muatan, maka bandul yang satu akan menarik ke bawah dan bandul yang lain bergerak ke atas, sehingga posisi bandul timbangan tidak datar atau seimbang. Boleh dikatakan bahwa keseimbangan setara dengan harmoni.

Saya melihat bahwa pengaruh globalisasi, khususnya pengaruh dan kecanggihan teknologi informasi telah mampu mengubah keseimbangan ini, antara sikap dan perilaku hidup materialistik yang hedonis di satu sisi dan lawannya yang sarat dengan cita-cita surga; dan akibatnya bandul timbangan yang bergerak ke atas, dihentak ke bawah dengan pemikiran dan perilaku eksklusif radikal, fundamentalis yang berujung pada gerakan-gerakan superradikal terorisme. Inilah bandul-bandul ideologi yang bersifat eksklusif yang tercerabut dari akar budaya Indonesia.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa para leluhur dan “*founding fathers*” bangsa Indonesia modern, telah menyepakati bahwa latar belakang budaya pluralis ini sebagai nilai yang bhinneka tunggal ika secara budaya, dan demokratis secara ideologis, serta berkeadilan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan perkataan lain, kehidupan yang berbudaya Indonesia senantiasa mengutamakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari antara yang “bhinneka” itu. Bukankah nilai-nilai ini telah dikemas dalam ideologi negara Pancasila? Namun, yang kita saksikan dan ini proses yang wajar, bahwa senantiasa terjadi dinamika dalam penghayatan dan praktik pelaksanaan ideologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak terjadi sinergi positif antara *das solen* dan *das sein* ideologi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Artinya fungsi

ideologi sebagai kekuatan mobilisasi masyarakat pluralis secara masif untuk mencapai peradabannya yang lebih mapan, belum dapat diwujudkan sepenuhnya, pada hal ideologi ini lahir dari budaya Indonesia, sama halnya dengan ideologi *Tennoisme* Jepang yang juga lahir dari budayanya.

Namun, dinamika ini tidak akan pernah berhenti kendati telah tercapai pencerahan dan terbukanya selubung ilmu pengetahuan dari setiap manusia. Hal ini terkait dengan usaha setiap manusia untuk mengolah pikiran dan perasaan, antara logika dan perasaan hati nurani serta akumulasi pengalaman yang membentuk mentalitas mereka. Dengan demikian, menurut hemat saya, mentalitas bukan berevolusi tetapi berproses dalam diri manusia sepanjang hayatnya. Mungkin yang dimaksud revolusi mental dalam konteks ini adalah percepatan yang masif dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kebenaran: yang fondasinya adalah kejujuran, ilmu pengetahuan, keadilan, kesetiaan dan cinta kasih, serta pengabdian yang pada hakikatnya menjadi nilai-nilai hakiki setiap individu. Akan tetapi, pengendalian antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kejahatan, kejujuran dan ketidakadilan, dan seterusnya pada setiap individu, senantiasa melalui proses masing-masing individu. Berdasarkan asumsi ini, saya yakin bahwa proses pembentukan mental yang baik, seimbang seperti disebutkan di atas akan terus berproses ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan ideologi Pancasila yang berbudaya, demikian pula demokrasi yang berbudaya, akan dapat mekar menuju kedewasaannya yang mapan, setelah diasah setiap hari.

### **Revolusi Mental?**

Istilah revolusi lebih pas dipakai dalam konteks penjungkirbalikan sistem politik, ekonomi, dan sosial seperti konsepnya Karl Marks

dan penerapannya oleh Lenin dalam Revolusi Bolshwick di Rusia tahun 1917, walaupun revolusi Prancis telah terjadi abad sebelumnya. Selain digunakan di bidang politik dan sosial, terminologi revolusi telah digunakan juga untuk bidang-bidang industri (revolusi industri) di Eropa abad ke-17, dan revolusi informasi tahun 1960-an. Bagaimanakah di Jepang, apakah ada revolusi? Revolusi sangat ditentang di Jepang, apalagi revolusi sosial. Untuk menghindari terjadinya revolusi di Jepang, para tokoh militer terpaksa mengalihkan perang ke Asia Pasifik, agar revolusi tidak meledak di Jepang tatkala negara ini dilanda krisis hebat pada tahun 1930-an.<sup>14</sup>

Daisaku Ikeda seorang tokoh, guru (*sensei*) dari aliran Nichiren Soshuu Buddhis Jepang yang juga Presiden Soka Gakkai Internasional, telah berpuluh tahun menyerukan perdamaian dunia, persahabatan, kasih sayang dan lain-lain, dalam 13 jilid buku tebal dengan judul "*Ningen kakumei*" (Revolusi manusia, maksudnya revolusi hati nurani).<sup>15</sup> Menurut hemat saya, tampaknya istilah ini sepadan dengan terjemahan "revolusi mental" yang dipromosikan oleh Joko Widodo dalam masa kampanye pemilihan presiden Republik Indonesia 2014. "Ningen kakumei" merupakan ajaran filsafat, teologi, pemikiran, contoh-contoh detail proses pembangunan nurani yang baik bersendikan ajaran-ajaran agama, termasuk ajaran agama Buddha. Apakah basis atau landasan dasar "revolusi mental"-nya Joko Widodo? Rumusan yang cukup jelas, komprehensif mengenai "revolusi mental" belum pernah saya ketahui secara substantif, demikian pula landasan dasarnya. Mungkin kalau boleh menduga, tampaknya revolusi mental menganjurkan kepada manusia Indonesia agar membangun nilai-nilai luhur berakhlak mulia, sesuai

---

14 Lihat I Ketut Surajaya, Yoshino Sakuzou, *passim*.

15 Daisaku Ikeda, *Ningen Kakumei*, (Tokyo, Seikyoo Shinbunsha, volume 1-13, terbit antara 1965-1992).

dengan substansi ajaran agama masing-masing. Atau membangun insan Indonesia dengan landasan nilai-nilai Pancasila? Agar tidak telanjur menduga-duga lebih baik saya memfokuskan perhatian pada pembangunan manusia yang bermental baik. Kalau kita ikuti khotbah-khotbah keagamaan, tampaknya semua agama mengajarkan nilai-nilai luhur tentang kebenaran dan kebaikan, pentingnya ilmu pengetahuan, kejujuran, keadilan, kesetiaan, cinta dan kasih sayang yang senantiasa harus direalisasikan dalam kerja dan perbuatan serta merupakan sikap hidup sehari-hari yang membudayakan nilai-nilai dimaksud.

Baiklah, saya akan coba melihat bagaimana Pancasila dipatuhi, diterapkan secara mental dalam kehidupan sehari-hari. Apakah telah terbentuk mentalitas tentang demokrasi yang berlandaskan Pancasila? Jujur saya katakan bahwa, substansi mentalitas demokrasi Pancasila sejauh ini masih berupa euforia dan slogan, dan baru mencapai tahapan kebangkitan secara parsial dan belum mencapai realisasi nyata secara masif. Menurut hemat saya, untuk merealisasikan mental demokrasi Pancasila, kita harus menelusuri jalan panjang, yakni proses pendewasaan internal setiap manusia Indonesia. Secara internal tentu saja ada jutaan, ratusan juta bahkan lebih internal-internal mentalitas yang berbeda, karena internal manusia senantiasa tidak terlepas dan berhadapan dengan lingkungan eksternalnya, yaitu manusia lain, masyarakat lain warga negara dan yang tidak kalah penting adalah lingkungan alam, dunia semesta.

Pembentukan mental seharusnya telah dilakukan sejak dini, sejak bayi masih berupa janin dalam perut ibunya, meningkat lagi setelah bayi lahir, bersosialisasi di kelompok bermainnya (*peer group*), di sekolah di lembaga-lembaga pendidikan di lingkungannya. Orangtua dan keluarga memegang peran penting dalam pembentukan mental ini. Oleh karena itu, harus ada contoh perilaku baik dalam

sebuah keluarga. Namun, dalam kenyataan, belum semua keluarga membangun mental anak-anaknya dalam hal sopan santun, perilaku baik, benar, serta moral yang menjadi modal bagi diri, masyarakat, dan bangsa. Masih terlau banyak orang tua memberi contoh-contoh hedonisme kepada anak-anaknya termasuk kepada bayi-bayi mereka. Sebagai contoh, orangtua membonceng atau "mengajari" anak-anak mereka naik sepeda motor melaju melawan arus, tanpa helm, masker atau alat pengaman lainnya, sebagai jalan pintas untuk memenuhi egoisme individual mereka. Padahal, orangtua mengetahui bahaya-bahaya CO<sub>2</sub> yang bertebaran di jalan-jalan raya yang dapat membahayakan paru-paru mereka, orang tua juga tahu tindakan-tindakan melawan hukum, seperti berkendara melawan arus. "Alah bisa karena biasa" kata pepatah kuno. Artinya kalau sejak anak-anak orang tua mengajarkan hal-hal yang berbahaya, bertentangan dengan peraturan dan hukum, maka setelah anak ini dewasa mereka akan menjadi manusia yang biasa melanggar hukum, hidup tidak sehat, dan egois. Perilaku macam inilah yang disebut "membudayakan" perilaku buruk.

Di luar keluarga amat banyak hal-hal negatif, amoral, pornografi, kejahatan, penipuan yang tersaji dalam dunia maya, media sosial yang dapat diunduh secara bebas oleh anak-anak melalui alat komunikasi yang mereka peroleh dari orangtuanya. Di sisi lain, orangtua tidak mampu mengawasi dan mengendalikan kecanggihan teknologi yang berimbas negatif bagi anak-anak mereka. Padahal, informasi yang bernilai ilmu pengetahuan, kebaikan, kebenaran, kejujuran juga dapat diperoleh di dunia maya, antara lain, di internet.

Dengan demikian, pembentukan mental baik semakin rumit karena semakin banyaknya tantangan yang dihadapi. Tantangan yang bersifat teknologis tersebut adalah juga merupakan kreasi manusia yang tidak henti-hentinya mengejar ilmu dan mendidik dirinya.

Inilah tantangan besar dalam melaksanakan revolusi mental yang senantiasa harus dilakukan secara terus-menerus karena perubahan juga terjadi secara terus-menerus. Kita mengetahui masa lalu, tetapi masa lalu tidak akan pernah kembali, kita mengalami dan merasakan apa yang dilakukan hari ini, tetapi tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang, walaupun manusia telah membuat rencana dan program-programnya.

Pengaruh globalisasi juga sangat berperan dalam pembentukan mentalitas. Seperti diketahui, globalisasi melahirkan paradigma konvergensi. Konvergensi adalah tarik menarik antara nilai-nilai lokal dan global, antara nilai-nilai yang merupakan sendi-sendi identitas nasional versus nilai-nilai global kosmopolitan, nilai-nilai spiritual religius melawan nilai-nilai materialistis yang rakus. Kondisi ini melahirkan deideologi dan pragmatisme di satu sisi, dan radikalisme bahkan fundamentalisme yang anti-kemapanan di sisi lainnya.

Di bidang budaya, globalisasi juga berdampak atas lahirnya kebudayaan populer (*pop culture*). Dari segi proses pembentukan mental yang bercirikan globalisasi yakni, "*borderless society, borderless economics*" dengan ujung tombak industri T3 (Transportasi, Telekomunikasi, dan Turisme), semakin meluberlah arus manusia, barang, jasa, uang, informasi dalam jumlah yang banyak dan kecepatan tinggi. Berlakulah hukum persaingan yang amat ketat dalam berbagai dimensi, antarmanusia individual, masyarakat, bangsa dan negara, dalam berbagai sektor. Terjadi persaingan teknologi, ilmu pengetahuan dan seterusnya di satu sisi, terjadi pengelompokan baru antara negara-negara atau regional yang membutuhkan bermacam-macam organisasi berlingkup internasional dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah besar secara bersama-sama. Namun, patut diingat bahwa dalam kerja sama berlingkup internasional pun, di dalamnya terdapat persaingan yang cukup dahsyat. Kondisi

persaingan multidimensi inilah yang merangsang terbentuknya mental deideologi, yang mengutamakan kepraktisan, pragmatisme, dan instanisme di satu sisi, dan bangkitlah kembali ideologi radikal fundamentalis ekstrem, terorisme, dengan dalih berjuang untuk melawan ketidakadilan global di sisi lainnya.

Di bidang budaya populer, muncullah negara-negara pengeksport budaya populer yang bersifat komoditas dan menghasilkan devisa. Sebagai contoh, daya tarik budaya populer Jepang dan Korea yang dieksport ke mancanegara, termasuk ke Indonesia, menarik perhatian yang sangat luas, khususnya di kalangan kelompok usia muda. Diseminasi melalui video dan *computer game*, tren mode, animasi, buku komik, musik pop, dan kuliner, memberikan imaji yang menyejukkan, menyenangkan, aman, damai, modern dan menarik simpati. Daya tarik yang mempesona dari budaya populer ini merupakan kekuatan tersembunyi, bersifat "menghipnotis" anak-anak muda; padahal "hipnotis" ini sesungguhnya mengandung pesan-pesan propaganda yang bersifat komersial. Itulah sebabnya banyak negara khususnya Jepang dan Korea menjadikan budaya populer ini sebagai sarana diplomasi yang lazim disebut sebagai diplomasi budaya. Di dalam diplomasi budaya, terdapat kekuatan budaya, atau "*cultural power*", yang pada akhirnya muncul sebagai pandangan budaya atau ideologi yang berfungsi memobilisasi secara halus dan masif, dalam bentuk "*softpower*".

Pasca-perang dingin kecenderungan diplomasi budaya berkembang dengan pesat, sejalan dengan dialihkannya kekuatan-kekuatan militer ke bidang-bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Budaya populer sesungguhnya adalah kekuatan politik suatu negara dalam mencapai tujuan nasionalnya di tataran internasional secara terselubung yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi diplomasi masing-masing negara dalam kebijakan politik

luar negerinya, walaupun bukan dominan mutlak. Bagaimanakah kebudayaan populer ini memengaruhi atau terbentuk dalam mentalitas manusia? Sudah tentu melalui belajar, meniru, melakukan atau memakai produk-produk budaya populer dalam kehidupan sehari-hari. Mula-mula ada rasa ketertarikan, ikut-ikutan, dan mempraktikkan serta memproduksi. Paradigma inilah yang terjadi pada kelompok atau komunitas anak muda seusia yang menembus batas-batas geografi.

Dimensi yang dilahirkan dari pengaruh budaya populer adalah terbentuknya citra kelompok usia muda khususnya terhadap budaya pop Jepang. Citra diekspresikan melalui eksperimen peniruan atau imitasi, yang pada akhirnya dapat membentuk nilai yang menggandrungi budaya populer Jepang. Dimensi lain dari budaya pop ini adalah terbentuknya komunitas kreatif yang ditopang oleh promosi media: televisi, internet, dan jejaring sosial lainnya yang di dalamnya terkandung "ideologi" lunak dan bungkus luarnya adalah produk-produk budaya populer yang senantiasa mencari sasarannya.

Gelombang budaya pop luar negeri yang digandrungi kelompok muda usia di Indonesia tampaknya cukup diterima secara antusias, ditiru, bahkan dikreatifkan di kalangan kelompok-kelompok muda tertentu. Sebagai contoh nyata, setiap tahun mahasiswa Program Studi Jepang di berbagai universitas di Indonesia mengadakan *Nihon Bunka Sai* (Festival Budaya Jepang). Bahkan, mahasiswa Program Studi Jepang UI yang menyelenggarakan Gelar Jepang setiap tahunnya, mendapat kunjungan ribuan mahasiswa dan siswa setingkat Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Atas. Dalam gelar itu mereka memamerkan komik Jepang, kostum-kostum pakaian komikal (*costum play*), kerajinan seperti seni melipat kertas (*origami*), berbagai jenis kuliner tradisional yang dikemas dalam aroma dan gaya budaya populer.



Ditinjau dari proses pengenalan, penerimaan dan memproduksi budaya pop luar dalam kegiatan dan produk-produk lokal, niscaya membawa dampak yang lebih luas dan dalam, terutama perubahan atau proses perubahan dari citra menjadi perubahan pada nilai-nilai budaya, yang pada gilirannya membangun persepsi yang multidimensi: positif atau negatif terhadap bangsa-bangsa yang mengeksport budaya popnya tersebut.

Yang jelas adalah telah ada ruang untuk terbentuknya mentalitas yang berjiwa *pop culture*, khususnya di kalangan anak-anak muda Indonesia. Persoalannya adalah sejauh mana nilai-nilai ini bermanfaat untuk jati diri bangsa, atau bahkan mengikis jati diri bangsa dengan semakin mudarnya budaya-budaya tradisional, khususnya yang bersifat lokal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena budaya populer mempunyai kemampuan dan kecerdasan untuk memperoleh apa yang diinginkan (seseorang, kelompok, komunitas, bahkan negara) melalui tindakan-tindakan simpatik yang menarik dan menyenangkan, alih-alih tindakan-tindakan yang bersifat pemaksaan (*coercion*) atau pembayaran (*payment*). Hal ini muncul dari kemenarikan (*attractiveness*) kebudayaan suatu komunitas, bangsa atau negara, cita-cita politik dan kebijakan negara yang dipancarkan melalui budaya populer.

Apabila suatu negara dilihat unggul oleh negara lain, maka citra dan simpati terhadap negara tersebut semakin baik. Di balik itu, budaya populer negara tertentu telah berhasil memengaruhi persepsi bangsa lain yang pada gilirannya terbangun empati dan simpati dalam hubungan negara-negara yang memanfaatkan budaya populernya sebagai sarana diplomasi. Budaya populer yang muncul dalam bentuk musik, sinema, fashion, bacaan, kuliner dan produk-produk budaya berbasis elektronik seperti video game, animasi, dan sinema melibatkan berbagai sektor lain yang berkelindan. Dalam

hal ini budaya populer telah melibatkan berbagai sektor produksi di bidang industri, bisnis, dan perdagangan yang menghasilkan devisa. Akhirnya, hal itu juga dapat menciptakan tenaga kerja dan profit yang cukup besar.

Bagaimana revolusi mental dapat dilakukan di Indonesia dalam konteks arus dan proses global-lokal kebudayaan yang senantiasa berdinamika? Pertama-tama dan yang terpenting harus disadari adalah "revolusi mental" harus dilakukan oleh individu-individu agar setiap individu (khususnya individu dewasa) membiasakan diri melatih dirinya dalam pengendalian indriya, mengendalikan pikiran-pikiran buruk seperti, jahat, iri hati, dengki, menipu, berbohong, tamak dan lain-lain pikiran menyimpang, agar dalam pergulatan antara pikiran dan rasa karsa diri individu senantiasa dapat memenangkan pikiran-pikiran dan rasa karsa yang baik dan benar. Dalam pengendalian diri inilah, peran pendidikan dan pelaksanaan ajaran-ajaran agama senantiasa dibutuhkan. Berbagai latihan praktis untuk pengendalian diri seperti latihan kontemplasi, menyepi, semedi, dan yoga dapat dijadikan sebagai metode pengendalian diri. Ujung tombak semua pengendalian diri ini ada pada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap individu harus tidak henti-hentinya mengejar dan mengisi dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Generasi lebih tua harus secara terus-menerus mengajarkan dan memberi teladan tentang pengendalian diri ini kepada generasi yang lebih muda. Menurut hemat saya, proses ini akan berjalan lama dan sepanjang hayat manusia. Kalau kita memilih terminologi "revolusi mental" untuk mengubah pikiran dan perilaku buruk menjadi pikiran dan perilaku baik dalam setiap diri manusia, maka revolusi ini pun dilakukan di segala lapisan generasi dan sepanjang hayat.

## Pembelajaran Demokrasi

Membicarakan demokrasi tidak terlepas dari membicarakan negara. Ada bermacam-macam teori tentang negara yang telah dikemukakan oleh para filsuf terkemuka sejak Zaman Yunani Kuno. Sebelum membahas demokrasi, ada baiknya mengemukakan beberapa pertanyaan mengenai hubungan antara manusia dan negara.

*Apakah masyarakat diciptakan untuk manusia atau manusia menciptakan masyarakatnya? Apakah negara ciptaan yang Maha Kuasa dan manusia tidak perlu mempertanyakannya, atau apakah negara merupakan akibat dari kontrak sosial antara manusia dan dapat diganti manakala negara tidak dapat melayani manusia? Bagaimana penguasa memperoleh kekuasaannya? Apakah revolusi dapat dibenarkan berdasarkan hukum? Apakah totalitarian atau demokrasi benar?<sup>16</sup>*

Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih tetap relevan sampai kini, sepanjang menyangkut hubungan individu dengan masyarakat dan negara. Dalam konteks terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara ini telah lahir akibat adanya revolusi nasional yang puncaknya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Dalam Undang Undang Dasar 1945 telah dinyatakan kesepakatan bernegara dan Pancasila sebagai Dasar Negara atau Ideologi Negara. Dalam negara yang telah disepakati, timbul pertanyaan yang mendasar: bagaimana seharusnya manusia (warga negara Indonesia) hidup bernegara? Ada baiknya mengutip pendapat filsuf Yunani kuno, yakni para pengikut Pythagoras (Pythagorean) yang dengan tandas mengatakan bahwa,

---

16 Lihat, S.E. Frost, JR, *Basic Teaching of The Great Philosopher*, Chapter VII, "Man and The State: Pythagoras, Democritus, The Sophists, Socrates, Plato, Aristotle, The Epicurean, The Stoics, Augustine, Locke, Adam Smith, Rousseau, Hegel, Marx, Mill, Nietzsche, Dewey", (USA, First Anchor Books Edition, 1989, Copyright 1942, 1962 by Doubleday a division of Random House, Inc). h. 175.

*para individu harus mensubordinasi dirinya kepada warga negara secara keseluruhan dan seharusnya bertindak sepanjang waktu untuk kebaikan negara. Dengan demikian, mereka harus mengajarkan kepada yang lainnya agar menghormati kekuasaan itu, hukum, kebenaran masyarakat pada kurun waktu tertentu, dan ini adalah pengorbanan yang ideal untuk kebaikan bagi semua warga*<sup>17</sup>.

Democritus juga mempunyai pandangan yang serupa dengan pandangan Pythagoras, seperti dikatakannya. “Setiap orang seharusnya mengabdikan dirinya secara penuh untuk kebaikan negara karena negara yang diperintah secara baik adalah penjagaan kita terbesar”. Selanjutnya dikatakan, “manakala negara berada dalam kondisi baik, segala sesuatu akan berkembang baik; manakala negara korup, segala sesuatunya akan hancur”.<sup>18</sup> Pernyataan kedua orang filsuf tersebut sesungguhnya telah mencerminkan betapa negara harus memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan rakyatnya.

Mengenai kehidupan berdemokrasi, John Locke yang menentang pemikiran Hobbes tentang kesucian raja karena dengan dalih kesucian ini, raja dapat memerintah negaranya secara absolut. Dikatakannya sebagai berikut

*“sifat dasar alamiah manusia adalah perdamaian, kebaikan, dan saling membantu. Dengan demikian, manusia secara alamiah bergerak menuju kehidupan sosial. Dalam masyarakatnya, manusia membuat hukum dan pengadilan, dan manakala seseorang berkuasa, maka kekuasaan itu digunakan dalam rangka menegakkan kepentingan*

---

<sup>17</sup> Ibid., h. 179.

<sup>18</sup> Ibid.

## BUDAYA BERDEMOKRASI DI INDONESIA

*umum. Struktur ini dibangun melalui kontrak sosial oleh suatu kelompok untuk kepentingan mereka”.*<sup>19</sup>

Kutipan-kutipan di atas diperlukan dalam upaya memahami pembelajaran demokrasi baik di Indonesia maupun di Jepang yang keduanya mempunyai substansi pemikiran John Locke.

Sejak Zaman Meiji (1868-1912), Jepang telah mulai melakukan pembelajaran demokrasi sebagai imbas dari semangat modernisasi dan pencerahan (*Bunmei Kaika*) yang terjadi di nagara-negara Barat. Sebelum ditetapkan Konstitusi Meiji (*Meiji Teikoku Kenpou*) pada Februari 1889, telah terjadi perdebatan yang sangat intensif di kalangan generasi terpelajar, menyangkut bentuk dan model konstitusi apa yang paling cocok bagi Jepang. Pemikiran-pemikiran Rousseau, John Locke, dan Stuart Mill, menjadi acuan dalam debat dan konsep-konsep konstitusi yang diajukan oleh para pendukung Gerakan Hak Warga (*Jiyuu Minken Undou*) pada masa persiapan penyusunan Konstitusi Meiji tersebut.

Memang sejak Restorasi Meiji Jepang belum memiliki konstitusi yang akan dijadikan pedoman dan dasar kehidupan berwarga negara dalam konteks negara modern. Gerakan ini berada di bawah pimpinan Itagaki Taisuke yang dijuluki Rousseau dari timur kala itu. Hak asasi manusia (*Tenpu jinken*) dengan gigih diperjuangkan oleh Nakae Choomin. Sistem konstitusi parlementer model Inggris dan pemikiran-pemikiran Stuart Mill diperjuangkan dengan gigih pula oleh Ookuma Shigenobu, meskipun yang akhirnya menang dalam adu konsep konstitusi ini adalah kelompok *Japanism* di bawah pimpinan Ito Hirobumi yang akhirnya mengadopsi konstitusi monarki absolut model Prusia.<sup>20</sup> Dengan ditetapkannya

---

<sup>19</sup> Lihat Locke, dalam Ibid., h. 196-197

<sup>20</sup> I Ketut Surajaya, *Sejarah Pergerakan Demokrasi Jepang*, (Jakarta, P.T. Karya Unipress,

UUD Meiji pada bulan Februari 1889, maka cita-cita pelaksanaan demokrasi tidak dapat diwujudkan sampai digantinya UUD Meiji dengan UUD Negara Jepang yang baru (UUD Negara Jepang 1947).

Proses pembelajaran demokrasi modern di Indonesia sudah berlangsung sejak negeri ini merdeka pada tahun 1945, walaupun cikal bakalnya khususnya gagasan perwakilan terbatas telah diperkenalkan pada masa-masa akhir kolonial Belanda. Dewasa ini wacana, diskusi, seminar, tulisan, dan pelaksanaan demokrasi di negeri ini lebih terfokus pada kurun waktu pascagerakan politik reformasi tahun 1998. Persoalan mengemuka yang menjadi pembahasan demokrasi masih terfokus pada bidang-bidang politik, khususnya dinamika partai-partai politik dalam konteks “perebutan” kekuasaan negara melalui pemilihan umum, padahal demokrasi bukan hanya menyangkut politik saja, melainkan menyangkut kehidupan bernegara secara luas.

Sejak masa Orde Baru, dimulai tatanan ekonomi kapitalis, dengan kedok “ekonomi Pancasila” yang menggantikan “sistem ekonomi terpimpin” pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Akhirnya dalam kenyataan, negara “permisif” terhadap praktik ekonomi yang semakin menjurus kepada sistem ekonomi kapitalis atau neoliberal, beserta hukum-hukumnya. Dalam konteks ini, arus dan kancah “globalisasi” dan “revolusi informasi” telah berpengaruh amat besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Kondisi inilah secara logis melahirkan antitesis euforia ekonomi kerakyatan yang tidak henti-hentinya dimunculkan dalam debat-debat politik ekonomi, bahkan dijadikan slogan pada masa-masa kampanye pemilihan umum legislatif dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Namun, dalam realitas ekonomi kerakyatan masih tetap berupa wacana

---

1984), *passim*.

dan slogan sampai kini, karena konsep ekonomi kerakyatan dalam konteks ekonomi global semakin tidak jelas.

Menurut hemat saya rumusan maupun praktik ekonomi kerakyatan tampaknya akan sulit dapat berhadapan dengan ekonomi kapitalis yang sudah mapan, bahkan terdapat kecenderungan bahwa bandul ekonomi kapitalis – seperti halnya di Jepang – telah semakin dekat dengan bandul ekonomi kerakyatan dalam pemahaman negara kesejahteraan (*welfare state*). Apakah jargon ekonomi kerakyatan yang didengungkan di negeri ini akan mencapai substansi dan bentuknya ke arah negara kesejahteraan? Dalam Pancasila “negara kesejahteraan” dengan terminologi lain “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah tercantum dengan jelas dan sudah dihafal sejak anak-anak duduk dibangku Sekolah Dasar. Namun, dalam praktik belum dapat dirasakan oleh rakyat banyak secara substantif.

Negara kesejahteraan mestinya dapat direalisasikan di negeri ini, umpamanya, melalui regulasi-regulasi pemerintah. Sebagai salah satu contoh kecil, perlu dibuat regulasi yang menjamin keberlangsungan hidup pasar-pasar tradisional yang telah semakin sepi, karena didesak oleh pembangunan mal atau toko-toko swalayan modern yang dikuasai oleh modal-modal raksasa dunia. Pembatasan pembangunan mal, misalnya, dalam satu kecamatan hanya boleh dibangun sekian mal tertentu yang jumlahnya tidak melebihi pasar tradisional, tentu akan menjadi salah satu katup penyelamat pasar-pasar tradisional. Untuk bersaing dengan toko-toko swalayan maka pasar-pasar tradisional juga perlu dibuat dan ditata secara modern.

Masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah, umpamanya, melibatkan perguruan tinggi pada sektor-sektor industri untuk merancang standar nasional mutu produksi dan sejenisnya, dalam upaya menekan produk-produk asing yang tidak memenuhi standar mutu untuk memasuki pasar Indonesia.

Memang telah diberlakukan SNI (Standar Nasional Indonesia), tetapi komoditas yang telah dibuat SNI nya masih terbatas jumlahnya. Jepang telah puluhan tahun menetapkan standar-standar nasionalnya, yang berfungsi sebagai “proteksi” terhadap membanjirnya barang-barang impor yang tidak memenuhi standar. Sebagai salah satu contoh, produk-produk pertanian Indonesia, salah satunya pisang, tidak dapat menembus pasar Jepang karena pisang Indonesia tidak memenuhi standar pengemasannya (*packing*) secara higienis. Sebaliknya, pisang Filipina atau Taiwan lolos masuk pasar Jepang karena memenuhi standar mutu kemasannya. Hal ini terjadi 20 tahun lalu, dan mudah-mudahan kendala ini sudah dapat diatasi.

Sistem pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan Sistem Presidensial belum sepenuhnya menemukan format yang pas bagi budaya berpolitik di negeri ini. Praktik demokrasi sistem Presidensial sejak 1945 telah pernah dalam bentuk demokrasi liberal parlementer -sampai pertengahan dasawarsa 1950-an, disusul dengan Demokrasi Terpimpin sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno, selanjutnya demokrasi dengan kedok Demokrasi Pancasila yang otoriter pada masa pemerintahan Orde Baru Presiden Suharto. Demikian pula mekanisme kekuasaan negara berdasarkan Trias Politika masih jauh dari harapan, lantaran etika dan moral berpolitik termasuk mekanisme pelaksanaan Trias Politika ini masih belum direalisasikan secara benar dan nyata. Padahal Trias Politika yang mengajarkan pembagian kekuasaan politik berdasarkan tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan bangunan dasar demokrasi. Tiga lembaga ini mempunyai tugas utama untuk mengontrol kekuasaan, agar terjadi pelaksanaan keseimbangan dan pengawasan kekuasaan (*check and balancing political power*). Partai politik semestinya dapat menjadi pelopor dalam pencerahan politik bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan



terakhir justru sangat memprihatinkan karena berkembangnya “politik uang” mulai dari elit sampai akar rumput. Ideologi partai-partai politik di negara kita seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.

Di bidang kebudayaan, pembentukan kebudayaan nasional masih terus mencari formatnya – kecuali budaya komunikasi bahasa nasional dan “sebagai olok-olok” pakaian seragam merah putih bagi anak-anak Sekolah Dasar, biru putih bagi siswa Sekolah Menengah Pertama, dan abu-abu putih bagi siswa Sekolah Menengah Atas, di sekolah-sekolah pemerintah yang sudah baku. Indonesia amat kaya dengan budaya tradisional lokal, bahkan sejak sepuluh tahun terakhir pesta kebudayaan atau festival kebudayaan lokal semakin gencar dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Namun, apakah masyarakat Indonesia sudah memberikan apresiasi, simpati, atau mengaguminya dalam konteks nasionalisme budaya?

Di Jepang nasionalisme budaya, nasionalisme produksi dan nasionalisme politik telah berada dalam satu sinergi nasionalisme Jepang yang menjadi landasan kokoh negara tersebut untuk menghadapi persaingan dunia.

Dalam konteks globalisasi yang deras ini, terjadi perubahan-perubahan perilaku yang sangat dahsyat. Individualisme semakin kuat sebagai akibat setiap orang semakin cerdas dan mereka dapat mengetahui informasi dan perkembangan dunia melalui internet dan telepon genggam mereka. Kondisi yang menggembirakan ini semestinya juga dapat mempercepat pemahaman masyarakat mengenai demokrasi.

Selain kemajuan berkomunikasi yang semakin baik dan meluas di kalangan masyarakat, terdapat pula hal-hal yang menyedihkan, yakni kurangnya pemahaman masyarakat akan makna peninggalan

benda-benda bersejarah. Benda-benda budaya yang sakral peninggalan sejarah, dijarah dan diperjualbelikan untuk mengejar dolar sebagai pemenuhan hasrat materialisme yang semakin rakus. Situs-situs sejarah purbakala, dibongkar dan disulap menjadi bangunan-bangunan mewah komersial. Hutan-hutan perawan di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan tempat-tempat lain dibabat sehingga merusak ekologi. Dalam konsep Hindu, hutan adalah sumber kemakmuran, dalam bahasa ekologi, paru-paru dunia. Seperti dikatakan oleh Makarand R. Paranjape, profesor bidang linguistik, sastra, dan budaya dari Universitas Jawaharlal Nehru India, *"The forests in ancient times were not only a source of prosperity but also site of penance, asceticism, and spiritual contemplation"* (Hutan pada masa purbakala bukan hanya sebagai sumber kemakmuran melainkan juga sebagai tempat penebusan dosa, bertobat, pertapaan, dan kontemplasi spiritual).<sup>21</sup> Dalam kaitan antara manusia, alam, dan Tuhan, S. Radharkrishnan menulis, *"Man is the mediator between God and nature and has to complete the work of creation by the incarnation of wisdom"*.<sup>22</sup> Dalam kitab suci Weda, Upanishad, dengan jelas dinyatakan hubungan Tri Hita Karana, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Secara harfiah Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kemakmuran, kesenangan, kelestarian, dan kebaikan.

Dalam perubahan-perubahan yang cepat ini, terjadi berbagai anomali di kalangan masyarakat. Janji-janji para elit politik seperti disebutkan di depan, yang menantang masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik, aman, damai, berkeadilan, ternyata amat sulit direalisasikan karena janji-janji itu lebih berupa ilusi politik. Sebagai

---

21 Makarand R. Paranjape, "Hindu Ecology", dalam *SGI Quarterly*, No. 61, July, 2010, (Tokyo, Japan Print Co, Ltd.), h.13.

22 S. Radharkrishnan, *The Principal Upanisads*, Uttar Pradesh, India, Harper Collins Publisher, 1953), h. 105.

akibatnya, beberapa janji “pepesan kosong” ini menyeret berbagai kalangan masyarakat ke dalam kondisi kebingungan, apatis, atau “nrimo” saja janji-janji dan jargon politik ekonomi yang dijanjikan oleh para elitnya itu.

Di satu sisi, rasa putus asa di kalangan lapisan masyarakat yang kurang beruntung dan terjepit dalam kehidupan sosial ekonomi, kerap mengaitkan kondisi ini ke dalam lingkaran gelap, nasib, dan takdir yang telah melekat pada diri mereka sebagai pelarian.

Kondisi ini menjadi semakin sulit karena rakyat khususnya di akar rumput belum mampu meyuarkan hati nurani dan aspirasi demokrasinya dalam saluran politik formal, mulai dari level terendah sampai perwakilan rakyat tertinggi. Dalam kondisi ini, menurut hemat saya, kesenjangan nilai budaya, mentalitas belum dapat bersinergi dengan sistem demokrasi modern yang telah dipilih. Padahal yang melaksanakan demokrasi itu adalah manusia yang dilahirkan dan dibesarkan dalam budaya yang melatarbelakangi sosialisasinya dalam lingkungan dan masyarakatnya. Dengan kata lain ukuran keberhasilan demokrasi terletak pada manusia secara keseluruhan, yakni yang paham dan melaksanakan sistem demokrasi itu. Memang ada kemajuan dalam praktik demokrasi sejak reformasi 1998, secara umum rakyat semakin tercerahkan dalam pelaksanaan proses demokrasi, sebagai contoh partisipasi politik rakyat dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 2014 cukup tinggi, pemilihan umum berjalan lancar, aman, dan damai, walaupun masih ada persoalan di tingkat elite politik yang bersifat egoistis politis.<sup>23</sup> Hasil pemilihan presiden yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kala, menimbulkan ketidakpuasan

---

<sup>23</sup> Tuduhan macam ini lebih bernuansa egoisme politik, daripada masalah hukum, karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Agustus 2014, gugatan Prabowo-Hatta ternyata tidak dapat dibuktikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

pasangan Prabowo-Hatta yang menuduh “telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif oleh penyelenggara pemilu...”<sup>24</sup> Diajukannya gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memberikan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga dalam proses pembelajaran demokrasi, sebab inti substantif demokrasi adalah suatu sistem yang dilaksanakan secara jujur, adil, benar, taat asas, dan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

### **Melaksanakan Demokrasi yang Berbudaya?**

Walaupun sistem demokrasi modern lahir di Negara-negara Barat, demokrasi ini juga berproses di negara-negara non-Barat. Pasca-Perang Dunia II, negara-negara yang baru merdeka khususnya di Asia berkiblat kepada sistem demokrasi atau komunis. Jepang yang sejak Zaman Meiji telah mulai membuka kabut benih-benih demokrasi yang dipelopori oleh anak-anak muda atau elite lama feodal, terkontaminasi “virus” demokrasi Barat, dan baru kemudian menuai hasilnya setelah melewati masa sulit membebaskan dirinya dari ideologi Tennoisme, komunisme, dan militerisme.

Mendewasakan demokrasi Indonesia dalam konteks kekinian serta globalisasi, memerlukan kesadaran secara berkesinambungan. Hal ini didasarkan atas sejarah perkembangan nilai demokrasi Indonesia yang telah berbibit sejak zaman kolonial dan tumbuh serta berkembang sampai kini, tampaknya tidak mudah tercerabut dari akar budaya Indonesia. Pada saat UUD 1945 disusun, perdebatan mengenai *Preamble* (Pembukaan UUD) ini cukup sengit karena adanya pro kontra antara anggota Tim Penyusun UUD, menyangkut terminologi Ketuhanan Yang Maha Esa. Akhirnya terminologi

---

<sup>24</sup> Ada tiga gugatan penting Tim Prabowo-Hatta yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan putusan MK menolak semua gugatan. Lihat, antara lain, Koran *Kompas*, 22 Agustus 2014. h.1, 2,3,4, dan 6.

yang disepakati oleh para penyusun sebagai ganti dari terminologi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (saja), dengan menghilangkan tujuh kata yang diperdebatkan”.<sup>25</sup> yang pada mulanya tercantum pada *preamble* Piagam Jakarta.

### **Membudayakan Demokrasi Pancasila**

Dalam merealisasikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, fungsi ideologi, yaitu mobilisasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, harus diimplementasikan oleh setiap warga negara yang dimotori oleh para tokoh dan pemuka agama, di bawah kawalan negara. Ideologi Pancasila harus semakin solid dan “tertutup” dari ideologi yang menggunakan agama sebagai kedok secara eksklusif yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi “terbuka” dalam visi, misi, dan program-program pemerintah atau lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya dalam rangka mengimplementasikan nilai ideologi Pancasila tersebut.

### **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan Yang Maha Esa harus dalam bentuk kebebasan memeluk agama dan keyakinan bagi segenap warga negara, serta menjalankan agama atau keyakinannya masing-masing menurut filsafat, kaidah, ritual, dan tata cara upacara religiositas masing-masing pemeluknya. Negara, dengan demikian, harus melindungi warga negaranya manakala ada pemaksaan, penodaan, terhadap ajaran agama dan keyakinan religiusitas perorangan yang merupakan hak individualnya. Negara juga harus turun tangan dan menggunakan kekuatannya bila

---

<sup>25</sup> Lihat majalah *Tempo*, Edisi Khusus Hari Kemerdekaan, (18-24, 2014), h. 45. Tim penyusun terdiri dari sembilan orang: Sukarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Subardjo, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso.

diperlukan untuk menegakkan sila ini apabila terjadi penyimpangan, terutama yang mengusik kedamaian dan kerukunan hidup beragama.

Lembaga-lembaga keagamaan sudah semestinya menanamkan ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa ini dalam agama yang diyakini kepada para umatnya. Dengan demikian, warga masyarakat memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara sadar, aman damai, penuh rasa kasih sayang keyakinan agamanya tanpa rasa teralienasi atau ancaman dari mana pun. Dengan perkataan lain, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cara hidup yang melahirkan keharmonisan, kerukunan, kedamaian, kesetiaan, cinta serta empati, dan bebas dari eksklusivitas agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural.

“Jangan sekali-kali melupakan sejarah” (*jasmerah*), kata Bung Karno dalam berbagai pidatonya di depan publik pada hari-hari penting bersejarah di negara kita. Inilah salah satu sumbangan ilmu dan nilai-nilai mentalitas terbesar pendiri bangsa kita dalam meletakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada sejarah. Kharisma Bung Karno ini merupakan “magnet” berkekuatan besar pada masanya yang menghimpun berbagai potensi bangsa Indonesia. Namun, sejak Pancasila dijadikan ideologi negara secara formal, negara dan masyarakat belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan sikap Ketuhanan Yang Maha Esa ini secara substansial, walaupun secara formal slogan filsafat dan sikap hidup ini bereuforia pada masa pemerintahan Sukarno dan senantiasa dijargonkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realitas euforia dan jargon ini melenceng ke dalam kepentingan-kepentingan politik aliran yang bersifat sempit yang mengatasnamakan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa demi kepentingan kelompok eksklusif namun sesungguhnya melawan filosofi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal inilah, negara dan masyarakat belum secara masif melaksanakan substansi dan makna filosofis Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan dan pergaulan serta bermasyarakat yang penuh kesejukan, kedamaian, dan keharmonisan. Contoh ekstremnya muncul gerakan-gerakan terselubung atau terbuka yang mengatasnamakan agama secara eksklusif yang menafikan sila ini, mencuat sebagai tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap warga lainnya.

Menurut hemat saya, siapa pun menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara harus senantiasa memegang teguh filosofi dan sikap hidup Ketuhanan ini. Dengan demikian, harus pula tidak hentinya-hentinya memupuk dan menerapkan nilai-nilai Ketuhanan ini melalui pendidikan formal di seluruh sekolah dan pendidikan nonformal di masyarakat luas. Warga dan masyarakat yang telah berpendidikan tinggi memberi pencerahan terus-menerus, memberikan contoh nyata serta advokasi pelaksanaan nilai-nilai Ketuhanan ini sampai ke tahapan pencerahan mentalitas yang semakin baik dan seterusnya. Demikian pula para elite masyarakat, pemerintahan, tokoh, dan pemuka agama harus senantiasa memberikan teladan dan contoh kehidupan toleransi beragama dan berkepercayaan, dan bukan hanya jargon semata, tetapi dengan etos kerja dan perbuatan serta tindakan nyata.

### **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Dalam mengimplementasikan sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, warga negara harus memahami dan mampu bertoleransi antarsesama warga dan mengerti hak dan kewajiban individu masing-masing. Implementasi Hak Asasi Manusia (Ham) harus melalui penegakan hukum yang tidak lepas dari etika dan moral serta berkeadilan oleh kekuatan negara dan lembaga-lembaga

politik, ekonomi, sosial, utamanya pada setiap individu warga bangsa. Sudah tentu negara dapat menggunakan kekuasaan dan kekuatannya manakala terjadi penyimpangan hukum dan penodaan serta pelanggaran hak-hak asasi manusia, dalam bentuk implementasi yang nyata. Sudah tentu hak-hak dan kewajiban ini berlaku bagi semua warga bangsa tanpa kecuali termasuk tidak ada perbedaan berdasarkan gender.

Lembaga Swadaya Masyarakat harus berperan di bidang pencerahan dan advokasi dalam mewujudkan sila ini. Dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter yang bernilai kemanusiaan yang adil dan beradab, perlu disiapkan kurikulum bagi siswa sekolah dasar dan menengah untuk menumbuhkembangkan mentalitas kemanusiaan yang penuh keadaban. Kurikulum memang untuk alat dan pedoman mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu seyogianya diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia. Negara hanya mengawal, memberi peluang, melindungi hak-hak manusia itu. Negara tidak boleh mengorbankan kemanusiaan demi tercapainya tujuan negara. Tujuan negara adalah terimplementasinya sila-sila Pancasila sebagai ideologi negara.

### **Persatuan Indonesia**

Penerapan sila “Persatuan Indonesia” akan menghadapi tantangan besar, khususnya segi-segi negatif globalisasi yang cenderung mendobrak sekat-sekat identitas warga negara bangsa. “NKRI merupakan harga mati” yang telah menjadi kesepakatan warga bangsa dalam menjaga dan memelihara kedaulatan dan persatuan bangsa Indonesia yang utuh yang direkat oleh sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia didasarkan pada jati diri bangsa, nasionalisme, patriotisme, kesetiakawanan sosial, kebhinnekaan dan keutuhan wilayah NKRI. Tanpa perlindungan negara kepada warganya, maka nasionalisme,



patriotisme mustahil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, secara logis, warga negara wajib membela negara yang telah melindungi dirinya, seperti diungkapkan oleh pakar sejarah pemikiran Jepang, almarhum Prof. Maruyama Masao.<sup>26</sup> Tidak dibenarkan mendirikan “negara dalam negara” (memberikan hak otomi khusus selevel negara pada daerah-daerah dengan dalih Otonomi daerah).<sup>27</sup> UUD dan hukum negara harus berada di atas berbagai hukum yang diterapkan dalam NKRI.

Sejak era reformasi (1998) media Indonesia baik elektronik maupun non-elektronik (khususnya televisi, surat kabar, internet, media sosial, radio) telah menjadi kekuatan besar keempat di negara ini selain kekuatan birokrasi, partai politik, dan pengusaha (*bussinessman*). Di Jepang *saking* kuatnya kekuasaan birokrasi ini sampai-sampai dijuluki dengan istilah *birokratorship* (birokrasi yang ditaktor). Meskipun demikian berkuasanya, para birokrat paling takut kepada media massa yang juga mempunyai kekuasaan sangat besar, bahkan bersifat nasional dan global.

Dalam konteks Indonesia, media massa seyogianya dapat mempercepat dan menjadi sarana untuk memperkuat persatuan Indonesia. Tetapi tidak sedikit media massa yang masih bersifat dan bersikap primordial dalam peliputan dan pelaporannya. Media sosial di dunia maya, banyak menonjolkan pemikiran dan tata krama komunikasi yang tidak menghiraukan tata krama dan tata adab. Yang paling parah adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat dan membenturkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan). Manakala

---

26 Lihat Maruyama Masao, *Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan*, diterjemahkan oleh Mikiso Hane, (Tokyo University Press, 1974), h.323-326.

27 Sejak dicanangkannya UU Otonomi Daerah berdasarkan UU OTODA No.22 tahun 2000, dan diperbaiki menjadi UU OTODA Nomor 32 tahun 2002 ada ratusan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945.

benturan-benturan SARA ini tidak terkendali, negaralah yang harus bertindak demi tegaknya Persatuan seluruh rakyat Indonesia.

### **Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Ketatanegaraan Indonesia secara implisit menganut Teori Trias Politika, yaitu pelaksanaan kekuasaan politik berada pada lembaga Eksekutif, perundang-undangan dibuat oleh lembaga Legislatif, serta Lembaga Yudikatif yang mengawasi pelaksanaan berbagai perundangan dan peraturan. Secara prinsip, kekuatan ketiga lembaga ini adalah pada hak dan kewajiban yang dimilikinya, yakni, dikontrol oleh mekanisme *Check and balances* (saling mengawasi saling mengimbangi). Secara teoretik, Filosofis dan ideologis, prinsip-prinsip Trias Politika telah diterapkan dan diuji dalam kurun waktu yang telah lama, sejak UUD 1945 ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Hanya saja implementasi aktual dalam ketatanegaraan Indonesia tidak terjadi secara substantif.

Dalam rangka mengimplementasikan Trias Politika ini, kekuatan media harus menjadi garda depan pertama-tama dalam menyebarluaskan dan advokasi penyelenggaraan negara *Trias Politika* karena *Trias Politika* hanyalah sekat-sekat dalam konteks *check and balance* dalam pelaksanaan ketatanegaraan yang demokratis, bukan dipakai untuk saling menjegal atau saling menjatuhkan antar lembaga. Hal ini sangat penting disadari karena kalau sampai sekat-sekat ini melebar menjadi tembok besar, maka niscaya negara demokratis sulit dilaksanakan dan juga sangatlah buruk bagi pendidikan bangsa dalam konteks persatuan Indonesia dan mencerdaskan bangsa yang bermentalitas demokratis. Sekali lagi perlu ditekankan, bahwa Trias Politika hanyalah teori belaka, apabila manusia yang berada pada

masing-masing lembaga tersebut tidak berkualitas dan tidak bermoral dalam mengemban tugas-tugas mulia.

Media tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang bertentangan dengan sila ini. Media harus menjadi sarana pencerahan demokrasi dan pengawal ideologi negara.

Nilai-nilai demokrasi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar menengah.

### **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Inti keadilan sosial adalah pelaksanaan keempat sila dari Pancasila. Keadilan sosial dapat diwujudkan apabila ada keadilan politik, ekonomi, pendidikan, pembangunan, hukum, gender dan kesetiakawanan sosial. Sesuai fungsi ideologi, Negara harus menggunakan kekuatan dan kekuasaannya dalam mobilisasi dan implementasi keadilan sosial ini. Warga negara dan warga masyarakat dari dirinya sendiri harus berbuat adil dan menjalankan kehidupan secara adil pula. Negara dengan kekuatannya, harus mampu memobilisasi semua sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat secara adil. Nilai-nilai keadilan sosial dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar-menengah.

Dalam kenyataan sosial, sampai kini keadilan sosial belum menjangkau dan dinikmati rakyat Indonesia secara keseluruhan. Padahal, ketidakadilan merupakan sumber berbagai masalah dalam masyarakat. Ketidakadilan dapat menyulut berbagai persoalan besar dan merupakan stigma dari rasa dendam, apatisme terhadap berbagai aturan dan hukum, bahkan ketidaksetiaan terhadap negara. Ketidakadilan dapat berbentuk diskriminasi, pengebirian terhadap hukum dan hak-hak asasi yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, warga negara, bahkan negara.

Filosofi dan nilai-nilai dasar Bhinneka Tunggal Ika dan Ideologi Pancasila harus dijadikan pendidikan fundamental sepanjang zaman dalam upaya membangun perilaku dan sikap mental yang jujur, berkeadilan, serta setia kepada negara dan bangsa. Generasi yang berilmu, bermoral dan sadar serta paham akan identitas bangsanya, dapat lahir dari nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar demokrasi yang mereka bangun sendiri, oleh mereka dan untuk mereka. Maka nasionalisme, patriotisme yang tidak lepas dari nilai kemanusiaan yang universal akan dengan sendirinya bersinar sebagai jati diri pribadi, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

Dalam konteks negara, "Negara yang adil adalah Negara yang Kuat", Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang kuat", dan "pribadi yang adil adalah pribadi yang kuat". Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, lahir dari pribadi, pemimpin, dan negara yang melaksanakan keadilan Sosial.

### **Inspirasi Filosofis Sukarno**

Proklamator dan Presiden Pertama Indonesia Bung Karno sebagai contoh, tidak henti-hentinya menyerukan Pancasila sebagai Filosofi Bangsa Indonesia, dan bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno dalam peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1959 di Istana Negara, dengan mengutip pernyataan Moh Yamin menyatakan: "Apa kata sarjana Agung Prof. Mr. H.M. Yamin, Biar Majapahit dan Sriwijaya tenggelam tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia kekal abadi ke akhir zaman".<sup>28</sup> Bung Karno juga pernah menulis Kata Sambutan selaku Presiden Republik Indonesia dalam buku *Suara Vivekananda* yang isinya sebagai berikut.

---

<sup>28</sup> *Tempo*, Edisi Khusus 2014, Suplement.

## BUDAYA BERDEMOKRASI DI INDONESIA

*Swami Vivekananda*

*What a name!*

*He was one of the men, who gave so much inspiration to me,  
–inspiration to be strong, inspiration to be a servant of God,  
Inspiration to be a servant of my country, inspiration to be a servant  
of the poor, inspiration to be a servant of mankind.*

*He was it, who said: We have wept long enough; no more weeping,  
but stand on your feet, and be men*

Sambutan Bung Karno tertanggal 4 Oktober 1963 ini disampaikan dalam konteks dunia yang sedang menghadapi Perang Dingin, perang antara ideologi kapitalisme versus komunisme, perang antara Blok Barat lawan Blok Timur dalam konteks polarisasi dunia pasca-Perang Dunia II. Bukankah pemikiran Bung Karno ini sesungguhnya adalah merupakan substansi Pancasila yang dikemas secara bebas?<sup>29</sup> Saya yakin implementasi filosofi Pancasila mampu menjawab persoalan-persoalan besar yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini, karena lingkup filosofi Pancasila bersifat universal, apabila kata-kata Indonesia dalam sila-sila Pancasila tersebut diganti dengan kata-kata dunia.

### Simpulan

Budaya berdemokrasi terbentuk melalui proses budaya yang amat panjang setara dengan perkembangan sejarah kebudayaan dan peradaban manusia. Perkembangan masyarakat dan negara mulai

---

<sup>29</sup> *Suara Vivekananda* oleh Swami Ranganathananda yang diterjemahkan oleh Souw Yogamurti pada tahun 1963. Lihat, Nyoman S. Pendit, *Vedanta, Percik-percik Renungan Swami Vivekananda, Permata Warisan Filsafat dalam Etos Kerja Modern*, (Denpasar, Pustaka Bali Post, 2005), h.x-xi. Swami Vivekananda (1863-1902) dikenal sebagai cendekiawan Hindu terbesar di abad XIX. Vedanta merupakan versi pembaruan dari ajaran-ajaran Agama Hindu menurut Buku Suci Veda.

dari negara “purba”, agraria, teologi, sekuler, aristokratik feodalis, aristokratik militer, negara modern ideologis, otokratik, totaliter, dan demokratis secara umum telah dilalui oleh berbagai negara dalam konteks budaya yang senantiasa berdinamika.

Saya percaya bahwa, setiap manusia yang lahir di bumi ini secara normatif telah melekat pada dirinya hati nurani kebebasan dan nilai-nilai demokrasi. Hanya saja nilai demokrasi yang terimplementasi dalam sistem di berbagai negara bukanlah implementasi nilai demokrasi individual sesungguhnya, tetapi nilai demokrasi yang terproses dalam sistem dan tatanan negara, yang melalui berbagai tahapan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pencerahan, dan pendidikan suatu bangsa.

Kesenjangan yang terjadi dalam berbagai masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain, faktor sosial ekonomi masyarakat yang terproses sebagai akibat kecerdasan manusia dalam pola-pola hidup, produksi, dan konsumsi yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman-pengalaman empiris dalam hidup manusia. Kesenjangan ini ada kalanya berskala kecil yang lahir dalam bentuk iri hati antara manusia, bahkan berskala besar yang lahir dalam bentuk kolonisasi, pemberontakan, kudeta, dan perang.

Secara normatif, sistem demokrasi yang bersifat universal, tidak menampakkan wajah dan implementasi yang sama pada setiap negara, karena adanya latar belakang budaya yang berbeda, adanya tingkat pencerahan, dan pendidikan masyarakat yang berbeda pula. Selain itu, pertumbuhan ekonomi, industri dan kelas menengah yang berbeda demikian seterusnya, juga memperkaya warna demokrasi.

Implementasi ideologi yang berbudaya, demikian pula praktik demokrasi yang berbudaya, tidak terlepas dari akumulasi

pembentukan mental yang dimenangkan oleh kejujuran, kebaikan, kebenaran, keadilan, kesetiaan, dan cinta kasih, setiap manusia, seperti yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama. Hanya saja merikat mentalitas individual dalam konteks sosial dan bernegara bukanlah pekerjaan mudah, karena dibutuhkan kesadaran dan pengorbanan setiap individu untuk merealisasikan kepentingan umum dan kepentingan bernegara, dan seyogianya senantiasa diasah oleh setiap generasi.

Dalam konteks Jepang dan Indonesia kehidupan berdemokrasi telah melalui proses dan alur sejarah dalam kurun waktu yang berbeda dan proses sejarah yang berbeda pula. Namun, yang sama adalah terwujudnya sistem demokrasi di kedua negara tidak terlepas dari pengaruh sistem demokrasi di negara-negara Barat dan berproses dalam kurun waktu yang amat panjang. Penerapan sistem demokrasi di kedua negara amat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang tidak serta merta tercerabut dari akar budaya masing-masing negara.

## KEPUSTAKAAN

Frost J. R. , S.E. 1989. *Basic Teaching of The Great Philosophers*. New York: First Anchor Books Edition.

Ikeda, Daisaku. 1965-1992. "Ninggen Kakumei". Tokyo, *Seikyoo Shinbunsha*, Volume 1-13.

*Kompas*. 22 Agustus 2014.

Masao, Maruyama. 1974. *Studies in the Intellectual History of Tokugawa*. Japan: Tokyo University Press.

Norman, E. H. 1994. "The Genyoosha: A Study in the Origin of Japanese Imperialism", dalam *Pacific Affairs XVIII* (September, 1944).

I KETUT SURAJAYA

- Paranjape, Makarand R. 2010. "Hindu Ecology" dalam, *SGI Quarterly*, No. 61, July, 2010, (Tokyo, Japan Print Co, Ltd. )
- Pendit, Nyoman S., Vedanta. 2005. *Percik-percik Renungan Swami Vivekananda, Permata Warisan Filsafat dalam Etos Kerja Modern*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Radharkrishnan, S. 1953. *The Principal Upanisads*. Uttar Pradesh, India: Harper Collins Publisher.
- Surajaya, I Ketut. 1993. *Pengantar Sejarah Jepang, I,II*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1993. "Nasionalisme Jepang" dalam *Jurnal ASJI Vol. I Th. I, Juli-Desember 1993*.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Sejarah Pergerakan Demokrasi Jepang*. Jakarta: P.T. Karya Unipress.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Demokrat Yoshino Sakuzo Penentang Gigih Anarkisme, Komunisme dan Militerime Jepang*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Tempo*. 2014. Edisi Khusus Hari Kemerdekaan. h. 18-24.



## Bab V

# KRISIS BUDAYA DAN GERAKAN MESSIANISTIS

*Hariani Santiko*

### Abstrak

Kehidupan yang karut-marut di negara kita ini telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat di berbagai wilayah, konflik antarsuku, juga antaragama telah menimbulkan pertanyaan, apakah nilai-nilai budaya khususnya nilai toleransi telah tidak dimiliki lagi oleh bangsa kita? Media massa sering memberitakan konflik antaragama, teror terhadap pengikut aliran agama yang dianggap “tidak benar” atau yang sering disebut “aliran sesat” oleh kelompok yang merasa diperlakukan sebagai “agama resmi” oleh pemerintah. Sebaliknya, kesemrawutan ini telah mendorong munculnya angan-angan akan keadaan yang lebih baik, kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang sedang mereka alami. Sebuah negara yang dipimpin oleh seseorang yang akan membawa mereka ke suatu kehidupan yang lebih baik, yang sempurna, bebas dari tekanan di segala bidang, hidup makmur, tenteram, dan damai. Angan-angan tersebut sering tercetus pada konflik, yaitu berbagai konflik baik konflik vertikal maupun horizontal, tetapi ada yang tetap mengangan-angankan datangnya seorang “satrio piningit” yang akan membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Keadaan semacam ini mengingatkan kita akan *gerakan messianistis*, yang *mengandung unsur millenarisme*. Gerakan messianistis ini muncul pada

masyarakat yang sedang mengalami krisis di segala bidang. Mereka mengangan-angankan sebuah “Negara Bahagia”, yang sempurna yang dipimpin oleh seorang Ratu Adil.

**Kata Kunci:** Millenarisme, gerakan messianistik, ratu adil, negara bahagia, pralambang jayabaya.

## Pendahuluan

Kesemrawutan budaya telah terjadi di negara kita Indonesia akhir-akhir ini. Konflik horizontal di beberapa wilayah yang melibatkan agama dan kesukuan sering terjadi. Demikian pula terjadi konflik dan kekerasan antarwarga masyarakat dengan bermacam dalih. Kekerasan perilaku yang mengakibatkan kerusakan fisik, pembunuhan, vandalisme, dan sebagainya, sehingga sering kita pertanyakan, di manakah bangsa Indonesia yang terkenal ramah dan selalu tersenyum?

Nilai-nilai budaya kita khususnya sifat toleransi sudah sangat menipis, bahkan mungkin sudah hilang. Hal ini terlihat pada kehidupan beragama di tanah air, yang makin terlihat suasana konflik antarliran agama, termasuk kebebasan dan kerukunan beragama. Media massa sering memberitakan teror terhadap kebebasan beragama, misalnya, penyerangan terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, terhadap gereja di Temanggung Jawa Tengah, dan berita-berita terbaru tentang konflik agama, antara lain, telah terjadi di daerah Kabupaten Aceh Singkil, pada awal bulan Mei 2012, 16 gereja disegel karena dianggap melanggar peruntukan. Penyegehan tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melainkan oleh gerombolan berjubah yang mengatasnamakan Islam. Selanjutnya para Jemaat HKBP Philadelphia di Bekasi mengadakan upacara Kenaikan Yesus Kristus di trotoar dengan dikawal polisi.

Masalah kerukunan dan kebebasan agama ini, merupakan masalah yang serius, dan pada tanggal 31 Maret 2012 diadakan seminar “Kebebasan Beragama atau Kerukunan Beragama”? yang diselenggarakan oleh *Reform Centre for Religion and Society (RCRS)* salah satu pembicaranya adalah Von Magnis Suseno (*Sinar Harapan*, 2 April 2012), Ia berpendapat bahwa negara harus memberi kebebasan beragama dan tidak boleh menghakimi sebuah aliran sehingga dianggap sebagai aliran sesat. Von Magnis memberi contoh aliran agama yang dipimpin oleh ibu Lia Eden. Apabila Ibu Lia bisa memberi rasa damai untuk 1000 orang, bukankah itu bagus? Berbagai diskusi di layar kaca masih terus bergulir, mengetengahkan berbagai harapan kerukunan antaragama di negara kita.

### **Aliran Agama dan Messianisme**

Konflik agama di Indonesia tidak saja terjadi antara agama-agama resmi, melainkan juga antara agama yang penganutnya menganggap dirinya sebagai penganut agama resmi dengan aliran-aliran agama baru yang kemudian divonis sebagai aliran sesat, telah terjadi beberapa kali, khususnya di Pulau Jawa. Munculnya berbagai aliran agama yang mengharapakan kedamaian dan kebahagiaan yang bisa diberikan oleh pemimpinnya, mengingatkan kita pada *gerakan messianistis* yang mengandung *unsur millenarisme*. Gerakan messianistis ini muncul pada masyarakat yang sedang mengalami krisis di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun di bidang keagamaan. Krisis tersebut disebabkan oleh berbagai sebab, antara lain, karena terampasnya hak seseorang, sejumlah individu, atau komunitas tertentu oleh suatu bangsa, atau kelompok dominan yang “menguasai” kelompok tertekan tersebut. Mereka yang tertekan mengangan-angankan suatu negara yang sempurna, suatu negara bahagia, dengan rakyat yang hidup makmur dan tenteram yang

dipimpin oleh seorang yang adil dan bijaksana. Kondisi ini sering bersifat emosional dan dapat menimbulkan gerakan-gerakan ekstrem dengan melakukan perbuatan konkret, tetapi ada pula yang bersifat damai atau menarik diri secara pasif dengan memusatkan seluruh perhatian ke alam kebatinan untuk melupakan kesengsaraan yang dialaminya di dunia nyata. Kalau pada suatu saat muncul seseorang yang dianggap memiliki sifat-sifat yang diangan-angankannya, ia disebut Ratu Adil, dan timbullah semangat yang berkobar-kobar, tidak jarang timbul perlawanan bersenjata terhadap kelompok yang dianggap menyengsarakan mereka. Gerakan messianistik di Jawa baik yang bersifat gerakan-gerakan yang bersifat aktif maupun pasif, dikaitkan dengan seorang tokoh sejarah, yaitu Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri yang memerintah tahun 1135-1157 Masehi. Raja tersebut dipercaya membuat sebuah ramalan atau *pralambang* yang dikenal dengan *Ramalan/Pralambang Jayabaya* yang pada dasarnya berisi kepercayaan akan datangnya “negara bahagia”, yang rakyatnya hidup makmur dan bahagia dipimpin oleh seorang pemimpin dikenal sebagai Ratu Adil. Saat ini terdapat beberapa versi pralambang, di antaranya, *Jaka Lodang*, *Jayabaya Sabdatama*, *Serat Jayabaya*, dan *Jangka Jayabaya Weda Wakyu*. Mengenai pralambang Jayabaya ini telah dibahas secara panjang lebar pada *Sarasehan Metafisika Studi Club* bulan November 2007 yang lalu kemudian dimuat di *SKM Buana Minggu* dalam beberapa terbitan.

Versi Pralambang Jayabaya pada umumnya mengandung beberapa unsur. Pertama, *mitologi* di antaranya tentang kedatangan bangsa Rum untuk menghuni Pulau Jawa yang masih kosong. Cerita tersebut, antara lain, terdapat dalam *Jangka Jayabaya Patih Subakir* yang telah dibahas oleh Sartono Kartodirdjo tahun 1959. Kedua, unsur *kronologi* yang pada umumnya tidak sesuai dengan catatan sumber tertulis lainnya. dan ketiga, unsur *eskatologi*, yang membicarakan

perang antara raja iblis Jamajuja melawan Imam Mahdi dengan kemenangan Imam Mahdi. Bagian ini membicarakan tiga orang Ratu Adil, yaitu Tanjung Putih, Erucakra, dan Asmarengkung yang memerintah menjelang *Kiamat Kubra* (Kiamat besar). Setiap Ratu Adil akan muncul selalu didahului oleh masa krisis, kekacauan di mana-mana. Ketika kerusuhan telah memuncak, maka muncullah Ratu Adil. Misalnya, setelah pemerintahan Tanjung Putih, disebut Zaman Kalabendu, banyak kesengsaraan, kesusilaan merosot, yang diutarakan sebagai berikut

- *Yen manusa wis wani supata lan sumpah* (kalau manusia telah berani bersumpah)
- *Adoh mring agama lan piwulang becik* (jauh dari agama dan ajaran/nasihat yang baik)
- *Kreta mlaku tanpa kuda* (kereta berjalan tanpa (ditarik) kuda)
- *Wong lumuh jejodoan, wong jejodoan anjaluk pisah* (orang segan berumah tangga, yang sudah berumah tangga minta cerai), dan lain sebagainya.

Berbagai kerusuhan tersebut di atas dapat diatasi oleh Ratu Adil Erucakra dan seterusnya hingga muncul Kiamat Kubra. Datanglah raja iblis Jamajuja berperang melawan Imam Mahdi yang dibantu Umarmaya dan Mohamad Hanafiah dengan kemenangan di pihak Imam Mahdi. Penelitian tentang *Ramalan Jayabaya* ini telah banyak dilakukan, pertama-tama oleh Stamford Raffles (1817), J.A.B Wisselius (1862), A.B. Cohen Stuart (1872), J.L.A. Brandes (1889), G.W.J. Drewes (1925), Sartono Kartodirdjo (1959), Hariani Santiko (1968). Menurut penelitian Cohen Stuart, dengan mempelajari prototipe pralambang yang diterbitkan oleh Raffles, ternyata *Pralambang Jayabaya* mengandung unsur-unsur Islam yang kuat, dan ditulis dalam bahasa Jawa Bar.

Diperkirakan Pralambang berasal dari tahun 1715 Masehi. Hal ini berarti *Pralambang/Ramalan Jayabaya* bukan ciptaan raja Jayabhaya yang masih beragama Hindu-Saiwa. Berdasarkan penelitian Cohen Stuart tersebut, penulis berpendapat bahwa nama Jayabhaya dipakai, karena untuk orang Jawa, Raja Jayabhaya adalah raja sakti, karena pada masa pemerintahan dialah *Kakawin Bharatayuddha* telah disusun oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. *Kakawin Bharatayuddha* diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Baru oleh pujangga Kyai Yasadipura I, sehingga nama Jayabhaya yang disebut dalam pembukaan (*manggal*) dikenal oleh masyarakat. *Bharatayuddha* (Bratayuda) tidak saja dikenal sebagai hasil sastra, melainkan juga dalam pewayangan, dan dianggap sebagai cerita keramat dan mempunyai kekuatan magis. Dengan dicantumkannya nama Jayabhaya sebagai pencipta pralambang, diharapkan pralambang/ramalan akan lebih dihargai dan dipercaya oleh masyarakat.

Peristiwa-peristiwa yang dapat dianggap sebagai gerakan messianistis telah dibahas oleh Sartono Kartodirdjo (1959) dan Michael Adas (1979, 1988), di antaranya perang Diponegoro; dan gelar Erucakra dari Pangeran Diponegoro memperjelas hal ini (Brandes, 1889). Gerakan messianistis ini diperkuat oleh unsur agama, sehingga Perang Diponegoro menjadi suatu gerakan suci yang melawan orang kafir. Selanjutnya, Sartono Kartodirdjo membicarakan beberapa gerakan messianistis lainnya di Jawa, yaitu peristiwa Malangyuda, peristiwa Cilegon tahun 1888, peristiwa Tambakmerang tahun 1935, di Wonogiri yang dipimpin oleh Kyai Wirasendjaja dan sebagainya.

Messianisme tidak hanya terjadi di Jawa. Di luar Jawa, bahkan di luar Indonesia, terdapat gerakan-gerakan messianistis ini. Di Irian, misalnya, di Biak dan Numfor, telah dibahas secara panjang lebar oleh F.C. Kamma tahun 1954. Penduduk daerah tersebut sangat miskin dan ditambah tekanan oleh Belanda, maka mereka

mengangan-angankan sebuah Negara Bahagia yang disebut Koreri. Sumber gerakan ini adalah sebuah cerita suci *Manseren Munggundi* (Manarmakeri) , seorang dewa yang buruk rupa tetapi tahu rahasia hidup manusia. Karena rupanya buruk, ia tidak dipercayai penduduk, sehingga ia pergi ke arah barat. Namun, ketika mereka hidup dalam kesengsaraan, barulah ingat kepada Manarmakeri, dan mereka percaya, apabila Manarmakeri mau kembali ke Biak dan Numfor, maka Negara Bahagia akan timbul kembali. Mereka menghindarkan diri dari kenyataan hidup dengan mengkhayal tentang Negara Bahagia yang akan datang. Sering mereka melakukan berbagai upacara yang mendatangkan ketidaksadaran, dipimpin oleh seorang *Konor* yang berarti “pesuruh Tuhan”. Misalnya, gerakan messianistis yang dipimpin oleh konor Meok Mundi dan mereka menjalankan agitasi-agitasi yang merugikan Belanda. Selain di Biak dan Numfor, gerakan messianistis ini terjadi pula di daerah danau Sentani tahun 1928, di daerah Nimboran desa Ginjem tahun 1925 (Koentjaraningrat 1963).

Di luar Indonesia, terjadi di kepulauan Melanesia tahun 1870 karena penduduk merasa tertekan dijajah oleh orang Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis. Di Suriname terjadi di kalangan orang-orang Negro yang menjadi budak belian dipekerjakan di perkebunan-perkebunan orang-orang Skotlandia dan Inggris. Gerakan ini pertama kali terjadi tahun 1836 yang dipimpin oleh Colin, gerakan kedua oleh Paulun Anake tahun 1900. Di Amerika pun terjadi gerakan-gerakan messianistis oleh suku Indian yang merasa dibuang di reservasi-reservasi.

Di kota Dedaya, Myanmar pada tahun 1930-1932, terjadi pemberontakan petani Myanmar dipimpin oleh Saya San, tokoh suci yang dianggap jelmaan Buddha atau pembawa pesan Buddha. Ia menjanjikan akhir pemerintahan kafir (orang-orang Inggris) dan memulihkan kerajaan Myanmar serta agama Buddha. Zaman keemasan, yang penuh dengan keharmonisan dan kesejahteraan, akan

diberikan kepada mereka melalui pemimpin mereka Saya San (Adas 1988: 51-65).

Di Indonesia masa kini pun terdapat pula angan-angan Negara Bahagia dengan Ratu Adilnya yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia ke suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sekarang. Diharapkan kedatangan “*Satrio Piningit*” yang akan melenyapkan keadaan yang “amburadul” yang disebut *goro-goro* oleh Permadi SH. “*Satrio Piningit*” ini akan muncul sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Harapan tersebut muncul terutama kalau akan dilaksanakan pemilihan presiden Republik Indonesia, berbagai spekulasi muncul, apakah calon presiden tersebut sesuai dengan ciri-ciri seorang “*Satrio Piningit*” atau tidak.

### **Berbagai Konflik dan Penanggulangannya**

Kehidupan yang karut-marut di negara kita ini telah banyak yang meneliti. Namun, rupanya belum ada yang dapat memberi jawaban yang tepat. Keresahan dalam masyarakat tersebut tidak hanya berupa konflik keagamaan, melainkan menyangkut berbagai bidang dalam kehidupan. Akumulasi kekecewaan terhadap sikap pemerintah, penegakan hukum yang tidak konsisten, kemiskinan dan sebagainya, menimbulkan sikap apatis dan masyarakat mencari “jalan” sendiri-sendiri yang mengakibatkan mudah terjadi konflik dan kekerasan, termasuk konflik keagamaan.

Soedjatmoko mengajukan pendapat bahwa kegelisahan pada masyarakat merupakan ciri zaman peralihan. Dua tujuan masyarakat setelah kemerdekaan Republik Indonesia berkisar di sekitar dua masalah yaitu *persatuan nasional* dan *masalah modernisasi*, modernisasi terhadap kebudayaan Indonesia yang dianggap pra-



modern, tradisional, dan yang dianggap perlu disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan zaman dan kepada tanggungjawab baru yang menjadi konsekuensi dari kemerdekaan bangsa. Nilai-nilai dan cara-cara lama yang berakar pada susunan agraris feodal sudah dianggap tidak bisa memberi jawaban berbagai masalah kehidupan bangsa, sedangkan cara-cara baru belum terang bentuk kristalisasinya. Di samping itu kita seolah-olah dibanjiri berbagai unsur budaya asing maka timbullah rasa ketidakpastian dan kegelisahan akan kehilangan pribadi kita sendiri sebagai bangsa, hilangnya rasa percaya diri, dan meragukan nilai-nilai budaya kita, yang berdampak pada disintegrasi dan kekacauan di berbagai segi kehidupan. (Soedjatmoko 1996:12, 44-45, 61).

Dapat dikemukakan di sini, bahwa nilai dan cara-cara lama tidak harus ditinggalkan, bahkan dari sejarah raja-raja masa lalu kita bisa memperoleh model pengelolaan konflik kepentingan, di antaranya, pemecahan konflik agama pada masa Kerajaan Singasari, raja mendirikan dua buah candi besar, yaitu Candi Jawi (di Pandaan) dan Candi Singasari, yang bisa dipakai ibadah bersama penganut dua agama yang bersaing, yaitu penganut agama Siwa dan agama Buddha. Raja Hayam Wuruk yang memerintah di Majapahit menangani konflik budaya dengan menjalankan prinsip multikulturalisme, berhasil dengan baik. Demikian pula Sultan Agung raja Mataram Islam (1613-1645), memadukan warisan budaya istana yang sangat halus, adiluhung, dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam masyarakat, apabila bisa dipadukan dengan unsur-unsur Islam. Contohnya, Sultan Agung telah menciptakan Tahun Jawa, atas perjalanan bulan, perpaduan antara Tahun Hijriah dan Tahun Saka. Perhitungan Tahun Jawa ciptaan Sultan Agung ini segera diterima baik oleh masyarakat Jawa maupun oleh masyarakat pesantren (Simuh 1999: 20, 61, 127).

## Penutup

Dengan memperhatikan berbagai model penanggulangan konflik keagamaan dari masa lalu diharapkan pemerintah mempunyai sikap yang lebih bijaksana dalam usaha menghilangkan keresahan dalam masyarakat. Dialog antarpemuka agama dan para cendekiawan yang paham tentang kebudayaan secara terus-menerus sangat diperlukan. Demikian pula berbagai aliran agama baru yang muncul. Perlu dibahas lebih mendalam sebelum menghakimi aliran tersebut sebagai “aliran sesat”.

## KEPUSTAKAAN

- Adas, Michael. 1979. *Prophets of Rebellion, Millenarian Protest Movements against the European Colonial Order*, The University of Carolina Press, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M.Tohir Effendi tahun 1988, dengan judul *Ratu Adil*.
- Brandes, J.L.A. 1889. “Ies over een oudere Dipanegara in verband met prototype van voorspelling van Jayabaya”? TBG 1889.
- Cohen Stuart, A.B.1872. “Eroe Tjakra”, BKL.
- Kamma, G.W.J. 1954. *De Messiaanse Koreri-beweging in het Biaak-Numfors cultuur gebied*, Proeschrijf, Leiden.
- Kartodirdjo, Sartono. 1959. *Tjataan tentang Segi-segi Messianistis dalam Sejarah Indonesia*”, Universitas Gajah Mada.
- Koentjaraningrat. 1963. “Reaksi Penduduk Terhadap Perubahan Jaman,” dalam Harsya Bachtar (ed), Penduduk Irian Barat. Jakarta
- Santiko, Hariani. 1968. “Mengapa Jayabhaya Dianggap sebagai Pencipta Pralambang (Ramalan) Jayabaya”? *Mimbar Ilmu IKIP Malang*, no.1 Tahun 2.
- Simuh. 1999. *Sufisme Jawa*. Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Soedjatmoko. 1996. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES.

## Bab VI

# KRISIS KEBUDAYAAN INDONESIA MASA KINI

*Okke Kusuma Sumantri Zaimar*

### Abstrak

Jawaban dari pertanyaan “Apakah kebudayaan Indonesia pada masa kini sedang menghadapi krisis” akan luas sekali. Hampir dalam semua tulisan tentang budaya, orang membicarakan bahwa budaya Indonesia masa kini sedang dilanda krisis hebat. Krisis budaya ini mencapai hampir semua lapisan masyarakat, dan menyentuh semua bidang kehidupan. Itulah sebabnya perlu ada batas-batas yang jelas dari data yang akan dikemukakan. Sumber data yang tersedia dan agak mudah dijangkau adalah media-massa. Media-massa menampilkan gambaran kehidupan dalam masyarakat, inilah yang menjadi santapan kita sehari-hari. Banyak sekali hal yang dapat kita temukan baik di media cetak maupun media elektronik. Peran media bagaikan pisau bermata dua: di satu pihak, kita dapat melihat keadaan masyarakat di dalam media, di lain pihak media mempunyai kekuatan pengaruh yang luar biasa.

Kata Kunci: krisis, krisis budaya, budaya Indonesia, media massa, peran media, pisau bermata dua.

**Apakah Kebudayaan Indonesia pada Masa Kini sedang Menghadapi Krisis?**

Jawabannya akan luas sekali. Hampir dalam semua tulisan tentang budaya, orang membicarakan bahwa budaya Indonesia masa kini sedang dilanda krisis hebat. Krisis budaya ini mencapai hampir semua lapisan masyarakat, dan menyentuh semua bidang kehidupan. Itulah sebabnya perlu ada batas-batas yang jelas dari data yang akan dikemukakan. Sumber data yang tersedia dan agak mudah dijangkau adalah media-massa. Media-massa menampilkan gambaran kehidupan dalam masyarakat, inilah yang menjadi santapan kita sehari-hari. Banyak sekali hal yang dapat kita temukan baik di media cetak maupun media elektronik.

Peran media bagaikan pisau bermata dua: di satu pihak, kita dapat melihat keadaan masyarakat di dalam media, di lain pihak media mempunyai kekuatan pengaruh yang luar biasa. Televisi biasanya ditempatkan di ruang keluarga dan ruang ini merupakan ruang kebersamaan, sehingga menjadi pusat "aktivitas keluarga". Dari sinilah pengaruh mengalir, menguasai semua golongan usia maupun kedudukan. Pada masa kini, media sangat menyebar di seluruh negeri. Terlebih lagi bila kita ingat bahwa televisi telah sampai ke pelosok-pelosok desa. Dalam hal ini, televisi lebih mudah membangun pengaruh di desa, karena televisi menampilkan gambar-gambar yang menarik. Dengan mudah masyarakat dapat meniru apa yang ditontonnya dan dengan demikian televisi dapat mengubah perilaku masyarakat. Lihat saja perilaku konsumtif masyarakat pedesaan sekarang. Mereka lebih mementingkan penampilan dari pada membeli pupuk. Inilah hasil kerja iklan. "Dibanding dengan media cetak dan radio, ternyata televisi memberikan pengaruh yang spektakuler dalam sisi-sisi pergaulan hidup manusia saat ini. Kemampuan televisi dalam menarik perhatian massa, didukung oleh beberapa hal, yaitu: pertama,

televisi mempunyai keunggulan sebagai media yang dapat didengar (audio) dan dapat dilihat (visual), karena mempunyai gambar. Gambar yang muncul pada televisi bukan gambar mati, melainkan gambar hidup yang dapat menimbulkan kesan yang mendalam pada penonton. Keunggulan lain televisi adalah dapat merangsang seluruh alat indra manusia dan mengubah persepsi sehingga pada akhirnya memengaruhi perilaku pemirsa.<sup>1</sup> Ada tiga dampak yang ditimbulkan acara televisi terhadap khalayak (pemirsa), sebagaimana tampak berikut ini.

1. Dampak kognitif, yaitu kemampuan pemirsa untuk menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi yang melahirkan pengetahuan bagi pemirsa.
2. Dampak peniruan, yaitu pemirsa dihadapkan pada model yang sedang aktual sehingga pemirsa ikut-ikutan untuk mencontohnya.
3. Dampak perilaku, yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang telah ditayangkan acara televisi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para pemirsa.<sup>2</sup>

Telah kita lihat betapa besar pengaruh televisi pada keadaan masyarakat. Itulah sebabnya maka data penelitian kecil ini terutama diambil dari televisi. Tentu saja data yang ada di televisi mendapat dukungan dari data di media cetak dan laman, yang mempunyai kelebihan bisa menyimpan data lebih lama. Tayangan televisi dan artikel surat kabar yang dipilih untuk dijadikan sumber data hanya beberapa berita dan artikel saja yang dua tahun belakangan ini sangat ramai dan banyak dibicarakan orang, baik di surat kabar maupun di televisi. Untuk

---

1 Lihat Mukhlisuddin Marzuki: "Dampak Media Televisi terhadap Psikologi Masyarakat". <http://sosbud.kompasiana.com/20011/23/>.

2 Dalam Mukhlisuddin Marzuki: "Dampak Media Televisi terhadap Psikologi Masyarakat". <http://sosbud.kompasiana.com/20011/23/>.

memudahkan membacanya, tulisan ini akan mengemukakan krisis budaya dalam beberapa bidang

#### **a. Bidang hukum dan keuangan**

Beberapa tahun terakhir ini, surat kabar dipenuhi berita-berita tentang korupsi.

Berikut ini kami kemukakan cuplikan dari beberapa artikel berita tentang mafia pajak dan mafia hukum . Harian Kompas pada tanggal 15 Juli 2012 menampilkan di halaman 1, sebuah artikel yang berbunyi sebagai berikut.

#### **Korupsi telah Menjadi Budaya**

JAKARTA, Kompas - Korupsi di kantor Pajak tidak bisa diatasi hanya dengan menangkap dan mengadili pelaku, yang umumnya pegawai golongan menengah ke bawah. Sebab korupsi di kantor pajak diduga sudah terstruktur, sistemik dan **bahkan menjadi budaya**. Selanjutnya pernyataan ini diikuti oleh sejumlah berita tentang korupsi.<sup>3</sup>

Berita lain yang mengejutkan adalah tentang mafia hukum. Dalam tulisan ini, akan dikemukakan perkara yang telah agak lama berlalu (tahun 2011), yaitu tentang perkara Antasari Azhar, mantan ketua KPK yang dituduh membunuh Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Perkara ini banyak mengandung kejanggalan. Tim pengacara Antasari menilai memang ada rekayasa dalam kasus ini, yang diawali skandal seks yang melibatkan Rani Juliani, seorang caddy golf. "Seorang Antasari dihukum penjara selama 18 tahun, hanya berawal keterangan Rani, lalu ditarik kesimpulan melakukan pembunuhan Nasrudin," ucap M. Assegaf, pengacara Antasari.<sup>4</sup> Padahal, si tertuduh adalah mantan ketua KPK.

---

3 Kompas, Minggu 15 Juli 2012, Korupsi telah menjadi Budaya.

4 [http://nasional.kompas.com/read/2011/04/26/135011/16/10](http://nasional.kompas.com/read/2011/04/26/135011/16/10%KejanggalanKasusAntasari) Kejanggalan Kasus Antasari.

Selain kasus Antasari, kasus lain yang juga melibatkan mafia hukum adalah kasus Gayus Tambunan. Tak kurang pula banyaknya kegagalan dalam kasus Gayus ini. Perkara yang akan dibicarakan di sini adalah perkara korupsi yang melibatkan seorang pegawai dirjen pajak bernama Gayus Tambunan. Pangkatnya rendahan saja, seorang pegawai golongan 3 b, tetapi ia mempunyai kekayaan yang melimpah berupa apartemen, mobil mewah, dan uang miliaran dalam rekening bank atas namanya sendiri. "Seperti diketahui, Gayus didakwa untuk empat perkara sekaligus. Dalam dakwaan terungkap peran Gayus dalam mengurus pajak di tiga perusahaan besar dari Bakrie Group yakni PT Bumi Resource, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin." Dengan demikian dia merugikan Negara dan mengeruk keuntungan untuk pribadinya. Selain itu, dia sangat licin. Selama dalam tahanan dia pernah "berlibur" ke Singapura dan Bali. Dia bisa melakukan hal ini dengan leluasa, karena menyuap para pegawai penjara dan sejumlah polisi yang bertugas di rumah tahanan.<sup>5</sup>

Setelah kita menyoroti masalah mafia pajak dan mafia hukum yang tentu saja erat kaitannya dengan korupsi, maka berikut ini akan dikemukakan kasus korupsi besar-besaran yang sangat menghebohkan selama tahun 2011 - 2012. Hal ini menyangkut kasus Nazaruddin, bendahara partai Demokrat yang terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet di Pekanbaru. Ia berhasil mengeruk keuntungan yang tak terkira banyaknya. Perkaranya menyangkut beberapa orang ternama. Pada tanggal 9 Mei Dewan Kehormatan Partai Demokrat memeriksa Nazaruddin, pada tanggal 23 Mei ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Nazaruddin berkicau, ia menyeret nama beberapa orang, antara lain Anas Purbaningrum (ketua partai Demokrat),

---

<sup>5</sup> <http://news.detik.com/read/2012/02/20/150059/1846880>  
2012/02/20/150059/1846880/10

Andi Malarangeng (Menteri Olah Raga), Rosa Manurung, dan akhir-akhir ini Angelina Sondakh, aktivis partai Demokrat dan anggota DPR. Menurut *Tribun News*, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan adanya 20 indikasi transaksi pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. 20 Transaksi mencurigakan yang terungkap itu, nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.<sup>6</sup>

Selain terlibat kasus Wisma Atlet, Nazaruddin juga terlibat dalam kasus Hambalang di Sentul, Bogor. Proyek untuk Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah yang dibangun Kementerian Pemuda dan Olahraga itu bernilai lebih dari Rp. 1,5 triliun.<sup>7</sup> Selain itu, Nazaruddin juga terlibat dalam kasus flu burung. Mengenai proyek flu burung ini, Rizal Djalil, salah seorang anggota BPK, menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam proyek flu burung adalah senilai Rp. 349,5 miliar dan potensi kerugian keuangan negara Rp. 343, 7 miliar atau total senilai Rp. 693, 2 miliar. Total dana yang dianggarkan dalam tiga tahapan pengucuran dalam proyek flu burung mencapai lebih dari Rp. 1,3 triliun. Dikatakan pula bahwa penyimpangan dalam proyek flu burung ini terjadi dari hulu hingga hilir. Dengan indikasi kerugian negara sebesar itu, kuat dugaan adanya intervensi politik oleh pihak-pihak tertentu.

Demikianlah, kita lihat bahwa seorang Nazaruddin tidak hanya terlibat dalam satu kasus korupsi, melainkan dalam beberapa kasus sekaligus yang bernilai triliunan. Hal yang menghebohkan itu bukan hanya pelariannya, atau kasusnya yang menelan uang negara triliunan, melainkan juga kaitan-kaitannya dengan beberapa orang penting. Dia melibatkan Anas Purbaningrum, ketua Partai Demokrat,

---

6 *Tribunnews.Com*. 20/2/2012, Jakarta.

7 *Kompas* 24 Desember 2011.



bahkan dia juga melibatkan menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng.

Masih banyak lagi perkara korupsi. Hampir setiap hari surat kabar dipenuhi berita-berita semacam itu, namun bukan tempatnya membeberkan semua itu di sini. Sementara itu, demonstrasi-demonstrasi yang seharusnya menyuarakan hati nurani rakyat, sekarang telah menjadi ajang untuk memperebutkan kekuasaan dengan membagi-bagikan uang. Dengan demikian, rakyat "diajari" untuk tidak jujur.

Kini sampailah kita pada pertanyaan: benarkah korupsi telah menjadi budaya kita? Apabila kita menggunakan definisi yang sangat sederhana dari Koentjaraningrat bahwa budaya itu "cipta, karsa, dan karya," maka korupsi tentu termasuk dalam budaya, karena si koruptor menciptakan kesempatan, tentu saja dia mempunyai karsa untuk mengeruk keuntungan, dan karyanya adalah mengurus uang negara. Sementara itu bila kita merujuk pada pendapat Masinambow, terlihat pandangan yang agak berbeda. Dalam mengemukakan pengertian "budaya" dan "kebudayaan", tokoh ini menyatakan bahwa kedua kata ini dapat digunakan, baik sebagai adjektiva maupun sebagai nomina, perbedaan makna masing-masing dapat ditentukan secara arbitrer. Namun pernyataan ini disusul dengan kalimat "Kalau toh mau diadakan perbedaan, yang paling mudah adalah menggunakan istilah *budaya*, untuk "nilai-nilai", dan "adat kebiasaan", sedangkan istilah *kebudayaan*, "(merupakan) suatu kompleks gejala termasuk nilai-nilai dan adat kebiasaan yang memperlihatkan kesatuan sistemik." Ia memberikan contoh "budaya merokok", "budaya berpesta", "menunggu giliran dengan berantre belum membudaya".<sup>8</sup> Kalau kita melihat pandangan ini, maka yang dimaksud dengan "korupsi telah menjadi budaya" adalah "telah menjadi kebiasaan" dan tentu saja saya

---

8 Masinambow dalam *Meretas Ranah*, 2001 hal. 11-12.

harap – dan hal ini tidak mungkin terjadi - korupsi tidak akan menjadi salah satu nilai kita. Sekarang mari kita lihat, perilaku apa saja yang muncul dari ”budaya korupsi” ini. Pertama-tama tentu ketidakjujuran, semua orang tahu bahwa koruptor itu selalu berbohong, bukan hanya membohongi atasan dan teman sejawat, tetapi juga masyarakat, negara, bahkan juga dirinya sendiri. Dia bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia mengambil uang itu bukan untuk dirinya saja, tetapi juga untuk golongannya, seperti kasus Nazaruddin dari partai Demokrat. Kemudian ia juga pencuri, tidak tanggung-tanggung yang dicurinya adalah uang negara, berarti uang rakyat. Mungkin dia tidak merasa lagi menjadi rakyat Indonesia, karena ketika masalahnya diketahui, Nazaruddin dan istrinya melarikan diri ke berbagai negeri. Dia super egoistis, karena memasabodohkan nasib orang lain, bahkan nasib negaranya sendiri. Dia sama sekali tidak punya rasa malu, bahkan para pejabat tidak ragu-ragu untuk melakukan ”kebohongan publik”, mungkin dia tidak lagi mempunyai nilai-nilai yang berarti bagi masyarakatnya. Sementara itu, yang mengherankan adalah ucapan Presiden kita pada masa itu, yaitu SBY (sayang saya tidak menemukan lagi sumber datanya) yang menyatakan bahwa koruptor dari Partai Demokrat jauh lebih sedikit dibanding dengan koruptor dari partai-partai lain. Pernyataan ini diulangi lagi dengan menyatakan bahwa persentase anggota Partai Demokrat yang terlibat korupsi, tidak terlalu banyak. Masih ada anggota dua partai lain yang jauh lebih banyak jumlah koruptornya.<sup>9</sup> Timbul pertanyaan, apakah kita memang sedang menuju pada tahapan persaingan antarpolitik untuk berlomba melakukan korupsi? Apakah korupsi akan dijadikan suatu nilai keberhasilan seorang pejabat? Kalau memang demikian, korupsi kelak menjadi budaya kita, menjadi salah satu nilai bangsa

---

<sup>9</sup> Berita dalam ”Seputar Indonesia Pagi” RCTI, 8 / 8 - 2012.

kita. Lalu ke mana nilai luhur bangsa Indonesia yang selama ini kita banggakan? Ini benar-benar menusuk perasaan kita.

Sementara itu, berita tentang korupsi makin santer saja. Pada tanggal 28 Juli 2012 ada 12 artikel tentang korupsi dalam satu terbitan surat kabar *Kompas*, yaitu dalam rangkaian surat kabar yang utama, dari halaman 1 sampai 16. Deretan judul-judul berita /artikel tersebut tidak perlu ditampilkan di sini, karena hanya akan memperpanjang tulisan ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam satu hari saja dari satu surat kabar, tampak banyak sekali berita tentang korupsi, dan bukan tentang satu peristiwa korupsi saja, melainkan semua berita/artikel mengemukakan hal yang berlainan. Dapat dicatat bahwa berita-berita tentang pemeriksaan korupsi tadi, terutama masih pada tahap awal. Vonis jarang ditemukan beritanya.

Memang ada dua kasus yang sudah divonis, yaitu kasus Gayus dan Nazaruddin, itu pun baru satu dari sekian banyak perkaranya. Rakyat hanya bisa menanti-nanti, mudah-mudahan penantian itu ada hasilnya.

Masalah korupsi terus saja mengalir, sehingga sesudah artikel ini selesai dibuat pun masih banyak lagi peristiwa korupsi yang dipermasalahkan. Saya masih tergoda untuk mengemukakan dua kasus saja secara singkat, karena hal ini dilakukan oleh petinggi kepolisian dan pejabat Kementerian Agama, dua lembaga yang seharusnya menjadi penjaga negara dari korupsi yang dilakukan berbagai kalangan. Dalam perkara yang pertama, terjadi korupsi simulator SIM yang melibatkan dua orang jendral polisi. Masalah ini menjadi ramai, karena kasus ini menjadi "rebutan" antara Polri dan KPK. Berita ini menyebutkan bahwa Presiden pun telah diminta untuk mengatasi masalah ini.<sup>10</sup> Beliau pun turut berbicara dan mengatakan agar KPK tidak ragu menyelesaikan masalah ini. Banyak cerdas pandai yang mendorong Presiden

---

<sup>10</sup> *Kompas*, 4 Agustus 2012.

untuk bersedia mengintervensi masalah ini. Memang, KPK didirikan dengan tujuan meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi ini perlu ditingkatkan secara profesional, intens, dan berkesinambungan. Dikatakan pula bahwa lembaga pemerintah yang menangani hal ini belum berfungsi secara efektif dan efisien. Sementara itu, pihak kepolisian merasa bahwa mereka telah lebih dahulu menangani kasus korupsi ini, tetapi banyak orang yang meragukan penyelesaiannya, karena dua orang pejabat tinggi kepolisian terlibat dalam kasus tersebut.

Sementara itu, korupsi di Departemen Agama berkaitan dengan pengadaan Al-Qur'an.<sup>11</sup> Dalam hal ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Zulkarnaen Djabar, anggota Banggar DPR dan anaknya, Dendy Prasetya. Mereka diduga menerima suap ratusan juta hingga miliaran rupiah terkait perannya membantu perusahaan memenangkan tender proyek.<sup>12</sup> Korupsi yang dilakukan oleh petinggi kepolisian dan Departemen Agama ini sungguh menusuk hati, karena hal ini membuktikan bahwa tak ada lagi lembaga yang dapat diharapkan menjadi pegangan masyarakat.

Melihat banyaknya kasus korupsi yang setiap hari dikemukakan dalam surat-surat kabar dan televisi, setidaknya sebahagian dari masyarakat kita, mau tidak mau harus mengakui bahwa nilai-nilai budaya kita yang luhur itu telah bergeser. Itu baru dilihat dari kasus korupsi yang berupa peristiwa-peristiwa tertentu.

Semua kalangan prihatin terhadap keadaan ini. Di dalam Kompas tertanggal 7 Oktober 2012 terdapat iklan pentas seni yang disponsori Djarum berjudul Maling Kondang yang dilaksanakan tanggal 12 & 13 Oktober 2012. Pengelolanya, Butet Kertaradjasa menyatakan bahwa pertunjukan ini merupakan suatu "satir yang getir". "Media massa,

---

11 Ya, Allah, ampuni kami, sampai-sampai Al-qur'an pun dikorupsi.

12 *Kompas*, 4 Agustus 2012.

khususnya televisi, saat ini telah menjadikan para koruptor di negara ini ngetop atau kondang melalui pemberitaan mengenai kasus mereka, namun yang terlihat malah wajah-wajah tenang, penuh senyum, dan selalu melambaikan tangan, seolah selebriti yang menyapa para penggemarnya. Menjadi kaya dengan jalan korupsi telah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Gejala sosial inilah yang ingin diangkat dalam lakon Maling Kondang.

Dibanding dengan kehadiran media lain, televisi relatif masih baru kehadirannya. Seperti juga karya sastra yang kental hubungannya dengan ucapan Horasius "dulce et utile" (menghibur dan berguna), televisi mempunyai sifat yang sama. Hanya saja seringkali orang melupakan kegunaannya, dan memfokuskan diri pada hiburan yang ditampilkannya. Betapa senangnya anak-anak Indonesia menonton film jagoan Amerika dan Jepang (yang dengan cepat meniru keberhasilan Amerika dalam hal ini). Kita sebut saja misalnya Superman, Spiderman, Batman, Ultraman, Power-Ranger, Dicky-Ranger (Jepang), Justy-Racer (Jepang), dan banyak lagi. Film-film ini sangat berpengaruh pada anak-anak. Sikap mereka yang sok jagoan, tingkah laku mereka, pemikiran mereka yang memuja kekerasan, semua didapat dari film-film tersebut. Ingat saja baru-baru ini di Amerika ada peristiwa yang mengejutkan. Seorang pria bersenjata menembaki penonton di pemutaran perdana film terbaru Batman *The Dark Knight Rises*. Jumlah korban mencapai 70 orang, di antaranya 12 orang tewas. Hal itu dilakukan karena dia merasa dirinya sebagai Joker, musuh bebuyutan Batman. Tentu tidak semua anak begitu dalam terpengaruh film, tetapi hal ini membuktikan bahwa pengaruh kekerasan dapat menguasai penonton film, terutama anak-anak.<sup>13</sup>

Selanjutnya akan dibicarakan bidang pendidikan yang merupakan bidang penuh dengan krisis budaya.

---

<sup>13</sup> <http://internasional.kompas.com/read/2012/07/21/11371944/Penembak.Batman>.  
Siapkan.6.000. Peluru.

## **b. Bidang pendidikan**

Melihat banyaknya kasus korupsi yang setiap hari dikemukakan dalam surat-surat kabar dan televisi, setidaknya sebahagian dari masyarakat kita, mau tidak mau harus mengakui bahwa nilai-nilai budaya kita yang luhur itu telah bergeser. Itu baru dilihat dari kasus korupsi yang berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Selanjutnya, pergeseran budaya perlu dilihat dari hal lain, karena korupsi saja mungkin dianggap kurang memadai sebagai bukti adanya "krisis" budaya kita.

Selain budaya kekerasan yang kita dapatkan dari film dan televisi, masih banyak hal lain yang menampilkan kemerosotan budaya dalam kehidupan kita. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bidang pendidikan-dari Taman kanak-kanak hingga Universitas. sangat menurun kualitasnya. Setiap saat kurikulum diganti dengan kurikulum baru dengan alasan untuk perbaikan atau penyesuaian. Berbagai usaha dilakukan untuk perbaikan kurikulum, bermacam teori digunakan, tetapi semua sia-sia belaka. Masalahnya tidak semua pelaku pendidikan siap bersama-sama untuk melaksanakan kurikulum itu. Misalnya saja, sebelum kurikulum 2013, telah terjadi perdebatan antara para pelaku pendidikan tentang kesiapan para petugas lapangan.

Apabila para pelakunya saja tidak siap, maka tentu pelaksanaannya pun tidak akan mulus. Namun, bukan hal ini saja yang menjadi masalah besar dalam pelaksanaan pendidikan. Rasa hormat terhadap guru sudah menjadi langka, sering kali murid bersikap tidak sopan, misalnya mengejek gurunya yang tak punya mobil. Sebaliknya, beberapa orang guru sering bertindak berlebihan dalam memberikan hukuman. Kekerasan menjadi bentuk pemberian hukuman. Dalam pada itu, kekerasan telah menjadi suatu kebiasaan, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok anak muda yang bersatu

berdasarkan wilayah tempat tinggal ataupun sekolah mereka. Penyatuan diri dalam kelompok ini pada umumnya tidak melakukan aktivitas yang sehat. Sering terjadi perkelahian antar kelompok ini, yang disebut tawuran. Tak terhitung pelajar yang tidak bersalah menjadi korban tawuran. Di sini, budaya saling memaafkan, telah berganti dengan budaya permusuhan, kehalusan budi pekerti telah tersingkir. Banyak lagi berita menghebohkan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Perkosaan, pembunuhan dengan mutilasi, pelecehan seksual pada anak-anak, dan banyak lagi. Baru-baru ini kita dapat berita yang menjadi topik pembicaraan yang sangat mengganggu nilai-nilai budaya kita, antara lain pelecehan seksual terhadap anak-anak yang terjadi di JIS (Jakarta International School). Tadinya penulis mengira bahwa sekolah ini jauh dari kejahatan, karena namanya yang memakai predikat “Internasional” tetapi ternyata sekolah ini telah menjadi tempat dilakukannya kejahatan seksual. Pelakunya bukan hanya tukang kebun (berita awalnya memang demikian), tetapi kemudian terbukti bahwa pengajar pun ada yang terlibat. Rupanya krisis budaya ini telah tertanam di mana-mana.

Hal lain dalam kehidupan sehari-hari yang tampak menonjol adalah tidak adanya sikap disiplin. Jangankan kedisiplinan, sikap menghargai orang lain pun sudah tak tampak lagi dalam budaya kita. Lihat saja sikap para pengemudi di jalan. Terlalu banyak hal yang bisa dikemukakan di sini. Sudah terbiasa orang melanggar rambu-rambu lalu lintas meskipun hal itu berpotensi mencelakakan orang lain, bahkan juga mencelakakan dirinya sendiri. Kebobrokan mental ini harus kita hadapi sehari-hari, tak ada tempat untuk menyingkir, apalagi kalau kita hidup di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, yang terkenal sebagai salah satu kota yang paling kacau lalu-lintasnya di dunia. Hal ini disebabkan oleh terus-menerus bertambahnya kendaraan bermotor, terlebih lagi bila banjir datang disertai tumbangnya beberapa

pohon besar yang menghalangi jalan. Namun, yang paling “berdosa” adalah perilaku manusia sendiri. Para pengemudi sering bersikap sangat egois, mementingkan dirinya sendiri saja, sumpah serapah pun mudah sekali meluncur dari mulutnya. Inilah kebobrokan budaya, selain kebobrokan yang tampak dalam sinetron.

Kini, marilah kita lihat tayangan sinetron macam apa yang disuguhkan setiap hari kepada masyarakat. Kita tidak usah berbicara tentang logika, karena hal itu jauh panggang dari api. Peneliti beranggapan bahwa ada kesalahpahaman dalam pembuatan sinetron. Para pembuat sinetron itu beranggapan kalau menampilkan cerita fiksi, semua hal bisa terjadi. Namun, mereka lupa bahwa ada berbagai *genre* dalam cerita fiksi. Dalam tayangan komik, bisa saja kartun yang sudah gepeng karena dilindas mesin pembuat jalan, bangun dan hidup kembali. Dalam film horor, bisa saja mayat keluar dari kuburannya dan mengganggu manusia. Namun, tidak demikian halnya dengan film yang berpretensi menampilkan kehidupan sehari-hari. Apa yang dilihat di film dianggap sebagai realitas yang memang nyata dan pemirsa bisa menganggap dirinya sebagai salah satu pemain film. Dia memproyeksikan dirinya sebagai tokoh film itu. Inilah yang berbahaya. Pengaruh bisa masuk melalui proyeksi diri. Pada tahap ini penonton telah mencapai tahap peniruan, bahkan lebih jauh lagi, apa yang dilihatnya telah menjadi perilaku dia juga. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang saya anggap sebagai pergeseran nilai-nilai budaya Indonesia dan akan dapat mempengaruhi pemirsa. Peristiwa-peristiwa yang saya kemukakan merupakan peristiwa yang umumnya hadir atau hampir selalu ada dalam sinetron.

Dan apa yang kita lihat di sini? Pertama-tama adalah kemewahan. Semua sinetron mempertontonkan kemewahan. Semua pemain yang cantik-cantik dan gagah, keluar-masuk rumah mewah dan mobil mewah. Entah apa pekerjaannya. Kalau direktur cukup



dengan mempunyai lap-top dan duduk di meja-kursi besar. Hampir tak ada lagi sinetron yang mengemukakan kesederhanaan dan perjuangan hidup untuk tujuan mulia. Konsumerisme ditampilkan dengan bolak-balik ke toko dan membawa belanjaan dalam tas yang besar-besar.

Selain kemewahan, perasaan dendam sangat dipentingkan, dibesar-besarkan, padahal, orang Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah dan pemaaf. Sekarang semua kesan itu telah hilang. Di sini akan ditampilkan salah satu sinetron yang mewakili sinetron lainnya dalam penggambaran pembalasan dendam, yaitu sinetron "Puteri yang ditukar" yang ditayangkan oleh RCTI pada tahun 2010-2011. "Puteri yang ditukar" adalah ceritera tentang dua bayi yang dipertukarkan dengan tujuan agar mereka tidak mengenal orang tua kandungnya, kedua keluarga itu akan terus saling membenci. Si penukar bayi berharap agar kedua keluarga itu akan terus bermusuhan. Sebenarnya, seperti juga dalam sinetron lainnya, alasan adanya dendam kesumat itu tidak begitu jelas. Memang, masalahnya adalah cinta segi tiga. Namun, setelah masalah cinta itu selesai, salah satu pihak telah dapat memperistri si wanita yang diperebutkan, dendam tidak habis-habisnya .

Pembalasan dendam yang paling ringan adalah menculik, memasukkan tawannya ke dalam ruang sekapan, dan menyiksa. Perasaan dendam dapat mendorong orang untuk berbuat apa saja, termasuk membuang orang di dalam mobil ke dalam jurang, menaruh orang di derek dan menggantungnya tinggi-tinggi, atau menguburnya hidup-hidup. Tindakan meracuni orang, membakar rumah, bahkan mencelakakan orang yang sakit parah dan terbaring di rumah sakit, menutup mukanya dengan bantal atau menyuntikkan cairan racun ke dalam selang infus, juga sudah biasa dipertunjukkan. Banyak lagi peristiwa kejahatan yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa hal

itu bisa dilakukan oleh pemuda yang cakap dan wanita muda yang cantik. Betapa kuatnya perasaan benci yang dipelihara dan dipupuk.

Selanjutnya banyak sekali kelicikan, keculasan dan pengkhianatan. Kejahatan seperti ini tak tampak, karena dikemukakan dengan halus, tetapi akibatnya justru sangat menyakitkan. Selain itu, selalu saja ditunjukkan dalam sinetron (dalam berbagai sinetron lain) orang yang mencuri dengar pembicaraan orang lain, kemudian mempergunakan apa yang didengarnya itu untuk kepentingan dirinya, misalnya memfitnah dan mengadu domba pihak-pihak yang berseteru. Singkatnya, dalam sinetron bukanlah kasih sayang yang ditunjukkan, melainkan perasaan benci dan dendam yang menguasai keseluruhan ceritera.

Sementara itu, tindakan menampar seringkali dipertontonkan, seakan-akan si pemain sudah mampu berakting kalau sudah bisa menampar. Memaki-maki orang adalah salah satu ciri kegagahan juga. Entah hal itu dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita atau sebaliknya. Bisa juga dilakukan oleh orangtua pada anaknya, bahkan yang “mengagumkan” dilakukan oleh seorang anak pada orangtuanya. Pertunjukan kekurangajaran, kepongahan, tidak adanya penghargaan pada orang yang lebih tua, sudah lazim dalam sinetron. Syukurlah, masih ada sinetron yang bernafaskan Islam seperti “Tukang bubur naik haji”. Juga masih ada sinetron yang menggambarkan penderitaan anak-anak kecil yang sudah tidak mempunyai bapak dan ditinggalkan oleh ibunya yang mengalami amnesia, berjudul “Kutunggu ibu di stasiun” (Indosiar). Juga ada sinetron yang menampilkan seorang bayi yang ditiptikan pada seorang laki-laki yang mengalami keterbelakangan mental, yang diberi judul “Aku sayang papa” (juga Indosiar). Akan tetapi, film-film seperti ini tampaknya sangat langka.

### **c. Bidang politik**

Bidang ini juga sangat ramai dengan gonjang-ganjing berita tentang permainan politik. Baru-baru ini, kita telah melalui pemilihan anggota legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, rakyat Indonesia bisa diacungi jempol. Bidang politik, terutama mengenai percaturan politik, sangat erat kaitannya dengan budaya. Dalam hal ini sikap para pemimpin maupun anggota partai, sikap para pemilih, dan sebagainya tercermin dalam budaya. Beberapa tahun yang lalu, kita melihat mereka gontok-gontokan, saling mencerca dan saling menantang. Namun kali ini hal tersebut tampaknya tidak sangat tajam lagi. Tentu saja di sana sini masih banyak pidato dan ucapan yang memanasi-manasi, bahkan menghasut, tetapi kewaspadaan militer di sini dapat dipuji, sehingga tidak tampak peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh pencalonan Capres dan Cawapres yang hanya terdiri dari dua kubu.

Kita tahu, bahwa korupsi hidup di mana-mana. Semua lapisan masyarakat terkena wabah ini. Mulai dari menteri, pemimpin partai, hingga lurah, bahkan juga para artis. Namun, kita tidak perlu merasa pesimis secara berlebihan. Budaya Indonesia masih tampak dalam sikap Presiden terpilih yang baru, yaitu Jokowi. Di tengah-tengah perseteruan antara kedua capres dan cawapres serta datangnya kemenangan ke pihak Jokowi, di tengah kemarahan atas kemenangan pihak lawan, di antara suara-suara yang mempertajam perseteruan, tiba-tiba dalam salah satu pidatonya, Jokowi menyebut dan memperlakukan Prabowo sebagai sahabatnya.

Bagaikan api yang disiram air, keadaan yang memanasi segera menjadi dingin. Kata-kata Jokowi terasa sejuk. Demikianlah budaya Indonesia. Kata-kata yang sederhana saja bisa menjadi kata-kata “sakti” yang bisa mengatasi keadaan tak nyaman, yang sebenarnya

dapat berbuntut panjang dan membahayakan. Kata-kata yang tidak tepat bisa memperuncing keadaan, sebaliknya sikap dan kata-kata yang santun dapat meredam “api” kemarahan. Ya, inilah budaya Indonesia yang sedang menghadapi “krisis”.

**Dapat dikatakan bahwa kebudayaan Indonesia masa kini memang sedang krisis.** Kita telah melihat apa yang oleh peneliti dianggap sebagai “krisis kebudayaan”. Mendiagnosa penyakit adalah hal yang penting, tetapi kita tak bisa berhenti sampai di sini. Pengobatannya lebih penting lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya?

Apakah dengan menyelenggarakan matakuliah wajib “Anti korupsi” (*Kompas*, 28 Juli 2012) di Perguruan Tinggi, korupsi bisa diatasi atau setidaknya, berkurang? Memang, “pemberantasan korupsi perlu peran semua pihak”, tetapi dalam hal ini saya tidak begitu optimis. Berapa banyak lulusan fakultas hukum dari semua Perguruan Tinggi di Indonesia. Mereka tentu paham sekali tentang hukum korupsi, bahkan bila ada kesempatan, mungkin pengetahuannya itu digunakan sebagai tameng untuk mengelak dari jeratan hukum. Selain itu, bukan maksud saya berbasa-basi, tetapi sebenarnya kita sudah mempunyai landasan ideologi yang kuat, yaitu Pancasila. Namun, ideologi adalah sesuatu yang abstrak. Meskipun hal itu telah ditanamkan sejak dini, yaitu pada taman kanak-kanak hingga penataran bagi orang-orang tua, tetap saja hanya kulit luarnya, hafalannya saja yang masuk ke dalam otak. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Entah sudah berapa banyak biaya yang digunakan, berapa banyak keringat yang mengalir, tenaga dan waktu yang tercurah untuk menatar pegawai negeri, pegawai swasta, namun menurut berita baru-baru ini, bahwa ada seorang calon bupati yang tidak hafal Pancasila. Hafal saja pun tidak, apalagi memahaminya, jauh lagi dari menerapkannya. Meskipun demikian sampai saat ini

masih ada saja pejabat, wakil menteri Pendidikan bidang Kebudayaan, yang akan memasukkan "kebudayaan yang membangun karakter bangsa" dalam kurikulum Pendidikan.<sup>14</sup> Dia menganggap bahwa kurikulum yang sudah penuh sesak itu masih perlu ditambah lagi dengan pelajaran tentang karakter bangsa, padahal sebagaimana telah dikatakan di atas, menurut pengalaman, hal itu akan sia-sia belaka.

Jadi, apa yang dapat kita lakukan sekarang? Kuncinya hanya ada dalam diri kita sendiri, yaitu tekad untuk mengakhiri "krisis" kebudayaan ini. Tentu saja hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lagi pula, tak mungkin kita mengembalikan apa yang telah hilang. Meskipun demikian, sedikit demi sedikit kebobrokan bisa dikurangi kalau kita menyadarinya. Kita dapat memperbaiki apa yang ada dalam jangkauan kita masing-masing. Hal penting dan perlu diingat adalah bahwa semua ini berlandaskan **kejujuran dan budaya malu**, yang telah lama hilang.

---

14 Kompas.com.26/10/2011



## Bab VII

# KRISIS KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL YANG DIABAIKAN<sup>1</sup>

*Parwatri Wahjono*

### Abstrak

Krisis kepemimpinan merupakan salah satu kemerosotan moral yang berkaitan dengan watak, karakter, yang dapat menyebabkan hilangnya jati diri bangsa. Masalah karakter bangsa sesungguhnya telah banyak dan sering dibicarakan dalam berbagai seminar, sarasehan, diskusi, dan dimuat dalam berbagai media. Masalah itu sejak dahulu telah muncul. Sehubungan dengan eksistensi berbagai etnik dengan masing-masing karakternya di wilayah Nusantara ini, telah disadari, dan mulai ditangani oleh para *founding father* melalui pendidikan *nation and character building* pada waktu beliau-beliau itu hendak melepaskan diri dari belenggu penjajahan, hendak menjadikan diri sebagai satu bangsa yang merdeka, yang bersatu dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, setelah lebih dari setengah abad menjadi bangsa yang merdeka, dalam perjalanannya mewujudkan cita-cita negara adil sejahtera, ternyata mengalami keterpurukan dilanda pelbagai krisis: krisis moneter, jati diri, moral. Dan krisis moral inilah yang paling sulit diatasi.

---

1 Tulisan ini bersumber dari karangan yang terdapat dalam Daftar Pustaka dan tulisan penulis yang dikembangkan.

Kata Kunci: krisis kepemimpinan, kemerosotan moral, karakter bangsa, *nation and character building*, krisis moral.

## PENDAHULUAN

Banyak opini, banyak teori, dilihat dari pelbagai sisi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, tetapi solusi yang tepat untuk diimplementasikan masih belum nyata. Penulis pun telah mengangkat tema pendidikan karakter/moral dalam berbagai makalah dengan mengambil sumber karya sastra (sastra etnik/ *wulang*) Jawa Kuna, Jawa klasik, tradisi adat Jawa, wayang, misalnya, Ajaran Rama kepada Bharata dalam *Kakawin Ramayana Sarga III*, bait 52-85 (UI, 1975), yang dalam sastra klasik Jawa digubah oleh R.Ng. Jasadipura sebagai *Sastracetha* dalam *Serat Rama; Asthabrata*, ajaran Rama kepada Wibhisana dalam *Kakawin Ramayana Sarga XXIV*, yang dijadikan pedoman bagi para pemimpin pemerintahan; Dharma Ksatria seperti yang diajarkan oleh Patih Suwanda dalam *Kakawin Arjunawijaya* dan Transformasinya ke dalam Sastra Jawa Klasik; *Serat Arjunasasrabahu* (UI, 2005); *Nilai-nilai Budi Pekerti dalam Wayang: Dharma Ksatria dan Dharma Wanita dalam Pewayangan* (Kongres Pewayangan Jogja, 2005); *Serat Wulang dari abad XIX: Serat Candrarini. Suatu Kajian Budaya* (UI, 2004); *Ungkapan-Ungkapan dan Ajaran Jawa: Kearifan dalam Berdemokrasi dalam Budaya Lokal* (UNY, 2005); *Usaha Pembentukan Watak Bangsa lewat Pemahaman serta Penanaman Budi Pekerti dan Adat Istiadat Jawa* (Orasi Pengukuhan GBUI, 2007); *Bahasa sebagai sarana Pelestarian Adat Istiadat Jawa* (UI, 2008); *Ruwatan dalam Berbagai Budaya* (UGM, 2009); dan “Sumbangan Adat Istiadat Jawa dengan Bahasa Jawa sebagai Sarananya dalam Pembentukan Watak Bangsa” (DGBUI, 2010).



Selain itu, telah banyak literatur /penerbitan hasil penelitian para sarjana, budayawan, pejabat, yang menghasilkan berbagai cara untuk mengatasi kemerosotan moral bangsa ini, baik sebagai ajaran untuk dihayati secara pribadi maupun berupa kurikulum pendidikan yang dapat diimplementasikan bersama sebagai usaha untuk memecahkan permasalahan bangsa yang rumit ini, antara lain, *Sabda Pandhita Ratu, Peranan Adat Tata Cara Jawa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Tengah* (Sujamto), *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa* (Suwardi Endraswara), dan *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan* (Nurul Zuriah).

Dalam tulisan ini, akan dipaparkan masalah belum mampunya bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita menyejahterakan rakyat, menjadikan Indonesia ini negara yang makmur, rakyat *ayem tentrem* lahir batin jasmani rohani, *wong cilik bisa gumuyu*, dan bagaimana usaha mengatasinya, dalam kaitannya dengan ajaran-ajaran, ungkapan-ungkapan, dan adat istiadat Jawa yang penuh dengan kearifan. Bagaimana membentuk watak dan berbudi pekerti luhur bagi para pemimpin, orang tua, dan generasi penerus merupakan syarat mutlak tercapainya cita-cita rakyat adil makmur sejahtera.

## I

### **Kesenjangan Sosial, Ketidakharmonisan, Kegoncangan Kosmis**

Seperti kita ketahui, keadaan bangsa Indonesia kini sangat memprihatinkan. Betapa tidak. Kehidupan rakyat tidak tenang, dari musibah yang satu datang musibah yang lain: banjir, tsunami, gunung berapi, wabah penyakit; para pejabat yang sudah mati rasa menghalalkan segala cara untuk menumpuk harta dengan jalan korupsi; kekerasan terhadap TKW; kekerasan dalam keluarga;

kejahatan di mana-mana; teror; dan tiadanya keadilan bagi rakyat kecil. Keadaan negara yang sering digambarkan sebagai zaman edan, yakni zaman ketika orang kehilangan kepercayaan diri, yang tidak kuat imannya akan mengikuti bujukan setan, lebih mementingkan diri sendiri, tidak peduli akan kesengsaraan orang lain. Namun, yang tabah dan tawakal akan selalu selamat seperti yang digambarkan dalam bait pertama dari *Zaman Edan*-nya Kyai Ranggawarsita:

*Amenangi zaman edan, ewuh aya ing pambudi, melu edan ora tahan,  
yen tan melu anglakoni, boya keduman melik, kaliren wekasanipun,  
dilalah kersa Allah, begja-begjane kang lali, luwih begja kang  
eling lawan waspada (Kalatida I,7).*

Lalu bagaimana rentetan kejadian yang melanda bangsa dan negara tercinta ini? Bahwa kemelut yang dialami oleh bangsa dan negara ini tidak lain disebabkan oleh kemerosotan moral. Inilah dampak globalisasi, demokrasi, dan HAM yang kebablasan!<sup>2</sup>

*Zaman kalatidha, kalabendu*, adalah zaman ketika orang *tidha-tidha*, 'ragu-ragu', seperti yang dikatakan bait zaman edan di atas. Zaman orang diombang-ambingkan oleh perasaan cemas menghadapi hidup dengan situasi bangsa yang tidak menentu, penuh korupsi, penuh bencana sehingga timbul krisis kepercayaan. Hanya mereka yang *eling* dan waspada saja yang akan terhindar dari kegoncangan batin. Orang yang *narima*, bahwa dirinya sebagai bagian dari anak bangsa, sedang dalam ujian mengendalikan diri. Harus selalu ingat kepada Tuhan dan waspada akan segala tipu muslihat. *Kalabendu*,

---

2 Periksa: Parwati Wahjono, "Usaha Pembentukan Watak Bangsa lewat Pemahaman serta Penanaman Budi Pekerti dan Adat Istiadat Jawa", Pidato Pengukuhan Guru Besar UI 2007.

artinya zaman datangnya *bebendu*, ‘hukuman yang berupa kesengsaraan’, karena sebagai manusia tidak menjalankan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Tuhan, karena melanggar hukum alam, hukum sebab akibat, hukum karma.

Zaman *kalabrastha*, ialah ‘zaman ketika kita semua harus bersama-sama **membasmi**’, **memberantas** segala tindak kejahatan, kekerasan, korup, narkoba, zaman yang kini sedang dialami bangsa dan negara kita tercinta ini. Zaman ini menuntut semua komponen bangsa, segenap rakyat tiada kecualinya harus *cancut taliwanda*, **bersatu** menyingsingkan lengan baju ikut berpartisipasi menegakkan keadilan dan kejujuran, sehingga segala macam krisis yang kita alami menjadi normal kembali. Dengan menyadari dan mengenali jati diri bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnik beserta kekayaan buminya, keanekaan adat istiadat budayanya dengan masing-masing bahasanya, Bhinneka Tunggal Ika! Hanya dengan bersatu, dengan persatuan kita akan kokoh, ‘kuat menghadapi segala rintangan’, *rawe-rawe rantas, malang-malang putung*.

Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia kiranya seperti yang dilukiskan oleh ki dalang dalam *jejer* (adegan pertama) suatu kerajaan: gambaran zaman *kalasuba*, ‘zaman yang serbaindah’, zaman keemasan.

*Dhasar nagari panjang punjung, pasir wukir loh jinawi gemah  
ripah karta tur raharja; panjang dawa pocapane, punjung luhur  
kawibawane, pasir samodra, wukir gunung, dene nagari ngungkurake  
pagunungan, ngeringake pasabinan, nengenake banawi, ngayunaken  
bandaran gedhe; loh tulus ingkang tinandur, jinawi murah kang sarwa  
tinuku, gemah kang lumaku dagang rainten dalu tanana pedhote,  
labet tanana sangsayaning margi, aripah janma ing amanca kang sami  
griya salebeting praja, jejel pipit pangrasa aben cukit tepung taritis,  
papan wiyar katingal rupak saking rejaning nagari; karta, kawula ing*

*padhusununan padha tentrem atine, mungkul pangulahing tatanen; ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tanana cinancangan, raina aglar ing pangonan, yen bengi mulih marang kandhange dhewe; raharja tebih ing parangmuka, dene para mantri bupati padha kontap kautamane, bijaksana limpad ing kawruh, putus marang wajib pangrehing praja, tansah ambudi wewahe kaluhuraning nata; dhasar nagara gedhe obore, padhang jagade; dhuwur kukuse adoh kuncarane, boten ing tanah Jawi kemawon ingkang sumuyud, sanadyan ing tanah sabrang kathah ingkang sumawita, tanpa kalawan karananing bandayuda, mung kayungyun popoyaning kautaman, bebasan ingkang celak manglung, ingkang tebih tumiyung, sami atur putri minangka panungkul; ing saben antara mangsa asok bulu bekti glondhong pangareng-areng, peni-peni raja peni, guru bakal guru dadi.*

(M.Ng. Nojowirongko al. Atmotjendono, 1954:65-66)

(Negara panjang punjung pasir wukir loh jinawi, panjang punjung:

Panjang dawa pocapane, panjang maksudnya selalu menjadi pembicaraan, banyak disebut-sebut, menjadi buah bibir; punjung 'menjulung' maksudnya luhur kewibawaanya; pasir wukir: pasir adalah samudra, wukir artinya gunung, maksudnya negara yang tata letaknya menghadap ke samudra, membelakangi pegunungan, di sebelah kiri adalah persawahan, sebelah kanan sungai, di depannya adalah bandar besar; loh artinya subur, semua yang ditanam tumbuh, maksudnya pertanian berhasil, jinawi maksudnya segalanya murah, rakyat mampu membeli; gemah menggambarkan perekonomian lancar, siang malam tiada putusnya karena tak ada aral melintang; aripah maksudnya banyak orang (asing) berdiam di negara itu jejel apipit, aben cukit tepung taritis sehingga penuh sesak, 'rumah berdesakan seakan beradu atap' sehingga tempat yang luas kelihatan sempit; karta maksudnya rakyat perdesaan tentram hatinya, bertani dengan tekun, binatang peliharaan kerbau sapi, ayam itik dibiarkan sedari pagi hari di tempat penggembalaan tanpa diikat, sore hari pulang ke kandangnya masing-masing; raharja maksudnya jauh dari peperangan karena para mantri bupatinya termasyhur utama, bijaksana pandai dalam ilmu pengetahuan, ahli dalam

## KRISIS KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL

mengendalikan pemerintahan, selalu berusaha menambah keluhuran sang raja (baca: bangsa dan negara).

Inilah sungguh negara yang besar kekuasaannya, terang benderang dunianya, Menjulang tinggi kemasyhurannya, tersohor sampai jauh tidak hanya di tanah Jawa saja raja-raja bawahannya, bahkan raja negeri seberang pun banyak yang tunduk mengabdikan, tanpa dilawan dengan peperangan, hanya karena pesona kemasyhuran keutamaan sang raja. Peribahasanya yang dekat menjulurkan kepala, yang jauh menunduk tunduk, menghaturkan putri sebagai tanda takluk, setiap antara musim menghaturkan upeti mas perhiasan, bahan mentah maupun barang jadi).

Demikian gambaran negara seperti yang kita idam-idamkan, negara yang subur makmur, *ayem* 'tenteram damai', sejahtera lahir batin, *wong cilik bisa gumuyu*, 'rakyat kecil dapat tertawa menikmati hidup bahagia'. Gambaran di atas menunjukkan betapa keadaan alam seisinya sangat harmonis. Alam yang subur dikelola dengan tekun oleh tangan-tangan dingin penuh kasih dan rahmat Tuhan. Rakyat yang tenteram karena tidak ada orang jahil yang mencuri benda miliknya maupun hewan ternak yang dibiarkan di padang rumput,<sup>3</sup> murah sandang murah pangan, perekonomian lancar, tidak ada penjahat sehingga rakyat merasa tenteram. Dasar watak bangsa yang *tuna satak bathi sanak*: 'lebih mengutamakan persaudaraan daripada mengambil keuntungan' yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri.<sup>4</sup>

---

3 bandingkan: ternak para korban Merapi yang disambar orang, sangat keterlaluhan!,

4 bandingkan: para koruptor, para pengambil komisi, para pemodal besar diberi izin, sebagai contoh, di sekitar rumah penulis, ada di salah satu jalan lurus sepanjang jalan utama di depan beberapa kompleks perumahan, berdiri sejumlah kira-kira 11 mini market terkenal dan beberapa mini market lainnya, dan satu cabang supermarket terkenal/ besar, sehingga rakyat kecil di kampung sekelilingnya tidak mendapatkan kesempatan hidup dengan berdagang!. Persaingan antara sesama pemodal besar yang tega memati-kan warung rakyat kecil!.

Gambaran negeri yang tenteram damai menandakan betapa watak penduduknya: rukun, damai seperti yang diutarakan oleh Franz Magnis Suseno dalam bukunya *Etika Jawa* (1985: 38-81), bahwa rukun dan hormat merupakan dua kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa. Rukun menandakan bahwa masyarakat dalam kondisi selaras, tenang dan tenteram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam arti untuk saling membantu, bahu-membahu, gotong royong dalam meniti kehidupan sebagaimana layaknya watak dan kehidupan masyarakat tradisional. Itulah gambaran idaman zaman *kalasuba*, 'zaman yang indah'.

Untuk menghindari konflik, saling menghormati satu sama lainnya adalah cara yang dilakukan, yang menjadi dasar kehidupan orang Jawa. Tata krama Jawa, seperti unggah-ungguh yang diperkenalkan mulai pada usia dini, merupakan salah satu usaha, yakni memberi bekal untuk hidup bermasyarakat pada masa dewasa. Seorang yang santun, rendah hati, akan lebih mudah diterima oleh lingkungan, lebih bisa gaul, luwes, dan hal ini sangat banyak manfaatnya. Misalnya, komunikasi yang baik akan mudah mendapatkan banyak teman, relasi, dan mencapai apa yang diinginkan.

Bila kita pikirkan, apa gerangan yang menyebabkan watak dasar manusia yang baik berubah 180 derajat menjadi manusia yang tanpa hati nurani, tanpa tenggang rasa/*tepa slira*? Kehidupan yang sulit, kesenjangan sosial, *iming-iming* 'sesuatu yang memancing, menggelitik orang menjadi menginginkan sesuatu, menjadi keluarga yang berkecukupan/mewah sebagaimana dalam alam "semu", seperti yang terlihat dalam tayangan di layar kaca, kehidupan para selebritas, iklan-iklan dari makanan, minuman sampai rumah mewah, ini kiranya masalah yang menimbulkan krisis moral bangsa ini. Masyarakat yang dahulu memiliki watak

dasar menjauhi *Ma lima*, kini dengan semakin subur tumbuhnya sarana fisik peribadahan, seperti masjid, musola yang menjamur dan kesadaran tumbuh kembangnya pengajian di mana-mana, seharusnya fenomena itu akan lebih kuat membantu mewujudkan kedamaian dan ketenteraman kehidupan masyarakat. Namun, pantas disayangkan di lain pihak kemaksiatan dan kejahatan seperti teror, (justru lewat saluran peribadahan), dsb, semakin menakutkan. Perampokan, penipuan kecil sampai besar, lewat segala cara, hipnosis, perkosaan, penculikan. Terutama dengan pesatnya kemajuan teknologi modern: ponsel, *facebook*, *twitter*, dsb. cukup menjadikan was-was para ayah ibu yang mempunyai anak remaja, ABG.

*Ma lima: madat, main, madon, maling, mateni*, merupakan lima hal yang merupakan sumber penderitaan manusia yang disebabkan ketidakmampuan diri mengendalikan hawa nafsu. Penjabaran *Ma Lima* adalah 1) *madat*, dahulu dikenal dengan istilah *nyeret*, 'menghisap candu', sekarang narkoba, mabuk-mabukan, merupakan kesenangan yang membuat ketagihan, membuat mental tidak berdaya, yang sangat berbahaya. Untuk memiliki dan menghisapnya, dilakukan segala cara. Untuk mendapatkannya, manusia sampai hati mencuri, memaksa, merampok, dengan segala tindak kekerasan. Ini membuat sengsara manusia, karena menjadikan hidup ini tidak aman dan ini pula yang menjadi sumber kehancuran bangsa 2) *Main* dahulu istilahnya *kasukan*, artinya 'berjudi', juga merupakan kesenangan yang membuat orang lupa diri, ketagihan, tidak akan berhenti, menuntut menang, uang kembali, tetapi justru menjadikan utang bertumpuk, *dhedhel dhuwel*, 'compang-camping', semuanya hilang berpindah tangan, akhirnya 'melarat' dan keluarga menjadi *kesrakat*; 3) *maling*, rampok, korupsi, kolusi, nepotisme adalah

perbuatan yang menjadikan masyarakat menderita, sengsara, tak ada lagi ketenteraman. Lagi-lagi kekerasan, tempat manusia menjadi kehilangan nurani, tega kepada sesama, tak ada rasa belas kasih; 4) *Madon*, artinya main perempuan. *Madon* dan poligami adalah sumber bencana bagi keluarga, tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman kasih sayang dalam rumah tangga. Sulit dipercaya kalau wanita bahagia hidup tenteram damai dalam permaduan; dan 5) *Mateni*, artinya ‘membunuh’, jelas membuat orang lain sengsara. ‘*Mateni* bisa berarti menghilangkan nyawa, menghilangkan mata pencarian (*mateni pangupajiwa*), *karier* dengan memfitnah dan memecat.

*Ma lima*, kelima hal tersebut menunjukkan gambaran watak orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, jauh dari pekerti luhur, dekat kepada ajakan ke liang kubur, mengganggu ketenteraman masyarakat. Watak nista ini semestinya di jauhi. Manusia sebaiknya menjalankan hal-hal yang menunjukkan watak madya dan utama.

Perekonomian yang sehat, maksudnya kerja sama yang baik, jujur, adil, saling memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, sesuai dengan watak gotong-royong, saling menghargai dan menghormati, kooperatif. Kiranya bentuk perekonomian demikian yang sebenarnya cocok untuk bangsa kita yang watak dasarnya gotong royong, *tuna satak bathi sanak*, ‘rugi uang (kira-kira 10 sen) tetapi tambah saudara’, ekonomi dan Demokrasi Pancasila, yakni saling menghargai dan tidak menyeleweng ke mana-mana. Ini berbeda dengan watak kaum kapitalis yang *tegelan*, ‘sampai hati’, bahkan memeras habis kekayaan bumi kita.

Alam demokrasi yang diinginkan adalah alam Demokrasi Pancasila, alam dengan para pemimpin benar-benar menghargai rakyat kecil, dengan memperhatikan dan peduli kepada kepentingan



rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi rakyat kecil, bukannya lebih membela kelas atas! Demokrasi yang sekarang terjadi ini adalah demokrasi yang dibelok-belokkan bukan di jalur yang lurus, berbelit-belit, sampai kebablasan, sedikit-sedikit berlindung kepada HAM! HAM bagi siapa? Ham bagi para atasan/pejabat, koruptor, bukannya HAM bagi rakyat kecil yang karena kesalahan kecil demi menggantal perut anak-anaknya sehari harus dibayar dengan meringkuk dua bulan penjara, sedangkan koruptor miliaran hanya mendekam beberapa tahun di hotel prodeo (yang mewah!). Demokrasi harus diluruskan, harus yang sesuai dengan tujuan menyejahterakan rakyat. Hak dan kewajiban mesti seimbang. Ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban sebagai manusia yang beradab sebagai warga Indonesia, yaitu warga yang menjunjung tinggi asas Pancasila. Persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, dengan dipimpin oleh acuan yang jelas, yang lurus, tidak dibelok-belokkan, yang jujur, Demokrasi Pancasila, demokrasi yang harus selalu diingat sila-silanya: sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa*; sila kedua *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*; sila ketiga *Persatuan Indonesia*; sila keempat *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan*; sila kelima *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Kiranya tidak perlu dijelaskan di sini tentang makna masing-masing sila itu. Bila pemerintahnya, para pemimpinnya dari atas sampai ke bawah benar-benar menjalankan Demokrasi Pancasila, akan terciptalah kondisi yang aman, rukun damai, dan dengan demikian rakyat sejahtera, negara sehat kuat.

Demikianlah kondisi negara dewasa ini, gambaran yang berlawanan dengan yang dicita-citakan seperti yang selalu menjadi *pocapan* ki dalang pada *jejeran*/adegan pertama: *negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi, tata tentrem karta raharja*, ternyata

jauh panggang dari api. Keadaan yang merupakan dampak globalisasi, yang terbentang jurang kesenjangan kehidupan antara yang kaya dan rakyat kecil yang miskin sedemikian dalamnya. Empunya jabatan demi menumpuk kekayaan untuk tujuh turunan, melakukan korupsi, menjarah kekayaan negara dengan menghalalkan segala cara. Hukumannya tidak seberapa. Sementara itu, *wong cilik* yang miskin demi menghidupi anak-anaknya terpaksa mencuri barang yang tidak *mbejaji*, yang ‘tidak ada harganya’ bagi orang lain, tetapi mendapat hukuman yang tidak sebanding! Keduanya maling, tetapi dalam skala dan sebab yang jauh berbeda! Tidak ada pekerti luhur, tidak ada keteladanan, tidak ada yang pantas menjadi anutan. Segala macam krisis menyebabkan krisis moral dan hilangnya jati diri sebagai bangsa. Krisis membawa perpecahan antarsuku, antaragama, krisis yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Di sini kelihatan peran nyata kepemimpinan, pemimpin yang tidak dapat diteladani, pemimpin yang tidak bisa memberikan ketenteraman dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pemimpin yang *keblinger*, ‘keliru, tersesat’, lupa akan amanah sebagai pemimpin, sebagai wakil rakyat, pemimpin yang “hanya” manusia biasa yang *sulap gebyaring donya*, ‘silau akan gemerlapnya dunia’.

Semua manusia itu dapat mudah lupa, lupa diri. Oleh karena itu, manusia perlu sering, bahkan setiap hari diingatkan agar selalu *eling*, sadar. Orang *Jawa* (baca: Indonesia dari suku apa pun) dalam kehidupan sehari-hari masih sering menggunakan ungkapan-ungkapan, yang spontan, yang sudah menjadi kebiasaan dalam bertutur, yang oleh orang yang masih berjiwa *Jawa* memang masih dilaksanakan, dihayati dalam hidupnya. Namun, mungkin oleh sebagian orang yang sudah “lupa” *jawanya*, *wis ora jawa*, *wis ilang jawane*, tinggal basa-basi saja, ‘sudah benar-benar hilang, sudah ditanggalkan’.

Banyak ungkapan dan piwulang yang mengandung kearifan lokal. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita yang berupa ungkapan-ungkapan, adat tata cara, ajaran, *piwulang* tentang pekerti luhur yang turun-temurun *dipepetri, dileluri*, ‘dihormati, dipelihara’, dilestarikan dengan dilaksanakan dan dihayati, dan ini ternyata membawa berkah keselamatan, ketenteraman, dan kedamaian. Kiranya nilai-nilai luhur ini yang perlu selalu kita semua ingat, kita saling ingatkan, diingatkan kepada sesama, kepada masyarakat luas, kepada para pemimpin, karena yang namanya manusia itu mudah lupa, seperti yang terjadi sekarang ini, lupa dan *lirwa*, “melalaikan” hak dan kewajiban sebagai manusia humanis, manusia yang beradab.

## II

### Kepemimpinan dan Kearifan Lokal

Pepatah mengatakan raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Maksudnya seorang pemimpin yang adil akan disenangi, disegani, dan dihormati, sedang pemimpin yang tidak adil akan dibantah, ditentang, dan dilawan. Dari paparan di muka, tentang keadaan negara kita tercinta, Indonesia kini nyata-nyata memerlukan sosok-sosok pemimpin yang bisa dijadikan anutan. Pemimpin yang berkualitas ***tanggap, tatak, dan tanggon***. Artinya tanggap akan situasi dan cepat merespons, *tatak* ‘kuat, kokoh, percaya diri, tidak punya rasa khawatir’, *tanggon*, ‘andal, dapat dipercaya’. Pemimpin yang paham akan menjunjung tinggi dan bertanggung jawab atas asas Negara Republik Indonesia, ***saka guruning Negara***, yakni **UUD 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika**, ‘empat pilar negara’. Pemimpin bersama-sama dengan seluruh warga mematuhi undang-undang dan hukum

negaranya, menjalankan kehidupan bersama sebagai manusia yang beradab, berperilaku kemanusiaan, religius, berjiwa Pancasila. Sebagai anak bangsa yang multikultural dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hendaknya para pemimpin dapat menjaga persatuan dan kesatuannya sebagai satu bangsa: bangsa Indonesia yang terdiri dari pelbagai suku, bahasa, budaya, dan adat-istiadat, dapat mempertahankan kebhinnekaannya itu agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap eksis. Negara kita dewasa ini memerlukan pemimpin yang berkepribadian Pancasila, sehingga akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang betul-betul akan mengabdikan rakyat, bangsa, dan negara dengan menjalankan tugas/kewajibannya sebagai warga negara bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan selanjutnya sejahtera lahir batin, *tata tentrem kerta raharja*.

Banyak teori dan acuan mengenai kepemimpinan yang semuanya baik, ideal. Namun, kepemimpinan itu gagal karena teori-teori tersebut tetap menjadi teori saja, tidak pernah mulus dilaksanakan oleh para (yang menjadi) pemimpin, walaupun sebenarnya pemimpin tersebut orang-orang pilihan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya terutama alasan politis. Teori komunikasi politik: etos, yakni integritas yang tinggi dan intelektualitas, logos atau penalaran, serta patos yaitu pengendalian emosi, pun tidak dapat berjalan karena masing-masing pemimpin mempunyai masalahnya sendiri yang kompleks. Alhasil karena tidak adanya kesadaran Pancasila dan sikap egoistis yang terkait golongannya, kepemimpinan itu pun gagal. Ternyata yang diutamakan hanya **kekuasaan**. Para pemimpin itu lupa akan jati dirinya, lupa bahwa dirinya seorang anak bangsa yang beradab, yang memiliki bahasa dan budaya serta adat-istiadat yang luhur sebagai salah satu ratna mutu manikam kebinekaan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berjiwa

Pancasila. Para pemimpin yang *lirwa*, 'lalai' pada budayanya yang kaya akan nilai-nilai luhur. Pemimpin yang sudah **kehilangan roh bangsa Indonesia**.

Kearifan lokal Jawa mengatakan seorang pemimpin harus *berbudi bawa laksana*, artinya *berbudi, luber ing budi*, berhati mulia, bertindak dengan penuh kasih, penuh pengertian; *bawa leksana* 'melaksanakan seperti apa yang dikatakan', satunya kata dan perbuatan; *netepi Sabda Pandhita Ratu*, menaati watak seorang Pandhita ataupun Raja, 'apa yang dikatakan', *sabda*, harus terjadi; *tan kena wola-wali*, sekali saja terlontar dari mulut; tidak akan menjilat ludahnya. Pemimpin hendaknya seorang *satriya pinandhita*, berwatak ksatria dan juga pendeta. Darma ksatria adalah melindungi rakyat, memberi kesejahteraan dengan membasmi kejahatan, membela kebenaran. *Pinandhita*, berwatak pendeta, spiritual, berjalan di jalan Tuhan, berdarma tanpa pamrih. *Satriya pinandhita* yang *mamayu hayuning bawa*, 'yang membuat keselamatan dunia'. Pemimpin berkewajiban –sudah seharusnya berusaha– memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya: *aweh pangan kang kaluwen*, *aweh sandhang kang kawudan*, *aweh payung kang kodanan*, *aweh teken kang kalunyon*, 'cukup sandang pangan, memberikan keteduhan hati dengan perlindungan (hukum) dan memberi pegangan/arahan serta solusi yang tepat'.

Ajaran kepemimpinan yang di dalam khazanah sastra etnik Jawa disebut *sastra niti*, yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia karena pernah diperkenalkan dalam P4, adalah *Hashtabrata*. *Hashtabrata* adalah salah satu kearifan lokal yang berasal dari kitab *Kakawin Ramayana* (Sarga XXIV, bait 52-60), yang berarti delapan laku, atau perilaku, perwujudan watak atau sifat delapan dewa penjaga lokapala. Mereka itu adalah Hyang Indra, dewa hujan, yang memberi hujan merata kepada seluruh dunia; Hyang Yama

yang menindak tegas segala kejahatan yang mengganggu ketenteraman dunia; Hyang Surya yang memancarkan sinar kebaikan ke segenap penjuru; Hyang Candra yang bersikap manis dan lembut dalam bergaul dengan siapa pun; Hyang Bayu yang bertindak cepat penuh selidik dalam memelihara perdamaian; Hyang Kuwera yang berusaha dengan gigih dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan; Hyang Baruna yang berwawasan luas karena memiliki segala macam ilmu; dan Hyang Brama yang dengan penuh keberanian memberantas semua musuh. Agar para pembaca mudah mengingat hal itu, di sini penulis sadur dalam tembang macapat:

1. *Pemut marang kang para pemimpin,  
yogya bisa ngregem Hasthabrata,  
ingetrapken salamine,  
eka kadya Hyang Bayu,  
tatas titis denya maniti,  
adil parama arta,  
datan grusa-grusu  
tanpa enget sanak kadang,  
sapa salah mesthi seleh kapidana,  
mrih tentreming nagara (Dhandhanggendis)*

(Para pemimpin hendaknya ingat, sepantasnya dapat menguasai Hasthabrata dan melaksanakannya selamanya. Yang pertama seperti Hyang Bayu, dewa angin, yang bertindak tepat meneliti sampai tuntas, adil, tidak tergesa-gesa, tidak melihat saudara atau bukan, tidak pandang bulu, siapa pun yang bersalah tentu mendapatkan hukumannya. Inilah yang menjadikan negara tenteram).

- 2 *Kaping dwi yogya nulada,  
lakune Bathara Agni,*

## KRISIS KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL

*nglebur sawegung piala,  
kadurakan tan na keru,  
maling culika korupsi,  
tatas tapis kabeh lebur,  
guna sekti amiguna,  
yen den angge aminteri,  
bakal antuk pidana sumbut lepatnya (Sinom)*

(Yang kedua hendaknya mencontoh perangai Hyang Agni, dewa api. Ia melebur, memusnahkan semua kejahatan. Tidak ada yang tertinggal, pencuri, penjahat, korupsi, semuanya habis tumpas. Kepandaian bila dipakai untuk memperdayai/mencelakai orang lain akan mendapatkan hukumannya sesuai dengan kesalahannya).

3. Katri watake Hyang Arka,  
*paring daya panguripan wong sabumi,  
sadaya titah satuhu,  
kang gumlar aneng donya,  
gesaningira awit sunar kang lumintu,  
saben ari saput siti,  
trontong-trontong surup nganti (Pangkur)*

(Yang ketiga perilaku Hyang Arka, dewa matahari, ia memberi daya kehidupan semua makhluk yang terbentang di bumi, mereka semua hidup karena sinar cahayanya yang memancar setiap hari dari fajar terang tanah hingga sore hari).

4. *Sang Hyang Indra tuladha kang kaping catur,*

PARWATRI WAHJONO

paring toya anggesangi,  
janma sato miwah tuwuh,  
tanpa tirta tan na urip,  
bumi sawah kabeh kaclop (Megatruh)

(Teladan yang keempat Hyang Indra, dewa hujan, memberi air sumber kehidupan manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan. Tanpa air segala sesuatu tidak akan hidup; tanah, sawah, semuanya memerlukan air).

- 5 *Sasangka ku, weh padhang ing wanci dalu,  
Manis kang wadana,  
grapyak sumanak mrak ati,  
pra pemimpin yogya raket mring kawula (Pocung)*

(Bulan itu memberi terang di waktu malam. Hendaknya para pemimpin dengan budi bahasanya yang manis memberikan simpati kepada rakyat. Inilah watak kelima, dewa rembulan yang perlu diteladani).

- 6 *Ambegira Hyang Yamadipati,  
tanggap tatag tanggon,  
mring titah kang tindak salah gawe,  
tanpa tedheng sanggya denpejahi,  
pra durjana juti,  
tentrem nagri ngganggu (Mijil)*



## KRISIS KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL

(Teladan yang keenam adalah perilaku Hyang Yama, sang penguasa maut. Ia sigap menindak setiap orang yang berbuat kejahatan. Tanpa basa-basi dengan transparan memusnakan para penjahat yang mengganggu ketenteraman negara hingga tumpas).

7. *Kaping sapta Kuweraki,  
greget sengkut nambut karya,  
ngudi nagri gemah ripoh,  
sejahtera gesangira,  
saras panjang ingkang yuswa,  
tuhu para pemimpin ku,  
makmur sempulur rakyatnya (Asmaradana)*

(Yang ketujuh adalah perilaku Hyang Kuwera, dewa kekayaan. Ia selalu berusaha dengan gigih dan sungguh-sungguh meningkatkan kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat, agar sehat dan panjang umur).

8. *Hyang Baruna amekasi,  
pra pemimpin mbeg darana,  
lir samodra momot kamot,  
jembar sugih wawasannya,  
sanjata murih raharja,  
tumindak sareh tan grusu,  
begja mulya pra kawula (Asmaradana)*

PARWATRI WAHJONO

(Yang kedelapan hendaknya meniru perbuatan Hyang Baruna, dewa laut. Hendaknya para pemimpin bersifat sabar bagaikan samudra yang akomodatif, luasawasannya sebagai sarananya bertindak tidak tergesa-gesa memutuskan segala sesuatu sehingga rakyat bahagia).

Dalam sastra Jawa Baru, ajaran ini digubah ke dalam sastra wayang, lakon *Makutharama* (Siswoharsoyo 1954: 122-3). Delapan sifat yang harus dimiliki oleh seorang raja (baca: pemimpin negara) disebutkan sebagai berikut:

1. ambeging kisma, anggung murah ati marang sapa bae kang nyuwun dimurahi, sifat tanah/bumi bermurah hati kepada siapa pun yang mohon dimurahi;
2. ambeging dahana, tansah dadi panglebur, ambrastha marang sabarang tingkah kang nyulayani marang angger-anggering jagad, watak api selalu melebur, memusnahkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum semesta;
3. ambeging samirana, adil paramarta, kabeh sasana, sato janma tetuwuhan sayekti sinarta ing samirana, watak angin, adil, semua tempat, hewan, manusia serta tumbuh-tumbuhan diberi kesejukan;
4. ambeging tirta anggung ngutamakake rasa sapatdha-padha, jer tirta iku tansah awatak warata, watak air selalu mengutamakan rasa kebersamaan karena air selalu merata;
5. ambeging akasa, tansah momot amengku marang saliring kahanan, sifat angkasa selalu dapat mengatasi segala keadaan;
6. ambeging candra anggung madhangi satebaning bawana, watak rembulan menerangi seluruh dunia;

## KRISIS KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL

7. ambeging raditya tansah asung daya kekiyatan marang kabeh kang gumlar ing jagad, watak matahari selalu memberi daya kekuatan kepada segala yang terbentang di dunia;
8. ambeging kartika santosa ing budi, teguh ing tekad, dan prawira ing tandang, watak bintang berbudi teguh, tangguh, berperilaku satria.

Apabila pedoman bagi para pemimpin, Hasthabrata atau Makutharama, ini dilaksanakan oleh semua pemegang pemerintahan, pemimpin dari yang di atas sampai dengan yang di bawah, di pusat maupun di daerah, maka rakyat akan terbawa berperilaku baik dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari karena wibawa sang pemimpin. Dengan demikian niscaya tidak akan ada huru-hara; negara aman tenteram dan rakyat sejahtera seperti deskripsi ki dalang.

Sosok pemimpin yang diperlukan kini adalah pemimpin nasional, pemimpin yang mampu berintegritas, mampu menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan bangsanya, jujur dan bisa dipercaya. Sosok yang mempunyai visi, pemimpin yang mampu memimpin, dengan kematangan profesionalnya sehingga dapat mempertahankan kedaulatan negaranya. Sosok yang mau mengambil risiko pribadi demi menyejahterakan rakyatnya dengan keadilan dan kemakmuran. Pemimpin yang seperti dahulu, sungguh-sungguh menjadi patron, pengayom rakyat. Salah seorang putra bangsa, pahlawan nasional sejati, pendidik agung bangsa, adalah Ki Hadjar Dewantara. Sosok seperti inilah pemimpin yang dewasa ini diperlukan. Predikat pahlawan nasional sejati dan pendidik agung bangsa dapat kita cermati seperti tercermin dalam hal berikut.

Ki Hadjar Dewantara (R.M. Soewardi Soerjaningrat) dengan teman-teman beliau, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Dr. EFE Douwes

Dekker mendirikan Indische Party pada 5 September 1912 dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, demokratis serta kewarganegaraan yang tidak mempedulikan asal kebangsaannya, asal mengakui Indonesia sebagai tanah air dan kebangsaannya (Tauchid 1963:19). Di sini tersirat **benih-benih** yang kemudian pada 28 Oktober tahun 1928 lahir sebagai **Sumpah Pemuda**: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas ribuan pulau dari berbagai suku bangsa menjadi satu kesatuan: Bangsa Indonesia dalam wadah Tanah Air Indonesia. Beliau adalah perintis kemerdekaan nasional. Di sisi lain, sebagai pendidik agung beliau mendirikan lembaga pendidikan dan kebudayaan: Perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922, sebuah *paguron* dengan sistem *among* nya, *tut wuri handayani* yang terkenal itu. *Paguron*, tempat *maguru*, berguru, sebuah tempat hidup para penganut Taman Siswa, para guru dan siswa bersama-sama sebagai satu keluarga yang erat bersatu, *tusschen guru en siswa besaat geen ruimte*, tidak terpisahkan. Di sini kita tahu semangat **perjuangan dan nasionalisme**, **‘persatuan dan kesatuan’** dalam melawan penjajah.

Apa yang dicita-citakan Ki Hadjar adalah manusia dalam bahagia, masyarakat tertib damai. Hidup dalam bahagia artinya selamat lahirnya dan bahagia batinnya, dicapai dengan kecukupan sandang pangan keperluan jasmaninya, dan bebas merdeka jiwanya, bebas dari gangguan lahir dan batinnya, bebas dari ketakutan. Orang tidak akan merasa bahagia hanya dengan kemewahan kalau hidupnya tanpa kebebasan dan kemerdekaan jiwa. Sebaliknya, kebahagiaan tidak akan ada selama orang masih menderita kekurangan dalam keperluan jasmaninya, seperti diungkapkan oleh Ki Hadjar *‘nunggang montor mbrebes mili, mikul dhawet rengeng-rengeng’*. Cita-cita hidup salam bahagia hanya bisa tercapai dalam satu masyarakat yang tertib dan damai, tata *tentrem, orde en vrede*. Tertib lahirnya, damai batinnya

adalah masyarakat yang menjadi tujuan Taman Siswa (Tauchid 1963: 33).

Asas-asas sistem pendidikan yang diberikan oleh Ki Hadjar Dewantara tidak hanya dapat dipakai dalam lapangan pendidikan, melainkan juga dapat dijadikan sebagai dasar kehidupan kemasyarakatan. Ada tujuh asas, yakni: 1) *cultureel nationalisme* yang dapat dipakai intern sebagai dasar kesatuan bagi bangsa Indonesia yang multikultural, beraneka ragam kebudayaannya, dan ekstern sebagai titik pertemuan dengan kebudayaan-kebudayaan di dunia. 2) asas *among* atau *tut wuri handayani*, dapat dipakai sebagai dasar hubungan pihak penguasa dengan rakyat, hingga timbul pengertian timbal balik dalam kehidupan berdemokrasi. 3) asas hak untuk menentukan nasib sendiri, *zelfbeschikkingsrecht*. Inilah pengakuan hak pribadi tiap-tiap orang untuk mengembangkan bakat dan swadaya secara bebas; asas ini sekarang penting bagi bangsa kita sebagai keseluruhan maupun bagian-bagian Indonesia sebagai satuan-satuan swatantra; 4) asas demokrasi, yang dimaksudkan adalah *democratie met leiderschap*, yakni bahwa setiap kebebasan ada batasnya, perlu disalurkan dan dipimpin. Pembatasan ini mencegah ketelanjuran, ekses-ekses, anarki, dan sebagainya. Mengharuskan adanya keseimbangan dan tata tertib; 5) asas *zelfbedruiping*, membiayai sendiri dari sumber-sumber sendiri. Asas ini mengharuskan adanya perhitungan dan kesederhanaan, yang juga penting bagi pelaksanaan swatantra (otonomi daerah); 6) asas kekeluargaan, yang tidak saja berguna bagi alam pendidikan, melainkan juga bagi penghidupan ekonomi, sosial, dan politik. Asas ini akan lebih memperbesar iklim saling mengerti dan kerja sama di antara pihak-pihak yang berkepentingan; 7) asas 'tricon': *concentriciteit, convergentie, continue*, pengakuan bahwa antara orang-orang dan dunia sekitarnya selalu ada pertimbangan, persatuan, dan persambungan. Alam hidup manusia merupakan

suatu alam hidup yang konsentris, yakni sebagai lingkaran-lingkaran besar dan kecil; yang berlapis-lapis, berpusat pada satu titik. Lingkaran paling kecil adalah alam pribadi manusia, di luarnya alam keluarga, lebih luas lagi alam bangsa dan kebangsaan, yang terluas alam manusia dan kemanusiaan. Semua lingkaran yang bersusun-susun itu satu titik pusatnya, orang berdiri di atasnya, di tengah-tengah lingkaran-lingkaran alam yang mengelilinginya (alam diri, alam keluarga, alam bangsa, dan alam manusia). Di sela-sela itu masih terdapat lingkaran-lingkaran alam kehidupan kedaerahan, kesukuan, golongan, paham, dan keyakinan, golongan politik/kepartaian ataupun golongan lainnya yang merupakan kesatuan hidup yang tersusun dan terikat oleh suatu paham kehidupan manusia. Ki Hadjar mengatakan **bila orang menyadari bahwa memang titik pusatnya satu**, maka bila orang-orang itu duduk dan berdiri di atas pendiriannya masing-masing **tidak akan saling berbentrokan apabila masing-masing menghargai pendirian orang lain**.

Apabila perasaan cinta daerah, cinta keluarga, dan cinta golongan itu disertai **kesadaran bahwa hidup manusia itu ada di alam lingkungan hidup yang mengelilinginya, maka tertib, damai, ketenteraman, dan keselamatan akan menjadi pendukung ketertiban, kedamaian, dan persatuan nasional**. Demikian pandangan Ki Hadjar tentang nasionalismenya, bagaimana sikap hidup yang seharusnya dipegang untuk persatuan nasional untuk ketertiban, ketenteraman dan keselamatan masyarakat, bangsa dan dunia (Tauchid 1963: 14-15, 32-52).

Kiranya ajaran dan keteladanan Ki Hadjar ini sangat relevan dengan keadaan bangsa dan negara tercinta dewasa ini. Semoga para pemegang pemerintahan kini maupun yang akan datang bersedia mengingat kembali, mau mempertimbangkan manfaat dan kebbaikannya, mau melaksanakan dan meneladani untuk mewujudkan

masyarakat yang sejahtera lahir batin, seperti apa yang diamanahkan sebagai darma seorang pemimpin negara. Amin. Semoga kearifan lokal yang merupakan pengalaman sejarah, yang disusun dengan sangat terperinci, rapi, dan jeli berdasarkan kondisi dan situasi, segala kemungkinan, dengan menyingkirkan efek-efek negatif yang akan terjadi, yang sudah diperhitungkan dengan sangat cermat oleh para pejuang-pejuang nasionalis kita itu dapat segera membangunkan, membangkitkan kembali aspirasi para pemimpin yang akan datang, yang kita nanti-nantikan kini, para pemuda generasi penerus bangsa tercinta ini.

Tokoh lainnya yang dapat dijadikan teladan dalam membina generasi penerus adalah Sri Mangkunagara IV (1811-1881), pemimpin praja Mangkunagaran. Terlahir sebagai R.M. Sudiro, putra Sri Mangkunagara III, kemudian dewasa bernama R.M.H. Gondokusumo dan dinobatkan sebagai pemegang pemerintahan praja Mangkunegaran pada 16 September 1857 bergelar K.G.P.A.A. Mangkunagara IV. Sri Mangkunagara IV adalah seorang raja/adipati, pujangga, budayawan, dan filsuf. Dalam bidang pemerintahan, beliau berusaha untuk menjaga stabilitas, kelancaran, ketertiban, dan dinamika dengan menjadikan semua aparat praja dan pamong praja sebagai orang-orang yang siap bekerja dengan baik sesuai tugasnya, kemampuan, dan tanggung jawabnya secara disiplin. Beliau banyak mengangkat pegawai pamong praja dari orang-orang legiun Mangkunagaran yang telah menerima pendidikan keprajuritan yang banyak menghayati masalah kedisiplinan. Pola kerja yang demikian akan mendorong keberhasilan praja dalam berbagai bidang sampai di daeah-daerah secara meluas. Dalam bidang perkonomian berhasil dikembangkan budi daya ulat sutra, teh, kopi, kina, dan gula (mendirikan pabrik gula Colomadu 1863 dan Tasikmadu 1874). Dalam bidang pembangunan, hasil budi daya tersebut dapat

membangun prasarana secara menyeluruh, dari istana sampai daerah-daerah seperti pengembangan Pendapa Ageng Mangkunegaran, memasang lampu-lampu *robbyong*, membangun bangsal Tosan dan emperan taman, gedung Purwasana, dirgasana, kavaleri, rumah besar di Canjarsari Sala, bangunan di Pendrikan Semarang, Wonogiri; memperluas areal budi daya perkebunan, memperbanyak penanaman modal dalam berbagai surat berharga (efek, saham) dsb. Dalam bidang seni budaya, beliau mendirikan badan yang berfungsi sebagai ajang pembinaan dan pengembangan kesenian Mangkunegaran: *Langenpraja*; membuat wayang kulit pilihan Kyai Sebet I dan II, mengembangkan seni wayang orang, *Langendriyan Mandraswara*; mengembangkan kantor kearsipan dan membuka kantor Reksa Pustaka 1867; mengembangkan berbagai karya sastra yang bersifat deskriptif, filosofis, didaktis, futuristik. Dalam bidang ketataprajaan, langkah-langkah baru disertai wawasan baru yang bertujuan untuk mempercepat pembaruan dan pembangunan praja, pengembangan tugas dan penyebaran tanggung jawab ketataprajaan serta peningkatan pelayanan dalam berbagai bidang dilaksanakan sejak 1867. Hal ini terlihat dengan ditetapkannya Pranatan Ketataprajaan Mangkunegaran, dengan diberlakukannya pembidangan urusan praja (negeri) menjadi beberapa bidang yang masing-masing dikepalai seorang wedana. Setiap kawedanan membawahi beberapa urusan, setiap urusan dikepalai seorang mantri. Pranatan ini dimaksudkan agar setiap bidang dan urusan tertentu dapat dikelola dengan baik karena penerapan pranatan baru ini memang bersifat *pamrayoga tata*, pranatan/saran. Ada tujuh pembidangan, yakni: 1) Kawedanan Amongpraja membawahi tiga urusan, yaitu Sastralukita, Reksa Pustaka, Pamong Siswa; 2) Kawedanan Reksapraja membawahi tiga urusan, yaitu Kepolisian, Margatama, Kejaksaan; 3) Kawedanan Kartapraja membawahi dua urusan, yaitu Kartausaha



dan Martanimpuna; 4) Kawedanan Kartipraja membawahi urusan Kartipura; 5) Kawedanan Martapraja membawahi urusan Reksadana, 6) Kawedanan Reksawitana membawahi empat urusan, yaitu Reksawarastra, Reksawahana, Reksa busana, Langenpraja; 7) Kawedanan Purabaksana membawahi empat urusan, yaitu Kotib, Naib, Mardikan, Ngulama (Bratahiswara 2000:12-13).

Di samping kegiatan membangun demi kemajuan dan keberhasilan negeri untuk kesejahteraan masyarakat, Sri Mangkunagara IV sangat memperhatikan dan mengantisipasi gejala-gejala yang tidak sehat, yang berpotensi menghambat pembangunan, merugikan, dan mengganggu kemapanan hasil pembangunan yang telah dicapai, bahkan membahayakan keberadaan dan kelangsungan hidup negeri Mangkunegaran. Hal ini disinyalir dalam tulisan beliau, *Serat Nayakawara* pupuh *Pangkur*:

*kang puwara nguni datan marsudi,  
mring gunem reh kang rahayu,  
masalahing suwita,  
mung ngugemi ujar kuna kang tan jujur  
kabanjur praptaning mangkya,  
piyangkuhe angluwihi (Pangkur, 2)  
mring kanca sakancuhira (3)*

(Tindakan para narapraja/pejabat dan bawahannya yang dulu tidak menjalankan pranatan praja yang berlaku, kurang menghayati dan mengindahkan nasihat sikap rahayu yang mengacu pada budi luhur. Pengabdian mereka tidak mantap karena hanya mengikuti kebiasaan

PARWATRI WAHJONO

lama yang tidak benar sehingga telanjur menjadi kebiasaan timbulnya sikap angkuh terhadap sejawat maupun orang lain).

*mring .....*

*barang karya tan gagah sami wigih,*

*keguh tabet tanpa kawruh,*

*kewran nalaring lara,*

*yun tinilar kogel bokmanawa masgul,*

*magal magul yen den delna,*

*ndaluya anandho kardi (3)*

(Dalam bekerja lamban, tidak cepat tanggap akan perubahan, situasi dan sering gagal menjalankan tugas karena keterbatasan pengetahuan, pemikiran, dan pengertian. Mudah kecewa dan patah semangat serta sering sembrono dan menunda pekerjaan sehingga tidak dapat diandalkan).

*karya pitunaning praja,*

*ngreregoni parentah kang wus dadi,*

*yen sinereg asring rengu,*

*tampane sinrengenan,*

*lelembatan nguring-uring kancanipun,*

*kang mengkana marenana,*

*rungunen pitutur mami (4)*

(Sering berbuat yang merugikan negeri sehingga mengganggu pemerintahan yang ada. Jika diberi peringatan mudah tersinggung dan salah paham, bahkan sering berbalik memarahi teman-temannya.

## KRISIS KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL

Tingkah laku semacam itu hendaknya dihentikan. Dengarkan nasihatku).

Kepemimpinan Sri Mangkunagara IV bertujuan menjadikan negeri Mangkunagaran berdiri tegak, aman, dan makmur sentosa, *praja kuncara*, membangun kemajuan negeri dan kawulanya sesuai dengan cita-cita menyejahterakan rakyat ini. Hal itu dilakukan dengan pembinaan generasi muda yang disebut dengan *Mbangun tuwuh*. Pembinaannya ditujukan kepada semua yang membantu pimpinan negeri: *nayaka mantri, punggawa, pamong praja*, dan semua perangkat serta jajarannya dengan tujuan pokok peningkatan wawasan kaprajan dan Mangkunegaran serta peningkatan pengabdian para punggawa, mantri. *nayaka, narapraja* (Bratahiswara ibid 11,12). Kepemimpinan ini pun tidak lepas dari semangat perjuangan perintis dinasti Mangkunagaran, Raden Mas Said, yang kemudian menjadi KGPA Sri Mangkunagara I, dengan Tridharmanya: 1) *Rumangsa melu handarbeni, sense of belonging*, 2) *Wajib melu hanggondheli (hangrungkebi), sense of defence*, 3) *Mulat sarira hangrasa wani*, siap dan sadar untuk mawas diri. Artinya, 1. Dengan kesadaran merasa ikut memiliki, masing-masing akan menempatkan diri sebagaimana mestinya. Praja, negeri adalah tempat mereka bernaung dalam menunaikan tugas hidup, tempat menggantungkan harapan hidup yang aman tenteram damai bahagia. Dengan merasa bertanggung jawab membina, menjaga, mengelola dan mengembangkan serta mencintai negeri Mangkunegaran sebagaimana mencintai dirinya sendiri, semuanya, penguasa, pamong, punggawa dan kawula akan mendapatkan nikmat dan hikmah dari negeri Mangkunegaran 2. Kesadaran ikut menjaga dan mempertahankan negeri merupakan kewajiban. Sikap moral kenegaraan ini ditanamkan oleh pendiri negeri Mangkunagaran. Berdasarkan hal ini semua pihak hendaknya

memiliki tanggung jawab moral sehingga sanggup mawas diri, dengan memiliki wawasan yang luas bersedia berkorban, memiliki jiwa pengabdian yang besar dan sanggup menyesuaikan diri dengan perkembangan. 3. *Mulat sarira*, mawas diri merupakan modal bagi setiap pribadi untuk dapat mengembangkan diri agar dapat lebih maju. Mawas diri akan membuat seseorang sanggup menengok kembali dirinya termasuk mengetahui pengalaman, kemampuan, kelebihan, kekurangan, kekhilafan, ketajaman visi, wawasan, dan keberuntungannya. Dengan belajar mawas diri ini, seseorang akan dapat memperhitungkan langkah-langkah yang akan ditempuh, sehingga akan memudahkan proses penyesuaian diri setepat-tepatnya berdasarkan kebenaran rasional dan kelayakan normatif yang bertanggung jawab, termasuk pengabdian kepada bangsa dan negara. *Mulat sarira hangrasa wani* merupakan sumber aspirasi dan motivasi untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan praja serta kerabat besar Mangkunegaran. Mawas diri bertalian erat dengan tingkat kesadaran dan kematangan pribadi seseorang, dan kematangan pribadi bergantung pada tingkat pengolahan diri yang bersifar batiniah maupun pekerti. Tridharma ini saling berkaitan dan saling menjiwai. Tridharma merupakan potensi yang sangat berarti dalam rangka gerakan moral membangun Wawasan Kemangkunegaraan dan perlu disosialisasikan secara terus-menerus dengan serius (Bratasiswara, *ibid*, 23-24).

Kearifan lokal yang mungkin kurang populer tetapi sangat potensial dan relevan, sangat tepat digunakan sebagai usaha memperbaiki keadaan bangsa dan negara dewasa ini, di mana para pemimpin serta wakil-wakil rakyat yang diharapkan peduli dan memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan rakyat kecil justru lupa diri. Adalah *Serat Piwulang Ngawula*, yang berisi ajaran seorang ayah kepada anaknya yang ingin mengabdikan (Wahjono dkk. 1994/1995).

Disebutkan dalam kitab itu kepada siapa harus mengabdikan dan apa bekalnya, yakni: 1) *guna*, ‘kepandaian’; bila kepandaian kita diakui orang, hendaknya tidak merasa *adiguna* (‘lebih pandai’, lalu menjadi lupa, lalai dan sombong; ini menjadi cacat kita), sehingga disebut *bising aguna amiguna*, ‘pandai yang bermanfaat’. Hendaknya menjadi *sujana paramarta*, ‘orang pandai yang mendahulukan kepentingan orang lain’; 2) *Sarana*, yaitu alat/piranti/perantara, atau *pintane*, yang berupa harta, *rajabrana*, yang diminta oleh raja/negara. (pen: Untuk zaman sekarang dapat diartikan rakyat harus membayar pajak yang harus diserahkan dengan ikhlas dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik, yang bermata pencarian, yang berpenghasilan, yang berharta (tanah, usaha, barang berharga lainnya) sebagai salah satu sarana untuk kelangsungan hidup bernegara, yang kesemuanya memerlukan biaya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai timbal baliknya rakyat akan menikmati hasil pembangunan itu). 3) *Sekti*, *kasekten*, maksudnya kemampuan atau prestasi. Kemampuan ini kita dapat belajar dari ‘belajar/pengendalian diri’, *ateteki*. Meskipun *sekti*/ banyak ilmunya kalau tidak *betah tapa*/ mengendalikan diri, kesaktian itu akan hilang/tidak berguna, justru membawa bencana. (Pen: *pinter kanggo minteri*, ‘pandai untuk membohongi rakyat, untung keuntungannya sendiri’, merupakan godaan, seperti halnya *ma lima: minum, main, madon, maling, mateni*). 4) *Wani ing kewuh*, ‘berani menghadapi bahaya atau risiko’; dan 5) *Nurutan* ‘menurut, patuh menjalankan semua perintah, tugas, tanpa mengeluh walaupun letih’.

Seorang abdi negara harus bisa membedakan perilaku yang termasuk *nistha*, *madya*, dan *utama*. Yang *nistha*: *mangro sirah*, ‘mendua pengabdian’, mengabdikan kepada lebih dari satu pemimpin’. Kemudian *bandha sumitra*, ‘menginginkan harta teman/rakyat. Pajak tidak disampaikan, dimakan sendiri. *Sarana paturan* artinya senang

mangadukan kejelekan temannya supaya mendapat celaka agar dirinya lebih diperhatikan. *Makolehake awak*, maksudnya nepotisme dan kolusi. Memasukkan sanak saudara untuk bekerja/menduduki jabatan dan mendapatkan prioritas untuk memperoleh fasilitas bagi dirinya sendiri. *Sakuthu batin*, yaitu dalam batin bersekutu. *Mbalela* maksudnya beraja di hatinya, menuruti kemauan sendiri, *eigenwijs*, dan *ora netepi wajib* 'tidak menunaikan kewajibannya dengan baik'. Hal ini berkaitan *mangro tingal*, *mangro sirah*, *ire-iren mring kanca* 'iri kepada teman'.

Watak yang harus dimiliki adalah watak *madya*, 'tengah': *taberi* 'rajin dan telaten', *amituhu*, *ngestokaken dhawuhing ratu* 'taat dan tulus lahir batin menjalankan perintah raja (pemimpin)'. Kini, taat pada undang-undang/peraturan. *Tumanduk nampani dhawuhing ratu*, artinya 'tanggap akan *cipta sasmita*, kehendak pemimpin walaupun tidak terucapkan dan menjalankannya dengan baik' *Tumindak anglakoni dhawuhing ratu*, tanpa mengubah, menambah ataupun mengurangi, tidak melalaikan, semua perintah dilaksanakan. *Narimeng pandum* artinya 'menerima bagiannya apa adanya, tanpa mengharapkan pemberian lebih dari mestinya, tidak iri kepada temannya. *Wedi pepacuhing ratu*, maksudnya 'semua larangan/peraturan tidak akan dilanggar, tata krama dipatuhi. *Angon wahyaning kang wektu mangsakala*. *Kang kapyarsa kang kaeksi anelebi tebanipun*, artinya 'memperhitungkan waktu, kadang-kadang menyembunyikan datangnya hal-hal yang didengar, dilihat, tanpa khawatir akan menjadi satu bersamaan, tetapi semua tugas itu dikerjakan dengan baik'.

Watak yang utama: *temen marang kagunganing ratu*, 'tidak menginginkan milik raja (baca: negara), justru turut menjaganya agar dipergunakan sebaik-baiknya yang bermanfaat, dengan pertanggungjawaban. Di sini ada *sense of belonging*, *rumangsa melu*

*andarbeni. Gemi, ngemi-emi, wewadi dijaga kanthi premati.* Artinya dapat menjaga rapat-rapat rahasia negara. *Nastiti*, 'hati-hati, mengingat sungguh-sungguh pesan pemimpin/peraturan agar jangan sampai tumpang tindih dalam pekerjaan. *Ngati-ati* 'hati-hati dalam berbuat'. *Ngawruhi* artinya tahu apa yang menjadi kehendak pemimpin. Tidak akan berbuat kalau belum mengerti betul, memikirkan masak-masak sebelum bertindak. *Santosa*, artinya tabah bila diuji pemimpin baik secara tersamar maupun terang-terangan, tidak tergoncang, tidak goyah, mantap menghadapi segala sesuatu tanpa menganggap sulit. *Mantep, ngidhep marang gustine*, artinya 'mantap, dengan sepenuh hati mengabdikan kepada pimpinan/ negara' (Wahjono 2007: 31-33).

## KESIMPULAN

Demikian bunyi ajaran/petuah-petuah yang penuh kearifan lokal, ajaran yang telah lama terlupakan, warisan yang ditinggalkan karena arus gelombang globalisasi yang begitu dahsyat memengaruhi dan merusak pribadi para pemimpin kita yang mudah tergiur *gebyaring donya*. Kearifan kuna ini tetap dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, sebagai generasi penerus dari para leluhur yang selalu ingin menjaga ketenteraman dan kesejahteraan dunia, *mamayu hayuning bawana*. Ini adalah kearifan lokal yang berupa keteladanan sebagai manusia yang berpekerti luhur, mengerti, peduli dan menghargai sesama lainnya dengan penuh kasih. Ini adalah ajaran dan nasihat bagaimana membentuk kepribadian manusia yang *tanggap, tatag, tanggon*, manusia yang kini sangat diperlukan sebagai sumber daya manusia pengabdikan rakyat, bangsa, dan negara di dalam menjalankan kewajiban mulia. Walaupun lahir pada zaman feodal, kini ajaran-ajaran tersebut tetap bisa diterapkan di negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis pancasila, dengan kepala negara/

pemimpin-pemimpin bangsa, wakil-wakil rakyat, dan rakyat/warga negara Indonesia, tanpa kecuali, semuanya adalah abdi rakyat, abdi bangsa dan negara, dan juga abdi Tuhan yang harus menjaga keseimbangan kosmos dengan keselarasan/keharmonisan, *ayem tentrem*. Kearifan lokal ini akan berlaku sampai kapan pun, di mana pun, selamanya, tak akan lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas.

## KEPUSTAKAAN

- Bratiswara, Drs.. Harmanto, K.R. Ay. Hilmiyah Darmawan Poncowolo, Satyawan S., Suryawinata. 2000. *Nayakawara. Pembinaan Generasi Penerus Dengan Wawasan Kemangkunagaraan* Seri Karya Sri Mangkunagara IV. Jakarta: PT. Binakerta Adiputra.
- Kamadjaja, Karkono. 1964 *Zaman Edan*. Jogya: UP Indonesia.
- Kern, H. 1900. *Ramayana Kakawin*.
- Nojowirongko, M.Ng. 1954. *Serat Tuntunan Padalangan*. Yogyakarta: Badan Kesenian Djawatan Kebudayaan.
- Suseno, Franz Magnis.1985. *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Siswoharsojo, Ki.1954 . *Pakem Makutharama*. Ngajogjakarta: JajasanPenerbitan Pesat, cet. 1.
- Tauchid, Mochammad. 1963. *Perjuangan dan Adjaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*. Jogjakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa.
- Wahjono, Parwati, dkk. 1994/1995. *Serat Piwulang Ngawula*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wahjono, Parwati.1998. "Mempersiapkan Diri dalam Memasuki Era Baru dengan Memahami dan Melaksanakan Kearifan Tradisional yang Tersurat dan Tersirat dalam Ajaran dan Ungkapan-Ungkapan Jawa". Makalah dalam Simposium Visi Reformasi Berwawasan Budaya Menuju Abad ke-21. Depok: FSUI



#### KRISIS KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN LOKAL

- . 2005. “Ungkapan-Ungkapan dan Ajaran Jawa. Kearifan dalam Berdemokrasi” dalam *Demokrasi dalam Budaya Lokal*. Yogya: Tiara Wacana & Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FBS Universitas Negeri Yogyakarta.
- . 2007. “Usaha Pembentukan Watak Bangsa lewat Pemahaman serta Penanaman Budi Pekerti dan Adat Istiadat Jawa”, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Susastra FIB UI. Depok.



## Bab VIII

# PERLU DIBANGUN RAGAM BAHASA POLITIK YANG SANTUN

*Muhadjir*

### Abstrak

Perkembangan demokrasi di Indonesia amat pesat, maju sejak zaman “reformasi”. Kebebasan berpendapat terbuka seluas-luasnya, dapat dilontarkan melalui media massa atau saluran lain. Sayangnya, perkembangan demokrasi itu juga dapat menghapuskan sebagian kearifan lokal yang dimiliki bangsa kita ini. Tuntutan-tuntutan politik/ideologi bukan saja disampaikan melalui jalur-jalur yang tersedia, dengan perundang-undangan, melainkan dilaksanakan dengan bahasa kekerasan, dengan “politik hiruk-pikuk” atau – meminjam istilah Koran *Kompas* – “politik gaduh” (Harian *Kompas* 29 dan 30 Oktober 2012). Meskipun Negara menyediakan saluran-saluran komunikasi politik, seperti Dewan-dewan Perwakilan Rakyat, pusat maupun daerah, kebebasan pendapat, kritik-mengkritik atau tuntutan-menuntut, dan kemauan-kemauan politik, sosial, dan ekonomi lebih “marak” kita dengar atau kita saksikan melalui demo-demo, poster-poster, atau acara-acara media elektronik, dalam acara tayang wicara (talk show) di televisi atau radio. Semua saluran itu halal saja, tetapi yang perlu dicatat adalah kekerasannya, keras dalam kegiatan fisik, dalam ungkapan-ungkapan dan pemilihan kata. Kata-kata seperti hiruk-pikuk, karut-marut, amburadul, memeras,

kongkalikong, mulut comberan, setan, bohong, atau skandal adalah ungkapan sehari-hari dalam bahasa pendemo, atau dalam debat-debat pada acara tayang wicara. Sambil meneriakkan kata-kata kasar dan keras, pendemo merusak pabrik tempat kerjanya, mahasiswa menghancurkan gedung di kampusnya sendiri, adalah pemandangan sehari-hari dalam siaran televisi Indonesia. Tawuran antarpelajar menjalar ke pemuda/mahasiswa dan orang tua mereka.

Kata Kunci: perkembangan demokrasi, reformasi, kearifan lokal, “politik hiruk-pikuk”, “politik gaduh”, komunikasi politik, kata-kata keras.

### **“Politik Hiruk-pikuk” di Indonesia**

“Politik hiruk-pikuk” dari segi perkembangan/pertumbuhan ekonomi Negara, menurut *Kompas*, bisa menghambat atau membuyarkan momentum pengembangan ekonomi yang sekarang sedang membaik. “Indonesia mempunyai modal dan daya tahan untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Momentum ini bisa buyar karena kegaduhan politik...” (*Kompas* 30/10/12). Dari segi lain, dari segi budaya, “politik hiruk-pikuk” yang sekarang sedang berjalan tampaknya lebih banyak merugikan. Sifat-sifat khas Indonesia, seperti *gotong-royong*, *ramah-tamah* terhadap orang baru/asing, dan sebagainya kini mulai pudar. Ungkapan *bahasa menunjukkan bangsa* tidak lagi tergambar.

Kemerdekaan berpendapat sebagai bagian dari perilaku demokrasi dewasa ini membangkitkan kehidupan yang sebaliknya. Kebebasan berpendapat dimanfaatkan warga Indonesia untuk membela atau memperjuangkan ideologi politik atau kepentingan pribadi dan kelompok, alih-alih membangun kesetiakawanan dan kehidupan bersama seperti yang diamanatkan prinsip-prinsip

demokrasi. Penonjolan akan kepentingan pribadi, akhirnya bahkan menjadi pemaksaan pendapat/ kemauan pribadi atau kelompok atas kelemahan pihak lain, dilakukan dengan melanggar aturan umum yang berlaku, memilih jalan kekerasan. Kekerasan sebagai media perjuangan oleh pelakunya lebih dinikmati sebagai kegiatan pemuas kekecewaan, ekspresi kemarahan, daripada untuk mencapai tujuan. Perilaku kekerasan itu merugikan demokrasi sendiri. “Kekerasan Marak, Demokrasi Turun”, demikian judul berita *Kompas*, 13 Desember 2012, halaman 2.

“Politik hiruk-pikuk” merupakan politik dengan biaya tinggi, baik pelakunya, lawannya, maupun masyarakatnya, masing-masing menanggung kerugian: kerugian waktu, materi, bahkan hal-hal yang nonmateri. Pelaku demo harus membiayai kegiatannya dengan menyiapkan sarannya, transportasi, dan meninggalkan pekerjaan atau bangku kuliahnya. Pihak yang didemo, kantor, pabrik, atau kampus, yang selain kehilangan waktu bekerja atau belajar-mengajar, mungkin mengalami kerusakan, bahkan mungkin kebakaran.

Kekerasan biasanya mulai bilamana pendemo hendak menyampaikan maksudnya. Ketika itu, mereka menganggap dirinya sederajat dengan pihak lawan. Pendemo di ibu kota kabupaten, hanya puas kalau ditemui Bupati atau walikota, di kota provinsi pendemo minta ditemui sang gubernur, di pemerintahan pusat mereka sederajat dengan menteri, hanya puas bila bisa berhadapan dengan menteri, atau bahkan presiden. Bila lawan bicara yang ingin dihadapinya tidak ada atau tidak mau, bisa diharapkan mereka akan melakukan kekerasan, merusak pagar atau gedung, bahkan melakukan pembakaran. Warga kota tempat demonstrasi terjadi, juga dirugikan oleh kemacetan lalu-lintas, lebih-lebih karena adanya pembakaran ban, pohon-pohon bertumbangan, dan ancaman dari batu-batu bahkan peluru yang beterbangan.

Kekerasan bukan hanya berupa kekerasan fisik seperti digambarkan tersebut. Demonstran biasanya juga melengkapi dirinya dengan poster-poster atau slogan yang menggunakan bahasa yang tidak kurang keras dari kekerasan fisik, yang menyakitkan hati orang atau kelompok yang dijadikan sasaran. Kata-kata atau kalimat yang ditulisnya pada poster-poster dipilih kata-kata yang serba superlatif sebagaimana diungkapkan di awal: *kacau-balau*, *hiruk-pikuk*, *karut-marut*, *amburadul*, *skandal*, atau ungkapan-ungkapan metaforis yang berlebihan, seperti *penumpang gelap*, *sapi perah*, dsb.

Bahasa dalam dialog-dialog yang digunakan dalam media lain seperti pada apa yang disebut acara tayang wicara, baik di radio atau televisi, pun tidak jarang sangat keras atau kasar. Kata-kata seperti *pemerasan*, *kongkalikong*, ancaman seperti *dihakimi rakyat*, atau bahkan *pemerintahan akan bubar*, dan semacamnya mudah muncul sebagai ancaman atau tuduhan. Bahkan, penulis sangat terkejut ketika dalam suatu acara televisi mendengar ungkapan yang sangat kasar, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota DPR, yang katanya ahli hukum, yakni ucapannya “mulutnya seperti comberan” yang dialamatkan kepada salah seorang pejabat tinggi negara. Ucapan yang sama kasarnya diucapkan oleh, juga, seorang anggota DPR lainnya lagi yang merasa dirinya termasuk dalam dugaan berkorupsi menyatakan: “kalau berbicara jangan asal (mulutnya) *nyjeplak* saja”. Kekerasan itu juga merugikan pelakunya sendiri di masa akan datang, bagi para anggota DPR yang bicara berlebihan, kasar, bisa-bisa tidak dipilih lagi untuk periode pemilihan mendatang.

Bukan hanya masalah penggunaan bahasa, tata tertib berdiskusi pun sering diabaikan begitu saja. Sekalipun pokok bahasan sebuah diskusi telah ditentukan, peserta diskusi sering keluar dari pokok permasalahan. Bukan hanya itu, giliran berbicara pun dilanggar, sebelum pembicara yang sedang mendapat kesempatan

selesai mengemukakan pendapatnya, sudah dipotong peserta diskusi lainnya. Bahkan kadang-kadang empat lima orang berbicara bersama-sama, persis seperti “tawuran” kata-kata makian yang ditayangkan di layar kaca, tidak bedanya dengan yang dilakukan anak-anak pelajar di jalanan.

### **Membangun Ragam Bahasa Politik yang Santun**

Walaupun politik hiruk-pikuk mungkin menghasilkan perubahan yang dikehendaki, perlu dipertimbangkan, mengingat biaya yang harus dikorbankan, tidakkah tujuan politik yang diperjuangkan juga dapat dicapai dengan cara lain yang lebih murah, lebih aman, lebih dapat menjaga kehormatan semua pihak? Ada alat berkomunikasi yang lain, menggunakan bahasa. Bahasa juga merupakan senjata yang cukup ampuh untuk menyampaikan pendapat, mengajukan tuntutan, memperjuangkan perubahan, atau sebaliknya buat “melumpuhkan” lawan.

Dalam surat kabar *Kompas*, seorang dosen bahasa Indonesia dari Australia menganggap bahwa bahasa adalah “kekuatan halus” (*soft power*). Pernyataan tersebut mengingatkan penulis pada cerita seorang kepala Museum Pusat di Jakarta. Dalam hubungan sehari-hari dengan rekannya, sang kepala melakukan dengan bahasa Indonesia. Namun, kata pejabat tersebut selanjutnya, kadang ada saat-saat ketika memberi tugas kepada bawahannya, sekalipun dilaksanakan, sering, lambat atau ditunda.

Kepala museum itu berasal dari kelompok etnik Jawa, demikian juga sebagian anggota bawahannya. Beliau sadar bahwa masyarakat Jawa memiliki aturan hubungan atasan-bawahan dan tingkah laku yang sangat ketat, termasuk dalam berbahasa. Aturan hubungan kemasyarakatan itu dalam bahasa Jawa ditegaskan dengan adanya

tata tingkat atau unggah-ungguh dalam berbahasa. Aturan berbahasa itu menentukan, penutur harus memilih variasi bahasa mana yang harus dipakai berdasarkan siapa yang berbicara dengan siapa lawan bicaranya. Menyadari konvensi berbahasa tersebut, maka sang kepala museum itu, bila menghendaki ada tugas yang harus segera ditunaikan, perintah dilakukannya dengan bahasa daerahnya. Dan ternyata tugas yang diberikan dalam bahasa etniknya itu membuahkan hasil yang diharapkan, sang pegawai segera melakukan apa yang diperintahkan atasannya itu—mungkin dengan sedikit membongkokkan diri ketika keluar dari ruang atasannya.

Bahasa bukan saja sanggup menegakkan disiplin, seperti contoh tersebut, bahasa bahkan memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada kekerasan fisik, asal digunakan sesuai dengan kaidah pemakaian bahasa masyarakat penuturnya. Setiap masyarakat bahasa memiliki kaidah bagaimana bertutur efektif, termasuk bagaimana bertutur sopan santun.

Dewasa ini Bahasa Indonesia tulis memiliki konvensi bagaimana berkomunikasi lewat berbagai ragam bahasa tulis, seperti surat-surat dinas, pengumuman, surat keputusan, surat perjanjian, dan berbagai konvensi tulis-menulis lainnya. Kita semua sudah tahu bagaimana mengawali surat resmi yang kita tulis untuk disampaikan kepada seorang kepala lembaga resmi tertentu, bagaimana perwajahannya, isi suratnya, sistem sapaannya, dan gaya bahasanya, bahkan sampai ke ukuran kertasnya. Dari segi perwajahan, misalnya, surat dari satu instansi ke instansi lain harus mulai dengan mencantumkan identitas instansi pengirim, dilanjutkan dengan tanggal dan kota tempat instansi pengirim. Lalu nomor dan tanggal pengiriman surat.

Bahasa pembukaan yang dipakai pun sudah merupakan konvensi yang ditaati setiap penulis surat. Surat dinas, misalnya, selalu dibuka dengan salam, dengan satu ungkapan yang selalu sama,



## PERLU DIBANGUN RAGAM BAHASA POLITIK YANG SANTUN

dengan “Dengan hormat”. Untuk surat pemberitahuan, misalnya, selalu dimulai “Dengan ini, kami beritahukan ...”. Surat dinas selalu diakhiri atau ditutup dengan “Terima kasih atas kerja sama Sudara atau Bapak”. Pendeknya sudah tersusun kata-kata dan ungkapan, yang dalam sociolinguistik disebut *register*, yang dengan segala aturan lain merupakan alat komunikasi antarlembaga dalam menjalankan birokrasi secara santun.

Dalam wacana bahasa lisan sejumlah komunikasi dalam wacana tertentu juga sudah terdapat semacam konvensi berkomunikasi menurut konteks sosial tertentu. Dialog dalam pengadilan, misalnya, hakim dianggap sebagai pusat konsentrasi peserta percakapan. Hakimlah yang mengatur lalu lintas pembicaraan, dan tidak seorang pun saksi, terdakwa, atau pembela, dan peserta umum, boleh bicara tanpa seizin hakim. Bila melanggar aturan, seseorang mendapat ancaman hukum. Aturan yang amat ketat ialah dalam memilih sistem sapaan. Hakim menyapa terdakwa, saksi, pembela, dan peserta dialog lain, dengan sapaan “Saudara”: Saudara terdakwa, saudara saksi, dan saudara pembela. Sebaliknya hakim harus mendapat sapaan “Yang mulia (Bapak/Ibu) hakim”.

Sedikit saja pembicara, misalnya, seorang saksi “melanggar” aturan, umpamanya, melantur, hakim akan segera menegur pembicara. Secara otomatis yang ditegur akan segera memperbaiki pembicaraannya sambil mengucapkan, “Ya, maaf yang mulia”. Sama halnya dengan pembela yang ketika mendapat kesempatan berbicara mengulang pertanyaan yang sama kepada saksi, misalnya, ia pun akan mendapat teguran yang sama. Dan secara spontan sang pembela akan memohon ampun dengan kata pengantar “Ya, yang Mulia Ibu/Bapak Hakim”. Aturan dan tata cara yang ditentukan dalam wacana pengadilan tersebut ternyata dapat menghasilkan wacana yang santun, yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Contoh lainnya, dalam wacana akademis, dalam sidang terbuka Dewan Guru Besar suatu universitas, pada upacara ujian terbuka untuk gelar doktor, juga diterapkan aturan yang sama yang juga amat ketat. Sama seperti pada sidang pengadilan, mulai dari pakaian hingga ke sistem sapaannya diatur. Rektor atau dekan yang memimpin sidang promosi doktor, harus mengenakan pakaian “toga” dengan segala atributnya. Para guru besar, khususnya penguji, juga memakai toga dengan dasinya. Promovendus mengenakan pakaian lengkap berjas berdasi atau pakaian asli Indonesia. Rektor yang berlaku sebagai pemimpin sidang beserta para penguji duduk berderet di barisan depan, para guru besar yang hadir, tetapi tidak bertugas menguji, yang juga berseragam toga duduk di baris belakang. Sang promovendus berdiri di depan para penguji didampingi oleh dua orang paranem yang mengawal dan mendampingi.

Cara bertanya dan cara menjawab semua diatur hingga ke sapaannya. Pimpinan sidang maupun penguji menyapa mahasiswa yang diuji dengan “Saudara promovendus”. Dan promovendus menjawab penanya yang berstatus guru besar dengan “Prof Doktor X yang amat terpelajar”, dan kepada penguji yang belum berstatus guru besar akan disapanya dengan “Doktor X yang terpelajar”. Bila ujian telah usai, sidang guru besar sudah menentukan hasil ujiannya, yudisium telah diumumkan, ketua sidang lalu mempersilakan eks promotor, yang membimbing penulisan disertasi mahasiswa, yang sekarang sudah diangkat sebagai doktor dalam bidang pengetahuan yang diujikan, untuk mengucapkan pesan terakhirnya untuk sang doktor baru. Dalam kesempatan ini promotor akan menyapa sang doktor dengan tambahan “Doktor X yang terpelajar”.

Ketiga contoh wacana tersebut bukanlah dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan tertulis resmi lainnya, melainkan tumbuh sebagai konvensi yang disetujui dan ditaati. Pelanggaran

terhadap konvensi itu akan dapat mengacau hubungan antar peserta wacana tersebut. Setahu penulis, di Indonesia kita belum memiliki “tata-tertib” yang dikonvensikan untuk wacana politik, kita juga belum memiliki kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang disetujui bersama dalam wacana lisan bidang pemerintahan dan debat politik. Kita belum punya, meminjam istilah sociolinguistik, belum punya *register* dalam komunikasi lisan di bidang-bidang tersebut.

Pada masa lalu, pada beberapa kerajaan dan kesultanan Melayu, telah terbangun semacam kosakata khusus yang dipakai di kalangan pemerintahan yang biasa disebut “bahasa istana”. Raja atau sultan memiliki kata-kata dan ungkapan khusus yang hanya dipergunakan untuk raja dan perangkatnya. Untuk kata ganti dan sapaan digunakan kata-kata khusus, seperti: *paduka yang mulia*, sebagai pronomina orang kedua, atau *yang mulia* saja sebagai pronomina orang ketiga. Tradisi semacam itu juga terdapat dalam bahasa Inggris, seperti, *Your Majesty*, *Her Majesty*, atau *Their Majesty* (Collins 1988-1995). Dalam bahasa Melayu bukan hanya sapaan saja yang mempunyai kosakata khusus, melainkan juga beberapa kosakata untuk kehidupan sehari-hari di kalangan istana, seperti *berkenan*, *bersantap*, *bersemayam* dan sebagainya. Di samping variasi *kromo inggil*, bahasa Jawa juga memiliki sejumlah sapaan dan kosakata khusus semacam itu.

Bersamaan dengan terselenggaranya pemerintah RI, sejak presiden pertama muncul sapaan seperti itu, yaitu *Yang Mulia Presiden RI*, untuk presiden dan *Yang Terhormat* untuk para menteri pernah dilaksanakan. Dan beberapa kosakata khusus Melayu tersebut pun juga dicoba dipakai. Para duta besar negara asing pun dihargai dengan sapaan yang sama, “Yang Mulia Duta Besar X”. Selama pemerintahan presiden Soeharto –kalau tidak salah– hingga sekarang kebiasaan itu ditinggalkan. Untuk menyapa seorang presiden atau seorang menteri dan pejabat tinggi lain cukup dengan kata *Bapak*. Sama dengan di

Amerika Serikat seorang presiden cukup disapa *Mister president*. Namun, perlu dicatat sekarang, sapaan Bapak pun seperti dianggap tidak perlu untuk menghormati orang lain. Bahkan, para pemimpin kita, kata *Bapak Presiden (Bambang Yudoyono)* hampir tidak pernah kedengaran. Kata *Bapak* pun tidak lagi melekat pada *presiden* atau pejabat negara lainnya. Malahan, presiden kita sering hanya disebut nama singkatannya saja, SBY, artinya seorang hakim lebih terhormat yang dalam sidang disapa dengan “yang mulia” daripada seorang presiden.

Mungkin segala simbol kekuasaan itu memang tidak perlu dihidupkan kembali. Namun, tata-tertib dan sopan santun dalam wacana, termasuk untuk wacana politik harus ditegakkan. Diskusi-diskusi politik yang sekarang marak dilaksanakan oleh TV dan radio dalam acara yang disebut *talk show* atau sebut tayang wicara, seharusnya merupakan kesempatan untuk membangun tradisi wacana politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sesuai dengan ciri-ciri bangsa kita dan tata krama nasional dan internasional.

### **Membangun Kerja Sama yang Santun**

Bahasa ditumbuhkan untuk melakukan kebutuhan komunikasi. Manusia tidak seperti burung beo yang mengucapkan ungkapan tanpa tahu apa tujuannya. Setiap tindak tutur (manusia) yang diucapkan seorang penutur selalu ada amanat tertentu, seperti menyampaikan informasi, menanyakan atau memperoleh informasi, memerintah, memprotes, mengeluh, memperingatkan, menyesalkan, berjanji, memuji, berterima kasih, dan sebagainya. Dalam wacana politik, mungkin penutur menginginkan perubahan sikap, perubahan pendapat, mempengaruhi lawan bicara untuk melakukan atau menghentikan sesuatu, dan sebagainya. Tentu saja setiap penutur menghendaki agar maksudnya itu tercapai. Untuk itu dalam sebuah

## PERLU DIBANGUN RAGAM BAHASA POLITIK YANG SANTUN

diskusi, misalnya, diperlukan semacam “strategi” bagaimana agar tujuan pembahasan tercapai.

Untuk itu, mungkin perlu didengarkan nasihat seorang linguist, Grice (1975) yang mengusulkan semacam nasihat agar tujuan pembicaraan berhasil. Dalam setiap percakapan, baik penutur maupun lawannya, harus bekerja sama membangun situasi pembicaraan yang rukun, saling memahami, dan tujuan pembicaraan tercapai. Untuk itu Grice memberikan semacam bidal (maksim) atau nasihat untuk melaksanakan kerja sama tersebut: (a) bicaralah seperlunya, jangan memberi informasi lebih daripada yang diperlukan sesuai pokok pembahasan; (b) jangan memberikan keterangan yang penutur sendiri tidak yakin kebenarannya, atau tidak cukup buktinya, (c) sampaikanlah hanya hal-hal yang relevan dengan pokok diskusi, dan (d) hindarilah informasi yang kabur, tinggalkan hal-hal yang meragukan, dan bicaralah sesingkat mungkin dan dengan tertib.

Setiap peserta diskusi pasti sudah tahu, memahami, dan membekali diri dengan keempat nasihat Grice tersebut. Namun, dalam kenyataan yang kita saksikan, baik di DPR maupun dalam tayang wicara yang diselenggarakan oleh TV, tampak bahwa para peserta pembicaraan sering gagal menunjukkan kerja sama seperti yang seharusnya terjadi. Sekalipun keempat “nasihat” bertutur itu sudah dilaksanakan, ada faktor lain yang terlupakan, “sopan santun” berbahasa. Dalam bertutur seorang penutur harus menyadari bahwa setiap orang memerlukan penghargaan dan memerlukan identitas. Atau kalau kita ambil perumpamaan Goffman, semua orang punya muka, setiap orang harus jaga muka, jangan sampai kehilangan muka (Levinson 1987). Dalam komunikasi, seorang penutur tidak hanya diikat oleh keempat prinsip tersebut, melainkan juga ada faktor sosial yang mengikat semua peserta pembicaraan, yakni kesantunan. Di samping menyampaikan amanat pembicaraannya, seorang penutur

harus menjaga kelancaran kerja sama, tidak macet dan hubungan sosial terjaga, tidak terganggu. Oleh sebab itu, empat prinsip kerja sama tersebut harus disertai prinsip-prinsip lain, yakni kesantunan.

Betapa pentingnya sopan-santun berbahasa dapat dicontohkan dengan peristiwa pada akhir tahun 2012 yang lalu. Dalam salah satu acara tayang bicara di salah satu TV swasta dipilih pokok bahasan tentang pemberian grasi presiden kepada salah seorang terpidana narkoba. Peristiwa tersebut mendapat reaksi yang amat keras dari sekelompok masyarakat, tindakan presiden dianggap bertentangan dengan upaya besar-besaran pemberantasan peredaran barang haram yang mengancam kehancuran masyarakat. Di antara berbagai komentar yang dikemukakan banyak pihak, dalam sebuah diskusi, Ketua Mahkamah Konstitusi berkomentar bahwa “*Barangkali mafia narkoba sudah sampai ke istana!*”. Ketika pendapat ketua MK itu ditayangkan kembali dalam tayang bicara, sinyalemen Ketua MK tersebut menimbulkan kemarahan seorang peserta tayang bincang yang mereaksinya dengan ucapan amat kasar: “*Sebagai Ketua MK mulutnya seperti comberan*”.

Reaksi atas sinyalemen Ketua MK tersebut terasa keterlaluan amat kasar. Namun, dilihat dari kaidah percakapan, ucapan Ketua MK tersebut, walaupun memenuhi 4 prinsip kerja sama Grice tersebut, yakni jelas, singkat, relevan dengan pokok, dan cara pelaksanaan yang tepat tetapi tidak dilengkapi dengan kaidah sopan santun. Sekalipun pernyataan itu sudah menggunakan pemagar “barangkali”, tidak langsung “menuduh” masuknya mafia narkoba ke dalam istana, tetapi pagar itu kurang kuat. Seandainya Ketua atau ancaman memilih kata pemagar yang lebih kuat, misalnya, kata yang juga menyatakan ikut melibatkan diri ke dalam keprihatinan (dan bukan tuduhan), seperti menggunakan kata-kata *jangan-jangan mafia narkoba masuk ke kalangan istana*, mungkin tidak mendapat reaksi yang sekasar itu.

### Tiga Strategi Sopan Santun Berbahasa

*Pertama*, yang secara intrinsik melekat pada tiap bahasa. Pada sejumlah bahasa di dunia, sopan santun berbahasa dinyatakan dalam sejumlah kosakata dan dalam tata bahasanya. Bahasa Jawa, misalnya, memiliki tiga lapis kesopanan, yang umumnya dinyatakan dalam tiga kosakata dan tata bahasa. Kata untuk *makan*, misalnya, masing-masing memiliki tiga bentuk kata: *mangan*, *neda*, dan *dahar*, dengan tiga nilai kesopanan, akrab, akrab-hormat, hormat. Tingkat kesopanan yang paling banyak dimiliki oleh, barangkali, semua bahasa adalah kosakata yang menyatakan sapaan dan kata ganti Orang Kedua. Dalam bahasa Jawa untuk kata ganti orang kedua juga terdiri dari tiga tingkat kesopanan: *kowe*, *sampae*, dan *panjenengan*. Untuk keakraban yang sopan dipakai kata yang menyatakan hubungan kekerabatan, seperti *adik* atau *dik*, *bang*, atau *abang*, *kak* atau *mbak* untuk orang kedua wanita. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang kedua *kamu* lebih sopan daripada *kau*. Secara umum, lawan bicara yang dihormati disapa dengan “*bapak*” atau “*ibu*”, termasuk tokoh tertinggi di Indonesia, presiden.

Sopan santun dalam sistem sapaan semacam itu juga terdapat pada bahasa-bahasa lain, baik di Asia maupun di Eropa. Dalam bahasa Cina, dipakai bentuk *ni* untuk hubungan akrab dan *nin* untuk pihak yang dihormati (Fasold 1990:3). Di dalam bahasa Arab dipakai panggilan hormat dengan memakai *um(i)* “ibu”+ nama anak laki-laki tertua atau abu “ayah” + anak laki-laki tertua, seperti *Ummi Ahmad*, dan untuk laki-laki dipakai *abu* “ayah”, seperti *Abu Muhammad* (Spolsky, 1998:22). Dalam bahasa-bahasa Eropa, bentuk kata ganti singularis digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan akrab dan bentuk pluralis untuk orang yang dihormati, seperti *du*

untuk hubungan akrab dan *Sie* untuk pihak yang dihormati dalam bahasa Jerman, atau *tu* dan *vous* untuk bahasa Prancis, dan *jij* dan *U* dalam bahasa Belanda.

Sopan santun tersebut dikendalikan oleh hubungan sosial antarpeserta pembicaraan, yang didasarkan kepada jarak sosial antar peserta yang oleh Brown dan Gillman (1960) disebut dengan hubungan *power and solidarity* “kekuasaan dan keakraban”. Faktor-faktor yang dinyatakan dengan *power and solidarity*, antara lain, adalah perbedaan jabatan, pangkat, usia, dan hubungan kekerabatan.

Strategi sopan santun yang *kedua* adalah strategi yang dimunculkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam upaya mencapai maksud tuturan. Sebagai contoh dapat dikemukakan pernyataan menteri BUMN Dahlan Isman ketika mensinyalir adanya anggota DPR yang dituding memeras pimpinan BUMN dengan menyebut jumlah anggota DPR terang-terangan menyebut “10 orang”, padahal yang dilaporkan dengan bukti-buktinya hanya 3 orang. Oleh karena itu, maka DPR menyatakannya dan menganggap sang menteri menghina lembaga DPR. Demikian keras kemarahan para anggota DPR, hingga menulis surat kepada presiden agar presiden menegur menterinya itu. Seandainya menteri Dahlan menggunakan strategi sopan-santun bahasa, mungkin mengurangi kadar kemarahannya. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan strategi yang dianjurkan oleh linguistik (pragmatik) ialah dengan menggunakan perisai, yakni ungkapan berupa kata, frase, atau klausa yang dapat melindungi lawan bicara akan ancaman harga dirinya atau menurut istilah pragmatik, agar tidak kehilangan “wajah”nya (Brown dan Levinson (1987). Misalnya, jangan langsung menyebut jumlahnya tetapi menjadikannya “kabur” atau tidak jelas, dengan menggunakan kata seperti “sejumlah” anggota DPR, atau mengecilkannya menjadi seperti “beberapa anggota DPR”.



## PERLU DIBANGUN RAGAM BAHASA POLITIK YANG SANTUN

Banyak cara untuk membuat ungkapan pelindung, membuat agar maksud tuturan tercapai tanpa mengganggu hubungan atau kerja sama antarpeserta pembicaraan. Selain yang sudah disebut, yakni “mengaburkan” dan “mengecilkan”, ungkapan keraguan seperti *agaknyanya*, *rasanya*, atau menyembunyikan sumbernya seperti “*kata orang*”, “*yang saya dengar*”, dan “*sepengatahuan saya*”.

Strategi kesopanan ketiga ialah apa yang disebut ujaran tak langsung. Sejumlah ujaran performatif dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat yang dalam tata bahasa sering disebut kalimat tak langsung. Bila pembicara ingin menyampaikan agar maksud ujarannya dapat disampaikan dengan berhasil, ia memilih ujaran yang tidak langsung. Bila pembicara berada di sebuah restoran bersama orang lain yang kurang akrab menghendaki pertolongan lawan bicaranya, misalnya, di tengah menikmati hidangannya memerlukan garam karena makanannya kurang asin, sementara garam yang disediakan pemilik restoran berada jauh dari tempat duduknya, sedang lawan bicaranya lebih dekat, maka ia akan menyampaikan ujaran: *Dapatkah Anda menggeserkan garam ke mari?*

Ujaran yang berbentuk pertanyaan itu, tentulah bukan untuk dijawab ya atau tidak melainkan sebuah permintaan, yang dirasakan lebih sopan daripada memakai ujaran langsung. Bila ingin lebih sopan lagi, dalam bahasa Inggris terdapat ucapan verbal yang dapat ditambahkan, yakni ungkapan “*Please*”. Sebuah ajakan yang diucapkan oleh seorang mahasiswa kepada pacarnya merupakan contoh lain. Mengajak teman wanitanya berjalan-jalan, mahasiswa itu menyampaikan ucapan *Ada acara apa sore ini?* Ajakan tidak langsung itu dipakainya untuk melindungi mukanya, seandainya teman wanitanya menolak ajakannya.

Dari sebuah percakapan politik, yang direkam mahasiswa dalam calon tesisnya dapat pula kita ambil contoh ujaran tidak langsung.

Seorang pewawancara mengajukan pertanyaan kepada seorang yang diduga akan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun 2009. Terjadi percakapan ini:

**X. Kalau rakyat mendukung dan partai-partai mendukung Anda untuk maju pada tahun 2009, bersediakah Anda?**

**Y. Itu ulasannya masyarakat. Kalau memang memerlukan saya, (mereka) akan mencari diri saya.**

Pertanyaan X tersebut dijawab dengan “Ya” tetapi secara tidak langsung menggunakan ujarannya untuk memberi masukan agar lawan bicara dapat memahami maksud yang tersirat, yaitu “Ya, bersedia”. Ujaran itu dalam linguistik pragmatik disebut dengan implikatur percakapan.

Sebagai penutup, mari kita cermati bagaimana seorang linguist memberikan sarannya agar pembicara berlaku sopan. Seorang penutur harus (a) arif, dalam arti: berusaha meminimalkan beban, dan memaksimalkan keuntungan lawan tutur, (b) dermawan, yakni meminimalkan keuntungan pribadi sendiri, dan memaksimalkan kerugian pada diri sendiri, (c) memuji, yakni meminimalkan ucapan yang berupa kecaman, memaksimalkan pujian, (d) rendah hati, meminimalkan ucapan yang memuji diri sendiri, memaksimalkan memuji lawan bicara; dan (e) meminimalkan ketidaksetujuan, dan memaksimalkan kesetujuan, tunjukkan simpati, hindarkan antipati (Leech 1983).

## KEPUSTAKAAN

Brown, Roger dan Albert Gilman. 2003. “The Pronoun of Power and Solidarity” dalam Paulston, Cristina Brat, dan G. Richard Tucker, (eds), dalam *Sociolinguistics, The Essential Readings*, USA dan UK: Blackwell Publishing, Ltd.

## PERLU DIBANGUN RAGAM BAHASA POLITIK YANG SANTUN

- Brown, Penelope dan Stephen, C. Levinson. 1987. *Politeness, Some Universals in Language Usage*. New York, Sydney: Cambridge University Press.
- Cruce, Allan. 2004. *Meaning in Language, An Introduction to Semantics and Pragmatics*. New York: Oxford University Press.
- Collinns Cobuild. *Essential Dictionary*. London: HarperCollinsPublishers.
- Djunaedi, Bambang. 2002. "Penggunaan Pemagar dalam Percakapan di Radio Elshinta", tesis diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pascasarjana, bidang ilmu pengetahuan budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Program Studi Linguistik, Depok: Program Pascasarjana Ilmu Pengetahuan budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Ervin-Tripp. 1972. "Sociolinguistic Rule of Address" dalam Pride, J.B., dan Janet Holmes, *Sociolinguistics, Selected Readings*. England, Australia: Penguin Books, Ltd.
- Geerts, C.. 1972. "Linguistic Etiquette", dalam Pride, J.B. and Holmes, Janet *Sociolinguistics, Selected Reading*, USA dan England.
- Grice, H.P. 1991. "Logic and Conversation" dalam Davis, Steven. *Pragmatics, A Reader (ed)*, New Searle, John, R. "Indirect Speech Act", dalam Davis, Steven. *Pragmatics, A Reader (ed)*, New York: Oxford University Press.
- Kasper, Gabriele. 1997. "Linguistic Etiquette", dalam Coulmas, Florian (Ed), *The Handbook of Sociolinguistics*. New York: Cambridge, Massachusetts, Blackwell Publishers Ltd.
- Leech, Geoffrey. 1983. *Principles of Pragmatics*. London, New York: Longman Group, Ltd.
- Spolsky, Bernard. 1998. *Sociolinguistics*. New York: Oxford University Press.
- Sitanggang, Natal P. 2008. "Relfleksivitas Implikatur Percakapan dalam Tayang Bincang Politik di Televisi Indonesia", proposal tesis, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2008.

MUHADJIR

Tim (Peneliti) Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 1977. *Bahasa Indonesia Surat Resmi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Bahasa.

## Bab IX

# CATATAN RINGKAS TENTANG KRISIS KEBUDAYAAN<sup>1</sup>

*Sapardi Djoko Damono*

### Abstrak

Catatan ringkas ini disarikan dari (dan sekaligus koreksi atas) kumpulan tulisan yang sudah dan belum saya bukukan. Krisis memiliki beberapa nuansa arti, antara lain, ‘saat yang begitu berbahaya oleh karenanya memerlukan penanganan yang segera,’ dan ‘suatu saat ketika suatu masalah sudah mencapai titik yang sangat berbahaya.’ Dalam kaitannya dengan konsep krisis, tampaknya proyek pengumpulan karangan ini bersandar pada pandangan bahwa keadaan kebudayaan kita sudah mencapai titik yang berbahaya; segera ditangani atau tidak adalah masalah lain yang sama sekali di luar jangkauan tulisan ini. Saya akan mencoba mempertimbangkan masalah tersebut dari tiga pendekatan atau sudut yang, tentu saja, ada kaitannya. Tumpuan pertimbangan itu adalah sumpah yang dilakukan oleh nenek moyang kita pada 28 Oktober 1928, yang kita keramatkan sampai sekarang.

Kata Kunci: krisis, kebudayaan kita, sumpah, 28 Oktober 1928.

---

<sup>1</sup> Tulisan ini diambil dari dan terintegrasi dalam Sapardi D. Damono. *Kebudayaan Populer di Sekitar Kita*, Jakarta: Edisi, 2013.

### **Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Indonesia**

Niat kita membentuk sebuah negara kesatuan pada dasarnya merupakan awal yang disebut krisis tersebut. Niat itu baik, tentu saja, dan alhamdulillah bisa terlaksana ketika kita menyatakan Kemerdekaan pada tahun 1945, meskipun bisa saja dikatakan bahwa sejak 1928 niat itu sudah ditanamkan kuat-kuat oleh para pemuda. Sejumlah ‘jenius muda’ telah bersumpah untuk memiliki satu bangsa dan satu tumpah darah. Dari perspektif kita sekarang tampak jelas bahwa yang mereka maksudkan sebagai “tanah Indonesia” adalah hamparan pulau yang sudah beberapa kali menjadi koloni atau jajahan bangsa lain. Dengan dasar kenyataan seperti itu, apakah kita sekarang tidak mau menyadari bahwa pada dasarnya konsep “tumpah darah” tersebut bersumber pada perkembangan politik dan historis yang ditentukan oleh kekuatan (bangsa, negara, atau usaha dagang) yang menguasai kita? Batas-batas negeri kita ini ditentukan tidak berdasarkan kesepakatan kita sendiri, melainkan oleh kenyataan historis yang, celakannya, bisa saja berubah-ubah. Selama beberapa dasarwarsa kita telah mengalami masalah yang berkaitan dengan Timor Timur dan Langkawi. Dalam pikiran kita tentu saja kedua wilayah itu masuk ke dalam pengertian “satu tanah air”, seperti yang digagas oleh nenek moyang kita (yang waktu itu masih sangat muda). Rupanya dunia dan pengadilan antarbangsa berpendapat bahwa gagasan itu tidak benar – maka lepaslah kedua wilayah itu dari “tumpah darah” kita, lewat perang dan keputusan pengadilan. Langkawi milik Malaysia sebab dulunya menjadi jajahan Inggris, Timor Timur bukan tumpah darah kita sebab pernah berada di bawah jajahan Portugis.

Demikianlah maka Kalimantan dibagi-bagi: sebagian milik Indonesia, sebagian yang lain milik Malaysia. Demikian juga Papua. Demikian juga Pulau Timor. Hal ini pada hakikatnya berhadapan

dengan konsep primordialisme, yang akhirnya ternyata harus tunduk pada ciri teritorialisme yang ditentukan oleh faktor sejarah politik. Gagasan tentang negara kesatuan pada hakikatnya bersandar pada butir pertama sumpah yang dinyatakan tahun 1928 itu; tanah yang menjadi teritori berbagai perkumpulan pemuda pada masa itu seperti Jong-Java, Jong-Selebes, dan Jong-Sumatra dikukuhkan menjadi “tumpah darah yang satu.” Sementara itu, ada juga perkumpulan yang tampaknya tidak dikaitkan dengan daerah tertentu, seperti Jong Islamieten Bond dan Pemuda Indonesia. Namun, ada juga yang bernama Jong-Bataksbond, yang tentunya harus diperlakukan terpisah dari Sumatra. Dalam ketiga butir pernyataan para pemuda itu tercantum kata “satu,” yang tentunya merupakan inti kongres tersebut. Inti inilah yang tentunya membuahkan makna kata “kesatuan” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: kita memiliki satu tanah yang bernama Indonesia. Sumpah atau keputusan itu disepakati oleh perkumpulan-perkumpulan yang berbasis teritori maupun tidak, yang dasarnya adalah teritorialisme maupun sektarianisme. Gagasan semacam itu tentunya dengan mudah disepakati oleh orang-orang muda yang mulai merasakan perlunya memiliki satu negara yang tidak menjadi koloni bangsa lain.

### **Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia**

Kita semua ini satu bangsa, seperti yang diamanatkan kongres pada 28 Oktober 1928. Tanggal itu dikeramatkan pasti karena kita menginginkan semua orang yang tinggal di hamparan pulau ini merasa menjadi satu. Bangsa kita ini terdiri atas begitu banyak bangsa, yang entah karena apa disebut juga “suku bangsa,” yang telah mendiami daerah yang sedikit banyak memiliki ekosistem, yakni “semua tumbuhan dan makhluk hidup di daerah tertentu berkaitan dengan “lingkungan fisiknya,” yang berbeda-beda. Konsep “suku

bangsa” atau etnik biasanya diartikan sebagai ‘kelompok manusia yang anggotanya berbagi mitos tentang asal-usul dan keturunan, kenangan kesejarahan, pola dan nilai-nilai budaya, tinggal di wilayah yang sama, dan rasa kebersamaan terutama di kalangan elit.’ Jelas sekali bahwa konsep itu berdasarkan sikap yang biasanya disebut primordialisme dan teritorialisme. Bangsa-bangsa yang tercakup dalam negara kesatuan ini sudah sejak entah kapan mendiami wilayah yang berbeda-beda, yang terpisah hanya beberapa kilometer atau ratusan kilometer jaraknya. Masing-masing kita mula-mula tidak pernah membayangkan adanya bangsa yang bernama “Indonesia” – nama itu pun pemberian bangsa lain. Dan ketika pada tahun 1928 dinyatakan adanya satu bangsa Indonesia, kita *monat-manut* saja. Berbagai jenis organisasi yang pada dasarnya bertumpu pada dua konsep itu pun tampaknya ikhlas untuk lebur, tidak ada lagi berbagai *jong* atau *sekar*.

Tentu saja tidak usahlah kita yakin bahwa semua yang berkepentingan ikhlas juga menanggalkan label yang berkaitan dengan wilayah dan kebudayaan. Kelompok etnik biasa juga disebut “orang”, ada orang Sunda orang Jawa, orang Ambon, dan sebagainya; masing-masing orang memiliki wilayah dan antara lain adat-istiadat serta jenis kesenian yang dianggap khas, dan melepaskan semua itu pasti bukan cita-cita dan niatnya. Dengan demikian, tentunya bangsa “baru” yang namanya Indonesia itu adalah sekumpulan orang yang masing-masing tidak ikhlas menanggalkan labelnya. Sekarang pun, setelah hampir seratus tahun setelah kongres tersebut, kita sampai batas tertentu masih juga memelihara sikap primordial dan teritorial itu. Bahkan, bisa dikatakan bahwa ada kecenderungan menguatnya kembali sikap itu, yang, antara lain, tampak jelas ketika masing-masing orang menyelenggarakan berbagai jenis kongres bahasa dan kebudayaan. Kenyataan ini tidak usah kita pakai sebagai alasan untuk menyalah-nyalahkan siapa pun sebab tampaknya memang



## CATATAN RINGKAS TENTANG KRISIS KEBUDAYAAN

sangat wajar jika orang memperjelas label masing-masing. Menyebut diri sendiri orang Indonesia tetapi juga orang Ambon atau orang Sunda apa pula salahnya karena memang demikian kenyataannya. Masing-masing kita memiliki kemelayuan atau kejawaan yang terkait pada teritori tertentu. Orang Jawa yang orang urban di Jakarta merasa perlu setiap Lebaran “pulang” ke teritorinya di Wonogiri atau Kediri, “pulang” ke Jawa, meskipun mungkin kampung halamannya sudah digusur oleh waduk.

Orang Bali tidak dianggap lagi sebagai “Bali” kalau tidak dengan tekun mengikuti upacara yang berkaitan dengan hal-hal primordial, yakni yang menjadi dasar sejak entah kapan ketika orang Bali ada di sebuah teritori yang dinamakan Bali. Ciri-ciri primordial itu harus dipertahankan – bahkan ketika orang Bali tidak lagi berada di Bali, ketika orang Bugis tidak lagi berada di Sulawesi Selatan. Di negara yang memberikan label “kesatuan” pada dirinya sendiri tetap saja orang yang datang dari teritori lain, yang dianggap memiliki ciri-ciri primordial berbeda, dianggap sebagai liyan. Orang Jawa di Makassar atau Samarinda dianggap sebagai pendatang atau tamu. Jadi, apa makna “Kesatuan” pada NKRI ini? Kita pernah menjadi sebuah negara kesatuan, pernah juga menjadi negara serikat; dan ketika sekarang menjadi kesatuan lagi sifat sebagai “serikat” itu tidak juga bisa kita tinggalkan. Meskipun pernah menjadi negara serikat, ciri-ciri keserikatan kita sama sekali berbeda, misalnya, dari Amerika Serikat. Di sana, yang berserikat adalah teritori yang tidak ada kaitannya dengan primordialisme. Serikat bangsa kita adalah kumpulan orang yang masing-masing berpegang teguh pada ciri-ciri primordial dan teritorial. Keinginan kita di zaman lampau untuk berserikat mungkin lebih mirip dengan niat bangsa-bangsa di Eropa yang sejak beberapa tahun lalu membentuk perserikatan, tanpa

keinginan untuk melepaskan label sebagai orang Italia, Turki, atau Serbia.

Dan sekarang ketika kita mati-matian mempertahankan NKRI, apakah masing-masing kita benar-benar memahami makna dan implikasi kata “kesatuan”? Sikap primordial dan teritorial yang selama ini belum pernah sepenuhnya padam tampaknya malah berkobar lagi ketika yang namanya “pemerintah pusat” tidak dipercaya mengelola negeri ini secara keseluruhan. Hasil utama ketidakpercayaan itu adalah lahirnya konsep otonomi daerah. Konsep ini jelas mengacu ke teritori yang ternyata tidak bisa dipisahkan dari sikap primordial. Demikianlah maka Pulau Bali, misalnya, adalah milik orang Bali yang sudah seharusnya dihuni hanya oleh orang Bali. Orang yang berasal dari teritori lain adalah pendatang atau tamu atau bahkan orang asing. Keputusan politis untuk tetap berada dalam sebuah negara kesatuan dengan menegaskan ciri-ciri teritorial dan primordial memiliki dampak yang luas, yang jelas-jelas menumbuhkan sikap yang menggelikan ketika masuk ke dunia politik, pemerintahan, dan pendidikan. Di hampir semua provinsi tumbuh kecenderungan untuk menyerahkan pengelolaan pendidikan hanya kepada “putra daerah”. Rektor Universitas Udayana harus orang Bali, rektor Universitas Padjadjaran harus orang Sunda, dan seterusnya. Meskipun mungkin ada tokoh yang memiliki kemampuan lebih untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, ia tidak akan diterima kalau berasal dari etnik lain sebab orang itu adalah liyan. Yang berproses di sini adalah insting teritorial dan primordial. Tampaknya konsep “bangsa Indonesia” yang ada dalam pikiran nenek-moyang kita sejak 1928 itu semakin sulit dimaknai.

### **Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia**

Dalam naskah yang kita keramatkan itu dinyatakan bahwa kita “menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.” Ada dua perkara yang bisa kita ajukan: pertama, yang berkaitan dengan penyebutan bahasa Indonesia; kedua, yang berkaitan dengan kebudayaan – dua hal itu pada dasarnya satu hal yang sulit dibedakan. Jelas bahwa bahasa Indonesia tidak pernah diproklamasikan sebagai satu-satunya bahasa, berbeda dengan bangsa dan tumpah darah. Bahasa yang saya pakai untuk menulis ini bukan bahasa ibu saya. Itu mungkin sebabnya pernah ada orang asing bertanya, “Kok kamu tidak menulis dalam bahasa Jawa?” saya diam saja, tidak tahu harus menjawab apa, meskipun pernah juga menulis dalam bahasa ibu saya. Inti pertanyaan itu saya pikir berkaitan dengan situasi yang aneh: kita menggunakan bahasa Indonesia tetapi tidak mau kehilangan bahasa daerah. (Saya pernah diberi tahu bahwa banyak juga orang yang tidak suka disebut orang daerah). Nah, daerah berarti teritori, bahasa berkaitan dengan primordialisme. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam kehidupan ini, bahkan dikatakan bahwa bahasa adalah kebudayaan sebab kebudayaan itu tak lain komunikasi. Bahasa disebut sebagai salah satu butir sumpah 1928, tetapi dalam naskah lengkap sumpah itu kata “kebudayaan” tidak kita temukan. Bahasa dianggap bisa menyatukan kita, tetapi kebudayaan?

Sumpah itu menyatakan sebagai berikut.

Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya:

- Kemauan
- Sejarah
- Bahasa
- Hukum adat

- Pendidikan dan kepanduan.

Kata “kebudayaan” sama sekali tidak muncul. Saya yakin, yang menulis naskah sumpah tersebut adalah orang-orang muda yang sangat cerdas, itu sebabnya saya tidak berani menganggap bahwa tidak munculnya kata “kebudayaan” merupakan akibat kebodohan. Jadi, ada dua kemungkinan. Pertama, mereka beranggapan sangat maju, yakni menyebut “bahasa” untuk mewakili “kebudayaan”; atau kedua, beranggapan bahwa kalau kata “kebudayaan” disebut-sebut, keinginan untuk bersatu malah bisa menimbulkan kekacauan dan selisih pendapat yang mendasar. Saya cenderung berpendapat bahwa yang kedua itulah yang mereka risaukan. Kita tahu, beberapa tahun selepas kongres terjadi silang pendapat di kalangan kaum intelektual kita, yakni “polemik kebudayaan”. Sutan Takdir Alisjahbana bilang begini, Ki Hadjar Dewantara bilang begitu, Dr. Soetomo bilang yang lain lagi, dan seterusnya. Kebudayaan ternyata bukanlah perekat terbaik untuk menyatukan kita, tetapi bagaimana dengan bahasa? Kita wajib berterima kasih dan bersyukur bahwa bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa persatuan, tanpa protes berarti. Namun, tampaknya “persatuan” terbatas pada fungsinya sebagai alat bertengkar. Bayangkan, seandainya bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bahasa persatuan, dengan bahasa apa pula kita bertengkar? Nah, kalau bahasa adalah alat komunikasi, dan komunikasi adalah kebudayaan, maka sampailah kita pada semacam kesimpulan bahwa kebudayaan kita adalah alat untuk bertengkar. Atau dalam kebudayaan, kita bertengkar. Dan pertengkar kebudayaan bisa sangat seru sebab cenderung tidak *nyambung*. Alasannya jelas, bahasa Indonesia bukan satu-satunya bahasa. Sama dengan mengatakan “kebudayaan Indonesia” (kalau itu memang ada) bukan satu-satunya kebudayaan. Dan tentu saja krisis bisa muncul kalau masing-masing orang dengan

ngotot memproklamasikan bahwa kebudayaan sendirilah yang paling unggul, yang harus dipertahankan, yang tidak boleh ditelantarkan, yang menyebabkan begitu banyak orang suka marah-marah dalam setiap kongres bahasa, terutama bahasa daerah.

### **Keberagaman dan Keseragaman**

Semoga tersirat dalam alinea-alinea sebelumnya bahwa, jika ditinjau dari hampir semua hal, kita ini ternyata berbeda – terutama karena adanya perbedaan ekosistem. Mereka yang tidak termasuk kaum kita dianggap liyan. Kalau tidak mau dianggap liyan, sebaiknya jangan pergi ke mana-mana atau tinggal di daerah lain, tetaplah saja di kampung sendiri. Peraturan otonomi daerah tampaknya didasarkan pada konsep tersebut. Kita ini bermacam ragam, jadi sebaiknya masing-masing diberi hak untuk mengurus diri sendiri. Perkara mampu atau tidak, itu soal lain. Namun, peraturan yang menginginkan keberagaman itu dilandasi keseragaman: prinsip-prinsip yang sama harus dilaksanakan di mana pun. Tidak terkecuali bidang pendidikan. Demikianlah, misalnya, di Depok yang terletak di batas Jakarta semua sekolah mengharuskan murid belajar bahasa Sunda sebab Depok termasuk Jawa Barat, teritori orang Sunda – meskipun anak-anak yang ada dalam kelas bernama Warouw, Silalahi, Kencono, dan Sihasale. Ini terjadi di semua provinsi.

Tidak bisa disangkal lagi bahwa yang berkuasa dalam negara kesatuan kita ini adalah primordialisme dan teritorialisme. Orang Ambon jelas tidak boleh menganggap Tari Pendet miliknya. Bahkan, konon ada menteri yang *mencak-mencak* karena beberapa jenis kesenian kita “diaku” orang Malaysia. Pak Menteri rupanya lupa bahwa kisah tentang Rama, Sita, Hanuman, Arjuna, dan Drupadi yang telah menumbuhkan nilai-nilai dan norma-norma sebagian dari kita berasal dari Anak Benua Asia. Sejak entah kapan nenek-

moyang kita telah mencurinya begitu saja dari sana, tentu tanpa izin terlebih dahulu. Berbeda dengan kita sekarang, mereka rupanya tidak memedulikan konsep “asing”, “Indonesia”, dan “daerah” – tidak hanya dalam kesenian melainkan dalam bidang apa pun. Hari begini, ketika hasil teknologi komunikasi masuk ke segenap penjuru kehidupan, masih juga kita bicara tentang “intervensi” kebudayaan asing. Malah ada juga yang tega berpendapat bahwa bahasa Indonesia telah “membunuh” bahasa daerah.

Kebudayaan tumbuh dari ekosistem. Dalam kenyataannya ada faktor di luar itu yang berperan mahapenting dalam pembentukan kebudayaan, yakni agama. Maka lengkaplah “krisis” kita ini: teritorialisme, primordialisme, dan sektarianisme. Semua gagasan itu menakutkan, sungguh. Dan karena kita semua merasa gamang kalau tidak termasuk “sekte” – apa saja – maka gagasan utama sektarian, yakni akhirat, mau tidak mau harus disebut dalam setiap visi lembaga apa pun. Perguruan Tinggi kita pun, yang mengaku dirinya sebuah *agent of change*, tetap berpegang pada konsep akhirat: lulusannya harus menjadi orang yang bertakwa. Kita tidak akan bisa mengukur takwa tidaknya orang-seorang, apalagi mengukur akhirat. Padahal, pendidikan hanya bisa hidup kalau apa yang dikerjakannya bisa diukur.

## Penutup

Kembali ke awal karangan ini: krisis memiliki beberapa nuansa arti, antara lain, ‘saat yang begitu berbahaya oleh karenanya memerlukan penanganan yang segera,’ dan ‘suatu saat ketika suatu masalah sudah mencapai titik yang sangat berbahaya.’ Yang saya paparkan secara ringkas dalam tulisan ini mungkin bisa dikategorikan sebagai “krisis”, mungkin juga tidak. Kalau memang semua itu krisis, yang kita miliki dan kembangkan selama ini adalah budaya krisis. Di

#### CATATAN RINGKAS TENTANG KRISIS KEBUDAYAAN

negara kesatuan ini kita memelihara krisis, dan bersenjatakan semua jenis “krisis” itulah kekuatan politis di negeri kita ini berusaha habis-habisan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan agar mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, dalam jenis apa pun. Proses semacam itu tampak sangat jelas dalam semua tingkat tata pemerintahan. Proses semacam itu tampaknya terus dipertahankan dengan menyelenggarakan kegiatan yang mengatasmakan konsep mahakompleks yang kita kenal sebagai Demokrasi.





## Bab X

# KRISIS IDENTITAS<sup>1</sup>

*Noerhadi Magetsari*

### Abstrak

Karangan ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membicarakan masalah identitas dan krisis identitas secara teoretis. Di sini dikaji secara singkat kaitan antara globalisasi, kebudayaan, dan krisis identitas, dan yang akhirnya bermuara pada kesimpulan bahwa krisis identitas merupakan ciri era pascamodern.

Bagian kedua mengkaji keadaan di Indonesia, terutama masalah mengapa pada era pascamodern yang sedang berlangsung ini, dengan krisis identitas yang menjadi cirinya, di Indonesia identitas politis yang telah dimiliki, justru ditelantarkan. Dicoba pula dijelaskan konflik antaretnik yang terjadi, maupun bahaya disintegrasi bangsa yang mengancam sebagai akibat dari ketelantaran ini. Dalam kaitan itu, dicoba untuk dijelaskan mengapa penegakan kembali Pancasila sebagai identitas politis justru tepat untuk diterapkan sebagai solusi dalam upaya mengatasi krisis identitas yang terjadi.

Kata Kunci: identitas, krisis identitas, globalisasi kebudayaan, pasca modern, identitas polisi.

---

1 Karangan ini merupakan pengembangan dari “Membangun Karakter Bangsa dari Perspektif Budaya”, yang disampaikan pada Seminar Nasional “Aktualisasi Fungsi Arsip Sebagai Simpul Integrasi Nasional dalam Pembangunan Karakter Bangsa”, Ternate, 11 Juli 2012.

## I

Apabila krisis kebudayaan dibicarakan, maka mau atau tidak harus pula dibicarakan pendukung kebudayaannya. Atas dasar itu maka karangan ini akan membicarakan manusia pendukung kebudayaan itu. Apabila kebudayaan yang didukungnya mengalami krisis, maka dengan sendirinya manusianya pun ikut menderita (Lieber dan Weisberg 2002: 285 dst.). Masalahnya adalah apanya yang krisis. Untuk membatasi permasalahan maka yang akan dibicarakan adalah identitas. Menurut Giddens dalam era pascamodern<sup>2</sup> ini, masalah identitas justru mengemuka karena menurut hasil penelitian terlihat bahwa identitas itu majemuk dan dengan demikian terbuka kemungkinan untuk terjadi perubahan. Selanjutnya Giddens menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh peri kehidupan yang meluas sehingga tidak dapat lagi diantisipasi sejak awal. Keadaan yang demikian ini membuat individu senantiasa dituntut untuk secara terus-menerus menghadapi dan menyesuaikan diri dengan pilihan-pilihan gaya hidup (1991: 75).

Dewasa ini terlihat bahwa identitas telah dikaitkan dengan masalah gender, berakar pada kelas, ras, etnisitas (kesukuan), dan orientasi seksual. Atas dasar itulah, maka identitas dapat dikatakan bersifat jamak bahkan hibrid, dalam arti tidak lagi perlu dikaitkan dengan warna kulit, terpelajar, metropolitan dan kemampuan fisik, orang Barat atau laki-laki untuk dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Di sisi lain, masih terdapat wacana bahwa dunia terbagi dalam dunia maju dan dunia ketiga, dengan yang ketiga dominasi yang pertama. Namun, identitas politis yang diciptakan negara-negara berkembang, telah mampu menjadikan makna dan

---

<sup>2</sup> Sesungguhnya Anthony Giddens lebih suka memakai istilah modern-lanjut daripada pascamodern. Namun, dalam karangan ini yang dipergunakan adalah istilah yang lebih umum, yaitu pascamodern.

## KRISIS IDENTITAS

kemauan pribadi menjadi pemicu yang kuat dalam membangkitkan rasa percaya diri. Pada gilirannya rasa percaya diri yang demikian inilah yang akan mampu tidak hanya menanggapi, melainkan juga menjinakkan kekuatan-kekuatan yang mendominasi dan datang dari luar (Woodward 2002: 3).

Dari uraian di atas terlihat bahwa masalah identitas menjadi mengemuka apabila dipersoalkan “siapakah saya”. Dalam kehidupan sehari-hari, biasa kita jumpai istilah-istilah “kehilangan identitas”, “mencari identitas”, atau “krisis identitas”, dan sering tanpa mempersoalkan apa sesungguhnya makna dari istilah-istilah tersebut. Paling tidak kita dapat mempersoalkan identitas yang terkait dengan “krisis budaya”, yaitu krisis identitas: “apakah betul ada krisis identitas”. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dicoba dijawab dalam karangan ini.

## II

*Just now everybody wants to talk about ‘identity’ . . . identity only becomes an issue when it is in crisis, when something assumed to be fixed, coherent, and stable is displaced by the experience of doubt and uncertainty.*

(Mercer, dalam Woodward, 2002: 15)

Pada hakikatnya masalah “identitas” dan “krisis identitas” tidak saja muncul dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan juga telah menjadi obyek penelitian para ahli sosiologi maupun para ahli teori sosial. Pada umumnya mereka sependapat bahwa krisis identitas telah menjadi ciri masyarakat kontemporer atau pascamodern.

Atas dasar ini maka dalam membicarakan identitas perlu dibedakan adanya empat tataran, yaitu global, nasional, lokal,

dan personal. Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam arena global, identitas politis dapat saling berhadapan, dan menimbulkan pertentangan antarkomunitas yang pada akhirnya mengobarkan konflik. Konflik ini dapat berakibat malapetaka karena kedudukan yang tidak seimbang di antara pihak-pihak yang bertentangan, sebagaimana yang terjadi di Bosnia, Rwanda, dan Palestina. Dalam arena nasional, perbedaan antarkomunitas dapat menimbulkan konflik yang dipicu oleh pertentangan antaridentitas geo-etnis,<sup>3</sup> sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Barat, dan akhir-akhir ini juga di Lampung. Pada tataran personal, identitas individu dapat ditentukan oleh kedudukan manusianya dalam masyarakat, apakah sebagai warga etnis, penganut agama tertentu, atau sebagai warga negara (Habermas 1994; Wexler 1990).

Telah pula diutarakan bahwa pada umumnya para ahli berpendapat bahwa krisis identitas merupakan ciri pascamodern dan bahwa kemunculannya hanya dapat dimaklumi apabila ditempatkan dalam konteks globalisasi dan terciptanya budaya global (Featherstone 1990), yang pada gilirannya telah pula mewarnai kehidupan kontemporer. Namun, di samping menyebabkan terjadinya krisis identitas, globalisasi juga berdampak lain terhadap identitas. Pemaduan budaya yang dipicu oleh pemasaran secara global dapat mengakibatkan tercabutnya identitas baik dari masyarakatnya maupun dari tempatnya.<sup>4</sup> Sebaliknya globalisasi dapat pula mengakibatkan terjadinya penolakan, yang pada gilirannya justru akan mampu memperkuat dan memperkokoh identitas, baik dalam skala nasional, lokal, maupun personal.

---

3 Mengenai pengertian identitas politis dan identitas geo-etnis akan dibicarakan lebih lanjut di bawah.

4 Dalam hal ini patut untuk diingat sumpah pemuda yang berlafal: satu bangsa dan satu nusa.

## KRISIS IDENTITAS

Jadi, apa sesungguhnya identitas itu? Dari sudut teori, identitas dibedakan ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan esensialis dan pendekatan non-esensialis. Pendekatan pertama beranggapan bahwa identitas merupakan sesuatu kewajaran yang timbul secara alami baik secara biologis atau dari kekuatan alam, dan dengan demikian bersifat tetap tidak berubah. Sebaliknya, pendekatan non-esensialis berpendapat bahwa identitas itu merupakan bentukan sosial serta dikendalikan oleh budaya. Dengan demikian, identitas bersifat tidak tetap dan tidak tunggal. Atas dasar ini maka apabila kita berbicara tentang krisis identitas, maka pada hakikatnya kita menerapkan pendekatan yang kedua.

Secara konseptual, identitas dapat pula dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu identitas sebagai subyektivitas, identitas sebagai antarsubyektivitas, dan identitas sebagai solidaritas sosial. Identitas sebagai subyektivitas: secara internal individu kehilangan pegangan moral dan keteguhan spiritual dalam berinteraksi sosial, sebagai akibat dari pergeseran kehidupan bermasyarakat dari religius ke sekuler. Demikian pula budaya simulasi yang didukung oleh teknologi digital telah pula menggoyahkan pengertian identitas individu. Identitas sebagai antarsubyektivitas: kejamakan identitas yang dimiliki individu akan senantiasa berganti bergantung pada interaksinya dengan individu lain, apakah sebagai warganegara, sebagai penganut agama ataukah sebagai warga etnis tertentu. Identitas sebagai solidaritas sosial: solidaritas sosial yang pada awalnya berdasarkan pada nusa, sekarang dalam dinamika yang sangat mobil, mengaburkan konsep tempat, dalam hal ini, daerah asal atau secara nasional tanah air.

## III

Sebagaimana di atas telah disinggung sebelumnya, krisis identitas merupakan ciri dari masyarakat pascamodern. Sementara itu, kajian

teori yang non-esensialis menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemungkinan untuk memiliki beberapa identitas yang berbeda-beda. Kepemilikan identitas yang majemuk ini pada gilirannya ditentukan oleh kedudukan manusia dalam kehidupan sosialnya. Adapun pemberian hak untuk memiliki identitas yang berlain-lainan itu dimungkinkan dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis, yaitu secara hukum setiap identitas diakui eksistensinya. Namun, apa yang patut dicatat di sini adalah kenyataan bahwa identitas itu tidak bersifat stabil atau langgeng. Identitas dapat melemah bahkan hilang. Kehilangan identitas ini dapat terjadi oleh karena tergerus oleh arus perubahan yang kuat, atau karena tidak dipelihara sehingga terlupakan oleh manusia yang “pernah” memilikinya. Konteks yang demikian inilah yang menimbulkan terjadinya krisis identitas, yang menjadikan manusia kehilangan identitasnya.

Apabila konteks permasalahan di atas diterapkan guna mengkaji krisis identitas yang terjadi di Indonesia, maka masalahnya adalah identitas mana yang mengalami krisis itu. Mengapa hal itu dianggap sebagai krisis? Apa yang menyebabkan terjadinya krisis itu apabila hal ini dianggap sebagai krisis? Hal-hal inilah yang akan dicoba diulas lebih lanjut.

Manusia Indonesia memiliki beberapa identitas yang berlain-lainan, sesuai dengan kedudukannya dalam kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk beragama ia memiliki identitas religi sesuai dengan agama yang dianutnya, apakah itu Hindu Bali, Buddha, Konghucu, Nasrani, atau Islam. Sebagai makhluk sosial ia memiliki bahasa-bahasa daerahnya masing-masing. Sebagai makhluk berbudaya ia mendukung budaya etniknya masing-masing. Di samping identitas yang terkait dengan aspek sosial-budaya, manusia Indonesia juga memiliki identitas yang lekat dengan tempat, yaitu daerah di mana mereka tinggal atau daerah dari mana mereka berasal. Identitas yang demikian ini secara

teknis disebut sebagai identitas geo-etnik. Sementara itu, sebagian besar manusia Indonesia masih memiliki kesadaran yang tinggi akan daerah asalnya.

Berbagai identitas yang dimiliki manusia Indonesia itu walaupun berlain-lainan tapi diturunkan dan dipelihara secara turun-temurun, baik melalui lingkungan keluarga maupun melalui tradisi dalam lingkungan suku bangsa masing-masing. Bahkan, dalam arus perubahan yang dahsyat yang bernama globalisasi melalui revolusi yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang menisbikan perbedaan waktu dengan ruang, manusia terancam akan kehilangan identitasnya. Akibatnya, manusia cenderung untuk berpegang erat pada identitas geo-etniknya sendiri yang telah berakar. Keadaan ini dapat dianalogikan sebagai orang yang sedang tenggelam cenderung untuk berpegang erat-erat pada penolongnya. Sebagai akibatnya maka identitas geo-etnik yang terkait dengan aspek sosial-budaya dan yang lekat dengan daerah asal justru makin menebal. Apabila keadaan demikian yang terjadi, dan yang dewasa ini sedang berkembang, masalahnya menjadi identitas yang bagaimana yang di Indonesia dikatakan sedang mengalami krisis itu.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka sebagai sebuah negara yang merdeka menghadapi masalah baru di bidang kehidupan sosial warga negaranya, khususnya yang berkenaan dengan masalah identitas mereka. Di samping masalah identitas geo-etnik dan identitas religi yang telah berakar, muncul masalah baru berkenaan dengan identitas sebagai warga negara, yaitu sebagai warga negara asli (WNI) atau warga negara keturunan asing (WNA). Demikian juga masalah mayoritas dan minoritas, sebagaimana halnya yang dialami oleh semua negara yang baru. Di dalam menghadapi masalah-masalah yang demikian inilah perlu diciptakan sebuah identitas yang baru pula, tidak terkecuali Indonesia. Mengingat

bahwa Indonesia secara sosial dan budaya bersifat majemuk, maka diperlukan sebuah identitas yang mampu meredam kemajuan dan memupus perbedaan yang mendarah daging. Menciptakannya, justru merupakan sebuah keharusan mutlak untuk segera dilaksanakan. Pada dasarnya identitas itu memang perlu diciptakan. Oleh karena itu, identitas yang demikian ini secara teknis disebut sebagai *identitas politis*. Dengan memiliki identitas politis ini maka jawaban atas pertanyaan “siapa saya?” adalah “saya orang Indonesia”, dan bukan “Papua”, atau lainnya. Masalahnya sekarang adalah, adakah sudah kita miliki identitas politis yang mutlak diperlukan untuk dimiliki itu.

#### IV

Ditinjau dari perspektif budaya, Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural, dalam arti memiliki berbagai kebudayaan yang berlainan satu dengan lainnya. Kenyataan ini berakibat bahwa manusia Indonesia memiliki identitas geo-etnik yang berbeda pula satu dengan lainnya sesuai dengan latar kebudayaan mereka masing-masing. Dengan sendirinya identitas geo-etnik ini pun mewarnai perilaku mereka, sehingga tindakan-tindakan mereka pun berbeda-beda pula, sesuai dengan, di samping latar kebudayaannya, juga agama, dan kedudukannya sebagai warga negara. Di sisi lain mereka sebagai kelompok sosial merupakan sebuah suku bangsa dan yang secara berkelompok memiliki identitas geo-etnik.

Namun, Indonesia merupakan sebuah kesatuan negara yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensinya maka sebagai warga negaranya, manusia Indonesia dilindungi oleh hukum yang memperlakukan mereka setara tanpa memperhatikan perbedaan apa pun, baik itu perbedaan sosial, budaya, ataupun agama. Demikian pula perbedaan sosial, misalnya, status, kekayaan, jenis kelamin



ataupun suku bangsa. Sebaliknya, sebagai warga negara mereka dengan sendirinya merupakan sebuah kesatuan yang memiliki hak maupun kewajiban yang sama pula.

Di sisi lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi. Menurut sistem ini, maka setiap warga negara memperoleh kebebasan untuk menganut kebudayaan masing-masing menurut suku bangsanya. Demikian pula memeluk agama menurut kepercayaan yang dianutnya. Sebab itu, setiap warga negara seolah-olah memiliki dua identitas, yaitu identitas geo-etnik dan identitas politis (Habermas 1994). Dalam pemaparan ini identitas politis akan diartikan sebagai sikap bagaimana yang sebaiknya diterapkan dalam menyiasati dua identitas ini. Selanjutnya apakah kita sudah atau belum memilikinya.

Masalah yang timbul adalah bahwa identitas geo-etnik pada hakikatnya telah berakar sebagai akibat dari kebudayaan yang telah berkembang secara berabad-abad. Sebaliknya, secara politis nasionalisme dan demokrasi, identitas politis baru diciptakan sehingga baru dicoba untuk diamalkan selama beberapa dekade saja, sehingga tidaklah mengherankan apabila masih dirasakan sebagai barang baru, atau bahkan sebagai sesuatu yang masih asing. Dalam konteks yang demikian ini, diperkenalkannya nasionalisme dan diterapkannya sistem demokrasi tidak akan dapat dengan sendirinya mengatasi berbagai perbedaan yang sudah dirasakan selama berabad-abad. Masalahnya adalah bahwa nasionalisme dan demokrasi tidak dapat timbul dengan sendirinya dalam sanubari warga negara sebagai identitas dan pada gilirannya diterapkan sebagai karakter. Persoalan yang timbul adalah bahwa di satu sisi secara budaya manusia Indonesia diberi kebebasan untuk tetap beridentitas geo-etnik. Namun, secara politis sebagai warga negara pada waktu yang bersamaan, manusia Indonesia juga beridentitas politis. Dengan perkataan lain, identitas

sebagai bangsa ini haruslah ditanamkan ke dalam hati sanubari agar selanjutnya dikembangkan sendiri menjadi karakter.

Bila kita membuka sejarah, maka akan kita ketahui bahwa pada hakikatnya para pendiri negara kita, sejak bertekad untuk merebut kemerdekaan, telah memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat tentang kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari, dalam arti keadaan yang sedang kita alami dewasa ini. Pertama mereka walaupun pada waktu itu masih muda telah menyadari bahwa bangsanya merupakan bangsa yang multikultural. Dalam menghadapi kenyataan ini kemudian mereka mempersiapkan diri dengan bersumpah untuk selanjutnya menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setelah bangsa dan tanah airnya mencapai kemerdekaan, mereka juga membekali bangsanya dengan filsafat negara *bhinneka tunggal ika* dan cara mengamalkannya dalam bentuk ideologi *pancasila*. Melalui penetapan *bhinneka tunggal ika* sebagai filsafat negara, maka dapat kita ketahui bahwa di samping ditujukan untuk mengatasi keanekaragaman budaya, juga mengisyaratkan bahwa mereka telah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Penetapan ini kemudian juga dikukuhkan melalui perumusan Pancasila sebagai ideologi, yang sebagaimana akan diuraikan kemudian memuat, antara lain, paham nasionalisme sebagai wahana pemersatu keanekaan yang ada.

Atas dasar ini, tidak perlulah kita menciptakan sesuatu identitas politis yang baru dan cukup kiranya kita gali kembali memori untuk kemudian kita amalkan apa yang telah diwariskan kepada kita. Hal ini seyogianya dilakukan mengingat bahwa apa yang diwariskan itu telah dipersiapkan oleh para pendahulu kita sejak dini. Tambahan pula, apa yang diwariskan itu telah merupakan intisari dari berbagai kebudayaan suku bangsa yang ada. Penegakan kembali apa yang telah

diwariskan itu dirasakan makin mendesak mengingat bahwa dewasa ini kita sedang menghadapi situasi yang makin tidak bersahabat.

Telah diketahui bahwa melalui kajian terhadap sumber sejarah, maka kita akan dapat mengungkapkan bahwa kesadaran akan persatuan antarsuku bangsa itu telah timbul di antara para pemuda, jauh sebelum kesadaran berbangsa itu diproklamasikan sebagai Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesadaran itu telah pula dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Melalui pengucapan sumpah para pemuda telah membuktikan bahwa mereka telah menyadari bahwa walaupun tinggal di berbagai pulau tetapi mereka merasakannya sebagai mendiami sebuah nusa. Demikian pula halnya dengan kenyataan bahwa walaupun mereka itu sesungguhnya berbangsa-bangsa tapi bertekad untuk menjadi satu bangsa. Adapun yang benar-benar menyatukan mereka adalah kenyataan bahwa mereka telah memiliki satu bahasa kesatuan, dalam arti dapat berkomunikasi satu dengan lainnya, walaupun memiliki Bahasa Daerah masing-masing, bukan dengan mempergunakan bahasa penjajah, seperti India, misalnya, melainkan dengan Bahasa Kesatuan, yaitu Bahasa Indonesia. Semangat kebersamaan yang demikian inilah yang mendasari tekad untuk bersatu membangun sebuah bangsa. Sikap saling menghargai inilah yang menjembatani perbedaan di antara mereka.

Tekad para pemuda sebagaimana yang diutarakan di atas ini patut selamanya kita kenang, kita renungkan, dan yang penting senantiasa kita tanamkan dalam-dalam dalam diri sanubari, agar menjadi identitas yang untuk selanjutnya kita amalkan sebagai karakter dan menjiwai kehidupan kita sebagai bangsa. Mengapa tekad mereka ini perlu kita kenang, kita junjung tinggi? Sebabnya, di tengah upaya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan politik *divide et impera*, yang senantiasa memecah belah kita yang memang multikultur, multi-etnik, dan multibahasa, justru bertekad menentang

politik itu dengan bersumpah untuk bersatu. Oleh karena itu, apabila sekarang ini ada di antara kita yang berkeinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka hal itu sama halnya dengan mengkhianati semangat kesatuan yang telah diwariskan kepada kita: semangat yang telah dibangun dengan taruhan nyawa, dengan mengorbankan hari depan. Pada masanya, mereka itu merupakan pemuda-pemuda yang telah menggapai pendidikan tertinggi yang Bangsa Indonesia miliki pada waktu itu. Mereka rela mempertaruhkan hari depan mereka yang cerah atau kedudukan yang mapan dalam sistem pemerintahan kolonial, bahkan ada kemungkinan ditangkap, diadili, serta akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Atas dasar itu maka sesungguhnya keinginan untuk keluar dari NKRI justru merupakan pengamalan warisan pemerintah kolonial dan sebaliknya mengkhianati semangat persatuan yang merupakan warisan para calon pendiri Republik Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan kristalisasi pengalaman yang telah dihayati dan diamalkan sejak abad XIV oleh nenek moyang kita.<sup>5</sup> Saya yakin tidak ada yang lebih tepat, akurat, dan indah dari ungkapan ini, yang dapat mencerminkan keindonesiaan kita, yang dapat menyarikan sumpah para pemuda kita: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

Ungkapan ini mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan spiritual kita sebagai bangsa yang warganya memeluk agama maupun religi yang berlain-lainan. Perbedaan-perbedaan yang ada ini tidak dimungkiri dan tidak pula disamakan, melainkan diterima sebagai sebuah realitas. Dengan demikian maka tiap agama diakui keberadaannya dan dihormati ajarannya. Hal yang sama juga

5 Konsep "*bhinneka tunggal ika*" dirumuskan dalam *kakawin* berbahasa Jawa Kuno, *Sutasoma* (139.5), yang digubah antara 1365-1389 oleh Mpu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit, tepatnya di bawah pemerintahan Raja Râjasanagara (Zoetmulder 1983:430).

diberikan kepada penganutnya, kepada mereka diberikan kebebasan untuk memeluk agama mana pun. Namun, secara hakiki semua agama yang berbeda-beda itu sesungguhnya memiliki satu dasar keyakinan, yaitu kepercayaan kepada Tuhan YME.

Dalam kehidupan sosial pun, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang multietnik, baik mereka yang merupakan penduduk asli, melainkan juga mereka yang merupakan pendatang baru walaupun telah tinggal di Indonesia secara bergenerasi. Perbedaan yang didasarkan atas etnik ini pun diterima sebagai sebuah realitas tanpa ada sedikit upaya pun untuk menjadikannya satu, atau mengakhiri keberagamannya. Adapun yang menyatukan keberagaman itu adalah konsep nasionalisme yang menjadikan berbagai etnik ini menjadi sebuah bangsa. Hal ini berarti bahwa sentimen yang bersifat primordial itu menjadi nasional. Di samping itu sistem demokrasi menjamin bahwa keberadaan etnik dengan kebudayaannya masing-masing tetap dihargai dan dengan demikian dijamin keberlangsungannya.

Demikianlah Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan kristalisasi dari kebijakan nenek moyang kita telah diterima, diakui, dan disahkan sebagai filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu, maka Pancasila dapat diperlakukan sebagai penjabaran dan perincian dari filsafat negara ini.

## V

Tanggal 1 Juni 2012 yang lalu, dalam mengenang lahirnya Pancasila, harian *Kompas* dalam tajuknya memberikan judul yang sangat mengejutkan dan juga sekaligus merisaukan, yaitu “Pancasila Masuk Kotak”. Dalam pada itu pada terbitan hari berikutnya, tanggal 2 Juni, harian *Kompas* memberikan reportase tentang peringatan yang

sama yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atas dasar ini maka dalam kesempatan ini kerisauan itu akan disampaikan agar dapat kita renungkan bersama.

Pertama, tentang Tajuk Rencana. Rupa-rupanya, *Kompas* menganalogikan keadaan Pancasila dewasa ini dengan sebuah kompetisi olah raga, dengan istilah “masuk kotak” diterapkan. Dalam konteks ini “masuk kotak” mengandung pengertian tidak dapat lagi melanjutkan pertandingan, atau telah tamat riwayatnya. Kedua, *Kompas* mengingatkan bahwa analisis mendalam tentang Pancasila yang selama ini telah dilakukan semuanya bermuara pada memperkuat, memperyakn, dan menegaskan pilihan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hubungan ini *Kompas* juga mengingatkan kembali peristiwa historis 1 Juni 1945.

*“Bung Karno menyampaikan pokok-pokok pikiran keindonesiaan yang di kemudian hari ditabalkan sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi jiwa segala kebijakan atau keputusan politis kenegaraan. Lambang Garuda Pancasila menjadi kompas mengelola kekuasaan”.*

Bagaimana keadaan Pancasila dewasa ini? Tentang hal ini, *Kompas* selanjutnya menulis:

*Yang terjadi, memang merujuk pada praksis kenegaraan sejak reformasi digulirkan, ada yang menyebut Pancasila ada di ujung tanduk, artinya kalau terus dibiarkan , bisa lepas.*

Di era reformasi, Pancasila tidak lagi dilafalkan dalam pidato resmi, penataran ataupun mata pelajaran/mata kuliah, bahkan terkesan sengaja dilupakan. Lepas dari arti dilupakan, bagian dari keteledoran

kita merawatnya, ancaman ini bisa melemahkan pilar-pilar eksistensi negara RI. Padahal bangunan negara yang disandarkan secara kokoh dan kukuh atas pilar-pilar itu masih dalam proses pembentukan/penyempurnaan.

Mengatasi keadaan yang demikian ini, maka *Kompas* akhirnya mengusulkan jalan keluar:

*Upaya revitalisasi Pancasila yang riuh diwacanakan, hadirnya pusat-pusat studi di berbagai perguruan tinggi, niscaya merupakan bagian dari usaha merawat ideologi negara. Partai tanpa ideologi saja jelas tanpa dasar berpijak, apalagi ideologi negara yang dibiarkan merana.*

Sebaliknya, kita bersyukur bahwa MPR juga bersidang untuk memperingati peristiwa yang sama, yaitu pidato Presiden kita yang pertama di depan Parlemen yang kemudian dikukuhkan sebagai Hari Kelahiran Pancasila, sebagaimana yang dilaporkan harian *Kompas* tanggal 2 Juni di halaman utamanya. Peringatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden, para mantan presiden (ketiga dan kelima), para mantan wakil presiden: Try Soetrisno, Hamzah Has, dan Jusuf Kalla. Di antara mereka hanya Wakil Presiden Boediono yang menyampaikan pidatonya. Adapun yang juga menyampaikan pidato adalah para ketua organisasi keagamaan, yaitu ketua NU, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dan Konferensi Waligereja Indonesia. Dalam pidatonya mereka semua mengingatkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan filsafat NKRI sudah bersifat final. Dalam penjelasannya, Wakil Presiden Boediono, sambil mengutip Martin Luther King Jr.: “Kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara atau kita akan binasa sebagai orang-orang bodoh”, menegaskan bahwa konflik sosial khususnya yang didasarkan atas agama telah merupakan sebuah realitas, dan bukan lagi sekadar wacana. Apa yang menjadi penyebab

utama adalah tumbuhnya egoisme sempit. Egoisme sempit inilah yang pada gilirannya membahayakan perjalanan bangsa dan oleh karena itu harus dilawan. Untuk ini kebangsaan perlu diperkuat, dan untuk memperkuatnya kita telah diwarisi dengan fondasi kebangsaan, yaitu Pancasila. Yang dipermasalahkan adalah mengapa pelaksanaan demokrasi yang memberikan peluang yang luas untuk ekspresi yang berbeda-beda tapi pada kenyataannya kebebasan berekspresi ini justru mengarah pada ekspresi keyakinan untuk menyingkirkan perbedaan atau kebhinnekaan yang sudah lama ada. Demikian antara lain pidato Wakil Presiden sebagaimana yang dilaporkan oleh *Kompas*.

Tajuk Rencana dan reportase *Kompas* tentang peringatan hari kelahiran Pancasila ini, dikutip dan dibicarakan dalam makalah ini sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat yang dalam hal ini dapat dikatakan diwakili oleh *Kompas* dan bagaimana pula pandangan pimpinan pemerintah dan para Ketua Organisasi Keagamaan, yang dapat dianggap sebagai mewakili pemeluk agamanya masing-masing. Secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan filsafat negara sudah mutlak diterima. Hanya saja dalam memberikan evaluasi terhadap pelaksanaannya, terdapat perbedaan terhadap masalah yang disoroti. *Kompas* menyayangkan bahwa “Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” belum sepenuhnya diamalkan, oleh karena kebijakan pimpinan pemerintahan masih belum berpihak kepada rakyat. Adapun Wakil Presiden lebih menyoroti bukan keadilan sosial, melainkan terjadinya konflik sosial, khususnya yang berlatar belakang agama.

Dalam menghadapi pengakuan maupun keadaan Pancasila yang demikian ini *Kompas* mengusulkan perlunya revitalisasi Pancasila. Apa yang dimaksudkan dengan revitalisasi ialah revitalisasi yang diwujudkan dalam kebijakan politik yang menempatkan rakyat sebagai



pusat, serta praksis politik yang sehat yang menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat. Demikianlah apa yang diharapkan masyarakat sebagaimana yang diisyaratkan *Kompas*. Mudah dimengerti bahwa karena yang diharapkan adalah masyarakat maka harapan yang tersirat itu dengan sendirinya revitalisasi Pancasila itu diharapkan dilakukan oleh para pemimpin, para pengambil keputusan, serta para penentu kebijakan. Sebaliknya, Wakil Presiden Boediono lebih menekankan pada anjuran agar masyarakat memerangi egoisme sempitnya, agar dengan demikian dapat meredam terjadinya konflik sosial.

Dari dua telaahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Pancasila merupakan ideologi yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik pada waktu dicanangkan pada tahun 1945, maupun pada waktu diperingati pada tahun 2012. Kenyataan ini membuktikan pula bahwa Pancasila dapat diamalkan oleh semua warga negara, terlepas dari agama yang dianutnya, kebudayaan yang melatarbelakangi kehidupannya, maupun sukubangsa dari mana ia berasal. Dengan demikian, maka seyogianya Pancasila dapat pula diamalkan oleh baik masyarakat pada umumnya agar dapat menekan rasa egoisme sehingga mampu menghargai perbedaan dan dengan demikian dapat hidup bersama tanpa memaksakan keyakinannya pada orang lain. Atau menganggap bahwa keyakinan sendirilah yang benar sedangkan keyakinan yang lain keliru. Demikian pula halnya dengan para pemimpin yang melalui pengamalannya dapat menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Atas dasar inilah maka sesungguhnya terlihat bahwa Pancasila, apabila diamalkan dapat mengatasi segala perbedaan baik yang diakibatkan oleh agama, suku bangsa, maupun rasa kedaerahan. Secara psikologis ini dapat pula mengatasi apa yang oleh Wakil Presiden Boediono disebutkan sebagai egoisme sempit. Atau yang

oleh Martin Luther King disebutkan sebagai “menghancurkan diri sendiri akibat kebodohan”. Dengan perkataan lain, apabila dihayati maka Pancasila sebagai ideologi dapat diamalkan sebagai karakter bangsa.

## VI

Dalam kesempatan membahas tentang krisis identitas, maka sesungguhnya kita telah memiliki penangkalnya, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan penjabaran dari filsafat bangsa yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika: kesatuan dalam keanekaan, atau keberagaman dalam kesatuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### ***1. Ketuhanan yang Maha Esa***

Sila pertama ini menjamin kepada warga negara Indonesia sebagai pribadi untuk secara bebas menganut dan memeluk agamanya masing-masing. Sebaliknya, setiap warga negara dalam menganut agama yang berbeda satu dengan lainnya menyadari bahwa di samping berbeda juga memiliki kesamaan, yaitu hanya percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka sila ini merupakan perwujudan dari filsafat negara Bhinneka Tunggal Ika, khususnya yang berkenaan dengan kehidupan spiritual, bahwa walaupun menganut agama yang berbeda tapi karena memiliki keyakinan yang sama, yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perbedaan itu tidaklah perlu dibesarkan.

Sebagai konsekuensinya, maka sila ini pun dirumuskan dalam UUD 1945, yang berbunyi bahwa pemerintahan akan didasarkan atas kepercayaan kepada hanya Tuhan Yang Maha Esa.

## ***2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab***

Sila yang kedua ini menekankan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat setiap warga negara diperlakukan secara adil tanpa membedakan agama, suku bangsa, ataupun status sosial, sesuai dengan mrtabatnya sebagai makhluk Tuhan YME. Dengan demikian, maka sila ini menolak semua kekerasan baik secara fisik maupun spiritual terhadap sesama warga negara Indonesia. Demikian juga kekerasan yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara mana pun terhadap warga negara Indonesia.

## ***3. Persatuan Indonesia***

Sila yang ketiga ini merupakan perwujudan dari konsep nasionalisme. Nasionalisme mengandung pengertian bahwa setiap warga negara wajib baik mencintai bangsanya maupun bersedia berkorban demi tanah airnya. Juga mengingatkan tanggung jawab setiap warga negara bahwa walaupun beragama, bersuku bangsa atau berasal dari daerah yang berlain-lainan, tapi mereka harus tetap menjaga kesatuan dan integritas nasional. Selanjutnya sila ini juga menuntut agar warga negara Indonesia menghindarkan diri dari perasaan lebih unggul dari lainnya, baik yang didasarkan atas suku bangsa, warna kulit, atau keturunan.

## ***4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan***

Sila ini mencerminkan kehidupan berdemokrasi. Sebagai konsekuensinya maka segala keputusan haruslah didasarkan atas asas musyawarah berdasarkan kemufakatan. Hal ini berarti bahwa demokrasi harus secara spiritual diamalkan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan YME sesuai dengan keyakinan dan agama

masing-masing. Secara sosial demokrasi juga harus diamalkan sesuai dengan nilai-nilai, martabat, dan integritas manusia. Pengamalannya baik secara spiritual maupun sosial keduanya diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan memperkuat kesatuan nasional demi pencapaian keadilan sosial.

Dengan demikian maka demokrasi sebagaimana yang dimaksudkan sila ini adalah bahwa penggunaan hak sebagaimana yang dijamin oleh demokrasi haruslah dilandasi rasa tanggung jawab kepada Tuhan YME sesuai dengan keyakinan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

### ***5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia***

Sila yang terakhir ini merupakan jaminan akan tercapainya kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh bangsa. Hal ini berarti bahwa seluruh sumber daya alam maupun segenap potensi harus didayagunakan hanya demi kebaikan dan kesejahteraan umat.

*Keadilan sosial mengandung arti jaminan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Namun, perlindungan ini lalu bukan berarti bahwa mereka yang lemah dibiarkan menganggur, melainkan didorong untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bidang kegiatannya masing-masing. Di sisi lain, perlindungan juga berarti penegakan keadilan dan pencegahan terhadap tindakan yang sewenang-wenang oleh pihak yang kuat terhadap mereka yang lemah.*

Di samping masalah perbedaan budaya, demokrasi juga memberikan jaminan hukum bagi warga negara untuk memperoleh kebebasan

beragama yang telah diakui. Sebagaimana diketahui, agama-agama itu adalah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dengan sendirinya pemberian hak ini pun pada gilirannya menciptakan perbedaan tambahan yang telah ada. Tambahan pula, secara geografis Indonesia merupakan negara yang terbentang luas dan tersebar, di samping terdiri atas pulau-pulau yang terpisah-pisah. Keadaan geografis yang demikian menjadikan sepanjang sejarah kontak antar-kebudayaan yang berbeda-beda itu terkendala, sehingga dapat dikatakan jarang atau bahkan tidak pernah terjadi. Keadaan yang demikian ini pun dengan sendirinya menjelaskan mengapa perbedaan budaya ini tetap berlangsung sampai kini.

Secara politis, pemberian otonomi kepada daerah, seolah-olah secara tidak langsung mempertebal identitas “kedaerahan” (geo-), serta mempertajam perbedaan budaya (-etnik) ini. Sesungguhnya pemberian otonomi ini dapat didayagunakan untuk mengatasi kendala geografis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Melalui pembentukan ruang otonomi “bersama” untuk beberapa kebudayaan yang berbeda, dan tidak memberikan otonomi kepada budaya itu masing-masing, maka mereka itu seolah-olah dipaksa untuk berinteraksi satu dengan lainnya demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan cara ini mungkin keterasingan antarbudaya itu dapat diatasi dan dengan demikian semangat kedaerahan pun dapat diredam. Salah satu contoh lain kebijakan yang juga justru membangkitkan rasa “kedaerahan” secara berlebihan adalah penggunaan kembali nama Papua sebagai pengganti nama Irian. Dalam konteks yang demikian ini maka dapat kiranya dimengerti bahwa di antara warga mereka pun ada yang menginginkan Papua yang merdeka sebagaimana tetangga mereka Papua Nugini, sebagai akibat munculnya kembali rasa “kepapuaan” di antara mereka.

Sesungguhnya timbulnya identitas kedaerahan yang berakar pada kebudayaan daerah itu merupakan sebuah kewajaran. Dalam menghadapi era globalisasi yang demikian ini, berkat penemuan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, batas waktu dan ruang menjadi kabur. Apa yang terjadi di suatu tempat dapat dilihat dari tempat lain mana pun di dunia ini pada waktu itu juga. Keadaan yang demikian menjadikan kita seolah-olah telanjang oleh karena apa pun yang terjadi dengan kita atau apa pun yang kita alami, dapat segera terlihat oleh orang lain, dari balik dunia sekalipun. Menghadapi keadaan itu, orang memerlukan sebuah pegangan, dan pegangan yang tersedia adalah akar kebudayaan, yaitu kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Hal ini secara *de facto* memperkuat identitas geo-etnik. Sebagai akibatnya, maka identitas politis yang secara *de yure* tidak terpelihara menjadi semakin melemah.

Akibat melemahnya identitas politis Bangsa Indonesia yang berawal dari terbengkalainya pemeliharaan Pancasila sebagai ideologi, terjadilah berbagai ketimpangan dalam masyarakat. Ketimpangan-ketimpangan itu, apabila tidak segera ditanggulangi, akan dapat berdampak merugikan, bahkan membahayakan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Adapun ketimpangan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi NKRI, misalnya, adalah melemahnya semangat persatuan serta rendahnya akhlak dan moral sehingga berakibat pada anarkisme, konflik antargolongan, suku, dan agama. Di samping itu, kemerosotan disiplin dan wibawa hukum pada gilirannya akan berakibat pada korupsi dan politik transaksional.

Menghadapi keadaan yang demikian ini, maka para sesepuh pimpinan nasional, seperti Try Soetrisno, Subroto, Juwono Sudarsono, dan Bagir Manan, cendekiawan Sofian Effendi dan Sri-Edi Swasono, rohaniwan Benny Susetyo, serta pengamat politik Yudi Latif beramai-ramai mendeklarasikan Gerakan Pemantapan Pancasila. Dengan

## KRISIS IDENTITAS

demikian, maka satu bulan setelah Pancasila diperingati maka gerakan pemantapannya pun dideklarasikan.

Dalam menghadapi kondisi yang demikian ini, sudah pada tempatnyalah apabila mulai diupayakan pembangunan karakter bangsa yang dapat mengimbangi semangat kedaerahan yang sedang berkobar-kobar. Masalahnya, apakah perlu kita menciptakan atau membangun karakter yang baru. Ataukah kita cukup menggali yang telah kita miliki, sehingga dengan demikian apa yang dapat kita lakukan adalah memperkenalkannya kembali dan menjabarkannya agar dapat dijadikan identitas dan diterapkan sebagai karakter bangsa.

## VII

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, dari kajian sejarah, dapat kita sadari bahwa kita sesungguhnya telah menerima warisan Pancasila yang dijiwai Sumpah Pemuda dan dilandasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan filsafatnya. Selama ini Pancasila hanya dimaknai sebagai ideologi belaka. Akibatnya, Pancasila hanya dihafalkan dan dilafalkan. Lebih dari itu, selama Orde Baru, Pancasila diupayakan untuk dihayati melalui berbagai skala penataran, dari tingkat lokal sampai nasional. Secara formal dimasukkan pula ke dalam kurikulum, tidak saja pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, melainkan juga pendidikan tinggi. Bahkan, untuk menangani kesemuanya itu telah dibentuk secara khusus Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, sebuah Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Pada era Reformasi Pancasila cenderung terlupakan. Sebagaimana yang diutarakan *Kompas*, Pancasila dilafalkan pun tidak, apalagi dihayati atau diamalkan.

Atas dasar itu maka Pancasila seyogianya tidak saja diakui dan diperlakukan sebagai ideologi negara, melainkan dikembangkan menjadi karakter bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak saja hanya dihafalkan dan dihayati untuk kemudian diamalkan, melainkan telah menjadi sikap hidup setiap warga negara Indonesia. Menjadi ciri atau identitas Bangsa Indonesia.

Perlu kiranya ditekankan di sini, bahwa pembentukan identitas bangsa ini, penanamannya sebagai karakter Indonesia, tidak dengan sendirinya menghilangkan atau menafikan identitas budaya atau mengganti karakter pribadi warga negara. Karakter pribadi yang dilandasi budaya suku bangsa atau dilatarbelakangi agama yang dianut tetap diakui dan tidak diganggu gugat. Dengan demikian, warga negara Indonesia memiliki identitas ganda, yaitu sebagai bangsa beridentitas Pancasila, sedangkan sebagai pribadi menyandang identitas suku bangsa.

Apa yang telah dikemukakan dapat dianalogikan dengan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah diakui dan telah pula disahkan secara hukum sebagai Bahasa Nasional Bangsa Indonesia. Bahkan, dalam kedudukannya ini Bahasa Indonesia telah menjadi fondasi persatuan Indonesia. Alhasil, semua warga negara Indonesia dapat mempergunakan Bahasa Indonesia secara baik, sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dengan lancar. Namun, penggunaan Bahasa Indonesia ini pun tidak dengan sendirinya membuat mereka harus meninggalkan atau melupakan bahasa mereka sendiri, Bahasa Daerah mereka. Bahasa Daerah tetap diakui dan diperlakukan sederajat, satu dengan lainnya. Tidak ada satu Bahasa Daerah pun yang diperlakukan lebih tinggi atau lebih rendah. Di wilayah penggunaannya, Bahasa Daerah tetap dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal. Dalam hubungan ini, maka warga negara berdwibahasa, yaitu Bahasa Daerah dan Bahasa Nasional:



## KRISIS IDENTITAS

Indonesia. Demikian pula halnya dengan identitas bangsa. Sebagai warga negara, dalam mengamalkan Pancasila sebagai karakternya, manusia Indonesia selaku pribadi tidak perlu menanggalkan identitas etnisnya. Secara analogis ketika kita mempergunakan Bahasa Indonesia, tidak dengan sendirinya kita mengabaikan bahasa daerah yang telah kita kuasai.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pancasila dapat diamalkan sebagai karakter bangsa karena di dalamnya telah terkandung konsep nasionalisme maupun cara hidup berdemokrasi. Dengan demikian, kita tidak perlu membangun karakter baru. Apa yang dapat dilakukan adalah bagaimana merevitalisasi Pancasila yang sudah kita sepakati bersama sebagai ideologi. Bagaimana upaya kita agar dalam rangka merevitalisasi ini kita tidak terjatuh kembali pada praksis Orde Baru, yaitu Pancasila didayagunakan sebagai alat penguasa, atau sebaliknya bagaimana merevitalisasi Pancasila agar tidak ditelantarkan oleh Orde Reformasi, sebagaimana yang ditengarai oleh *Kompas*. Adapun satu-satunya tujuan adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi menjadi karakter bangsa.

## VIII

Kembali kepada masalah krisis identitas, pada waktu dunia memasuki era pascamodern, yang krisis identitas menjadi salah satu ciri utamanya, Indonesia justru menelantarkan Pancasila sebagai identitas politisnya.

Merupakan kewajiban apabila proses yang terjadi adalah bahwa sebagai akibat dari memudarnya identitas politis maka identitas geo-etnis dan identitas religi menguat. Berlangsungnya proses yang demikian ini pada gilirannya akan mempertajam perbedaan antar-identitas geo-etnis, karena identitas politis yang

berperan menjembatani perbedaan-perbedaan itu tiada berfungsi. Dengan perkataan lain, egosentrisme akan mencuat sejalan dengan meredupnya solidaritas sosial maupun kepentingan bersama.

Akibat dari semuanya itu, pada tataran nasional egosentrisme yang berlebihan itu, apabila tidak menimbulkan konflik antar-identitas geo-etnis, sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Barat dan kemudian juga di Lampung, juga dapat menumbuhkan keinginan untuk memisahkan diri seperti yang pernah terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua. Keadaan yang demikian ini dapat dikategorikan sebagai krisis, karena apabila Pancasila sebagai identitas politis kita tetap dibiarkan telantar atau bahkan terabaikan, maka hal itu akan dapat mengakibatkan disintegrasi Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Pada tataran personal, dalam konteks globalisasi, krisis identitas pun terjadi. Apabila manusia dalam keadaan terseret arus budaya global (Featherstone 1990) dan terlepas pula dari ikatan identitas politis tempat ia berpegang, adalah wajar apabila mereka berusaha untuk menggapai pegangan lain. Dalam situasi demikian, apabila tidak bersedia menjadi manusia tanpa identitas dan tenggelam dalam budaya global, tiada kemungkinan lain baginya kecuali kembali kepada identitas etnisnya. Namun, identitas geo-etnis itu sendiri tidak terbebas dari gempuran arus globalisasi dan budaya global (Arnason 1990). Globalisasi dengan budaya globalnya (Smith 1990) telah memperkenalkan *public sphere universal*<sup>6</sup> bagi kehidupan sosial, melalui pendirian berbagai mal di seluruh penjuru Indonesia. Di samping itu juga dalam proses untuk mengglobalkan citarasa manusia Indonesia melalui pembukaan berbagai gerai siap saji seperti KFC, McDonald, dan memasyarakatkan minuman Coca Cola, untuk menyebut beberapa di antaranya.

---

6 Konsep *public sphere* yang merupakan tempat publik berinteraksi, pada awalnya diperkenalkan oleh Habermas, yang kemudian dikembangkan oleh Jenifer Barret (2011).

Selanjutnya terpulang kepada kita sendiri untuk menjawab pertanyaan “siapa saya” dengan “saya orang Indonesia!” atau “saya warga global” (kalau tidak gombal).

## KEPUSTAKAAN

- Arnason, Johann P. 1990. “Nationalism, Globalization and Modernity”, dalam Mike Featherstone, (ed). *Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. A Theory, Culture & Society special issue*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications hlm. 207 – 236.
- Barret, Jennifer. 2011. *Museum and the Public Sphere*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Profesor (Emeritus), Ph.D. 2012. *Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21*. Jakarta: UI Press.
- Featherstone, Mike. 1990. “Global Culture: An Introduction”, dalam Mike Featherstone, (ed). *Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. A Theory, Culture & Society Special Issue*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, hlm. 1-14.
- Featherstone, Mike (ed). 1990. *Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. A Theory, Culture & Society Special Issue*, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- Giddens, Anthony. 1991. *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen. 1994. “Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State”, dalam Amy Gusman (ed), *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition*. Princeton, New Jersey: University of Princeton Press.
- Hall, Stuart. 1997. “Cultural Identity and Diaspora”, dalam Kathryn Woodward, (ed). *Identity and Difference*. London: Sage Publication.
- Harian Kompas*. 2012 “Pancasila Masuk Kotak”. Tajuk Rencana. 1 Juni 2012.
- . 2012. “Kita Harus Hidup Bersama”. *Berita Utama*. 2 Juni 2012.

- . 2012. “Pemahaman Pancasila Perlu Direvitalisasi”, 6 Juli 2012: hlm
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Lieber, Robert J. dan Ruth E. Weisberg 2002. “Globalization, Culture, and Identities in Crisis”, dalam *International Journal of Politics, Culture and Society*, Vol. 16, No. 2, Winter 2002, hl 273 – 296.
- Smith, Anthony D. 1990. “Towards a Global Culture?” dalam Mike Featherstone, (ed). *Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. A Theory, Culture & Society Special Issue*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, hlm. 171-192.
- Taylor, Charles. 1994. *Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition*. Edited and Introduction by Amy Gusman. Princeton, New Jersey: University of Princeton Press.
- Tilley, Christopher. 2006. “Introduction. Identity, Place, Landscape and Heritage”, dalam *Journal of Material Culture*”, Vol. 11:7-32.
- Turner, Bryan S. (ed). 1990. *Theories of Modernity and Postmodernity*. London: Sage Publication Ltd.
- Wexler, Philip. 1990. “Citizenship in the Semiotic Society”, dalam B. S. Turner, (ed) *Theories of Modernity and Postmodernity*. London: Sage Publication Ltd.
- Woodward, Kathryn (ed). 1997. *Identity and Difference*. London: Sage Publication.
- Zoetmulder, P.J. 1983. *Kalangwan. Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

## Bab XI

# NASKAH KUNA SEBAGAI SUMBER KEARIFAN LOKAL DAN PENGETAHUAN BUDAYA INDONESIA: SOLUSI UNTUK MEMBACA DAN MEMAHAMI PRODUK BUDAYA INDONESIA

*Titik Pudjiastuti*

### Abstrak

Banyak orang berpendapat bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami krisis budaya. Menurut saya, pendapat ini keliru. Budaya Indonesia tidak sedang mengalami krisis bahkan dapat dikatakan tengah sibuk bergerak maju; melahirkan berbagai inovasi yang menarik, baik sebagai ciptaan baru maupun aktualisasi budaya lama. Kita dapat melihat berbagai atraksi menarik dalam bidang seni budaya di bidang tari, musik, drama, dan lain- sebagainya atau penerapan adat-istiadat kedaerahan masa lalu yang kini digunakan dan dipertontonkan lagi bahkan dijadikan sebagai komoditas pariwisata. Berkenaan dengan itu, artikel ini ditulis. Tujuannya adalah memberi wawasan dan pengetahuan tentang produk budaya lama bangsa Indonesia yang isinya masih relevan dengan kehidupan masa kini. Produk budaya lama Indonesia yang saya maksud di sini adalah “naskah lama atau naskah kuna.”

Kata Kunci: krisis budaya, aktualisasi budaya lama, produk budaya lama, naskah lama, naskah kuna.

## 1. Pendahuluan

Naskah kuna atau naskah lama merupakan salah satu produk budaya masa lampau, warisan nenek moyang bangsa Indonesia, “kekayaan” yang tak ternilai harganya. Tidak heran jika sejak masa kolonial Belanda hingga kini naskah-naskah kuna Indonesia terus diburu oleh bangsa asing. Berbagai cara dilakukan untuk mengambil kekayaan budaya Indonesia itu. Ada yang dengan cara damai, seperti membeli, meminjam, menukar dengan barang, atau menyalin naskahnya. Ada pula yang dengan cara paksa, seperti merampas, benda pampasan perang, atau mengambil dengan menakut-nakuti pemiliknya. Tidak heran jika naskah-naskah kuna Indonesia saat ini banyak tersimpan di manca negara, misalnya, Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Malaysia, dan Brunei. Berdasarkan hal ini, timbul pertanyaan, apakah sebenarnya naskah kuna itu dan mengapa banyak bangsa asing menginginkannya? Sebelum pembicaraan ini berjalan lebih lanjut – untuk alasan praktis – penyebutan naskah kuna atau naskah lama dalam tulisan ini, saya sebut “naskah” saja.

Dari pengamatan di masyarakat, pada masa kini kebanyakan orang Indonesia tidak paham atau tidak mengerti apa yang disebut dengan naskah, apa lagi mengetahui isi dan atau fungsinya. Tidak jarang saya temukan orang-orang memperlakukan naskah seperti benda tidak berharga: meletakkannya di bawah tempat tidur, di atas perapian di dapur (*para-para*), atau di langit-langit rumahnya. Akan tetapi, sebaliknya saya juga sering melihat orang-orang yang menghargai naskah secara berlebihan: menganggap naskah sebagai benda keramat, membungkusnya dengan lembaran kain kafan (kain putih) berlapis-lapis – tergantung si penyimpan naskah merupakan

keturunan beberapa – disimpan dalam/pada tempat khusus dan hanya dikeluarkan pada waktu tertentu dengan upacara tertentu. Di sisi lain, saya juga tahu ada orang-orang yang memperlakukan naskah sebagai barang dagangan yang mempunyai nilai jual tinggi, bukan karena kandungan isinya melainkan sebagai benda antik.<sup>1</sup> Untuk memberi wawasan pengetahuan tentang naskah Indonesia kepada masyarakat masa kini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, makalah ini ditulis.

Naskah dalam bahasa Inggris disebut *manuscript*, berasal dari ungkapan Latin *codicesmanuscripti*, artinya buku-buku yang ditulis dengan tangan (Madan 1893: 3). Kata *manu* berasal dari *manus* berarti tangan dan *scriptus* berasal dari kata *scribere* yang berarti menulis (Mamat 1988:3). *Manuscript* dalam bahasa Indonesia disebut naskah. Kata naskah dalam bahasa Indonesia diambil dari akar kata bahasa Arab *al nuskhah* yang artinya tulisan tangan. Maksudnya, karya-karya tulisan tangan dari masyarakat masa lampau. Melalui naskah berbagai masalah kehidupan dan sosial budaya masyarakat masa lampau dapat diketahui oleh masyarakat masa kini.

Berkenaan dengan naskah Indonesia, ada dua hal yang akan saya bicarakan, yaitu yang berkaitan dengan isi dan bendanya. Berbicara tentang isi atau kandungan naskah berarti berurusan dengan teks. Salah satu bidang ilmu yang fokus kajiannya berpusat pada teks adalah filologi. Adapun ilmu yang memusatkan perhatiannya pada naskah sebagai benda (secara fisik) dikenal dengan nama kodikologi.

---

1 Sebagai contoh, pada tahun 2010, saya pernah ditawari seorang pedagang barang antik di daerah Ciputat yang mau menjual naskah Jawa *Centhini* koleksinya dengan harga 3 miliar rupiah.

## 2. Filologi

Filologi merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan karya masa lampau yang berupa dokumen tertulis. Di sini saya batasi pengertiannya sebagai naskah. Sebagai saksi yang ditulis langsung oleh bangsa yang bersangkutan pada masanya, naskah berisi berbagai masalah kehidupan dan sosial budaya bangsa tersebut, di antaranya, cara berpikir, kehidupan keagamaan, kepercayaan, pendidikan, seni, dan adat istiadat. Selain itu, naskah juga berisi teks yang menentang masalah-masalah teknis, seperti pembuatan rumah, obat-obatan, dan seni keterampilan. Dengan kata lain, naskah merupakan sumber kearifan lokal yang memuat nilai-nilai kehidupan dan sosial budaya bangsa masa lalu yang jika dicermati masih sangat relevan dengan keadaan masa kini.

Setiap naskah adalah sesuatu yang unik, meskipun ada banyak naskah yang sama (judulnya) tetapi tetap saja merupakan varian atau versi yang berbeda. Dengan kata lain, tak ada satu naskah pun yang identik sama dengan naskah lainnya. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa setiap naskah adalah saksi dari dunia berbudaya di masa lalu. Oleh karena itu, terkadang kita temukan suatu naskah mempunyai peran khusus dalam suatu masyarakat, ditilik dari sudut pandang sejarah maupun budaya. Namun, bukan berarti naskah yang tidak tergolong ke dalam jenis ini tidak berfungsi atau kurang berguna bagi masyarakat.

Pada dasarnya, setiap naskah mempunyai masalah sendiri-sendiri, mempunyai cerita, atau menyimpan rahasia masing-masing yang baru akan diketahui jika sudah dibedah. Untuk membedah naskah, ada sejumlah kegiatan yang harus dilalui, yaitu membuka naskahnya, memahami teksnya, menangkap amanatnya, menikmati sastranya, dan mengkaji masalahnya. Pada proses membedah naskah inilah diperlukan alat-alat kajian yang sangat memadai, misalnya, agar



dapat memahami teks diperlukan buku tata bahasa atau kamus yang sesuai; untuk dapat menangkap makna dan menikmati sastranya, diperlukan perangkat teori sastra; dan untuk mengkaji masalahnya diperlukan teori dan pendekatan yang relevan. Oleh karena itu, Robson (1994: 12) mengatakan bahwa filologi bukan sekadar "kritik teks." Pada dasarnya tugas filolog adalah menjembatani kesenjangan komunikasi antara penulis masa lalu dengan pembaca masa kini. Ringkasnya filolog bertugas "membuat suatu teks terbaca atau dimengerti."

Dalam bukunya yang berjudul *Hikayat Sri Rama: Suntingan Naskah Disertai Telaah Amanat dan Struktur*, Achadiati Ikram (1980) berusaha membuat teks *Hikayat Sri Rama* yang versi tertuanya ditulis sebelum tahun 1633 dapat dipahami oleh pembaca masa kini. Usaha yang dilakukannya adalah dengan menerbitkan suntingan teks dan mengkaji amanat serta struktur cerita yang terkandung di dalam teksnya dengan pendekatan ilmu sastra.

Hal yang sama dilakukan oleh van der Molen (1983) ketika ia meneliti salah satu teks Jawa kuna, *Kunjarakara* yang berasal dari skriptorium Merapi-Merbabu.<sup>2</sup> Dalam usahanya membuat teks naskah lontar yang berasal dari abad ke-17 itu dapat dimengerti dan dibaca sesuai bunyi teks aslinya, van der Molen mengalihaksarakan teks *Kunjarakara* yang ditulis dengan aksara buda<sup>3</sup> itu ke huruf Latin secara diplomatik<sup>4</sup> dan menerjemahkan teksnya ke dalam bahasa

2 Informasi tentang skriptorium Merapi-Merbabu dapat dibaca dalam tulisan I. Kuntara Wiryamartana dalam BKI ... - ... Adapun informasi mengenai naskah-naskah Merapi-Merbabu dapat dibaca dalam tulisan I. Kuntara Wiryamartana dan Van der Molen "The Merapi-Merbabu manuscripts. A Neglected Collection" dalam *BKI 157*: 51-64 dan buku *Katalog Naskah Merapi-Merbabu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* yang disusun oleh Kartika Setyawati dkk (2002).

3 Istilah aksara buda disampaikan oleh Pigeaud (1967:25) dalam bukunya yang berjudul *Literature of Java*. Maksud kata buda bukan dalam pengertian agama Buddha, melainkan bukan Islam.

4 Cara diplomatik adalah usaha mengalihaksarakan teks sesuai bunyi teks naskahnya tanpa melakukan perubahan apa pun. Pada terbitan diplomatik penyunting tidak diberi

Belanda. Untuk memberi pemahaman lebih pada pembaca tentang teks ini, van der Molen menyajikan pendekatan baru dalam studi filologi, yaitu membuat analisis ejaan dan mengkaji aksaranya dengan pendekatan paleografi. Hasil penelitiannya diterbitkan dengan judul *Javaanse tekskritiek: een overzicht en een nieuwe benadering geillustreed aan de Kunjarakara* (1983).<sup>5</sup>

Naskah-naskah lain yang juga telah diteliti, dikaji, dan diterbitkan, antara lain, *Hikayat Banjar dan Kota Waringin* (Ras 1968), *Wangbang Wideya: A Javanese Panji Romance* (Robson 1971), *Babad Buleleng: A Balinese Dynastic Genealogy* (Worsley 1972), dan *Bo' Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima* (Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin (2012).

Informasi mengenai keberadaan naskah-naskah Indonesia dapat dibaca melalui tulisan Chambert-Loir dalam *Archipel* 21 (1980) dan van der Molen (1984) dalam *Caraka* No. 4, serta buku-buku katalog naskah, seperti: *Literature of Java: Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in The Library of The University of Leiden and other public collections in The Netherlands*, vol I, II, dan III (Pigeaud, 1967, 1968, dan 1970), *Indonesian Manuscripts in Great Britain: A catalogue of manuscripts in Indonesian languages in British Public Collections* (Ricklefs dan P. Voorhoeve 1977), *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara. jilid III A-B: Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia* (Behrend dan Titik Pudjiastuti 1997), *Katalog Naskah Palembang* (Achadiati dkk 2004), dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengalaman meneliti dan membaca berbagai teks naskah Indonesia, baik yang belum dan sudah diterbitkan maupun

---

kesempatan untuk masuk dan memperbaiki teksnya.

5 Terjemahan dalam bahasa Indonesia *Kritik Teks Jawa: Pandangan Umum dan Pendekatan Baru Diilustrasikan dengan Teks Kunjarakarna*, Yayasan Obor Indonesia, 2012.

yang belum dan sudah diteliti,<sup>6</sup> kita dapat belajar tentang beberapa hal:

1. Dari teksnya yang kebanyakan didaktis, kita tahu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang-orang bijak. Mereka mengajarkan kepada generasi penerusnya tentang cara memberi nasihat dengan menggunakan teknik pengajaran yang tepat, indah, dan tidak menggurui, melainkan melalui contoh. Oleh karena itu, saya sebut teknik pengajaran itu "teknik model" (contoh). Berbagai masalah dalam kehidupan dan sosial budaya, seperti ajaran agama, intrik politik, sistem ekonomi, adat istiadat, percintaan, dan kesehatan disampaikan dalam bentuk contoh yang disusun sebagai cerita. Bahkan untuk memperhalus nasihat atau ajaran, sering cerita disusun dengan memakai lagu (*tembang*), pantun, atau syair, menggunakan bahasa metafor, dan diksi yang indah, sehingga kesan nasihat atau ajaran tidak terasa. Namun, tanpa disadari kita menjadikan contoh cerita yang telah kita baca sebagai rujukan.
2. Melalui teks yang disusun sebagai cerita, kita dapat mengetahui alam pikiran, cita-cita, dan pedoman hidup para leluhur bangsa Indonesia. Tindakan yang mereka lakukan dalam menjaga lingkungan hidup dan pelestarian alam; sikap mereka baik terhadap alam, sesama manusia, tumbuhan, maupun hewan.
3. Dari teknis penciptaan naskah kita belajar tentang konsep kerja sama atau gotong royong. Pada masa lalu, proses penciptaan

---

6 Indonesia memiliki kekayaan naskah yang banyak jumlahnya, mungkin mencapai puluhan ribu. Teksnya ditulis dengan berbagai tulisan, di antaranya, Arab, Jawa (hanacaraka), Sunda (cacarakan), Bali, Rejang, Jawi (Arab Melayu), Buri Wolio, Kaganga, Lampung, Bugis, Makasar, Batak, dan sebagainya dan dalam bahasa Jawa Kuna, Arab, Jawa, Sunda, Bali, Melayu, Minangkabau, Lampung, Bugis, Makasar, Wolio (Buton), dan Batak. *Genre* teksnya juga bermacam-macam, antara lain, nasihat, silsilah, sejarah, seni, sastra, mitologi, agama, primbon, jimat, seni keterampilan, dan obat-obatan.

naskah bukan merupakan kerja mandiri dari seorang penulis teks, melainkan kerja sama antara juru tulis, juru gambar (jika diperlukan), juru jilid, dan juru sampul. Suatu naskah akan terwujud jika ada seorang juru tulis yang “bertugas” sebagai penulis teks. Jika teks membutuhkan gambar maka teks yang telah ditulis di atas permukaan bahan naskah akan diserahkan kepada juru gambar. Setelah teks selesai ditulis – dan gambar dibuat – bahan naskah yang telah ditulis diserahkan kepada juru jilid. Tugas seorang juru jilid adalah membuat bahan naskah yang telah ditulis menjadi sejumlah kuras,<sup>7</sup> lalu menumpuk dan menjahit salah satu sisi tumpukan kurasnya agar menjadi seperti buku. Setelah jilidan selesai, tumpukan kuras, yang telah menjadi seperti buku, diserahkan kepada juru sampul. Di tangan juru sampul naskah yang telah dijilid disempurnakan; punggung naskah diberi lem dan sampul naskah direkatkan pada punggung naskahnya. Dengan terpasangnya sampul naskah, pembuatan naskah selesai dan teks terlindungi.

### 3. Kodikologi

Naskah-naskah Indonesia telah beberapa abad diteliti, tetapi kebanyakan penelitian masih bersifat filologis. Hal yang paling mendasar dalam pembuatan naskah masih sangat kurang. Padahal, masalah sejarah teks yang sering menjadi persoalan dalam studi filologi – terutama jika penanggalan tidak ada – salah satu pemecahannya dapat diusahakan melalui kajian bahan naskah atau alas tulisnya. Kajian terhadap bahan naskah atau alas tulis inilah yang menjadi salah satu tugas kodikologi.

---

7 Kuras adalah istilah kodikologi untuk menyebut sejumlah helai kertas yang dilipat dan dipotong lalu diikat dengan benang.

## NASKAH KUNA SEBAGAI SUMBER KEARIFAN LOKAL

Kodikologi berasal dari kata Latin, *codex* atau *caudex* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai naskah,<sup>8</sup> adalah ilmu yang mempelajari fisik naskah. Pemahaman fisik naskah di sini adalah berbagai hal yang berkenaan dengan naskah sebagai benda yang dapat dilihat, dirasa, dan dipegang.

Dalam buku *Les Manuscrits*, Alphonse Dain (1975: 76) mengatakan bahwa kodikologi adalah ilmu tentang naskah-naskah dan bukan ilmu yang mengkaji apa yang tertulis di dalam naskah (teks). Tugas dan wilayah kajiannya yang meliputi, antara lain, sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, masalah penyusunan katalog naskah, perdagangan atau persewaan naskah, dan penggunaan naskah.

Berkaitan dengan tugas dan wilayah kajiannya, persoalan bahan naskah, tinta, jilidan, sampul, dan iluminasi juga merupakan bahan kajian kodikologi. Berdasarkan hal ini, tampak bahwa kodikologi bukan hanya sekadar “ilmu tentang fisik naskah”, melainkan juga ilmu yang berurusan dengan teknologi. Berikut ini adalah masalah kodikologi yang erat kaitannya dengan teknologi, khususnya teknologi media informasi. Dalam tulisan ini, media informasi yang saya maksudkan adalah perangkat sarana dan alat tulis yang digunakan untuk “mengabadikan” informasi (baca: teks). Bahan naskah menjadi sarana wadah yang sangat penting untuk meletakkan teks dan tinta sebagai alat yang berfungsi sebagai pengantar untuk menuliskan teksnya. Untuk jelasnya, berikut ini adalah uraian mengenai kedua hal tersebut.

### 3.1. Bahan Naskah

Dari pengamatan atas naskah-naskah Indonesia, saya membagi dua jenis bahan naskah, yaitu bahan naskah impor dan bahan naskah

---

8 Lihat *Kodikologi Melayu di Indonesia* karya Sri Wulan Rujianti Mulaydi (1994: 1).

tradisional. Bahan naskah impor adalah bahan naskah yang berasal dari luar Indonesia, seperti kertas eropa dan kertas cina. Adapun bahan naskah tradisional adalah bahan naskah yang berasal dan dibuat di Indonesia, contohnya, lontar, dluwang,<sup>9</sup> bambu, kulit kayu, dan rotan.

Dari bermacam-macam jenis bahan naskah tradisional, saya akan membicarakan tiga macam bahan naskah saja, yaitu *lontar*, *dluwang*, dan *kulit kayu*. Ketiga macam bahan naskah ini saya pilih karena proses pembuatannya menunjukkan tingkat pengetahuan dan teknologi nenek moyang bangsa Indonesia yang unggul. Mereka mampu mengolah bahan dasar yang “sederhana” menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, dari daun atau kulit pohon menjadi bahan naskah yang dapat berumur puluhan hingga ratusan tahun. Berikut ini adalah teknik pembuatan ketiga bahan naskah tradisional tersebut.

### 3.1.1 Lontar

Lontar<sup>10</sup> – metatesis dari *ron tal* (Jawa = daun tal) – merupakan bahan naskah yang aslinya adalah daun pohon siwalan (Latin: *Borassus Flabellifer* LINN). Teknik pembuatan daun siwalan menjadi bahan naskah lontar adalah sebagai berikut.

Mula-mula, daun siwalan dilepaskan dari batang dahannya, lalu setiap daun dilepaskan dari lidinya, selanjutnya dijemur. Langkah berikutnya adalah merendam bahan naskah lontar tersebut ke dalam air selama tiga hari. Setelah itu, bahan lontar itu direbus dengan

---

9 Nama lainnya adalah dalubang (Lampung), daluwang (Jawa barat), kertas saeh (Garut).

10 Menurut Zoetmulder (1983:153) lontar sudah dipakai sejak zaman Jawa Kuna. Kata ini disebut dalam *Kitab Korawasrama*, sebagai buku sakti Ganesa.

berbagai rempah<sup>11</sup> sampai daunnya menjadi lemas.<sup>12</sup> Setelah itu, daun diangkat dan dicuci dengan air dingin agar bersih, kemudian dijemur lagi supaya kering. Ketika bahan lontar telah kering lalu dipres selama sedikitnya dua minggu. Selama proses pengepresan, bahan lontar diukur panjang dan lebarnya untuk digunakan sesuai keperluan,<sup>13</sup> kemudian setiap helai lontar diberi tiga buah lubang: dua di tepi dan satu di tengah. Setelah lontar-lontar dilubangi lalu dibundel dengan diberi pasak lidi dari bambu agar terikat erat. Selanjutnya, sisi lontar diratakan dan dihaluskan dengan amplas serta digosok dengan batu apung lalu diberi *meni* (pewarna merah untuk kayu). Pada tahap akhir, sebelum lontar siap ditulisi, setiap helai lontar digarisi untuk panduan menulis teks.

Proses pembuatan bahan naskah lontar dari awal sampai siap ditulisi biasanya berkisar antara 3–12 bulan. Informasi lebih terperinci mengenai bahan naskah lontar dapat dibaca dalam tulisan Grader dan Hooykaas (1941), Ginarsa (1976), Hinzler (1993), dan Pudjiastuti (2006). Adapun urutan gambar mengenai proses pembuatan lontar dapat dilihat dalam buku *Illumination. The Writing Tradition* (Kumar dan John H. McGlynn 1996: 136-137).

- 
- 11 Ginarsa (1976: 6) menyebutkan rempah-rempah yang digunakan untuk merebus bahan lontar adalah: babakan pohon intaran (Ltn. *Azadirachta Indica*), babakan pohon book (Ltn. *Dracontomelon*), umbi pohon sikapa (Ltn. *Dioscorea hispida*), putik kelapa, temu tis (Ltn. *Curcuma xanthorrhiza*), dan jagung yang telah tua (berwarna kuning oranye). Campuran rempah ini berguna agar lontar tahan lama dan tidak dimakan rayap.
  - 12 Lama waktu perebusan bahan lontar biasanya sehari-semalam atau ditandai dengan jagung yang telah menjadi bubur (Pudjiastuti 2006: 37).
  - 13 Dalam tradisi tulis Bali, panjang pendek lontar berkaitan dengan isinya, misalnya, untuk menulis teks *Ramayana* akan digunakan lontar yang panjangnya 60 cm tetapi untuk teks *Usada* (obat-obatan) cukup lontar yang panjangnya 30 cm, sedangkan untuk teks jimat akan digunakan lontar yang panjangnya 2-5 cm.

### 3.1.2 Dluwang

Dluwang dalam bahasa Jawa artinya kertas, merupakan jenis kertas tradisional yang dibuat dari kulit pohon. Dluwang di Garut disebut *kertas saeh*,<sup>14</sup> karena dibuat dari kulit pohon saeh (Latin: *Broussonetia papyrifera vent*). Pohon saeh juga dikenal dengan berbagai nama, seperti: *sepukau* (Indonesia), *glugu* (Jawa), *dhalubang* (Madura), *kembala* (Sumba), dan *Malak* (Seram). Kulit pohon saeh yang paling baik mutunya untuk bahan kertas adalah yang berumur 3 - 6 bulan (Heyne 1987: 661). Teknik pembuatan dluwang dari kulit pohon menjadi kertas memakan waktu sekurang-kurangnya dua minggu dengan proses sebagai berikut.

Mula-mula dahan pohon saeh dipotong sesuai pesanan, lalu kulit pohon dipisahkan dari kayunya dan kulit ari (kulit luarnya) dibuang, kulit dalamnya yang berwarna putih (Jw: *lulup*) diambil. Kulit dalam yang merupakan bahan dluwang itu kemudian dijemur di bawah sinar matahari atau diasapkan di atas api (Jw: *ditarang*), setelah kering dipotong-potong sesuai pemesanan. Tahap berikutnya, bahan dluwang itu direndam dalam air selama paling sedikit satu malam. Sesudah perendaman bahan dluwang dipukul-pukul dengan pemukul dari perunggu (Jw: *dikemplong*, Snd: *dikeprek*). Dalam proses pemukulan ini, bahan dluwang akan melebar 3 sampai 4 kali lipat dari lebar semula. Setelah itu bahan dluwang direndam lagi dalam air (Jw: *dikum*, Snd: *diseuseuh*) lalu diperas dan selanjutnya diperam (Jw: *diepep*, Snd: *dipeuyeum*) dalam sebuah keranjang bambu dan ditutup dengan daun pisang selama 10 – 15 hari. Sesudah itu bahan dluwang dijemur di bawah sinar matahari dengan dibentangkan di atas batang pohon pisang (Jw. *dijereng*). Sambil dijemur, bahan dluwang digosok dengan daun Ki Kandhel (benalu pohon cangkkring)

---

14 Kertas saeh di Thailand dikenal sebagai *sa paper* dan di Jepang disebut *kozo*.



atau daun pohon karet, sampai kering sendiri dan terlepas dari batang pohon pisanginya. Pada tahap akhir sebelum digunakan sebagai alas tulis, permukaan dluwang dihaluskan atau dilicinkan terlebih dahulu dengan batu pelicin. Penjelasan lebih terperinci mengenai teknik pembuatan dluwang dapat dibaca dalam tulisan Pudjiastuti (2001: 189 - 194) dan Ann Kumar & John H. McGlynn (1996: 116 –117).

Dluwang di Ponorogo dikenal sebagai *kertas gedhog* di Yogyakarta disebut kertas *tela*, di Cirebon diketahui sebagai *kertas kapas*, dan orang Belanda menyebutnya *Javaans papier*. Noorduyn (1965) menjelaskan bahwa pusat dluwang di Jawa ada di Ponorogo, Purworejo, dan Garut. Namun, dari ketiga daerah ini, dluwang Ponorogo-lah yang dikenal mutunya sangat baik, sehingga pernah diekspor ke Belanda. Dari informasi Soetikna (1939: 194) dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 1820 Ponorogo masih aktif memproduksi dluwang.

### 3.1.3 Kulit kayu

Kulit kayu juga merupakan bahan naskah tradisional. Naskahnya disebut buku lipat, bentuknya seperti alat musik arkodeon. Buku lipat kulit kayu di Sumatra Utara disebut *pustaha* dan di Lampung disebut *handaluang*. Bahan baku *buku lipat kulit kayu* memang kulit pohon tetapi jenis pohon dan teknik pembuatannya berbeda dengan dluwang.

Dalam tulisan Pudjiastuti (1997: 62) disebutkan bahwa bahan baku *buku lipat kulit kayu* adalah kulit pohon kayu alim, sejenis pohon kayu wangi, seperti gaharu atau cendana. Nama Latin pohon ini adalah *Aquilaria Malaeceusis* LMAK, termasuk suku *Thymelaeaceae* (Heyne 1987:1469). Nama lainnya adalah *halim*

(Lampung), *alim* (Batak Toba), *karas* (Indonesia), *kepeng* (Balitung), dan *kareh* (Minangkabau).

Secara ringkas Teygeler (1933: 595-97) menguraikan teknik pembuatan bahan naskah *buku lipat kulit kayu* sebagai berikut: Mula-mula batang pohon kayu alim dipotong lalu kulitnya dipisahkan dari batang kayunya dan dijemur beberapa waktu. Lalu ujung dan pangkal kulit kayu itu diratakan. Setelah itu, kulit kayu dihaluskan dan diampas dengan daun yang keras (Latin: *Ficus Ampelas*), kemudian dilipat-lipat, seperti alat musik arkodeon dengan bantuan alat pemukul kayu (martil). Terakhir, permukaan depan dan belakang kulit kayu dilumuri tajin. Sebelum ditulisi, kulit kayu digarisi terlebih dahulu dengan penggaris bambu yang disebut *balobas* dan ditegaskan garisnya dengan pisau bambu yang disebut *panggorit*.

Menurut Pudjiastuti (1997: 63-64), yang diperoleh dari penuturan Sidabutar, seorang *datu* di Pulau Samosir, teknik pembuatan bahan naskah *pustaka* adalah sebagai berikut: Pertama-tama pohon kayu alim ditebang, lalu kulit pohonnya dikupas, kulit luarnya (kulit ari) dibuang dan kulit dalamnya yang berwarna putih diambil. Kulit dalam itu kemudian dijemur beberapa hari sampai kering lalu digulung dan permukaannya dihaluskan dengan daun yang keras (Latin: *Ficus Ampelas*). Jika akan dibuat *pustaka*, kulit kayu yang sudah kering diukur panjang dan lebarnya sesuai keinginan atau pesanan, diratakan ujung dan pangkalnya, lalu dilipat-lipat, setiap lapis lipatan dipukul dengan alat pemukul besi (martil) sampai membentuk alat musik arkodeon dan kemudian ditindih dengan batu atau benda yang berat selama satu minggu sampai tiga bulan. Terakhir, kedua permukaan kulit kayu (depan dan belakang) dilumuri dengan *tajin* (air beras yang ditanak) dan dibiarkan kering sendiri, setelah itu baru dapat ditulisi.

### 3.2 Tinta

Seperti telah dinyatakan di atas, selain bahan naskah sarana lain yang juga sangat berperanan dalam mengabadikan teks adalah tinta. Dalam *the book of dead*<sup>15</sup> disebutkan bahwa tinta jelaga telah digunakan sejak 2500 SM di Mesir, di atas permukaan papyrus (Mamat 1988: 15). Ini menandakan bahwa tinta telah lama dikenal dan digunakan sebagai alat untuk menuliskan teks. Dalam tulisan ini saya akan membicarakan tinta tradisional yang lazim dipakai dan ditemukan pada naskah-naskah Indonesia. Dari berbagai jenis tinta tradisional, saya hanya akan membicarakan dua macam tinta yang paling banyak dipakai, yaitu *tinta jafaron* dan *tinta jelaga*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua jenis tinta tersebut.

Pudjiastuti (2001: 194) menjelaskan *tinta jafaron*, adalah jenis tinta tradisional yang kebanyakan digunakan di pesantren-pesantren, antara lain, di daerah Cirebon dan Garut. Tinta ini terbuat dari campuran kacang mete (Latin: *Anacardium Occidentale*), kunyit (Latin: *Curcuma Domestica*), Jelaga lampu, dan minyak jafaron<sup>16</sup> (minyak wangi Arab). *Tinta jafaron* dibuat dengan cara sebagai berikut: Kacang mete dan kunyit dibakar sampai menjadi arang lalu dihaluskan sampai menjadi serbuk. Jika akan digunakan, serbuk ini dicampur dengan jelaga lampu dan minyak jafaron. *Tinta jafaron* biasanya digunakan untuk menulis teks yang ditulis di atas permukaan dluwang.

*Tinta jelaga*, merupakan tinta yang banyak dipakai oleh masyarakat Melayu tradisional dan telah digunakan sejak abad ke-7 M (Mamat 1988: 17). Bahan yang diperlukan untuk membuat tinta

15 Buku ini ditemukan bersama *mummy* di kuburan kuna zaman Firaun di Mesir. Buku-buku seperti ini terdapat di museum dan perpustakaan-perpustakaan di Eropa, Amerika, dan Mesir ( Mamat 1988; 15-16).

16 *Jafaron* adalah jenis minyak wangi Arab, bahan pembuat tinta, istilahnya *hibr za'faran*, biasanya digunakan untuk menulis rajah atau zimat.

ini adalah: jelaga lampu, getah pohon karet (Latin: *Hevea brasiliensis*) yang kering dan bersih, kulit buah manggis (Latin: *Garcinia Mangostana*) yang dibakar sampai menjadi arang, lada hitam (Latin: *Piper nigrum*) yang disangrai (digoreng tanpa minyak), minyak kelapa dan garam. Cara membuat tinta jelaga sebagai berikut: Getah pohon karet kering, arang kulit manggis, dan lada hitam sangrai ditumbuk dan dihaluskan menjadi satu sampai menjadi serbuk. Lalu campuran serbuk ini direbus dengan air, garam, dan minyak kelapa sampai menjadi larutan, Tinta baru dapat digunakan jika larutan telah kering. Tinta jelaga ini biasanya dipakai untuk menulis teks di atas permukaan kertas, dluwang, bambu, dan buku lipat kulit kayu.

Kedua jenis tinta di atas tidak digunakan untuk menulis teks pada naskah lontar, karena yang berlaku sebagai tinta pada naskah lontar adalah buah kemiri (Latin: *Aleurites moluccana*) yang dibakar sampai menjadi arang lalu ditumbuk halus. Jika akan digunakan, bubuk kemiri bakar itu cukup dioleskan pada goresan huruf di atas permukaan lontar dengan menggunakan kapas.

#### 4. Penutup

Melalui uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa naskah-naskah Indonesia memang merupakan sumber kearifan lokal dan pengetahuan budaya Indonesia. Melalui hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti naskah Indonesia yang bekerja dalam bidang filologi kita dapat mengetahui ide-ide, cita-cita, dan cara berpikir nenek moyang bangsa Indonesia serta cara-cara pewarisan pengetahuan mereka kepada generasi penerus, sekaligus belajar tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam dan lingkungan.

Dari pengetahuan mengenai pembuatan bahan naskah dan tinta yang merupakan lahan kajian kodikologi, kita harus mengakui

keunggulan teknologi nenek moyang bangsa Indonesia. Kedekatan mereka terhadap alam, membuat mereka kenal betul akan sifat-sifat alam, tumbuhan dan lingkungannya, sehingga mereka dapat dengan tepat menentukan sesuatu berguna untuk hal lainnya. Contohnya, dalam proses pembuatan tinta, mereka menggunakan lada hitam untuk membuat tinta cepat kering, garam untuk mencegah tinta berbau busuk, dan kulit buah-buahan untuk meningkatkan mutu dan kepekatan warna hitam, dan minyak kelapa untuk membuat tinta mengalir dengan licin pada saat menulis.

Berdasarkan hal ini, kita mendapat sedikit gambaran mengenai naskah-naskah Indonesia yang banyak diminati oleh orang-orang mancanegara, seperti yang dituturkan oleh Behrend bahwa naskah-naskah Indonesia diminati karena selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, hal lainnya adalah untuk mengetahui kandungan budayanya.

## KEPUSTAKAAN

- Behrend dan Titik Pudjiastuti. 1997. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara. jilid III A-B; Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chambert-Loir, Henri. 1980. "Catalogue des Catalogues de manuscrits Malais", *Archipel* 20 Chambert-Loir, Henri dan Siti Maryam R. Salahuddin, 2012, *Bo' Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima*, Jakarta: EFEO dan Yayasan Obor Indonesia.
- Dain, Alphonse. 1975. *Les Manuscrits*, Paris: Les Belles Lettres.
- Grader, J. en Hooykaas, C.. 1941. "Lontar als schrijfmateriaal" in *Mededelingen van Kirtya Liefcrink van der Tuuk* 13.
- Ginarsa, Ketut. 1976. *The Lontar (Palmyra) Palm*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Terj. Badan Litbang Kehutanan Jakarta.

TITIK PUDJIASTUTI

- Hinzler, H.I.R.. 1993. "Balinese palm-leaf manuscripts " dalam *Manuscripts of Indonesia*. (ed). T.E. Behrend dan W. van der Molen. *BKI* deel 149, 3 e aflevering, KITLV.
- Ikram, Achadiati. 1980. *Hikayat Sri Rama, Suntingasn Naskah Disertai Telaah Amanat dan Struktur*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ikram, Achadiati, dkk. 2004. *Katalog Naskah Palembang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kumar, Ann dan John H. McGlynn. 1996. *Illumination. The Writing Traditon in Indonesia*.
- Madan, Falconer. 1893. *Books in Manuscript: A Short Introduction to their Study and Use*. London: Kegan Paul.
- Mamat, Hj. Wan Ali Hj. Wan. 1988. *Pemuliharaan Buku dan Manuskrip*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- van der Molen, Willem. 1983. *Javaanse tekskritiek: een overzicht en een nieuwe benadering geillustreed aan de Kunjarakara, VKI ...*, Leiden: KITLV
- . 1984. A Catalogue of Catalogues of Javanese Manuscripts" dalam *Caraka* No. 4,
- Noorduyn, J.. 1965. "The Marking of Bark Paper in West Java" dalam *BKI* 121, 4e aflevering.
- Pigeaud, Th.G.Th. 1967-1980. *Literature of Java: Catalogue raisonn   of Javanese manuscripts in The Library of The University of Leiden and other public collections in The Netherlands*, vol I, II, dan III. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Pudjiastuti, Titik. 1997. *Pandangan Masyarakat Kini terhadap Naskah Kuna di daerah Sumatra Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- . 2001. " Bahan dan Alat" dalam *Sastra Jawa Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Balai Pustaka.
- . 2006. *Naskah dan Studi Naskah*. Bogor: Akademia.
- Ras, J.J.. 1968. *Hikayat Banjar: A stud in Malaqy Historiography*. The Hague: Martinus Nijhoff. Bibliotheca Indonesia 1.

NASKAH KUNA SEBAGAI SUMBER KEARIFAN LOKAL

- Ricklefs and P. Voorhoeve. 1977. *Indonesian manuscripts in Great Britain: A catalogue of manuscripts in Indonesian languages in British Public Collections*, London: Oxford University Pers.
- Robson, S. O. 1971. *Wangbang Wideya: A Javanese Panji Romance*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- .1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta: RUL.
- Setyawati, Kartika, dkk.. 2002. *Katalog Naskah Merapi-Merbabu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Yogyakarta/Leiden: Penerbit Universitas Sanata Dharma dan OTCZAO.
- Soetikna, R.T.A. 1939. "Dloewang Ponorogo" dalam *Djawa* No. 19.
- Teygeler, Rene. 1993. "Pustaha. A Study into the production process of the Batak book" dalam *Manuscripts of Indonesia*. (ed). T.E. Behrend dan W. van der Molen. *BKI* deel 149, 3 e aflevering.
- Wiryamartana, I Kuntara dan Van der Molen. " The Merapi-Merbabu manuscripts. A Neglected Collection dalam *BKI* 157: 51–64.
- Worsley, P.J. 1972. *Babad Buleleng: A Balinese Dynastic Genealogy*. The Hague: Martinus Nijhoff, BI 8.





## Bab XII

### *PROXY WAR DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA*<sup>1</sup>

*Susanto Zuhdi*<sup>2</sup>

#### Abstrak

Makalah ini meletakkan isu *proxy war* ke dalam konteks yang lebih luas mengenai perang atau peperangan yang sesungguhnya tidak konvensional lagi pengertiannya. Lebih eksplisit, ia termasuk ke dalam perang generasi keempat (*Fourth Generation War*). Berbicara *proxy war* tidak dapat dipisahkan dari *asymmetric war*, dalam arti perang yang tidak biasa atau yang inkonvensional. *Proxy war* adalah perang yang dilakukan dua negara dengan menggunakan pihak ketiga (pengganti) dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di wilayah negara yang menjadi sasarannya.

Dalam konsep *asymmetric warfare* hampir semua lapangan kehidupan memiliki pola ofensif yang dapat digunakan. *Asymmetric war* dapat melibatkan diri ke dalam beragam rencana dan banyak bentuk seperti bidang diplomatik, finansial, *proxy war*/konflik dengan intensitas

- 
- 1 Tulisan ini telah dikembangkan dari makalah yang pernah dibentangkan dalam Seminar Nasional Pembinaan Teritorial diselenggarakan oleh Pusat Teritorial Angkatan Darat Mabes Angkatan Darat dengan Universitas Indonesia di Kampus UI Depok, 15 Oktober 2015. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran dari Prof. Dr. Melani Budianta dan Mayjen TNI I Gede Sumertha, KY, PSC. M.Sc.
  - 2 Susanto Zuhdi adalah Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pengajar Prodi Strategi Perang Semester Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan).

rendah (*low intensity conflict*), terorisme, biokimia, intelijen, sumber daya alam, ekologis, psikologis, ekonomi, ruang, energi, regulator, elektronik, *drugs/smuggling*, media, virtual, ideologis, dlsb. (Katoch dalam Singh 2010:95).

Kata Kunci: *proxy war*, perang generasi keempat, *asymmetric warfare*, *asymmetric war*, pihak ketiga.

*“Maybe you are not interested in war, but war is interested in you”*

Pernyataan Leon Trotsky yang populer di atas, agaknya relevan jika dikaitkan dengan perang yang terjadi di Indonesia. Dalam perpektif sejarah perang di wilayah Indonesia lebih banyak sebagai *terra belica* (tempat peperangan yang dilakukan pihak lain), daripada perang dilakukan bangsa Indonesia terhadap musuh dari luar. Masalahnya tidak berarti Indonesia terbebas dari berbagai kepentingan asing dan dampak yang ditimbulkan, apalagi jika pihak-pihak berperang memang bertujuan menghancurkan Indonesia. Jadi, dalam konteks itu pada hakikatnya adalah bagaimana kita mampu menutup celah dan kelemahan internal bangsa sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan negara-negara bertikai (*belligerent states*).

Sementara itu, pembicaraan mengenai *proxy war* menyita banyak perhatian di media massa, setidaknya setelah KASAD Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan dalam berbagai media dan forum. Kemudian hal ini dikemukakan kembali dengan lingkup lebih luas dalam buku kecil menyongsong Peringatan 70 Tahun TNI, pada 5 Oktober 2015. Dalam buku itu dipaparkan konsep *proxy war*. Perang proksi atau *proxy war* adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti, biasanya negara kecil, atau *non state actor*, Ormas, LSM, kelompok

masyarakat atau individu. Selain itu dapat diberi pengertian bahwa *proxy war* merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya tetapi menghindari keterlibatan langsung dalam suatu perang yang mahal dan berdarah (hlm. 22 mengutip Dandan S, 2012; hlm. 23 mengutip Mumford, 2013).

Dalam buku Panglima TNI tersebut, dikutip hasil kajian Lemhannas mengenai daftar 16 bentuk *proxy war*. Adapun dua, yang diambil dari ke-16 butir itu, relevan untuk dianalisis dengan pendekatan budaya dan sejarah yang justru berfungsi dalam pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks ini, perang yang dijalankan oleh pihak musuh yang tidak hadir diganti oleh pihak-pihak tertentu. Begitulah ketika musuh yang tidak disadari eksistensinya, tetapi (dalam butir e) dapat “menghancurkan generasi muda Indonesia melalui berbagai budaya negatif, seperti budaya konsumtif, judi daring (judi *online*), situs porno, dan lain-lain”; dan (butir g) dengan “membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, memutarbalikkan sejarah, serta membuat kegaduhan di masyarakat”.

Tulisan singkat dalam bentuk rintisan ini mencoba membahas mengenai seputar perang atau peperangan khususnya dalam konteks sejarah Indonesia. Dalam cakupan pengertian tentang perang yang terus berkembang, terdapat konsep-konsep *asymmetric* dan *proxy war*. Bertolak dari tema itu, bagaimana sejarah dapat menjelaskan isu-isu tersebut baik dalam dimensi perspektif maupun sejarah sebagai suatu pendekatan sekaligus kerangka analisis sebagai ilmu (historiologi).

Tawaran sejarah sebagai unsur dalam kerangka teori dan analisis seperti dimaksud di atas, hanya dapat beroperasi jika dikolaborasikan ke dalam paduan dengan ilmu-ilmu sosial dan geografi. Pembicaraan mengenai perang dengan demikian masuk ke dalam kajian strategis

yang terus berkembang. Jadi, bersama antropologi sosial, sejarah memberi kontribusi data empiris sekaligus pengalaman suatu bangsa dalam memaknai identitasnya yang berguna bagi kajian strategis dalam kepentingan keamanan nasional (*national security*). Aspek geografi memegang peran penting bagi suatu bangsa dalam merumuskan strategi raya (*grand strategy*).

### **Perspektif Historis**

Dengan perspektif, sejarah bangsa yang dimaksud adalah upaya untuk memahami posisi dan sikap yang harus dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah, segenap tumpah darah, dan keutuhan wilayah NKRI khususnya dalam periode awal kemerdekaan. Di sini sejarah diberi makna esensial sebagai peristiwa masa lalu yang dapat diambil sebagai pelajaran (*lesson learned*). *Proxy war* sebagai konsep hendak dianalisis melalui kajian historis dalam arti bahwa fakta atas peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu tidak lepas dari konteks pemaknaan suatu bangsa terhadap perjalanan menuju cita-citanya. Seperti sepintas dikemukakan di atas, tujuan bangsa dalam bernegara tertuang dalam paragraf keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam perspektif sejarah perang kemerdekaan, *proxy war* tampak ketika Belanda memanfaatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat Indonesia sendiri bahkan dalam bentuk negara federal yang bertujuan melemahkan atau menghancurkan Republik Indonesia, disadari atau tidak. Kelompok-kelompok atau kekuatan itu dapat disebut sebagai “pengganti” dari kekuatan Belanda dalam memerangi republik.

Jika secara eksplisit perang dalam pengertian pertikaian antarnegara dengan kekuatan persenjataan, maka barulah terjadi sejak

proklamasi kemerdekaan 1945, Republik Indonesia melawan musuh, yang sesungguhnya sudah berada di dalam wilayah negara. Jadi, bukan musuh yang datang dari luar wilayah kemudian mengagresi Indonesia. Musuh itu adalah Jepang, Inggris, dan Belanda. Mereka memang sudah berada di Indonesia dalam kaitan dengan penjajahan dan masalah dekolonisasi. Kalau kamus pewayangan boleh dipakai dalam menggambarkan perang menghadapi musuh-musuh: Jepang dan Inggris, perang itu dapat disebut sebagai “perang kembang”, karena peperangan sesungguhnya baru terjadi ketika melawan Belanda. Itu pun setelah pasukan Belanda melancarkan agresi militer pertama 1947 dan yang kedua 1948.

Peperangan bangsa Indonesia dalam membebaskan Irian Barat secara fisik (1962-1963) terjadi dalam konteks reaksi atas kebuntuan diplomasi bilateral sejak tahun 1950. Pemerintah Belanda selalu mengulur waktu dan menunda pengembalian Irian Barat kepada RI sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar 1949.

Memang sulit juga mengelak ketika Indonesia menunjukkan inisiatif berperang dan menganggap berdirinya negara Malaysia dan sebagai musuh oleh sebab itu harus dihancurkan. Bagaimana sejarah dapat memberi penjelasan? Sejarah mencatat bahwa ambisi Presiden Sukarno untuk menjadikan Nasakom sebagai ideologi untuk membangun “dunia baru” yang bebas dari neokolonialisme dan imperialisme berimplikasi pada Konfrontasi terhadap Malaysia (1963-1965). Kampanye bubarkan negara boneka Malaysia buatan Inggris dan mendukung gerakan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) mendorong Indonesia ke kancah peperangan. Namun, kampanye ini bukan mengatasi masalah tetapi justru menjadi kontraproduktif justru karena terjadinya ketidakamanan kawasan. Pengalaman pahit itulah yang mendorong lahirnya Perhimpunan Negara-negara Asia

Tenggara (ASEAN) tahun 1967. Kesepakatan negara-negara yang bergabung dalam perhimpunan ini adalah untuk menjadi Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, aman, dan stabil dalam tiga pilar ekonomi, keamanan, dan kebudayaan.

Lalu bagaimana menjelaskan peperangan yang terjadi di Timor-Timur yang kemudian pernah menjadi Provinsi ke-27 NKRI (1976-1999)? Pada tahun 1974-1975 terjadi kekacauan politik dalam proses dekolonisasi Portugal di wilayah jajahannya itu, dan perkembangan geopolitik di Asia Tenggara pasca-kekalahannya Amerika Serikat di Vietnam rupanya menjadi faktor yang mendorong pasukan Indonesia memasuki wilayah tsb. Operasi Seroja memulai aksinya pada 7 Desember 1975, hanya beberapa jam setelah Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger meninggalkan Jakarta (Singh 1996: 47).

Pada prinsipnya seperti dinyatakan Presiden Sukarno “Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Perubahan semboyan jika dulu “bangsa yang lebih cinta kemerdekaan” kini terutama ditekankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), NKRI “sebagai harga mati”. Hakikatnya sama, Indonesia bangsa yang cinta damai. Melalui SBY pula, diketahui sikap bangsa Indonesia yang berpandangan “*zero enemy thousand friends*”. Artinya jika kemerdekaan diusik, maka peperangan sebagai satu-satunya cara mempertahankan kedaulatan, maka, tidak akan mundur. RI dalam masa awalnya tidak segera membangun tentara, melainkan hanya membentuk Barisan Pertolongan Bagi Keluarga Korban Perang. Dari Barisan Pertolongan lalu diubah menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR) kemudian Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dalam kaitan itu, Jenderal Urip Sumohardjo pernah berkomentar “Aneh Negara *Zonder* Tentara”.

Meskipun cinta damai, apabila kemerdekaan bangsa diusik maka seperti sejarah, perjuangan telah membuktikan hampir di seluruh persada pertiwi Indonesia, terhampar makam para pahlawan. Pun boleh dicatat ini negara yang memiliki sebuah direktorat (Kementerian Sosial) yang mengurus Keperintisan dan Kepahlawanan Bangsa. Artinya, perjuangan itu harus dilakukan dengan jiwa-raga, darah, dan air mata dalam merebut kemerdekaan. Dengan demikian, bangsa keluar dari “kawah candramuka” penjajahan dan berhasil mengusir penjajah, kalau retorika Bung Karno boleh dipakai. Dalam konteks itu pula sering dikumandangkan Bung Karno ungkapan “*Rawe-rawe rantas malang-malang putung*”; “*Sadhumuk bathuk sanyari bumi, toh ing pati, wutahing ludiro ingsun lakoni*”, berarti sikap yang tidak rela jika wilayah negeri diambil meskipun “sejengkal tanah” dengan taruhan mati dan tumpahnya darah” akan dilakukan. Itu pula yang mencerminkan sikap bela negara dari orang Indonesia, yang diambil dari nilai tradisional dalam masyarakatnya. Dalam bahasa pewayangan, misalnya, ada ungkapan menghindari “*tinggal gelanggang colong playu*” untuk menggambarkan seorang kesatria yang tidak akan takut atau lari dari medan pertempuran.

Pada umumnya perang terjadi bukan karena faktor ideologis, melainkan karena faktor rasional, yakni sumber daya alam yang diperebutkan terutama oleh negara-negara kuat, yang berada di negara-negara lain. Bukankah justru di wilayah-wilayah kaya minyak atau gas (*resources*) yang menjadi tempat berkecamuknya konflik atau perang?

Dalam perspektif historis sudah sejak abad ke-16 kepulauan Nusantara diperebutkan karena kekayaan sumber rempah-rempah oleh bangsa-bangsa Eropa. Portugis (*Estado da India*), dan Belanda (*Verenigde Oost Indische Compagnie*); Inggris (*East India Company*) merupakan kekuatan-kekuatan yang berperang di Nusantara. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Nusantara dalam peperangan

antarperusahaan dagang yang *notabene* mewakili kepentingan pemerintah negara masing-masing itu (tampak sekali pada VOC), dapat dijelaskan dalam pola sekutu dan seteru. Pola sekutu, misalnya, ketika VOC bersama Bone dan Buton menghadapi Gowa. Atau ketika VOC bersama Mataram menghadapi Trunojoyo (persoalan internal). Kedua pola itu berlangsung dalam abad ke-17 dan ke-18.

Sewaktu penduduk di kepulauan Nusantara berada dalam pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sebagai kawulanya, memang tidak terlibat dengan Perang Dunia Pertama 1914-1918 yang meletus di Eropa. Justru muncul petisi Wiwoho yang mengusulkan agar penduduk di Jawa diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri membantu Belanda dalam perang tsb. Alasannya, jika suatu saat perang akan melibatkan penduduk Jawa, maka tinggal dikerahkan untuk tujuan itu. Petisi itu dikenal sebagai "*Indie Werbaar*"; artinya, "Hindia yang berketahanan". Dalam pengertian sekarang barangkali itu semacam sikap bela negara. Petisi Wiwoho ditolak.

Kekecewaan yang nyaris sempurna terhadap pemerintah kolonial Belanda, karena tuntutan agar orang Indonesia boleh berparlemen (Petisi Soetarjo) ditolak, sementara tuntutan perbaikan ekonomi rakyat hanya dibalas dengan pembentukan Komisi Visman untuk melakukan penyelidikan mengenai rendahnya tingkat kemakmuran (*comissie van minderweltaart onderzoek*), maka kedatangan bala tentara Jepang di awal 1942 disambut dengan antusias tinggi oleh rakyat Indonesia. Apalagi dengan propaganda Jepang yang menyebut sebagai "saudara tua" hendak membebaskan "saudara muda"-nya (Indonesia) terbebas dari penjajahan Belanda.

"Revolusi mental" sebagaimana digaungkan pemerintah sekarang dalam perspektif sejarah sungguh telah berlangsung dalam masa penjajahan Jepang. Benedict Anderson menyebut periode ini sebagai "Revolusi Pemuda" karena peran revolusioner mereka dalam



menggerakkan perjuangan merebut kemerdekaan. Sebagian pemuda lainnya telah mendapat pelatihan militer atau para-militer yang diberikan pemerintah militer Jepang. Sebut saja Seinendan, Heiho dan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Rupanya pengalaman di berbagai pertempuran sebagai konsekuensi dari upaya perebutan senjata dari tangan Jepang oleh pemuda Indonesia di berbagai tempat terutama di Jawa, menjadi bekal dan pengalaman penting ketika mereka memasuki perang melawan Belanda.

Dalam perspektif historis, Belanda dapat dikatakan telah melakukan *proxy war* dalam masa perang 1945-1949, periode yang dikenal sebagai revolusi atau perang kemerdekaan, sebagaimana deskripsi yang diuraikan di bawah mengenai komponen di dalam diri bangsa Indonesia sendiri yang menjadi ancaman terhadap tegaknya kedaulatan. Pilihan pada tema perjuangan kemerdekaan dalam menghadapi Belanda yang bertujuan menjajah kembali menjadi penting ketika potensi ancaman dari dalam negeri begitu nyata dan terbuka. Dalam usia republik ke-70 ini, suatu pertanyaan sampai berapa lama RI dapat bertahan mungkin perlu sebagai bahan reflektif. Muhammad Yamin pernah mengemukakan pendapatnya mengenai RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sebagai bentuk “Republik yang Ketiga”.

Adapun Republik Pertama adalah Sriwijaya (4 abad) dan Republik Kedua adalah Majapahit (2 abad). Meskipun benar sebagian besar wilayah geografi dari kedua kerajaan besar tersebut kemudian menjadi wilayah negara Indonesia, secara esensial itu tidak. Benang merah yang ditarik oleh Yamin untuk mengaitkan masa lalu sejarah kedua kerajaan itu dengan Indonesia tidak bisa diterima. Mengapa? Karena Indonesia adalah suatu konsep baru dan bukan warisan melainkan sebuah cita-cita yang diperjuangkan. Kekuatan Indonesia terwujud jika dilandasi nilai persatuan dari setiap unsur yang *notabene* berasal

dari keragaman masyarakat dan budayanya. Semangat persatuan menguat karena diikat oleh saling percaya dan harapan akan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sejarah sesungguhnya bukan hanya bersifat perspektif melainkan juga bahan kajian yang dapat diangkat sebagai konsep dan strategi sekaligus. Pengalaman perjuangan gerilya di Jawa Timur yang dijadikan studi kasus sejarah ini dapat menjelaskan segi-segi *asymmetric* dan *proxy war*. Strategi Belanda untuk menghancurkan RI dilakukan dengan aksi militer dan seperti mengulang “*divide et impera*” pada masa lalu, kini itu dilakukan dengan cara “mengadu domba” antar kekuatan dan pihak-pihak di dalam masyarakat bangsa. Berdirinya negara bagian (federal) yang bergabung ke dalam *Bijeenkomst Federal Overleg (BFO)* dapat dilihat sebagai strategi memecah belah kekuatan internal bangsa Indonesia. Proses pembentukan negara-negara bagian diawali dengan diselenggarakannya Konferensi Denpasar, Malino, dan Pangkalpinang. H.J. van Mook menginisiasi bahwa yang cocok untuk masyarakat Indonesia adalah membentuk negara berupa negara federal. Sudah didahului oleh isi pasal perundingan Linggarjati yang kemudian disepakati pada Maret 1947, bahwa kedua pihak (Indonesia dan Belanda) akan membentuk negara Indonesia serikat.

*Proxy war* dapat dihindari dalam arti pihak musuh tidak bisa secara leluasa memanfaatkan potensi kelemahan di dalam negeri (Indonesia) jika antara TNI dengan rakyat bersatu memiliki visi yang sama untuk mempertahankan negara dan mewujudkan kesejahteraan. Pendekatan keamanan (*security approach*) tidak lagi dapat berjalan sendiri seperti pernah dilakukan pada masa lalu, atau malahan harus ditinggalkan setidaknya dimodifikasi disertai dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Ini trauma yang tidak mudah dihapuskan yang sebagian masih hidup dalam ingatan kolektif. Bukti sejarah sesungguhnya dapat menjadi modal bangsa membangun

kekuatan yang didukung oleh komponen militer dan sipil seperti terwujud dalam masa perang kemerdekaan.

Dinamika perjuangan kemerdekaan dalam menegakkan republik dengan dasar negara Pancasila, pernah sampai pada puncak kritis, yang ditandai dua peristiwa ini: Pemberontakan PKI di Madiun 19 September 1948 dan Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat 1949. Diawali kedatangan Musso di awal tahun 1948 dari Moskow yang menawarkan “jalan baru” sebagai alternatif perjuangan yang dipimpin Sukarno-Hatta, Pemberontakan PKI hampir nyaris menghempaskan nasib RI ke dalam jurang kehancuran. Hanya dalam hitungan satu dua bulan kemudian pasukan Belanda melancarkan aksi militer menduduki Yogyakarta. Akan halnya dinamika di Jawa Barat pasca-perjanjian Renville 1948 adalah dikosongkannya kantong-kantong republik dengan menghijrahkan TNI ke Jawa Tengah. Daerah-daerah yang ditinggalkan TNI dan rakyat ke Yogya inilah yang kemudian diisi oleh gerombolan DI/TII. Patut dicatat bahwa inilah pemberontakan (*insurgency*) memakan waktu terlalu lama dibanding yang lainnya, yakni kurang lebih 13 tahun. Barulah setelah TNI bersama rakyat dengan sistem “pagar betis” bahu-membahu membangun kekuatan dapat mengepung kekuatan gerombolan dengan tokohnya S.M. Kartosuwirjo yang berhasil ditangkap dan diakhiri. Pemberontakan DI/TII yang menggunakan perjuangan gerilya dapat diakhiri dengan suatu pemikiran dan strategi yang oleh David Kilcullen disebut baru. Pemikiran dan strategi yang dimaksud dipersiapkan oleh perwira Divisi Siliwangi dengan keterlibatan A.H. Nasution sejak 1959 dan membuahkan: Pokok Perencanaan Pemulihan Perdamaian dan Keamanan (P4K). Menurut Kilcullen strategi baru ini tampaknya mirip dengan sistem wilayah “*black*” and “*white*” yang diperkenalkan Jenderal Sir Templer, Komandan tentara Inggris dalam menangani masalah keamanan di Malaysia. Akan tetapi, Kilcullen lebih percaya

bahwa strategi itu lebih sebagai pengalaman gerilya TNI sendiri dalam masa perang kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda (Kilcullen 2010: 90). Dengan perkataan lain, ini merupakan strategi yang otentik lahir dari pengalaman perang gerilya Indonesia.

Dalam pada itu, upaya Belanda dalam menghancurkan RIS Yogya dilakukan dengan mengonsolidasikan negara-negara bagian yang dibentuk/disponsori van Mook. Salah satu negara bagian (dari 17 negara bagian) yang berdiri pada 1948 adalah Negara Jawa Timur dengan ibukota Surabaya. Belanda membantu persiapannya selama empat bulan. Sebagaimana laporan Kahin, yang dibuatnya ketika ia melakukan kunjungan daerah sebagai wartawan Amerika, undang-undang dasar negara bagian masih berbahasa Belanda (belum diterjemahkan ke dalam Indonesia). Informasi yang diperoleh Kahin dari Dr. Charles van der Plaas, Pemerintah Komisioner (Belanda) untuk Jawa Timur menyiapkan berbagai cara sampai diadakan konferensi Bondowoso yang memuluskan pembentukan Negara Jawa Timur. Dipilihlah Achmad Kusumonegoro, regen (bupati) Banyuwangi sebagai wali negara (Kahin 1995: 478-480).

Dalam konteks ini perjuangan gerilya bukan saja harus menghadapi Belanda pasca-aksi militer kedua dengan didudukinya Yogyakarta, ibukota RI (18 Desember 1948), para pejuang juga harus meyakinkan kepada rakyat agar tetap setia kepada RI. Tidak sedikit hasutan Belanda untuk melemahkan perjuangan gerilya. Perhatikan propaganda Belanda (18 Juli 1949) untuk membujuk pasukan gerilya:

“Serdadu-serdadu dari Pasukan Ichdar. Tuan2 terancam dalam bahaya! Tuan-tuan punya pimpinan sudah bimbang, senjata2 menjadi tua dan peluru2 hampir habis, rakyat menentang pada tuan2, dan keterangan2 kita menjadi tambah baik dan jaring kita yang mengelilingi tuan2 senantiasa terus mendekati tuan2.

## *PROXY WAR DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA*

Penghabisan tuan2 sudah dekat dengan pelahan2 tetapi sungguh, seperti ini hari kejadian di Gununggangsir sepuluh orang dari teman2 tuan korban jiwa kena kita punya metraleur dan apa sebabnya? Untuk apa tuan berjuang sesungguhnya, sekarang negara Indonesia akan lekas berdaulat?

Sekarang sudah dibentuk batalyon Ke I terutama mengambil tentara T.N.I. Sudah beratus yang masuk asramanya yang ada di Jember, Bondowoso, dan Ambulu ditempat2 mana mereka sama sekolah untuk menjadi tentara federal yang terpelajar. Beberapa Let. Kol.2, major2, kapten2 dan lain2 onderopsir serta beratus2 anak buahnya sama menyerahkan diri dengan anak bini sebagai biasa.

Kita mengetahui bahwa kebanyakan dari tuan2 terpaksa ikut berjuang dan mereka ingin lekas perjuangan dihentikan. Jangan takut pada kita? Kita tidak akan membikin susah pada tuan2 asal saja tuan2 menyerahkan diri pada kita punya post militer di Kejapanan, Balongtani, atau Porong. Simpenlah senjata tuan, dan datanglah memberi tahu dan keselamatan tuan terjaga.

Jika tuan2 tidak datang awaslah pada kita, nasib tuan ampir temponya.

Tuan2 dapat tempo sampai 15 Agustus. Commandan Eskadron 8 Vechtwagens, ttd Bakker” (Djarwadi 1959:40-41).

Paparan di atas menunjukkan bahwa mungkin sekali tidak mudah bagi pasukan gerilya untuk mengambil pilihan dengan kondisi sosial-ekonomi di satu pihak dengan tawaran untuk mendapat posisi atau kondisi yang lebih baik. Persoalannya berada pada semangat dan nilai perjuangan yang dianut tetapakah setia pada cita-cita proklamasi 1945 atau sebaliknya.

Pengalaman perjuangan gerilya di Jawa Timur yang dicatat dalam buku Djarwadi ini menjadi menarik sebagai bahan telaah

sekaligus untuk merefleksikannya ke kondisi kini setelah RI telah berusia 70 tahun. Bujukan atau propaganda di atas dijawab oleh catatan di bawah ini.

”Di sepanjang jalan desa yang mereka lalui, rakyat menyampaikan salam atas kemenangan yang telah dicapai oleh kaum gerilya. Tidak jarang rakyat atas kemauan sendiri mengadakan selamatannya, dengan doa agar senjata yang baru diperoleh dari pihak musuh jangan sampai jatuh lagi ke tangan musuh. ...gerakan pasukan yang tepat, selalu merupakan barisan propaganda yang sangat baik. Rakyat tidak dianjurkan dalam rapat untuk membantu pasukan gerilya. Namun didorong oleh rasa bangga dan kepercayaan pada kekuatan pejuang-pejuang Republik, secara spontan mereka dengan ikhlas membantu perjuangan kita. [...] Desa-desa yang masih asing, pada mulanya hanya dilewati saja, kemudian singgah sebentar untuk berkenalan dengan penduduk. Akhirnya setelah sering berjumpa dan mendengar/mengerti keadaan pejuang-pejuang Republik, mereka meminta pasukan gerilya tinggal di desanya. Dari desa yang tidak dipercaya akhirnya menjadi desa sarang gerilya dan menjadi pangkalan gerilya” (Djarwadi 1959: 43-44).

Jika refleksi historis hendak dijadikan acuan dalam merajut kembali pertalian yang erat antara rakyat dan TNI, maka pada dasarnya bukti sejarah perjuangan gerilya seperti di atas menjadi sangat akurat dan otentik. Bagaimana semangat juang rakyat tergambarkan dengan jelas. Dalam konteks itu, adalah menarik jika ada usul bahwa “Bintang Gerilya” seharusnya juga diberikan kepada penduduk atau orang-orang desa yang membantu pasukan gerilya TNI. Justru mereka “sebagai orang-orang yang penuh rasa tanggung jawab dan keberanian menyokong pasukan gerilya”.

Namun, begitulah perjalanan waktu rupanya dapat membuat orang mudah lupa pada apa yang sudah menjadi sejarah. Begitulah

penjelasan psikologis terhadap cara manusia mengapresiasi sejarahnya menjadi telaah yang menarik dan merupakan obsesi sejarawan yang terus memperluas berbagai pendekatan. Paparan di bawah ini memperlihatkan bagaimana penyusun sejarah batalyon di Jawa Timur hendak merefleksikan nilai-nilai perjuangan gerilya yang baru ditinggalkan (1949) karena sudah terjadi perubahan pada sepuluh tahun kemudian (1959, ketika buku ini diterbitkan).

“alangkah tinggi kesadaran nasional mereka. Sebaliknya, alangkah berbedanya dengan beberapa gelintir pemimpin yang telah mengabdikan pada “tanah air” dengan meng-korup uang negara, melanggar uang pajak yang didapat dari keringat rakyat. Betapa rendah moril pemimpin semacam ini. Mungkinkah pemimpin-pemimpin semacam ini dapat menghargai “tulang-tulang berserakan dan mayat yang bergelimpangan” selama berlangsung perang kemerdekaan?” (hlm 45).

Yang dimaksud dengan “mereka” dalam paparan di atas adalah orang-orang (mantan pejuang gerilya) yang masih konsisten. Kalau begitu, masalah besar bangsa adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan kepada situasi ketika tantangan sudah berubah. Musuh tidak lagi berbentuk fisik yang mudah dideteksi. Peperangan seperti dibahas dalam makalah ini adalah konsep yang tidak lagi biasa, konvensional, melainkan sudah berubah menjadi *asymmetric* dan *proxy war*.

Letjen (Pur) J. Suryo Prabowo menerangkan perang gerilya dengan terlebih dahulu menggambarkan sifat peperangan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh (Jepang, Inggris, dan Belanda) yang memang sudah berada di wilayah Indonesia. Dalam konteks yang lain dalam bukunya *Komando Teritorial* (2013) Suryo Prabowo mengeksplorasi pendapatnya mengenai isu pembinaan teritorial pasca-reformasi. Awalnya karena kekhawatiran pihak yang melihat

upaya untuk menghidupkan aspek teritorial dalam sistem pertahanan negara adalah sama dengan kebangkitan pemerintah Orde Baru. Namun, perlu diperhitungkan adanya kekhawatiran lain, bukankah sisi ini pula menjadi kerawanan karena musuh dapat menggunakan potensi isu-isu konflik dalam negeri untuk *proxy war*. Meskipun TNI diberi 14 tugas yang dapat dilakukan sehubungan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dalam kenyataan, terutama dalam aplikasinya, mereka masih menghadapi kendala.

### **Perspektif Kekinian**

Suatu perang dilakukan kekuatan besar dengan tidak melibatkan dirinya—tetapi dengan menggunakan pihak-pihak ketiga sesungguhnya sudah mulai menggejala sejak berakhirnya Perang Dingin. Banyak *proxy war* terjadi terutama di negara-negara yang baru keluar dari alam penjajahan, seperti Asia-Afrika. Pertanyaannya adalah apakah bekas penjajah tidak rela dan suka jika negara yang baru merdeka segera menjadi negara yang maju dan kuat? Apakah mereka terus menginginkan agar negara-negara ini tetap lemah sehingga masih terus dapat dieksploitasi dan menjadi pasar mereka?

Dari dua bentuk *proxy war* yang dikutip di atas dalam perspektif kekinian dapat diajukan pertanyaan historis: bagaimana dapat dijelaskan? Ketika paradigma perang telah bergeser, maka konsep memenangkan perang pun tidak lagi dengan cara-cara lama. *Hard power* betapa pun hebatnya untuk menguasai suatu teritorial tertentu bukan jaminan memenangkan perang, misalnya, Amerika di Vietnam atau Soviet di Afganistan. Bukankah memenangkan perang hakikatnya adalah *winning the mind and the heart*? Bukankah menjadi sederhana memenangkan perang artinya ketika musuh mengikuti kehendak kita? Bahkan, hal-hal tertentu dilakukan dengan sukarela karena tidak dirasakan sebagai serangan konvensional, seperti



lazimnya letusan senjata. Kalau demikian, amunisi telah diubah atau digantikan dengan media sosial atau budaya (seni/musik), gaya hidup, dan lain-lain.

*Proxy war* dengan cara “pembentukan opini atau pemutarbalikkan sejarah” (kajian Lemhannas) rupanya menjadi media efektif untuk menyerang “*the mind*”. Apakah gejala seperti ini sudah muncul? Pengalaman sudah membuktikan ketika Kurikulum 2004 digulirkan timbul masalah yang nyaris memicu konflik antarkomponen bangsa dan mengancam integrasi bangsa, karena dalam mata pelajaran sejarah Indonesia tidak termuat materi “Pemberontakan PKI di Madiun 1948” dan tidak dicantumkan kata “PKI” dalam “Gerakan 30 September/ 1965”. Adakah ini sebagai kesalahan teknis belaka? Masalahnya menjadi prinsipil karena telah memicu “amarah” kelompok guru di Jawa Timur yang membakar buku-buku sejarah dengan kurikulum. Tentulah Kurikulum sebagai produk kebijakan pemerintah akan mengikuti sejarah resmi yang dipegang, sedangkan sebutan “G30S/1965” –tanpa PKI– masuk ke dalam ranah kajian akademis yang hingga saat ini terdapat 5 teori mengenai siapa pelaku/dalang gerakan (lihat IDAS jilid 8, Van Hoeve-Ikhtiar Baru, 2010).

Sejarah hanya akan bermakna jika diletakkan ke dalam konteks pertanyaan yang kita ajukan untuk menjelaskan masalah yang muncul kini. Dalam kaitan ini, sejarah adalah dialog kita dengan masa lampau melalui pertanyaan atas isu-isu kekinian. Dalam hal ini, apa yang kita bicarakan adalah perang generasi keempat berupa *asymmetric* dan *proxy war*. Dalam kaitan dengan memperingati 70 tahun TNI, muncul isu kekinian mengenai hubungan TNI dan rakyat. Perhatikan semboyan dan slogan dalam memperingati 70 tahun TNI, antara lain, “TNI adalah Rakyat”; “Rakyat adalah TNI”;

“bersama rakyat TNI kuat”. Pertanyaan historisnya pernahkah TNI meninggalkan atau menyakiti hati rakyat?

Pengalaman masa Orde Baru yang menempatkan TNI (ABRI) pada posisi pendukung utama pemerintah otoriter yang kemudian jatuh itu, memang sulit bagi TNI untuk mengembalikan fungsi sesungguhnya dalam penjaga kedaulatan teritorial NKRI. Kekuatan TNI sebagai komponen utama ketika negara menghadapi ancaman militer pun tidak harus sendirian karena dilengkapi komponen cadangan dan komponen pendukung. Pada akhirnya ketika perang sudah demikian kompleks, dalam konteks *asymmetric* dan *proxy war* maka sudah jelas bahwa dikotomi sipil-militer tidak boleh ada lagi dalam benak sekecil apa pun ia pernah terbersit di dalam pikiran anak bangsa.

Akhirnya suatu pemikiran akademis yang patut dikemukakan untuk dikembangkan di sini adalah menyambut dan mengelaborasi pemikiran Colin S. Gray mengenai kolaborasi antara geografi, sejarah, dan kebudayaan yang mampu memberi sumbangan teori, analisis, dan eksplanasi dalam kajian strategis modern (Gray 1999, 2006).

Geografi memang tidak menentukan budaya strategis nasional dalam beberapa tampilan mekanistik yang sederhana. Namun, kondisi geografi dalam semua jenis yang ada di komunitas dapat memainkan peran dalam aspek pengalaman sejarah suatu komunitas. Dalam lingkup yang lebih luas, sesungguhnya kita berbicara mengenai budaya strategis (*strategic culture*), yang dapat dipahami sebagai suatu rangkaian transmisi sikap perilaku, keyakinan dengan prosedur yang dipilih sehingga setiap anggota masyarakat dapat belajar, mempraktikkan, dan mengajarkannya kepada anggota baru masyarakat (Gray 2006:139). Di dalam kaitan inilah, ke depan kajian-kajian strategis sangat berguna bagi studi dan ilmu pertahanan, khususnya di Indonesia.

## KEPUSTAKAAN

- Anderson, Benedict RO'G. 1977. *Java in a Time of Revolution 1944-1946*. Ithaca New York: Cornell University Press.
- Djarwadi, Radik dkk. 1959. *Pradjurit Mengabdikan Gumpalan Perang Kemerdekaan Batalyon Y: Sedjarah Batalyon "Y"*. Bandung: Pusat Sejarah Militer.
- Gray, Colin S. 1999. *Modern Strategy*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2006. *Strategy and History Essays on Theory and Practice*. London: Routledge.
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (terjemahan). Surakarta: Penerbit UNS.
- Katoch " Lt Gen PC. "Asymmetric Warfare" dalam Singh, Dhirendra, IAS & Lt Gen DB Shekatkar eds., *Intelligence, Security and Asymmetric Warfare*. New Delhi: Manas Publication 2010: 93-104.
- Kilcullen, David. 2010. *Counterinsurgency*. Oxford: Oxford University Press.
- Nurmantyo, Gatot. 2015. *Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas*.
- Prabowo, Suryo J. 2013. *Komando Teritorial sebagai Bagian dari Gelar Kekuatan TNI AD*.
- Singh, Bilveer. 1996. *East Timor Indonesia and the World Myths and Realities*. Kualalumpur: ADPR Consult (M) Sdm Bhd.
- Thornton, Rod. 2007. *Asymmetric Warfare: Threat and Response in the Twenty-first Century*. Cambridge: Polity Press.
- Zuhdi, Susanto, (ed). 2012. *Indonesia dalam Arung Sejarah. Jilid 8 Reformasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Van Hoeve Ikhtiar Baru.



## Bab XIII

### WAWASAN KEBANGSAAN: SEBUAH KENISCAYAAN<sup>1</sup>

*N. Jenny M.T. Hardjatno*

#### Abstrak

Wacana tentang wawasan kebangsaan akhir-akhir ini kembali menguat dalam masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah wawasan kebangsaan tetap relevan untuk dibicarakan dalam kondisi dunia yang mengglobal seperti saat ini, juga mengingat adanya kebangkitan *ethnic nationalism* sebagaimana yang terjadi di Negara Eropa Timur pasca keruntuhan Uni Soviet di tahun 1991. Selain itu, juga diperbincangkan perlunya revitalisasi wawasan kebangsaan, dalam artian ini terlihat bahwa wawasan kebangsaan merupakan salah satu elemen yang sangat mendasar yang menentukan eksistensi negara dan bangsa kita secara historis baik di masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Namun, pada saat yang sama, ia menunjukkan pula adanya anggapan bahwa landasan itu kini sedang menghadapi diskontinuitas, yang pada gilirannya bisa berakibat munculnya krisis-krisis yang mengancam keberlangsungan keduanya.

Sehubungan dengan paham kebangsaan, semakin lama timbul kecenderungan penonjolan partikularisme dan relativisme budaya, hal

---

<sup>1</sup> Sebagian besar tulisan ini merupakan pengembangan tulisan dalam buku *Bangsa Indonesia Terjebak "Perang Modern"*: SESKO TNI AD Republik Indonesia tahun 2004 dan dalam *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 18 Juni 2014*.

yang selama ini sangat bertentangan dengan semangat universalisme yang dipunyai oleh *the founding fathers* kita. Akibatnya, timbul kelompok-kelompok yang ingin melakukan redefinisi terhadap situasi yang mereka alami dan mulai mencoba melakukan penemuan jati diri. Akhirnya beberapa masalah yang dapat ditemukan dalam pergaulan sosial seperti, masalah SARA, bahkan masalah bahasa pun menjadi sumber revitalisasi dan dari sini tumbuhlah suatu landasan munculnya visi politik primordial.

Kata Kunci: wawasan kebangsaan, revitalisasi wawasan kebangsaan, *ethnic nationalism*, partikularisme, relativisme budaya.

### Pengantar

Masalah ini akan menjadi penting bilamana kita melihat adanya gejala disintegrasi bangsa, seiring dengan situasi politik yang berkembang sedemikian cepat, sehingga masalah wawasan kebangsaan pun menjadi semakin rumit dan kompleks. Bilamana kita melihat perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, masalah kebangsaan semakin relevan untuk diangkat ke permukaan sebagai tindak lanjut dari perwujudan integrasi nasional.

Sehubungan dengan itu perkembangan teknologi informasi di satu pihak dan semakin berkembangnya dunia di lain pihak, maka wawasan kebangsaan menjadi sangat fungsional baik secara nasional maupun internasional, yang pada gilirannya memaksa kita untuk meredefinisi dan membuat reorientasi masalah tersebut.

Tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran seberapa penting masalah wawasan kebangsaan menjadi relevan untuk difungsikan dan diaktualkan pada masa sekarang ini, dengan melihat latar belakang terciptanya wawasan kebangsaan dan pembentukan

bangsa Indonesia serta dengan dampak globalisasi yang tengah melanda dunia.

### **Kebangsaan Indonesia dalam Tinjauan Historis**

Berbicara tentang kebangsaan (nasionalisme) tentu saja tidak dapat dilepaskan dari konsep bangsa (*nation*). Rogers Brubaker dalam Smith (2003: 12) mengingatkan tentang bahaya menjadikan konsep bangsa sebagai suatu hal yang konkret, yaitu dengan melihat bangsa sebagai 'kolektivitas yang substansial dan berdaya tahan'. Dikatakannya, bahwa seharusnya dipikirkan nasionalisme tanpa bangsa dan melihat bangsa (*nation*) sebagai suatu kategori praktik, kemerdekaan bangsa (*nationhood*) sebagai suatu bentuk budaya dan politik yang dilembagakan serta kebangsaan (*nationness*) sebagai suatu peristiwa yang kontingen. Sementara itu Max Weber (1948) menyatakan bahwa kriteria bangsa yang murni 'objektif' seperti bahasa, agama, wilayah, dan sebagainya tidak bisa mencakup sejumlah bangsa. Oleh karena bangsa bukanlah negara yang merupakan sebuah kegiatan institusional melainkan aktivitas bangsa yang bercirikan suatu jenis komunitas. Dengan demikian, maka bangsa tampaknya dapat terbentuk tanpa adanya negara, oleh karena bangsa dalam konsep nasionalisme merupakan suatu perwujudan dari bentuk persatuan komunitas tersebut.

Anderson (1983: 5) menyatakan bahwa bangsa adalah sebuah *imagined community*, yaitu sebuah komunitas politik yang imajiner, yang mempunyai batas-batas yang jelas serta mempunyai kedaulatan. Disebut demikian karena sebelumnya warga dari sebuah *nation* itu tidak saling mengenal, akan tetapi mereka membayangkan adanya sebuah komunitas, yang diciptakan atau dibayangkan. Dengan demikian bangsa (*nation*) bukanlah suatu benda ataupun yang dibendakan, yaitu sejumlah kriteria obyektif seperti latar belakang

sejarah, suku, agama, kebudayaan, bahasa, dan lain sebagainya, akan tetapi adalah apa yang digambarkan oleh masyarakat tentang dirinya serta tentang sesamanya dalam masyarakat.

Akhirnya gambaran yang berupa *nation* itu diwujudkan kebenarannya melalui berbagai ikon yang dijadikan simbol bersama. Sementara itu, Smith (2003: 150) menyatakan konsep bangsa sebagai “suatu komunitas manusia yang memiliki nama, yang menguasai suatu tanah air serta memiliki mitos-mitos dan sejarah bersama, budaya publik bersama, perekonomian tunggal dan hak serta kewajiban bersama bagi semua anggotanya”.

Selanjutnya menurut Smith (2003: 6) kebangsaan atau nasionalisme mempunyai makna sebagai berikut.

1. Suatu proses pembentukan, atau pertumbuhan bangsa-bangsa;
2. Suatu sentimen atau kesadaran memiliki bangsa bersangkutan;
3. Suatu bahasa dan simbolisme bangsa;
4. Suatu gerakan sosial dan politik demi bangsa yang bersangkutan; dan
5. Suatu doktrin dan/atau ideologi bangsa, baik yang umum maupun yang khusus.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh David Miller (1995: 27) bahwa nasionalitas adalah suatu komunitas yang (1) terbentuk dari keyakinan dan komitmen bersama yang saling menguntungkan, (2) mempunyai latar belakang sejarah, (3) berkarakter aktif, (4) berhubungan dengan suatu wilayah tertentu, dan (5) dibedakan dengan komunitas lain melalui budaya publiknya yang khas.

Dengan demikian, kebangsaan merupakan sesuatu yang berproses, yang diwujudkan melalui simbol-simbol, dikukuhkan



melalui arus informasi dalam interaksi sosial dan media komunikasi, yang disertai sarana dan prasarana teknologi yang tersedia. Di sini terlihat bahwa wawasan kebangsaan akan tetap ada jika terdapat proses imajinasi dan keyakinan suatu komunitas yang selalu dipelihara, dipertahankan serta dikembangkan. Tanpa hal itu maka kesadaran kebangsaan akan lenyap.

Dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan bahasa, maka penanaman rasa kebangsaan ini menjadi penting terutama pada masa penjajahan. Yang menjadi dasar keterikatan masyarakat untuk bersatu adalah adanya kesamaan pengalaman sejarah, cita-cita sosial politik untuk berkehidupan kebangsaan yang merdeka dan berdaulat yang bisa dilihat mulai dari sejarah pergerakan nasional, lahirnya Budi Utomo 1908 dan kristalisasi dari semuanya itu sampai pada saat dikumandangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai kehendak untuk bersatu dengan janji *Satoe Bangsa, Satoe Tanah Air dan Satoe Bahasa Indonesia*. Sumpah tersebut menjadi modal utama untuk melahirkan Negara nasional yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari proses tersebut, terlihat bahwa konsep kebangsaan Indonesia pada hakikatnya berbasis pada identitas dan budaya bangsa yang terdiri dari berbagai etnis, bahasa, agama, yang dituangkan dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun di satu sisi keragaman ini merupakan kondisi yang rawan konflik, namun di sisi lain merupakan kekayaan yang harus dipertahankan sebagai ciri khas bangsa yang merupakan mozaik dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jadi, secara historis munculnya rasa kebangsaan Indonesia ditunjukkan oleh adanya kesamaan pengalaman sejarah dan cita-cita sosial politik untuk berkehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai suatu Negara yang pluralistik terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, bahasa, etnis dan kelompok tertentu tidaklah merupakan kelompok-kelompok yang eksklusif dilihat dari sejarah kelahirannya. Akan tetapi, bangsa Indonesia merupakan transendensi atas suku-suku. Dengan meminjam istilah Benedict Anderson, dari hal ini terlihat bahwa Indonesia sebenarnya merupakan *imagined community*, oleh karena bangsa Indonesia terbentuk berdasarkan visi dan cita-cita berbangsa. Selanjutnya dalam rangka pembentukan bangsa terlihat adanya dasar keterikatan integratif masyarakat berdasarkan toleransi dari suku-suku atau kelompok etnis tertentu dengan tujuan untuk dapat mencapai cita-cita bersama atau cita-cita bangsa, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Wujud dari masyarakat Indonesia pada umumnya berkembang dari pola-pola keterikatan demikian yang tumbuh dari bawah sebagai manifestasi kebutuhan untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Pola keterikatan tersebut merupakan pangkal tolak dan tempat tumbuhnya pola berpikir dan bertindak inklusif. Secara historis terlihat bahwa ikatan-ikatan ini kemudian berkembang sejalan dengan wawasan dan pergaulan masyarakatnya yang makin maju dan makin luas. Menurut Ki Hadjar Dewantara rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan yang hidup dalam jiwa dengan disengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu timbul dari rasa diri, yang terbawa dari keadaan peri kehidupan, lalu menjalar menjadi rasa keluarga, rasa ini terus jadi rasa hidup bersama (rasa sosial).

Rasa kebangsaan merupakan rasa kesadaran berbangsa yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam

mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan. Atas dasar rasa dan wawasan kebangsaan yang memuat nilai-nilai toleransi dan gotong royong timbul semangat kebangsaan untuk cinta terhadap tanah air dan rela berkorban demi kepentingan tanah air. Wawasan kebangsaan mengandung suatu tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati dirinya, serta mengembangkan tatalakunya sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai luhur budayanya yang lahir dan tumbuh sebagai identitasnya.

### **Dinamika Kondisi Sosial Budaya Indonesia**

Indonesia merupakan *rumah* bagi beragam kelompok etnik dengan bahasa dan dialek yang beraneka ragam. Kurang lebih ada 300 kelompok etnik di Indonesia, diperkirakan 200 juta orang atau 84% adalah mereka yang memiliki leluhur lokal. Kelompok etnik terbesar di Indonesia adalah orang Jawa yang mencakup 41% dari seluruh penduduk Indonesia. Orang Sunda, Melayu dan Madura merupakan kelompok terbesar berikutnya di Indonesia. Selain itu ada juga kelompok etnis yang berasal dari keturunan orang asing, seperti Tiongkok dan Arab.

Keragaman etnik ini kadang-kadang menjadi salah satu pemicu berbagai konflik sosial. Beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di antaranya, aksi kekerasan antara penduduk Dayak setempat dan migran Madura di provinsi Kalimantan Barat dan Tengah. Contoh konflik sosial lainnya, pada bulan Oktober 2012, telah terjadi bentrokan antara warga asli Lampung di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan beberapa desa sekitarnya, melawan warga keturunan Bali di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Bentrokan ini awalnya dipicu oleh adanya kecelakaan lalu lintas yang menimpa dua gadis warga desa Agom yang sedang mengendarai sepeda motor dan

dilaporkan telah diganggu sekelompok pemuda di Desa Sidoreno, Kecamatan Way Panji<sup>2</sup>

Selain berpotensi menimbulkan konflik sosial, keragaman budaya dan adat istiadat dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi setiap tantangan baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Kondisi ini dapat tercapai apabila bangsa Indonesia dapat menjaga dan meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi, saling menghormati, dan penuh persaudaraan. Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut membuatnya menjadi semakin bersatu dan tidak sebaliknya menjadi semakin terpecah belah. Selain itu, kondisi tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia memiliki pemahaman sekaligus pengalaman yang sangat kaya dalam mengelola keanekaragaman.

Oleh karena itu, perlu juga ditumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan kemampuan untuk mengimplementasikan ajaran dan keyakinan agama yang dianutnya untuk melaksanakan kehidupan yang harmonis di masyarakat, saling mencintai baik yang sama agamanya maupun yang berlainan agama di lingkungan wilayah perbatasan sebagai satu kesatuan wilayah dari Negara Kesatuajn Republik Indonesia.

Sebagaimana kita sadari bersama bahwa untuk membangun sebuah bangsa, tidak mungkin dapat dilakukan oleh sekelompok orang saja, akan tetapi dibutuhkan kebersamaan segenap komponen bangsa. Kebersamaan yang dikehendaki adalah kebersamaan dalam rangka mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di dalam kebersamaan diperlukan adanya keadilan, karena aspek keadilan menjadi sangat penting mengingat kebersamaan akan sulit

---

2 <http://www.antaranews.com/berita/342011/warga-balinuraga-lampung-selatan-sampaikan-permintaan-maaf> diunduh tgl 2 Juni 2014 pukul 23.00 WIB.

#### WAWASAN KEBANGSAAN: SEBUAH KENISCAYAAN

diwujudkan, jika pembangunan itu sendiri menghasilkan diskriminasi terhadap setiap penduduk yang terlibat di dalam pembangunan itu sendiri.

Selanjutnya untuk menghadapi era global diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, ulet, gigih, tangguh, tidak mudah menyerah, sehingga tumbuh menjadi manusia yang kreatif, inovatif, kritis dan akhirnya mampu memenangkan persaingan global. Dengan demikian pendidikan karakter perlu untuk membentuk bangsa yang berintegritas, mandiri, dan berdaya saing. Di lain pihak, sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan juga harus memiliki akhlak mulia, beretika, dan taat hukum, serta mencintai lingkungan.

## **Memaknai Wawasan Kebangsaan Masa Kini dan Operasionalisasinya**

Saat ini kita berada dalam era globalisasi, suatu situasi dan kondisi yang tidak dapat kita elakkan. Proses globalisasi pada dasarnya telah membuka suatu lahan interaksi yang baru di dunia yang belum pernah dikenal sebelumnya, bahkan juga semula asing di negara-negara maju. Lahan interaksi global atau kerap juga disebut ‘globalitas’ itu seperti biasanya yang terjadi dengan segala lahan baru dalam kehidupan masyarakat manusia selalu bersisi dua: dia menawarkan peluang-peluang baru (*global society*), tetapi juga menghadapkan kita pada risiko-risiko baru, sehingga beberapa ahli menyebut dunia kita sekarang sebagai ‘*risk society*’ (Giddens, Beck, Wallerstein).<sup>3</sup>

Sementara itu globalisasi sebagai suatu fenomena masa kini dirumuskan oleh Roland Robertson (1993) sebagai “*a concept refers both to the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole*”. Globalisasi berarti meningkatnya interdependensi dan kesadaran interdependensi (Sastraprteja, 2001). Globalisasi membawa serta nilai-nilai dan tatanan dunia baru yang tercermin melalui nilai-nilai universal yang berada di dunia ini, seperti masalah demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Arus globalisasi yang menerpa masyarakat dapat menyebabkan kuatnya identitas primordial berbagai kelompok masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat menghadapi arus global tersebut serta mengidentifikasikan diri kepada budaya global seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sebagai akibatnya masyarakat dapat terjebak

---

3 Beck: 9 *et seq*; 10-11.

pada ekstrimitas identitas primordialnya untuk mencari rasa aman terhadap terpaan budaya global tersebut.

Proses globalisasi yang telah terjadi membawa dampak yang melanda berbagai bangsa di belahan dunia ini, di mana setiap bangsa dapat memanfaatkannya dengan mengadakan suatu usaha yang terus menerus seperti adaptasi, serta reformasi dalam setiap kondisi sosial politiknya sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Akan tetapi, bisa saja terjadi kesulitan bilamana terdapat kemampuan yang kurang seimbang atau ketidaksiapan dari bangsa yang terkena arus globalisasi, yang antara lain dapat menimbulkan *culture shock*.

Dalam proses transformasi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini, terjadi berbagai perubahan dan kemajuan, yang tentu saja membawa serta gaya hidup beserta manifestasi kulturalnya, termasuk budaya pop (*pop culture*) yang meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Budaya pop berkembang tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan sosial ekonomi dan gaya hidup. Dalam perkembangannya, budaya pop ini dapat menjamah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan apakah mutunya baik atau tidak, karena permasalahan yang utama adalah asalkan dapat memenuhi selera dan gaya hidup masyarakat, misalnya *junk food*, *K-Pop*, dan berbagai lainnya yang dipersembahkan oleh tayangan media baik cetak maupun elektronik.

Sebagaimana kita ketahui, proses globalisasi ini telah terjadi berulang kali, namun isu globalisasi sekarang ini begitu gencar dan menyeluruh dengan dampak yang cukup besar berkat teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Dengan demikian fenomena globalisasi harus dicermati, karena penolakan terhadap globalisasi berarti akan mempunyai dampak ketertinggalan, sedangkan memanfaatkan globalisasi akan membawa kemajuan sejauh terdapat kemampuan dan kesiapan yang nyata dari bangsa tersebut.

Dengan demikian, globalisasi menuntut kesadaran terhadap kesatuan dunia, perlunya solidaritas bangsa manusia sebagai prinsip global di samping prinsip-prinsip yang sudah berlaku yaitu individu (pribadi), masyarakat, dan bangsa. Demikian pula, globalisasi menuntut sikap keterbukaan serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan di dalam pergaulan hidup dunia termasuk menghormati martabat serta hak-hak asasi manusia. Mengandalkan kekuatan fisik dan mempergunakannya untuk memperoleh suatu pengaruh dominan dalam percaturan dunia akan berakibat lunturnya semangat global ini.

Sekalipun demikian, globalisasi tidak berarti menghilangkan nasionalisme sebagaimana semangat yang dicerminkan dalam pernyataan Kenichi O'Mae dalam *The End of Nation State*. Sangat mungkin bahwa di dalam globalisasi berkembang nasionalisme secara regional yaitu gabungan dari negara-negara yang sudah *established* atau pun juga nasionalisme lokal yaitu *ethniconationalism*. Sehubungan dengan hal ini dalam konteks globalisasi pun perlu diperhatikan prinsip-prinsip sosial politis berdasarkan multikulturalisme.

Akhirnya, perlu digarisbawahi bahwa globalisasi menuntut masing-masing negara mempunyai daya saing yang tinggi, bangsa yang lemah dalam daya saingnya tidak mustahil akan dilanda oleh proses globalisasi dan ini berarti hanyalah menguntungkan bagi negara-negara yang berdaya saing tinggi. Globalisasi pun mempunyai dampak dan tuntutan terhadap kondisi ekonomi, politik dan sosial budaya bangsa termasuk di dalamnya aspirasi daerah. Pemberlakuan UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU RI nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diharapkan akan membawa perubahan kepada kehidupan pemerintahan daerah yang semata-mata mengutamakan kepentingan rakyat, dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.



Jadi, kedua UU ini diharapkan semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan RI. Bertolak dari kenyataan-kenyataan yang ada dan berlangsung selama ini, dan untuk menjamin eksistensi Negara Kesatuan RI, sangat dibutuhkan suatu dorongan secara nasional untuk membangkitkan semangat kebangsaan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Di Indonesia, dianut paham demokrasi Pancasila, di mana asas kekeluargaan dan rasa saling hormat-menghormati merupakan ciri khas dan mengacu pada kokohnya semangat gotong royong berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda sebagai pilar dan nuansa demokrasi yang kokoh.

Jadi, dapat disebutkan di sini bahwa jati diri bangsa selalu memberi warna dalam proses demokrasi, termasuk di dalamnya pelaksanaan otonomi daerah yang tidak terlepas dari cita-cita demokrasi dalam rangka menumbuhkan pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi harus selaras dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam artian ini terlihat bahwa aspirasi rakyat semakin tumbuh dan berkembang, terutama dalam mengatur daerahnya sendiri.

Krisis ekonomi, politik, dan krisis kepercayaan yang berkepanjangan, yang melanda bangsa Indonesia telah membawa dampak hampir kepada seluruh aspek dan tatanan kehidupan. Walaupun terasa pahit keterpurukan yang telah terjadi di Indonesia, namun ada hikmah positif yang bisa diambil, yaitu timbulnya ide dan pemikiran dasar yang menumbuhkan reformasi total di dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa, dan bernegara.

Tujuan dan usaha reformasi total ini adalah untuk mewujudkan terciptanya masyarakat warga (*civil society*) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat, dan bernegara yang memiliki nilai-

nilai *good governance* dan *clean government*, yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepentingan rakyat, serta bertanggung jawab kepada rakyat dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Salah satu pemicu utama permasalahan yang semakin kompleks dan berdampak multidimensional terhadap kehidupan setiap bangsa, termasuk Indonesia di abad ke-21 ini adalah pertambahan jumlah penduduk dunia yang meningkat pesat dari 6,9 miliar (2011) menjadi 9,2 miliar orang (2050) atau bertambah 2,5 miliar dalam kurun waktu empat puluh tahun. Pertumbuhan penduduk akan memicu persoalan ketersediaan ruang hidup, pangan, energi, air, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, keamanan, bahkan eksistensi sebuah bangsa dan negara. Pada tahun 2045, ketika Indonesia berusia 100 tahun, jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai 400 juta jiwa. Pada saat itu, satu dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan dan memperhatikan secara serius aspek pendidikan dan kesehatan penduduk, sehingga penduduk Indonesia tumbuh sebagai manusia berkualitas dan menjadi aset bangsa, bukan sebaliknya menjadi beban bangsa. Dengan bekal jumlah penduduk yang besar (demografi), letak yang strategis (geografis), dan sumber kekayaan alam (sda) melimpah, Indonesia diramalkan akan menjadi negara besar (*super power*) urutan ke-7 dari aspek ekonomi pada tahun 2030, dan pada urutan ke-4 dunia dalam aspek PDB pada 2050, yaitu mencapai US \$13,93 triliun.

Dari hal tersebut faktor pendidikan menjadi penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, beretika, dan taat hukum, serta mencintai lingkungan dan tanah airnya. Artinya penanaman wawasan kebangsaan juga merupakan hal yang patut dikembangkan dalam kurikulum pendidikan baik

pendidikan formal, serta non formal dan bentuk-bentuk pendidikan informal yang mengedepankan rasa cinta tanah air. Menurut Komaruddin Hidayat (2012) arah pendidikan yang terjadi dewasa ini harusnya mengacu pada empat hal pokok yaitu (1) peserta didik harus diarahkan agar mengenal dan memahami potensi dirinya; (2) peserta didik harus diarahkan untuk mengenal karakter dan potensi daerahnya agar dipelihara dan dikembangkan; (3) peserta didik harus diarahkan untuk mengenal dan memahami sejarah dan jati diri bangsanya untuk dijaga kehormatannya dan dimakmurkan rakyatnya; dan (4) peserta didik dan tenaga pendidik harus memiliki wawasan global dan regional. Pada kenyataannya, suasana batin dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini hanya disibukkan pada hal-hal yang bersifat administratif dan ujian nasional yang materinya sangat kognitif. Kurikulum dan kultur pendidikan kurang menanamkan nilai-nilai patriotisme.

Lawrence Harrison dan Samuel P. Huntington dalam buku *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, yang dikutip oleh Jakob Oetama (2012) mengatakan bahwa dari 10 faktor kemajuan dan ketertinggalan suatu bangsa, satu diantaranya adalah pengembangan pendidikan. Ketertinggalan (contoh Ghana) dan kemajuan (contoh Korea Selatan) suatu bangsa bukan dikarenakan imperialisme, ketergantungan, dan rasisme, melainkan terletak pada nilai-nilai budaya yang secara luar biasa membentuk kehidupan politik, ekonomi, dan kinerja sosial-budaya. Korea Selatan lebih mampu membangun pendidikan sebagai bagian dari membangun nilai-nilai budaya kehidupan bangsa yang cerdas. Pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter-karakter positif, yang dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila dalam bentuk 'baru' sesuai dengan tingkat pendidikannya, mulai dari tingkat TK sampai PT.

Akhirnya, dalam memaknai wawasan kebangsaan harus dilihat dari hal-hal berikut ini. *Pertama* hilangkan kesenjangan, ketidakadilan, diskriminasi, intoleransi yang masih merupakan fenomena menonjol dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini. *Kedua* menanggapi pernyataan Kenichi O'Mae *The End of Nation State* perlu disadari dan diyakini bahwa di samping tiga faktor prinsip-prinsip esensial identitas pribadi, masyarakat, dan bangsa perlu diterima dan difungsionalkan faktor ke empat yaitu bangsa manusia (*human kind*) dalam membangun dunia baru yaitu struktur dunia global yang terbuka, toleran, adil, dan aman. *Ketiga*, menampilkan persepsi kebangsaan bukan sebagai benda atau reifikasi, tetapi sebagai *imagined community* sebagaimana dikemukakan oleh Benedict Anderson. *Keempat*, menghargai multikulturalisme yang mengakui kepribadian serta hak hidup masing-masing suku dan identitas budaya lokal dalam konteks yang lebih luas sebagai satu bangsa. Prinsip ini pada dasarnya sudah dikemukakan dalam rumusan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, wawasan kebangsaan harus dituangkan secara konkret dalam struktur kehidupan sosial masyarakat serta sejauh mungkin dalam percaturan global demi kepentingan bangsa. Oleh karena itu *pertama* harus dihindari rumusan-rumusan yang ideologis semata-mata, yang dapat mengakibatkan *counter effect*. Sadar atau tidak sadar, rumusan-rumusan ideologis sering digunakan bukan sebagai pedoman yang memberikan arah ataupun motivasi kerja, tetapi dipakai untuk membenaran kepentingan bahkan membenaran kekuasaan. *Kedua*, hindari bentuk-bentuk ungkapan yang eksklusivistik, hubungan relasional yang feodalistik, sikap-sikap fanatisme sempit, serta wawasan primordial yang kerdil dalam hubungan antar suku dan agama. *Ketiga*, menuangkan arti dan makna wawasan kebangsaan serta kepentingan bangsa ke dalam prinsip dan acuan bagi organisasi-organisasi internasional

seperti WTO, WHO, APEC dan lain-lain. Sebagai contoh Negara Amerika Serikat yang begitu terkenal kaya dan kuat hubungan internasionalnya tetap bersikap gigih dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. *Keempat*, menuangkan kadar nasionalisme secara konkret serta kadar solidaritas gotong royong yang rasional produktif ke dalam organisasi sosial, ekonomi, dan politik nasional.

### Penutup

Perkembangan wawasan kebangsaan Indonesia bergerak ke arah tumbuhnya penghargaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, yang secara historis tercermin dengan lahirnya Budi Oetomo sebagai usaha merintis integrasi persatuan dan kesatuan masyarakat, yang makin mengkristal dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang sangat monumental. Sumpah tersebut menjadi modal utama bagi perjuangan untuk melahirkan negara nasional (negara bangsa) Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Konsep kebangsaan Indonesia pada dasarnya harus berbasis identitas dan budaya bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman yang demikian ini justru harus menumbuhkan nilai persatuan dan bukan perpecahan.

Jadi, perilaku sehari-hari masyarakat akan menjadi lebih bermakna sejauh diilhami oleh semangat sejarah perjuangan bangsa. Dalam kaitannya dengan proses globalisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang menuntut perubahan besar di dunia harus dicermati dalam konteks kepentingan bangsa. Perkembangan dunia pada abad ke-21 diwarnai oleh perubahan-perubahan yang sangat cepat dan mendasar. Politik global yang pada awalnya ditekankan pada pertahanan keamanan telah berubah ke arah politik pengembangan kekuatan ekonomi melalui persaingan perdagangan bebas.

Dengan pola berpikir inklusif, dan perkembangan pola keterikatan masyarakat yang ditunjukkan oleh faktor sejarah perjuangan bangsa, serta cita-cita bangsa Indonesia maka posisi agama dapat menjadi salah satu faktor sebagai perekat bangsa, dalam arti religiusitas sebagai satu dimensi yang melekat pada martabat manusia, dalam kerangka persatuan dan kesatuan karena pada tingkat yang lain dapat menimbulkan faktor eksklusivisme.

Lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang modern, bersifat inklusif dan merupakan faktor integrasi nasional, harus secara sadar dihidupkan dan ditopang sehingga nilai-nilai paham kebangsaan melekat dalam berkehidupan bermasyarakat dengan paham kebangsaan serta berpadu integral dengan kehidupan negara. **Jadi, perlu sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai sebuah keniscayaan untuk mempertebal rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.**

Dengan demikian, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar sejauh mampu mengembangkan diri menjadi bangsa yang dinamis dan arif, serta memiliki daya menuju kemajuan secara kreatif, dan bebas dari sekat-sekat primordial dan kekerdilan wawasan, berpikir dalam perspektif yang luas serta bekerja secara produktif.

## KEPUSTAKAAN

- Anderson, B. 1983. *Imagined Community*. London: Verso.
- Couwenberg, SW. 1994. *Nationaliteit & Nationalism*. Den Haag: SDU.
- Gerth, H.H dan C.W. Mills. 1948. *From Max Weber. Essays in Sociology*. USA and Canada: Routledge: Taylor and Francis Group.
- Harrison Lawrence dan Samuel P. Huntington. 2000. *Cultures Matters. How Values Shape Human Progress*. USA: Basic Books.
- Hutchinson, John & D. Smith Anthony. 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.

#### WAWASAN KEBANGSAAN: SEBUAH KENISCAYAAN

- Kahin, George Mc. Turnan. 1952 *Nationalism and Revolution in Indonesia*.  
Terj. Nur Bakdi Sumanto. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*.  
Jakarta : UNS Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pembangunan Bangsa*. Jogjakarta: Aditya Media.  
———.1999. *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan  
Negara Kesatuan*. Jogyakarta: Kanisius.
- Parera, F.M., T. Jakob Koekerits (penyunting). 1999. *Demokratisasi dan  
Otonomi. Mencegah Disintegrasi Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Robertson, Roland. 1993. *Globalization. Social Theory and Global Culture*.  
London: Sage Publication Ltd.
- Sirait, Midian. 1997. *Paham Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar  
Harapan.
- Smith, Anthony. D. 2003. *Nationalism and Modernism: a critical survey  
of Recent Theories of Nation and Nationalism*. USA and Canada:  
Routledge.
- Surakhmad, Winarno. “Karakter dalam Pendidikan Bangsa: Filosofi  
Pendidikan yang Membudayakan Satu Indonesia”, dalam Sutjipto  
(ed.) *10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed: Pendidikan Nasional:  
Arah ke Mana?* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Watson, H.S. 1997. *Nation and States. An Enquiry into the Origin of Nation  
and the Politics of Nationalism*. Boulder Colorado: Westview Press.
- Miller, David. 1995. *On Nationality*. Oxford: Oxford University Press.





## BAB XIV

# BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH

*Achadiati*

### Abstrak

Beberapa penelitian memperlihatkan suatu bahasa yang tidak berfungsi di salah satu ranah kehidupan akan mengalami kematian di ranah itu. Bisa saja penuturnya menjadi kian sedikit dan akhirnya mati. Demikianlah yang telah dialami beberapa bahasa di dunia dan daerah Indonesia. Tampaknya gejala itu terjadi pula pada bahasa daerah yang berpenutur terbesar di Indonesia, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Adanya perkawinan campur, globalisasi, dan faktor penting tidaknya menguasai bahasa daerah merupakan beberapa faktor yang turut memengaruhi suatu bahasa bisa bertahan hidup atau tidak. Makin menguatnya bahasa Nasional, yakni bahasa Indonesia, juga di sisi lain memberikan dampak pada bahasa daerah.

Bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa Nusantara yang utama dengan penutur yang terbanyak merupakan bahasa tulis yang paling berkembang dengan sejarah kesusastraan yang paling panjang. Pada waktunya bahasa kesastraan ini juga telah mengalami kematian, karena ia merupakan bahasa yang terikat pada peraturan prosodi, sedangkan bahasa sehari-hari berkembang searus dengan masyarakatnya. Kesusastraan yang kemudian berkembang menggunakan bahasa yang dekat pada bahasa sehari-hari ini. Akan tetapi, kesusastraan

yang bertumpu pada bahasa sehari-hari pun kini makin redup nyala kehidupannya seiring dengan bahasa pendukungnya.

Ihwal kematian bahasa, apakah bahasa kesastraan atau bahasa pergaulan tidak lepas dari globalisasi yang sedang melanda dunia dengan bahasa Inggris sebagai penekannya yang mendentangkan lonceng kematian bagi vernakular di dunia modern. Akankah kita juga digilasnya pada akhirnya?

Kata Kunci: globalisasi, bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa kesastraan, vernakular.

Beberapa tahun yang lalu ketika saya bertemu Profesor Anton Moeliono (alm.) kami berbicara tentang bahasa nasional dan bahasa daerah. Pada saat itu ada seorang mahasiswa (yang usianya antara 40 dan 50) menyapa saya dengan menggunakan bahasa Jawa. Kami berbicara sebentar dan ketika ia berlalu, Profesor Anton bertanya apakah biasa mahasiswa bimbingan saya menggunakan bahasa Jawa dengan saya. Saya menjawab dengan menyatakan kegelisahan saya melihat kenyataan bahwa bahasa daerah semakin kurang dikuasai oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Setelah tersingkir dari ranah formal dengan digantikan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, karangan, buku dan majalah berbahasa daerah sulit berkembang.

Jawaban Profesor Anton sederhana saja: *“That is the price we have to pay!”* Dalam hati saya menyambung *“for having a national language?”*

Dan apakah harga yang kita bayar setimpal dengan perolehan kita?

Namun, demikianlah keadaannya sekarang. Di ranah formal bahasa daerah – dalam hal ini saya maksud bahasa Jawa – nyaris hilang, hanya tinggal dalam komentar yang mengiringi upacara perkawinan, yang terkadang masih dibawakan oleh pengarah upacara dalam bahasa Jawa. Itu pun semakin langka.

Majalah berbahasa Jawa, demikian juga yang berbahasa Sunda dan bahasa daerah lainnya, hidupnya penuh perjuangan dan seringkali mutunya tidak seperti yang diharapkan. Padahal bahasa Jawa adalah bahasa sastra yang pernah berkembang subur.

Di ranah informal pun penggunaan bahasa daerah mulai terkikis, terlebih dalam keluarga yang ayah-ibunya berlain suku, jadi berbeda bahasa ibu. Dengan terbukanya batas-batas kesukuan, perkawinan antarsuku semakin sering terjadi. Alih-alih dua bahasa yang dipelajari, yang dipilih adalah bahasa Indonesia.

### **Dari Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Indonesia**

Kiranya pada tahun 1928, saat para pemuda-pemudi Indonesia mengambil keputusan historis untuk mengangkat Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dengan nama bahasa Indonesia, tidak terbayang konsekuensi yang mengikuti keputusan ini. Yang terpenting adalah persatuan yang dapat diwujudkan dengan keputusan ini. Persatuan antara pemuda-pemuda dari berbagai suku telah dipersatukan oleh nasib yang sama sebagai koloni dengan satu penguasa, yaitu suku-suku dan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya masing-masing memiliki ambisi untuk menjadi primus inter pares. Adalah suatu kenyataan yang ironis bahwa justru kolonialismelah yang telah mempersatukan Nusantara yang begitu aneka warna dalam hal bahasa, budaya, dan lingkungan alam.

Mampukah kiranya bahasa Melayu memenuhi peranannya sebagai bahasa yang mendukung budaya dan ilmu pengetahuan suatu bangsa modern?

Penelitian mengenai budaya-budaya di kawasan Asia Selatan dan Tenggara mengungkapkan bahwa mulai awal abad ke-4 M. bahasa Sanskerta telah menyebar di berbagai negara, suatu gerakan yang disebut sebagai '*cosmopolis* Sanskerta'. Gerakan ini telah membawa serta keberaksaraan (Pollock 2006:115). Di Indonesia kurun waktu itu menyisakan prasasti di Kutai berbahasa Sanskerta yang berasal dari abad ke-5 M. Keberaksaraan telah memicu penyesuaian dengan bahasa daerah serta mendorong berkembangnya kesusastraan dalam bahasa tersebut (vernakularisasi). Hal ini telah terjadi di Jawa dan Sumatra, hanya saja dari bahasa Melayu tidak tersisa naskah, hanya prasasti.

Dari segi sejarahnya memang tidak salah pilihan bahasa Melayu, mengingat riwayatnya yang panjang, tidak hanya sebagai bahasa pergaulan antar pulau-pulau yang dihubungkan oleh kepentingan dagang dan kekuasaan (Lapian 2008). Dalam arsip berita Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 telah ada kerajaan bernama Melayu yang mengirimkan utusan ke Tiongkok (Iskandar, 1995). Setelah itu Melayu dikalahkan oleh Sriwijaya dengan dinasti Syailendra-nya yang menguasai lautan Nusantara sampai ke pulau Jawa. Selama kurun waktu tertentu Sriwijaya saling berebut hegemoni dengan kerajaan Mataram Lama di Jawa Tengah, demikian kesaksian yang diberikan oleh sejumlah prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah (Ras 2013).

Sriwijaya dalam berita para rahib Cina yang menjelajahi kawasan Nusantara diberitakan sebagai pusat pengajaran agama Buddha dan bahasa Sanskerta, sehingga dapat diperkirakan bahwa kesusastraan Melayu setempat juga berkembang. Sayang sekali dari zaman ini tidak tersisa tulisan dalam bentuk lontar atau bahan lain

yang dapat memberi kesan tentang jenis serta subyek sastra yang pernah berkembang di sana. Beruntunglah ada sejumlah prasasti yang terlestarikan, sehingga kita mendapat kesan tentang tulisan serta bahasa yang digunakan pada zaman itu yaitu suatu bentuk bahasa Melayu Kuna (Casparis 1975). Inilah teks berbahasa Melayu yang tertua (683 M.) yang memberi kesaksian tentang adanya bahasa tersebut, yang di sini digunakan dalam hubungan dengan kerajaan dan agama. De Casparis menyatakan bahwa pentingnya keberadaan prasasti ini tidak hanya karena menyatakan awal mula kerajaan besar di Indonesia, melainkan juga awal mula suatu bahasa yang akan tumbuh menjadi bahasa nasional di kawasan yang luas (Casparis *op.cit.*). Sekitar zaman itulah bahasa Melayu tidak lagi hanya merupakan bahasa sehari-hari di daerah itu, tetapi telah diangkat menjadi bahasa sastra dan tulisan.

Agaknya peranan Sriwijaya yang berpengaruh politik di Asia Tenggara mendukung penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di kalangan berbagai bangsa yang berlalu-lalang dalam kawasan tersebut. Meskipun di masa-masa sesudahnya Majapahit menjadi saingan Sriwijaya sebagai pengimbangnya, bahasa Melayu tetap merupakan *lingua franca* yang memiliki persebaran yang paling luas. Namun dalam perebutan kekuasaan di sekitar selat Malaka akhirnya Sriwijaya pamornya meredup dan hilang dari panggung sejarah.

Sebelum itu pengaruh India dan agama Hindu telah diresapi oleh budaya di hampir seluruh Asia Tenggara. Dua hal yang mempunyai arti berlanjut serta menentukan dari pengaruh tersebut adalah keberaksaraan dan hasrat ke arah pembentukan negara (Ras 2013). Dalam akulturasi yang terjadi dalam pertemuan budaya dua bangsa keberterimaan unsur-unsur budaya sangat bergantung pada kesiapan budaya penerima. Apabila kesiapan ada maka alih unsur budaya dapat terjadi dan perkembangan selanjutnya bergantung pada

si penerima. Dalam hal ini tulisan India, di kawasan Nusantara tertentu diterima dan selanjutnya disesuaikan dengan jati diri bahasa penerimanya. Sebaliknya, bila bangsa penerima belum siap, maka alih teknologi tulis itu tidak terjadi. Oleh karenanya hanya beberapa kawasan saja di Nusantara yang memiliki dan mengembangkan kiat menulis. Ada pula yang setelah menerima dan menguasai kiat menulis tidak dapat memelihara dan mengembangkannya karena kurang daya dukung kejiwaan dan teknologinya.

Kedua unsur budaya tersebut di atas telah kita lihat dalam perkembangan Sriwijaya menjadi kerajaan adikuasa yang memiliki dan menggunakan tulisan guna menegaskan kekuasaannya. Meskipun waktu tidak meninggalkan sisa naskah bertulis, isi prasasti menunjukkan bahwa pendukung tulisan dalam bentuk lain pasti ada pada zaman ia ditulis (Casparis *op.cit.*)

Perkembangan bahasa tidak lepas dari perkembangan kekuasaan politik yang berpindah-pindah tangan di antara kerajaan-kerajaan Melayu di sekeliling selat Malaka. Kerajaan Melayu muncul setelah redupnya Sriwijaya. Dengan adanya pusat yang mapan kegiatan budaya mulai berkembang lagi. Pengaruh India di bidang itu memberi dorongan kepada perkembangan sastra dan bahasa. Dalam kerajaan Melayu yang kemudian mengambil alih kekuasaan di Sumatra Tengah tercipta sejumlah karya sastra yang merupakan gubahan baru dari petikan Mahabharata dan kini masih terlestarikan dalam salinan-salinan yang dibuat dalam abad-abad kemudian. Di antaranya Hikayat Pandawa Panca Kelima, Hikayat Pandawa Jaya dan Hikayat Sang Boma. Dalam penelitiannya mengenai Hikayat Pandawa Jaya, Van der Tuuk berkesimpulan bahwa hikayat tersebut diterjemahkan dari sebuah versi Jawa Kuna dan bukan dari Jawa Baru. (Van der Tuuk 1875). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hal itu terjadi kira-kira antara abad ke-13 dan 14, ketika bahasa Jawa

Kuna dipakai dalam susastra Jawa dan pengaruh Jawa dirasakan sampai ke Sumatra karena politik ekspansi yang dijalankan oleh Kartanegara, raja Singhasari (Jawa) (Ras 2013). Kartanegara pada tahun 1277 mengirimkan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Melayu (Iskandar 1995). Demikian diberitakan dalam kronik Jawa Pararaton. Pada zaman itu ada hubungan erat antara raja Jawa dan raja Melayu, dan sebagian peneliti cenderung menyebut hubungan ini berdasarkan perjanjian antara Melayu dan Jawa (Singhasari), bukan karena Melayu dikalahkan (Kozok 2006). Di zaman inilah kiranya Mahabharata dalam bahasa Jawa Kuna berbentuk prosa atau Bharatayuddha dalam bentuk puisi sampai di kawasan Melayu dan digarap menjadi beberapa hikayat. Yang mana sumbernya masih perlu diteliti.

Meskipun tidak banyak peninggalan naskah yang tersisa dari zaman kerajaan Melayu, yang juga diperkirakan berasal dari zaman ini adalah Hikayat Sri Rama, epos India yang telah melanglang buana, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, digarap dan disadur sesuai dengan berbagai aliran keagamaan. Yang telah digarap dalam bahasa Melayu ada sekurangnya tiga versi yang masing-masing berasal dari induk yang berbeda, yang mungkin juga berbeda bahasa (lihat juga Ikram 1980). Dengan jalan ini bahasa Melayu telah mengalami pengayaan yang luar biasa dari limpahan kesusastraan dalam bahasa Sanskerta, Tamil, dan Jawa Kuna. Sejumlah hikayat pun jelas menunjukkan pengaruh dari bahasa-bahasa itu, dan dalam teks-teks yang sampai pada kita kelihatan ditambah dengan kosakata yang lebih mutakhir lagi.

Perlu juga di sini disebut naskah Melayu yang tertua, berupa teks undang-undang, yaitu Undang-Undang Tanjung Tanah yang ditemukan di daerah Kerinci (Sumatra Selatan) yang menyebutkan raja daerah itu (Kozok 2006), ditulis dalam huruf pasca Pallawa.

Naskah yang berasal dari pedesaan ini adalah satu-satunya naskah Melayu yang menggunakan aksara bukan Arab. Naskah ini mengandung pula pembuka dan penutup berbahasa Sanskerta yang menyebut Maharaja Dharmasraya yang dikenal dari sumber-sumber sejarah yang berasal dari abad ke-13 dan 14, sehingga kuatlah alasan untuk mengatakan bahwa naskah tersebut berasal dari kurun waktu itu. Hal ini didukung pula dengan bukti fisik dari Rafter Radiocarbon Laboratory di Wellington, New Zealand (Kozok *op.cit.*).

Periode berikut dalam perkembangan bahasa Melayu didukung oleh tema-tema keagamaan, karena kini tempat perkembangannya adalah Pasai yang telah beragama Islam. Pemerayaan bahasa dengan berbagai istilah Arab, tidak hanya di bidang agama Islam, makin mempercanggihnya serta memungkinkan berbagai gaya bahasa serta bentuk puisi. Melalui pengaruh Islam masuk pula kekayaan budaya Persia. Dari zaman inilah diwarisi kisah-kisah yang berasal dari Al-Quran dan Hadith, yang digubah menjadi cerita, yang terkadang sangat fantastis. Epos Yunani yang telah mendunia, yaitu tentang Alexander raja Macedonia, dalam bahasa Melayu menjadi Hikayat Iskandar Zulkarnain dan Iskandar dalam banyak kesusastaan sejarah digambarkan sebagai tokoh yang menurunkan semua raja Melayu. Epos Islam yang lain serta sastra sejarah kerajaan lokal lahir pada zaman ini.

Kerajaan Pasai akhirnya lenyap dan digantikan oleh Malaka yang melanjutkan perkembangan bahasa Melayu. Perkembangan Malaka sebagai negara perdagangan yang menjelajahi lautan Nusantara menambah meluasnya bahasa Melayu yang kini menjadi bahasa pengantar dalam persebaran agama Islam. Kesultanan-kesultanan kecil di Nusantara bagian timur seperti Sulu, Bima, dan Buton memilih bahasa Melayu dengan tulisan Arabnya sebagai bahasa tulisnya yang resmi. Di antaranya ada yang menentukan demikian



dengan menyisihkan bahasa dan tulisan yang telah dimilikinya sebelumnya, seperti Bima, yang dengan resmi mengangkat bahasa Melayu dan aksara Arab sebagai bahasa tulisnya. Hal ini dilakukan sebagai pertanda bahwa kerajaan itu telah beragama Islam (Chambert-Loir 1996).

Dengan kedatangan para pelaut dan pedagang asing Eropa di Nusantara, rupanya bahasa Melayu makin mendapat angin. Dari sumber-sumber arsip Portugis yang berjumlah amat banyak (van Fraassen 1992) dapat diketahui bahwa perdagangannya dengan daerah Maluku telah terjadi sejak sebelum 1522, ketika mereka menetap di Ternate. Pedagang Spanyol, Belanda, dan Inggris yang datang sesudah itu masing-masing berkomunikasi dengan penduduk dan raja-raja di kawasan itu. Meskipun bahasa yang digunakan tidak disebut secara eksplisit dapatlah kita simpulkan bahwa dalam hubungan yang amat intens itu (van Fraassen, *op.cit.*) digunakan bahasa Melayu, demikian juga dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat antar kedua belah pihak mengenai perdagangan rempah-rempah.

Dalam penyebaran agama Islam dan di kemudian hari agama Kristen, bahasa Melayu mempunyai peranan yang amat penting, meskipun dalam hal agama Kristen ada juga usaha untuk menerjemahkan kitab-kitab agama ke dalam bahasa daerah (Groeneboer 1997).

Dari abad ke-16 pula tersimpan surat-surat dalam bahasa Melayu yang oleh penelitiannya disebut 'Melayu pasar' dari Ternate., bertanggal 1521 dan 1522 (Blagden dalam Ricklefs 1976.) Perlu dicatat bahwa dalam surat berbahasa Melayu ini digunakan tulisan Jawa Baru yang pada kurun waktu itu merupakan tulisan yang umum digunakan dalam surat menyurat berbahasa Melayu, juga untuk bahasa lain (Sukatno, tidak diterbitkan).

Disertasi Mujizah (2009) memperlihatkan bagaimana sampai abad ke-18 dan 19 bahasa Melayu masih digunakan dalam surat-menyurat antara para pemimpin di Nusantara dan raja serta penguasa asing dengan surat yang bergambar indah. Kita kenal yang termasyhur dan terindah yaitu surat Sultan Iskandar Muda kepada raja Inggris James I yang panjangnya hampir satu meter (Mujizah *op. cit.*) dari abad ke-17.

Dapat dipastikan bahwa Batavia sebagai kedudukan V.O.C. yang memenuhinya dengan penduduk dari Nusantara bagian timur serta merupakan tempat persinggahan saudagar Asia, menjadi tempat berkembangnya bahasa pergaulan ini dengan pesat.

Salah satu kelompok penduduk yang banyak sumbangannya kepada pendewasaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia adalah bangsa Tionghoa. Pada hakikatnya pergaulan antara orang Tionghoa dan penduduk Nusantara sudah berlangsung berabad-abad, seperti diberitakan dalam berita dalam arsip Tiongkok (Groeneveldt 1960), tetapi baru pada abad ke-19 mereka memasuki Asia Tenggara dalam jumlah besar. Keinginan mereka untuk menerjemahkan karya-karya Tionghoa ke dalam bahasa Melayu timbul karena munculnya rasa nasionalisme Tionghoa di daerah Melayu, dan karena sebagian besar dari golongan peranakan dan baba (Tionghoa kelahiran setempat) tidak lagi menguasai bahasa Tionghoa dengan sempurna (Suryadinata 2009). Munculnya media percetakan mulai dasawarsa 1880-an (Suryadinata *op.cit.*) memberikan dorongan yang luar biasa kepada kegairahan menulis dan menerbitkan. Untuk itu surat kabar memberi kesempatan pengembangan bakat penulisan, diantaranya dengan mempublikasikan cerita bersambung yang menjadi sangat populer, dan dengan demikian menyebarluaskan suatu ragam bahasa (Melayu pasar) yang merupakan alat komunikasi antar bangsa, betapapun kurang sempurnanya dibandingkan dengan bahasa Melayu 'klasik'

yang digunakan di kawasan kerajaan-kerajaan Melayu di sekitar Selat. Kiranya dari bahasa Melayu pasar inilah tumbuh bahasa Indonesia yang kini menjadi bahasa nasional (lih. Ricklefs 1976).

Dalam kurun waktu ini banyak pihak yang memberi sumbangan guna menumbuhkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penulis dari golongan Tionghoa dan Indo aktif dalam penulisan, penerjemahan dan penyaduran roman dan cerita pendek dari berbagai bahasa, sebagian besar bahasa Eropa.

Penetapan Pemerintah Belanda menjadikan bahasa Melayu bahasa administrasi menambahkan wibawa bahasa itu di zaman kolonial. Berbagai usaha dilakukan pemerintah kolonial Belanda untuk menjadikan bahasa Melayu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Balai Pustaka yang semula bernama *Bureau voor Volkslectuur* menjadi salah satu ujung tombaknya dengan menerbitkan buku dalam bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda. Berbagai ragam sastra dunia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan dengan demikian meningkatkan keluwesan dan kekayaannya.

Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dan menetapkan bahasa Indonesia sebagai “bahasa persatoean: bahasa Indonesia” tidak mendapat pertentangan karena memang didasarkan pada kenyataan situasi bahasa. Dan seperti sudah kita lihat di atas, dari segi sejarah perkembangannya bahasa Melayu memang siap untuk mengemban tugas sebagai bahasa nasional.

Pendudukan bala tentara Jepang selanjutnya mengangkat kedudukan bahasa Melayu dan mengukuhkannya sebagai bahasa keilmuan dan administrasi, karena bahasa Belanda disingkirkan, bahkan dilarang, sedangkan bahasa Jepang karena asingnya tidak dapat menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh bahasa Belanda dalam administrasi pemerintahan. Dalam waktu singkat semua buku

pelajaran di tingkat dasar dan menengah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sekolah dasar dan menengah yang semula menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar beralih ke bahasa Indonesia tanpa kesulitan yang berarti.

Sementara itu, di ranah informal pun bahasa Indonesia gaya Jakarta makin merangsek. Ibu kota memperlihatkan gejala ini, dan daerah mengikuti.

Apakah ini akan berarti kematian bahasa daerah?

Mengenai nama Indonesia, Harimurti Kridalaksana mengingatkan bahwa nama yang digagas oleh M. Yamin sebenarnya adalah ‘bahasa Melajoe’ yang oleh Tabrani diusulkan diubah menjadi ‘bahasa Indonesia’, karena ‘kalau kita sudah berani memutuskan persatuan bangsa tidak perlu lagi berpaling pada bahasa daerah (...); bahasa persatuan mesti pula bernama Indonesia (Kridalaksana, *Kompas* 26 April 2013).

Pada masa pergerakan nasional itu, kelompok Pujangga Baru dengan karyanya di bidang kesusastraan berusaha juga memberi tempat yang kokoh kepada bahasa nasional yang baru.

Maka terjadilah semacam sintesa antara berbagai ragam bahasa Melayu, yang ‘pasar’ dan utilitarian serta yang ‘klasik’ dan kesastraan menjadi suatu bahasa yang cocok untuk bangsa modern dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kehidupan yang terus-menerus berkembang.

Sementara itu perkataan Tabrani, salah satu arsitek nasionalisme Indonesia bahwa kita “tidak perlu lagi berpaling kepada bahasa daerah” yang mungkin diucapkannya dalam gelora nasionalismenya, perlu mendapat renungan yang lebih mendalam. Terlebih karena ada kesajajarannya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Anton Moeliono yang saya kutip di atas.

Bila dipikirkan bahwa semua suku bangsa yang telah memilih bersatu dengan nama 'Indonesia' ini masing-masing memiliki bahasa dan kesusastraan, maka pengabaian dan kematiannya akan merupakan suatu kerugian yang serius, mengingat bahwa setiap bahasa telah menghimpunkan sejumlah besar ilmu pengetahuan, akhlak serta pengalaman hidup di dalamnya yang menjadi andalan suatu bangsa untuk menghadapi kehidupan. Dan kiranya masih diperlukan untuk mengolah dan menyerap pengalaman emosional maupun intelektual yang dihadapinya. Kini bahasa Indonesia telah menganggangi hampir semua segi kehidupan tanpa meninggalkan ruang yang berarti bagi bahasa daerah.

### **Kematian Bahasa**

Suatu bahasa yang tidak berfungsi di salah satu ranah kehidupan akan mengalami kematian di ranah itu karena tidak berkembang karena tidak menambah kosakata dan bentuk-bentuk grammatikanya. Ia mengalami stagnasi dalam pertumbuhan dan akhirnya membeku dan makin ditinggalkan oleh penggunanya. Hal ini kini sudah dan sedang kita amati dengan bahasa Jawa, salah satu bahasa Nusantara yang utama dengan penutur yang terbanyak, bahasa tulis yang paling berkembang dengan sejarah kesusastraan yang paling panjang. Di atas bahasa Jawa telah kita sebutkan sebagai salah satu *vernacular* dalam *cosmopolis* Sanskerta bersama dengan kesusastraan Melayu yang telah berkembang dengan subur sehingga menghasilkan tradisi kesastraan yang kaya. Pada waktunya bahasa kesastraan ini juga telah mengalami kematian, karena ia merupakan bahasa yang terikat pada peraturan prosodi, sedangkan bahasa sehari-hari berkembang searus dengan masyarakatnya. Kesusastraan yang kemudian berkembang menggunakan bahasa yang dekat pada bahasa sehari-hari ini. Akan tetapi kesusastraan yang bertumpu pada bahasa

sehari-hari pun kini makin redup nyala kehidupannya seiring dengan bahasa pendukungnya.

Ihwal kematian bahasa, apakah bahasa kesastraan atau bahasa pergaulan tidak lepas dari globalisasi yang sedang melanda dunia dengan bahasa Inggris sebagai penekannya yang mendentangkan lonceng kematian bagi vernacular di dunia modern. Akankah kita juga digilasnya pada akhirnya?

Pollock mengatakan bahwa hilangnya suatu bahasa kesastraan (*literary language*) dipandang sebagai reduksi daripada keragaman dalam ekosistem kebudayaan, suatu kehilangan yang sama gawatnya seperti reduksi dalam keragaman biologi (*op.cit.*).

Demikianlah peristiwa ini sering diumpamakan.

Pandangan seperti itu seharusnya membuat kita lebih sadar akan pentingnya teks-teks dalam bahasa kesastraan yang pernah berkembang di Nusantara dan kini sedang dalam ambang kemusnahan. Sekarang ini belumlah terlambat bila kita mulai mengambil langkah-langkah guna mengumpulkan dan memelihara serta mempelajari secara sadar dan terarah peninggalan intelektual senyampang masih ada. Seorang ahli bahasa yang mempelajari bahasa-bahasa yang di ambang kematian memberi harapan dengan mengatakan:

*Once a culture adopts writing, the disappearance of speech no longer needs to mean the death of a language and the loss of an oral tradition does not delete this knowledge for all time.*

Nicholas Evans, *Dying Words. Endangered Languages and what they have to tell us*

Pernyataan ini benar: kita masih berkesempatan untuk tetap dapat menimba pengetahuan yang telah dikumpulkan dan

dikembangkan di masa lalu lewat bahasa tulis yang terkandung dalam peninggalan tertulis yang terlestarikan. Kedengarannya hal tersebut masuk akal dan dapat diusahakan oleh ahli waris suatu bahasa yang meninggalkan warisan dalam bentuk tertulis. Bangsa Indonesia sebenarnya belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai sejarahnya sendiri, dan tampaknya peneliti yang memusatkan diri pada penggaliannya tidak banyak, kalaupun ada.

Salah seorang sejarawan Indonesia yang terkenal, yaitu Anhar Gonggong pernah mengatakan bahwa tanpa mengenal sejarahnya, suatu bangsa tidak pernah akan menemukan jati dirinya. Maka sungguh penting bagi bangsa Indonesia untuk menggali dan mempelajari sumber-sumber yang dapat mengungkap sejarah itu.

Pada saat ini kita benar-benar melihat seakan kekinian begitu penting. Begitu banyak yang harus disusul untuk mengimbangi perubahan yang terus dialami dunia. Untuk itu sistem-sistem yang lama terbongkar, keamanan yang lama hilang, diganti dengan kegamangan menghadapi ketidakpastian, yang seakan menghapus nilai-nilai yang begitu lama menjadi sandaran dalam kehidupan bernegara dan berkeluarga. Pengenalan dan kesadaran sejarah akan memberikan kepastian akan latar belakang dan asal-usul seseorang mengenai ufuk harapan yang dapat dicapainya. Melalui pengetahuan tentang sejarahnya sendiri orang Indonesia dapat menyadari bahwa sebelum ini kemapanan dan keseimbangan rokhani dan jasmani dapat dicapai melalui berbagai jalan.

Namun, apakah kita memiliki kesediaan dan kemampuan yang diperlukan untuk membuka pesan-pesan yang ditinggalkan oleh pendahulu kita? Kemampuan intelektual dan moral untuk melakukan tugas itu? Baiklah kita amati apa yang dimiliki bangsa Indonesia untuk menyelesaikan tugas yang berat ini.

Setelah pengungkapan sejarah yang dilakukan melalui penelitian epigrafis dan filologis terhadap peninggalan dalam berbagai bentuk selama dua abad yang lalu, tidak banyak lagi yang dilakukan di bidang itu. Bahkan mungkin yang sudah dicapai tersisih karena masalah bahasa, administrasi dan pendidikan tidak mampu menjembatani jurang yang telah ditimbulkan oleh pergantian kekuasaan pemerintahan yang satu sama lain sangat berbeda tujuannya serta saling berganti dengan begitu cepat dengan penuh pemaksaan, yaitu zaman kolonial Belanda, kemudian penjajahan Jepang yang sarat penderitaan dan setelah itu perang kemerdekaan yang penuh pengharapan tetapi juga kehilangan.

Di bidang sejarah kuna yang terkandung dalam prasasti sejak zaman kolonial telah dilakukan sejumlah besar penelitian, baik oleh sarjana pribumi maupun asing, terutama Belanda. Mengenai hal ini ahli prasasti Indonesia yang terkemuka, yaitu Boechari (alm.) mengatakan bahwa dari zaman kuna saja warisan sumber sejarah yang ditemukan di Nusantara tertulis dalam berbagai bahasa: Sanskerta, Melayu Kuna, Sunda Kuna, Jawa Kuna, Bali Kuna, Tamil, dan Arab. Jumlahnya lebih dari 290 prasasti yang ditemukan tersebar di Sumatra, Jawa, Madura, dan Bali (Boechari 2012).

Dalam hal peninggalan yang berbahan bukan batu (kertas, baik yang pribumi maupun buatan asing, aneka daun palem, bambu, kulit kayu dsb.) jumlahnya lebih banyak lagi, tertuang dalam 12 bahasa dengan berbagai tulisan, di antaranya aksara Batak, Arab, berbagai aksara Jawa, Bali dan Sunda, Kaganga, Bugis dan Makasar, Jejawan dan sejumlah variasinya.

Di dalam berbagai tulisan itu, ditambah dengan sastra lisan yang dimiliki sejumlah besar suku bangsa di Nusantara dapat dilacak masa lalu Indonesia yang kini baru sebagian kecil terungkap, dan memang perlu diperhatikan preservasinya.



Mengenai sumber sejarah dalam prasasti, Boechari mengatakan bahwa baru sebagian kecil yang terungkap, itupun dari yang dibuat salinannya di atas kertas. Dari yang ada, baru sedikit yang dialihaksarakan, diterjemahkan dan diterbitkan (Boechari *op.cit.*). Sisanya menantikan tangan-tangan para arkeolog dan ahli bahasa yang sabar untuk diungkap menjadi bahan sejarah.

Bagaimana keadaannya dengan naskah-naskah yang dapat dijadikan sumber sejarah?

Ini pun hanya sebagian kecil yang sudah siap untuk digali karena sebagian terbesar belum ditangani, sedangkan sebagian lagi - yaitu yang masih di tangan masyarakat - sulit diakses.

Keinginan - walaupun ada - untuk meneliti khazanah tulisan lama pada saat ini - dengan keadaan pendidikan dalam kurun waktu pemerintahan sekarang - tidak didukung oleh pendidikan yang bahkan di tingkat tertinggi diarahkan kepada keperluan yang lebih praktis atau mengejar kemajuan teknologi. Untuk studi klasik tidak lagi disediakan tempat yang tadinya di tingkat menengah pun masih diajarkan. Hal ini kiranya perlu dipikirkan apabila kita tidak ingin membiarkan khazanah teks-teks kuna membisu, dalam arti tidak berbicara apa-apa.

Setelah isinya terungkappun harus dipikirkan bagaimana penyusunan sejarah dan pengajarannya dengan mengintegrasikannya dengan sastra lisan agar bersama membentuk kisah sejarah bangsa untuk dijadikan pijakan dalam kehidupan berbangsa.

Jelaslah bahwa pekerjaan yang berat dan luas masih menanti di berbagai tingkat yang hanya dapat ditanggulangi dengan pemahaman yang mendalam dan terutama kemauan yang kuat, terutama dari pihak pengambil keputusan. Seharusnya dari pihak peneliti pun tumbuh kerjasama untuk mengisi rumpang-rumpang yang menganga dalam kesadaran bangsa.

Semoga.

## KEPUSTAKAAN

- Casparis, J.G. de. 1975. *Indonesian Palaeography. A History of Writing in Indonesia from the Beginnings to ca. A.D. 1500*. Leiden: Brill.
- Chambert Loir, Henry dan Siti Mariam R. Salahudin. 1999. *Bo ' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: EFEO dan Yayasan Obor.
- Fraassen, C.H.F. van . 1992 . "Molukse Geschiedenis in Maleise Bronnen" dalam *Sejarah Maluku*. Van Soeren en Co.
- Groeneboer, Kees. 1997. *Taalpolitiek in Oost en West Nederlands Indie, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Groeneveldt, W.P. 1960. *Historical notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bhratara.
- Iskandar, T. 1995. *Kesusastraan Klasik Melayu Sepanjang Abad*. Brunei: Universiti Brunei Darussalam.
- Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Naskah Melayu yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara, Yayasan Obor Indonesia.
- Kridalaksana, Harimurti. *Kompas* 26 April, 2013.
- Lapian, A.B. 2008. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu, EFEO.

- Mujizah, 2009. *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, E.F.E.O., Pusat Bahasa, KITLV.
- Ras, J.J.. 2013. *Masyarakat dan Kesusastraan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Ricklefs, M.C., 1969. *An Inventory of the Javanese manuscript collection in the British Museum*. Bijdragen tot de Taal-, Land, en Volkenkunde. 125: 241-62.
- Sukatno. "Bahasa Melayu dalam Aksara Jawa". Tidak diterbitkan.
- Suryadinata, Leo, 2009. "Kesusastraan Tionghoa dalam Terjemahan Melayu-Indonesia Dahulu dan Sekarang", dalam *Sadur, Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, hlm. 155. Penyunting Henri Chambert-Loir. Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Pusat Bahasa, 2009.



## Bab XV

### TELAAH KRISIS KEBUDAYAAN

*Toeti Heraty Noerhadi*

#### Abstrak

Niat telaah krisis kebudayaan lebih dibangkitkan oleh rasa cemas karena harapan Reformasi belum terwujud setelah 14 tahun. Krisis Kebudayaan sifatnya krisis multidimensional dan menyangkut seluruh “*Cultural Universals*” (Koentjaraningrat 1953) yang perlu mengalami kelengkapan dengan manusia versus lingkungan serta “kekuasaan versus keadilan”.

Pada tahun 2012 telah berlangsung suatu seminar LIPI 2012 yang berjudul “Jalan Keluar dari Krisis Kebudayaan”. Disebutkan misalnya 9 butir kegagalan reformasi dan mengatasi kendala lewat 6 pendekatan (Daniel Sparingga). Dimensi kekuasaan divisualisasikan dengan membedakan 1) gagasan kekuasaan dengan 2) penyalahgunaan kekuasaan serta 3) penangkalnya. Berbagai butir penangkal adalah nilai-nilai luhur (*Kompas*, 5 Oktober 2012; “Banyak Nilai Luhur Hilang”). Membicarakan nilai luhur kembali mempertimbangkan peran *ratio* (Barat) dan *rasa* (Jawa) dan peranan dimensi-dimensi adi kodrati sebagai bagian dari pawulang Jawa. Kemudian kearifan lokal dihadapkan pada teori-teori ekonomi dengan konsep-konsep mutakhir, yang bersinggungan dengan dimensi keadilan, kesenjangan kesejahteraan yang berperan pada krisis multidimensional.

Kata Kunci : krisis kebudayaan, krisis multidimensional, cultural universals, kekuasaan versus keadilan, nilai-nilai luhur, adi kodrati, kesenjangan.

Ternyata masih ada protes terhadap adanya “krisis kebudayaan” terutama berdasarkan argumentasi di bidang ekonomi, tetapi lebih tepat disebutkan “krisis” ini adalah rasa cemas atau putus asa karena harapan reformasi tidak terwujud sesudah 14 tahun berjalan.

Memang segera diterapkan perubahan struktural (desentralisasi) pada awal reformasi, tapi tidak ada yang menyebutkan perlunya perubahan kultural, dan akhirnya terputusnya harapan berdampak multidimensional, di bidang hukum, ekonomi, moral, politik dan bidang-bidang lainnya, sehingga muncul di belakang perubahan struktural suatu dimensi luas dan tak berwujud ialah masalah nilai-nilai : *krisis multidimensional yang menjadi krisis kultural*.

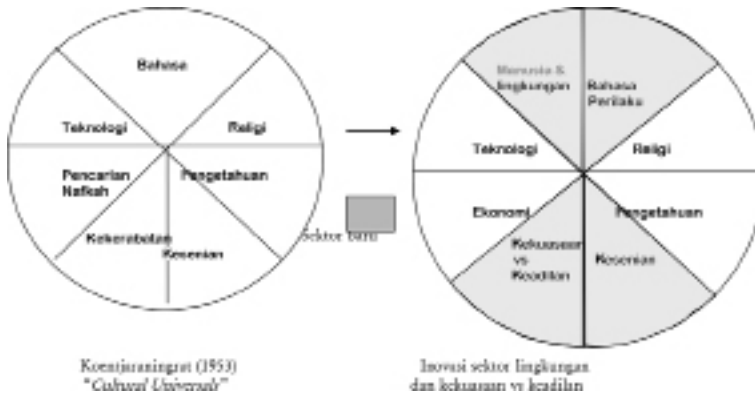
\*\*\*

Langsung keprihatinan yang munculpun perlu memperoleh rambu-rambu supaya tidak melewati minat profesional disiplin ilmu masing-masing, yang tentu ada benarnya, tapi kebudayaan itu begitu luas, dan bila dituntut terbatas pada materi kebudayaan, jelaslah menjadi suatu “*contradicties in terminis*”, membatasi suatu yang luas, sementara budaya itu di samping *materiil* sifatnya *immateriil* pula. Di antara dua status ontologis tersebut, tercakup perilaku manusia pendukung budayanya. Mungkin tetap diperlukan fokus pada permasalahan nilai-nilai. Sebaiknya demikian, karena hal-ihwal lain dapat disambut oleh disiplin ilmu lainnya dengan kritisisme ilmiah dan akal sehat.

Kebudayaan yang sifatnya multidimensional layak diterjemahkan menjadi sektor-sektor *cultural universals* dengan

## TELAAH KRISIS KEBUDAYAAN

modifikasi yang diperlukan, juga tambahan sektor seperti masalah lingkungan hidup, politik, dan gender. Demikian lingkaran dengan sektor-sektor (sesuai Koentjaraningrat) mengalami modifikasi dengan menekankan sektor-sektor dengan krisis signifikan.



Dapatkah kita menentukan dimensi atau sektor mana yang sarat dengan krisis tersebut? Bagian kiri menunjukkan sektor lingkungan hidup, krisis ekonomi yang agak mengecohkan karena angka-angka yang mengalami distorsi akibat statistik dan korupsi, bahasa dan perilaku dapat menjadi berbagai bentuk kekerasan yang dapat membedakan lewat eufemisme dan kemunafikan, krisis hukum yang tidak menerapkan keadilan, tetapi menjadi permainan mencari celah-celah bagi keserakahan kekuasaan. Jadi, krisis kultural atau multidimensional tampil sarat pada beberapa sektor yang divisualisasikan pada gambar di atas.

\*\*\*

Bila beberapa sektor lebih jelas menampilkan krisis, akan terpikir bahwa mungkin sebenarnya semua sektor mengalami dampak berat atau ringan dari sesuatu dimensi yang tidak divisualisasikan di sini ialah *kekuasaan*. Kekuasaan inilah yang tampil nyata lewat *struktur*, yang berdampak di segala sektor.

Bila 14 tahun reformasi diawali dengan perubahan-perubahan struktural, maka kekuasaan itu dimantapkan dengan legitimasi pada Trias Politica legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dilengkapi dengan budaya politik yang menguasai ketiga unsur ini lewat percaturan partai-partai politik. Akhirnya krisis ini pun kita fokuskan pada budaya politik yang berorientasi pada kekuasaan.

\*\*\*

Sebagai contoh, kita angkat materi seminar LIPI tanggal 30 Agustus 2012 tentang “Jalan Keluar dari Krisis Kebudayaan: Upaya Menata Strategi Baru”. Beberapa pembicara memang bertolak dari gagasan masing-masing yang kemudian lewat metode disiplin ilmu masing-masing dapat secara sekilas diulas sebagai berikut.

Krisis kebudayaan pertama-tama dilihat sebagai suatu *krisis multidimensional* karena itu pula disebut sebagai krisis yang dialami oleh kebudayaan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Pembicara membahas krisis kebudayaan ini dari enam sudut pandang; kebudayaan itu menjadi tangguh karena ada suatu kemantapan mekanisme internal dan mekanisme internal itu dapat menjadi otoriter lewat *pemusatan kekuasaan* terjadi oversentralisasi. Oversentralisasi oleh pemerintah yang maksudnya membawa penataan, gagal dalam tugas penataan karena berbagai sebab, antara lain, karena penyalahgunaan kekuasaan (Dhakidae 2012).



Penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi secara kasar dan lembut ialah lewat berbagai kepalsuan, kemunafikan (Gerung 2012) yang pada pokoknya meninggalkan kejujuran. Sementara itu, bila kekuasaan telah diselewengkan tidak ada pihak yang mampu mengadakan koreksi karena telah terjadi suatu jaringan perlindungan diri sehingga terjadi *sistemik impunity* (Pabottinggi 2012). Kemudian diharapkan ada penangkal terhadap *impunity* dan kepalsuan tersebut yang diharapkan diperoleh dari nilai-nilai religius di mana setiap religi memang mengamankan kejujuran, sikap rendah hati, dan sikap altruistik serta meninggalkan egoisme (Mubarok, Saidi 2012).

Namun, bagaimana pun *strategi* akan memerlukan suatu proses yang akibatnya merupakan hal yang ingin dicapai atau tidak (*unintended consequences*). Daniel Sparingga menyebutkan sebilan butir kegagalan reformasi yang harus diatasi:

- a. Terjadi banalitas korupsi di negeri ini: korupsi (dan suap) menjadi bagian dari praktik sosial;
- b. Asal jajak dalam sistem ketatanegaraan kita;
- c. Keseronokan di ruang publik;
- d. Kebebasan dan kekerasan: ketertiban umum dan keselamatan publik terabaikan dan seakan menjadi ongkos yang harus dibayarkan demi kebebasan;
- e. Penyesatan dan fabrikasi kebenaran: bualan difabrikasi secara rapi dan disuguhkannya kepada publik sebagai sebuah kebenaran yang otonom;
- f. Hilangnya kesukarelaan (*voluntarisme*) dan rapuhnya kebajikan bersama (*civic virtues*): tidak ada lagi yang gratis;

- g. Media massa dan politik: media massa tidak lagi sekadar faktor, sebagian juga menjadi aktor;
- h. Demokrasi, toleransi, dan harmoni sosial: kebinekaan dicampakkan, kebersamaan dilukai; dan
- i. Menyingkirnya kepedulian dan solidaritas sosial: ada kesewenang-wenangan yang dipertontonkan oleh orang di jalan maupun di ruang-ruang publik.

Untuk meluruskan kembali apa yang bengkok, diperlukan:

- a. Menata kembali perspektif kita;
- b. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum;
- c. Menegakkan etika politik: kekuasaan tidak menjadikan seseorang berdiri di atas kebenaran (*truth*) dan kemanusiaan (*humanity*);
- d. Demokrasi dan etika politik: mencegah kekuasaan berwajah “*demonic*” dan menghindarkan kebebasan bertabiat “*barbaric*”;
- e. Demokrasi dan media massa: yang kita perlukan saat ini bukan semata “*freedom of the press*” melainkan juga “*transparency of the press*”; dan
- f. Memberdayakan dan mendidik kembali masyarakat: menguatkan pluralisme dan merayakan multikulturalisme.

Sparingga (2012) menyimpulkan: “Masyarakat memuliakan materi dan meremehkan semua yang bersifat sosial dan spiritual. Voluntarisme dan altruisme harus dikuatkan sebagai nilai-nilai bersama yang mengintegrasikan secara sosial bangsa yang majemuk ini. Sementara

## TELAAH KRISIS KEBUDAYAAN

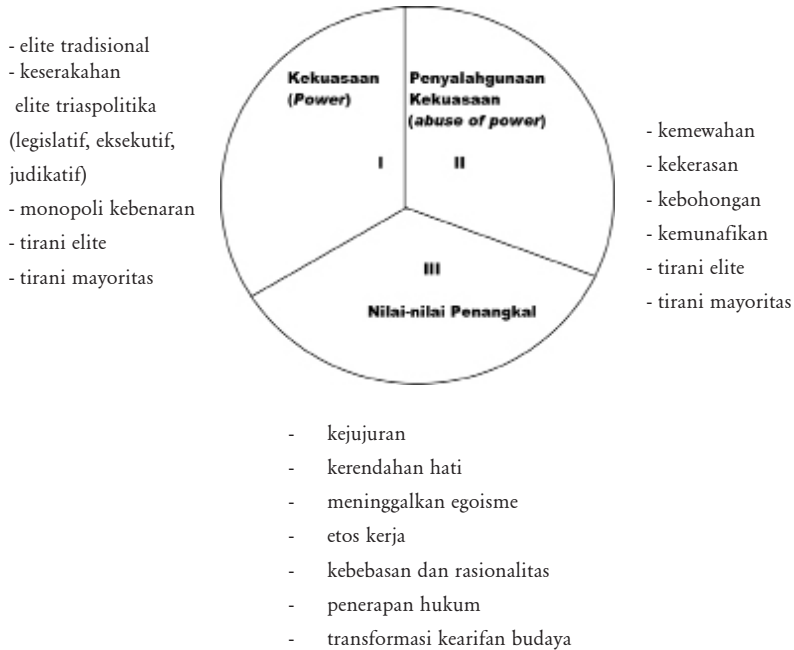
itu, Mubarak (2012) menyimpulkan bahwa penyelesaian dapat lebih diharapkan dari kelompok kecil masyarakat dan bukan kelompok besar seperti DPR, MPR, dan partai politik .

\*\*\*

Gagasan hasil seminar tentang strategi keluar dari krisis kebudayaan divisualisasikan pada gambar-gambar di bawah ini.



## TOETI HERATY NOERHADI



Pada seminar di LIPI telah disampaikan berbagai gagasan yang bermuara pada gagasan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan nilai-nilai penangkal kekuasaan. Yang terakhir diandalkan bahwa dimensi religius dapat menawarkannya seperti halnya spiritualitas, kejujuran, kerendahan hati atau altruisme. Bila kemudian agama lalu dianggap sebagai sumber moralitas, di samping alternatif berbagai alternatif agama, nilai-nilai luhur pun dapat diturunkan dari kearifan budaya, khususnya kearifan budaya lokal dengan mengalami reinterpretasi dan dekonstruksi masih relevan dengan kehidupan masa kini meski dengan permasalahannya.

Suatu seminar bertema “Transformasi Kearifan Budaya Lokal Menghadapi Tantangan Global” diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 13 Oktober 2012 di Semarang telah mengemukakan berbagai gagasan kearifan lokal Jawa yang akan disebut melalui diagram berikut. Harian *Kompas* 5 Oktober 2012 memuat suatu liputan pertemuan aliansi kebangsaan yang berjudul “*banyak nilai luhur hilang*”. Apakah hilangnya nilai-nilai luhur ini terkait dengan menghilangnya kearifan lokal sementara akhlak moralitas kebangsaan dianggap mengalami kemerosotan? Sebaiknya sebagai kasus ilustrasi kita batasi kini kajian pada nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya Jawa. Nilai-nilai luhur sendiri kita tempatkan sebagai unsur-unsur keutamaan budi atau *virtue*. Kearifan lokal budaya Jawa kita telusuri pada petuah dan ajaran “pawulang” dalam masyarakat Jawa yang meskipun belum tentu diterapkan, sering dikemukakan sebagai pedoman untuk berperilaku baik orang Jawa.

Tidak mudah menyusun inventarisasi pedoman hidup yang bila dimulai seperti tidak ada akhirnya. Perlu dibatasi pada 19 ungkapan yang sekaligus menunjuk pada **dunia batin** orang Jawa dengan **roso** yang berbeda dengan orang Barat berfilsafat dengan **ratio**. Namun, hal itu masih akan disentuh kemudian dengan memperhatikan gagasan Franz Magnis Suseno tentang “Etika Jawa”; Martha Nussbaum tentang *etika*, *moralitas* dan *hukum*; dan Amartya Sen tentang kebebasan dan rasionalitas.

Bagan “Pawulang” pedoman hidup Jawa. (lihat lampiran terjemahan).

TOETI HERATY NOERHADI

Lingkungan Alam Metafisik	Diri individu	Komunitas sesama
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urip iku urup</li> <li>2. Eling sangkan paraning dumadi</li> <li>3. Urip sadermo nglakoni</li> <li>4. Urip mung mampir ngombe</li> <li>5. Gusti ora sare</li> <li>6. Sowan ngarsaning Gusti</li> <li>7. Manunggaling Kawula Gusti</li> </ol> <p>(6) Menyadari manusia merupakan ciptaan, diciptakan sebagai suatu bentuk kehidupan di alam semesta yang kekuatan dan kekuasaannya diluar jangkauan pemahaman manusia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ojo gumunan, getunan kagetan, aleman</li> <li>2. Ojo kuminter mundak keblinger</li> <li>3. Ojo rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa</li> <li>4. Becik ketitik ala ketara</li> <li>5. Cegah dhahar lawan guling</li> <li>6. kegedhen empyak kurang cagak</li> <li>7. Jer basuki mawa beya</li> <li>8. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana</li> <li>9. Ojo maling, madat, madon, marung, main,</li> </ol> <p>(Menjaga diri, kekuatan batin untuk melawan hedonisme, konsumerisme)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sugih tanpa banda, Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake</li> <li>2. Ing ngarsa sing tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani</li> <li>3. Ojo adigang, adigung, adiguna.</li> <li>4. Lembah manah lan andap asor</li> <li>5. Mikul nduwur, mendem jero.</li> </ol> <p>(5) (Dalam bermasyarakat tahu menempatkan diri karena keselarasan sosial ikut merawat keseimbangan kosmis)</p>

Karya Magnis Suseno (2003) dalam *Etika Jawa* mengkaji “kebijaksanaan hidup Jawa” dan mengemukakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat, di lingkungan alam dan *lingkungan adikodrati*, menjaga keselarasan sosial bersifat sekaligus menjaga keseimbangan kosmis, di mana manusia menjalani hidup dalam penentuan lebih

tinggi secara adikodrati. Ini pun sekaligus berarti bahwa prakarsa individual dan posisi diri pribadi kurang berarti, kecuali dalam tatanan sosial yang apalagi berdampak pada keseimbangan kosmis. Kolom ke-2 adalah kolom yang diekstrapolasi atas pemahaman psikologis bahwa hidup dalam tatanan etika Jawa memerlukan kepribadian yang harus ditempa secara khusus, meninggalkan egoisme dan egosentrisme dan khusus memperkuat kehidupan batin mengendalikan gejolak emosi, menjaga ketenangan lewat tata krama bermasyarakat.

Menurut teori psikologi, kepribadian yang dewasa harus mencapai keseimbangan antara *rasio* dan *emosi*. Dalam tes kepribadian Rohrschach, emosi jelas berperan mengimbangi rasio. Akan tetapi, Filsafat Barat dengan manusia sebagai *animal rationale* (Aristoteles), melihat emosi disruptif terhadap rasio, harus dikendalikan demi kehidupan yang baik. Rehabilitasi peran emosi dalam filsafat terlaksana lewat gagasan Martha Nussbaum, di mana emosi berfungsi kognitif, juga sebagai sarana untuk mengenal lingkungan demi keselamatan diri dan penting perannya untuk pertimbangan moral, serta untuk menjalani keutamaan (*virtues*) dalam hidup. Akhirnya, dikaji pula peranan emosi di ranah hukum dalam karya *Hiding from Humanity*. Di pihak lain, Martha Nussbaum menganggap bahwa emosi dapat menunjang tirani mayoritas, suatu komunitas yang cenderung mencari bahkan menumpas kambing hitam, sementara supremasi hukum tidak berlaku lagi, karena diremehkan oleh gerakan masal suatu komunitas radikal atau fundamentalis (Nussbaum 2012).

Pandangan Jawa tentang pengendalian emosi demi ketenangan batin, keselarasan dengan tatanan sosial telah diterapkan pada budaya politik Orde Baru, tetapi berorientasi pada kehidupan bermasyarakat atau komunitas yang mungkin telah terkooptasi oleh pemusatan kekuasaan. Sementara itu, pencanangan “kebebasan” dalam sejarah

gagasan di Barat melahirkan negara dengan demokrasi berdasarkan supremasi individu yang memiliki pilihan. (Amartya Sen; *Rationality and Freedom*, 2002). Kehidupan demokratis berporos pada **supremasi individu**, yang pada etika Jawa tidak mendapat tempat.

Dalam perjalanan sejak kemerdekaan, kemudian Orde Baru, lalu Reformasi, dampak budaya global apakah yang tersisa dari nilai-nilai luhur yang kita telusuri pada petuah tradisional Jawa di atas? Yang dikhawatirkan dan memang terjadi ialah khusus *pembentukan daya tahan diri pribadi* tidak mampu menghadapi tuntutan keselarasan sosial komunitas dan malahan menunjang pemusatan kekuasaan menurut paham budaya Jawa, dan sarat latar belakang kekuatan adikodrati pada pemegang kekuasaan. Pada suatu krisis kemudian gempa dan letusan gunung api dan gejala alam lain dianggap sebagai tanda tanda melemahnya kekuasaan yang terkontaminasi eksekutif koruptif.

Kepribadian sesuai nilai-nilai tradisional pun bahkan secara laten dapat mengakibatkan sikap apatis, fatalistis, oportunis, khusus dengan berorientasi pada komunitas yang mengalami anomali dan menunjang secara oportunis pemusatan kekuasaan. Kebebasan dan rasionalitas masih dapat menyelamatkan kita dari **irasionalitas tirani elite** dan *tirani mayoritas*, dengan daya tahan individu yang kreatif dan kritis, demikian dalam *Rationality and Freedom* (Amartya Sen 2002).

\*\*\*

Nilai-nilai luhur “pawulang” Jawa mengenai *perilaku manusia* didudukkan dalam lingkungan alam, masyarakat, dan alam adikodrati. Dalam pada itu, oleh Dr. Edy Suandi Hamid diangkat berbagai pepatah baik dalam bahasa Indonesia maupun Melayu yang



## TELAAH KRISIS KEBUDAYAAN

dikaitkan dengan kebijakan ekonomi Indonesia dan meninggalkan kearifan lokal yang dianggap lebih sesuai dengan suatu sistem Ekonomi Pancasila, apalagi bila kebijakan itu menyangkut masalah utang-utang negara.

Kearifan lokal ini nyala lewat ungkapan:

- Utang melilit pinggang
- Utang sebanyak gulu
- Besar pasak daripada tiang
- Sedia payung sebelum hujan
- Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya

Demikian kearifan lokal pun dianggap lebih sesuai dengan Ekonomi Kerakyatan. Prof. Moebyarto memenuhi lima pilar ekonomi Pancasila sesuai platform sebagai berikut.

### 1. *Ekonomika Etik (Ketuhanan)*

Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.

### 2. *Ekonomika Humanistik (Kemanusiaan)*

Kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

### 3. *Nasionalisme Ekonomi (Persatuan)*

Nasionalisme ekonomi: bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.

4. *Demokrasi Ekonomi (Kerakyatan)*

Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.

5. *Ekonomi Berkeadilan sosial.*

Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

\*\*\*

Beberapa catatan berikut yang dikutip di sini memperlihatkan kesenjangan-kesenjangan antara angka makroekonomi dengan angka-angka mikroekonomi, mencakup distribusi, kemiskinan, pengangguran, dan indikator lainnya. Karena telah *menjadi subkultur dari ekonomi global*, yang digiring dengan ideologi liberal yang kapitalistis, kebijakan ekonomi pemerintah menunjukkan suatu kelengahan kultural. “Kita telah lengah budaya” (*Sri Edi Swasono*):

“Kita telah lengah budaya. Belum sempat kita sepenuhnya melaksanakan tugas budaya tersebut... (dalam bidang ekonomi adalah melaksanakan Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, kita malah terkagum-kagum pada globalisasi yang hegemonik dan salah arah.” (Padahal di sisi lain, esh) “Kebetulan dunia intelektual, tidak terkecuali para pemenang nobel ekonomi Barat, yang saat ini mulai mengumandangkan lagi perlunya mengakhiri pasar bebas (the end of laissez-faire) yang menyertai atau bersembunyi di balik globalisasi dan menegaskan ulang perlunya intervensi negara dalam

## TELAAH KRISIS KEBUDAYAAN

perekonomiannya, maka saatnya kita tidak ragu lagi dan mantak kembali ke ekonomi konstitusi”

Sementara itu, senapas dengan kutipan di atas, perlu dikemukakan kembali suara alm. Prof. Moebyarto mengenai tantangan menghadapi globalisasi ekonomi:

“...Tantangan ini tidak makin bertambah ringan, karena ada kecenderungan berkembangnya semangat individualism sebagai akibat merebaknya pengaruh faham kapitalisme-liberalisme (atau bahkan neoliberalisme). Dengan munculnya kelompok pengusaha nasional yang menganut faham kapitalisme global, rupanya muncul semangat “keserakahan” baru yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan ekonomi rakyat” (Moebyarto, ed. 2005:ix)

Dalam orientasi menghadapi keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, kutipan di atas dapat dikaitkan relevansinya dengan angka-angka sebagai berikut.

Perhatikanlah bahwa 20% masyarakat berpendapatan teratas mengalami peningkatan dari 42,19% menjadi 44,79% dan 40% pendapatan terendah mengalami penurunan dari 20,92% menjadi 19,10%. Demikianlah kesenjangan semakin mencolok, bertolak dari angka-angka sebagai berikut.

Tabel 1 Indeks Gini

KelompokPenduduk	2002	2003	2004	2005	2006	2007
40% terendah	20,92	20,57	20,80	18,81	19,75	19,10
40% menengah	38,89	37,10	37,13	36,40	38,10	36,11
20% teratas	42,19	42,33	42,07	44,78	42,15	44,79
Indeks Gini	0,33	0,32	0,32	0,36	0,33	0,37

Sumber: BPS, dikutip dari Bank Indonesia, (2008) Tabel 2.16.

## Kesimpulan

Krisis kebudayaan ialah krisis multidimensional, yang memperlihatkan krisis beberapa dimensi (sektor) tampak lebih mencolok. Kini, setelah menempatkan fokus kepada dimensi kekuasaan yang berdampak pada semua dimensi, kita lihat penyalahgunaan kekuasaan dan dicari penangkalnya. Kembalilah kita pada nilai-nilai agama, pada kearifan lokal, dan di bidang ekonomi, pada ekonomi Pancasila.

Penangkal kita cari pada nilai-nilai luhur yang tidak tertanam begitu saja tetapi dibentuk lewat proses pendidikan, dan di situlah peran ilmu-ilmu budaya dan humaniora. Tentunya, setelah antara kita, ada kesepakatan misi bersama meski tentu masih dengan berbeda pendapat pula.

Jakarta, Desember 2012

Toeti Heraty Noerhadi

## KEPUSTAKAAN

- Dhakidae, Daniel. 2012. "Keluar dari Krisis, Membangun Kembali Kebudayaan", makalah Seminar Kebudayaan "Keluar dari Krisis Kebudayaan: Upaya Menata Strategi Baru".
- Gerung, Rocky. 2012. "Kebudayaan, Politik, dan seterusnya", makalah Seminar Kebudayaan "Keluar dari Krisis Kebudayaan: Upaya Menata Strategi Baru".
- Hamid, Edy Suandi. 2012. "Transformasi Kearifan Budaya Lokal, Menghadapi Tantangan Global: Perspektif Ekonomi". Seminar Kebudayaan "Keluar dari Krisis Kebudayaan: Upaya Menata Strategi Baru".
- Mubarak, Ahmad. 2012. "Membangun Budaya Politik yang Bermartabat", makalah Seminar Kebudayaan "Keluar dari Krisis Kebudayaan: Upaya Menata Strategi Baru".

## TELAAH KRISIS KEBUDAYAAN

- Nussbaum, Martha C. 2012. "Hiding from Humanity". Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Pabottinggi, Mochtar. 2012. "Strategi Keadaban atas Krisis Mutlidimensi", makalah Seminar Kebudayaan "Keluar dari Krisis Kebudayaan: Upaya Menata Strategi Baru".
- Saidi, Anas. 2012. "Agama, Demokrasi dan Krisis kebudayaan: Sebuah Skema", makalah Seminar Kebudayaan "Keluar dari Krisis Kebudayaan: Upaya Menata Strategi Baru".
- Sen, Amartya. 2002. *Rationality and Freedom*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sparingga, Daniel. 2012. "Melihat Diri dan Masalah Kita: Sebuah Perspektif Sosiologis", makalah Seminar Kebudayaan "Keluar dari Krisis Kebudayaan: Upaya Menata Strategi Baru".
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN

Terjemahan :

BAHASA JAWA	BAHASA INDONESIA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urip iku urup</li> <li>2. Eling sangkan paraning dumadi</li> <li>3. Urip sadermo nglakoni</li> <li>4. Urip mung mampir ngombe</li> <li>5. Gusti ora sare</li> <li>6. Sowan ngarsaning Gusti</li> <li>7. Manunggaling Kawula Gusti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hidup itu seperti nyala api</li> <li>2. Menyadari asal dan tujuan kehidupan</li> <li>3. Hidup jangan sekedar menjalankan</li> <li>4. Hidup itu hanya mampir untuk minum saja</li> <li>5. Tuhan tidak tidur</li> <li>6. Menghadap kepada Tuhan</li> <li>7. Aku dan Tuhan menyatu</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Ojo gumunan, getunan, kagetan, aleman</li> <li>9. Ojo kuminter mundak keblinger</li> <li>10. Ojo rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa</li> <li>11. Becik ketitik ala ketara</li> <li>12. Cegah dhahar lawan guling</li> <li>13. kegedhen empyak kurang cagak</li> <li>14. Jer basuki mawa beya</li> <li>15. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana</li> <li>16. Ojo maling, madat, madon, marung, main</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Jangan terheran-heran, jangan penyesalan, jangan terkaget-kaget, jangan bermanja-manja.</li> <li>9. Jangan sok pandai, akan terjerumus</li> <li>10. Jangan merasa bisa, tapi bisa menyadari</li> <li>11. Yang baik maupun yang buruk akan ketahuan</li> <li>12. Kurangi makan dan tidur</li> <li>13. Besar pasak daripada tiang</li> <li>14. Tak ada kemapanan tanpa kerja</li> <li>15. Jauhi kepentingan diri, bekerja yang tekun memperindah dunia.</li> <li>16. Jangan mencuri, jangan minum candu, jangan main perempuan, jangan berjudi dan judi.</li> </ol>

## TELAAH KRISIS KEBUDAYAAN

17. Sugih tanpa banda, Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake	17. Kaya tanpa harta, menyerang tanpa berkelompok, menang tanpa mempermalukan
18. Ing ngarsa sing tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani	18. Yang didepan menjadi contoh, yang ditengah melaksanakan kerja, yang dibelakang patuh menurut.
19. Ojo adigang, adigung, adiguna.	19. Jangan merasa heabt, tinggi dan serba bias
20. Lembah manah lan andap asor	20. Lembut perangai dan rendah hati
21. Mikul nduwur, mendem jero.	21. Menghormati setinggi-tinggnya, memaafkan sedalam-dalamnya.





## INDEKS

### A

A.B. Cohen Stuart, 125  
A.B. Lopian, 308  
A.Funkenstein, 62-63  
Achadiati, xv, 249-250  
Adas, 128  
Afrisal Mutahir, 52-53  
Agus Aris Munandar, vii, 7, 12  
Ahmad Kusumanegoro, 275  
Ahmad Mubarak, 329, 331  
Airlangga, vii, 32, 34  
Albert Gilman, 200  
Amartya Sen, 335-336  
amnesia budaya, viii, 57-71  
*amnesia retrograde*, 61-62  
Anas Saidi, 329  
*anchorage*, viii, 59-74  
Andre Gide, 38-39  
Anhar Gonggong, 319  
*animal rationale*, 335  
*anterograde*, 58-64, 71  
Anthony Giddens, 218, 294

Anton Moeliono, 306, 317  
Aristoteles, 335  
*Artasastra*, 27, 30  
*Astabrata*, 6-7  
*Astadikpalaka*, 6  
*Asymmetric war*, xi, 265-266

### B

*Babad Buleleng: A Balinese  
Dynastic Genealogy*, 250  
bahasa Melayu, 195, 307-316  
bahasa santun, ix,  
*balobas*, 258  
Bambang Sumadio, 10  
Behrend, 250, 261  
Benedict Anderson, 272, 287-290  
BFO, 274  
Bidal (maksim), 197  
*Bo' Sangaji Kai Catatan Kerajaan  
Bima*, 250  
Boechari, 320-321  
Boediono, 231, 234

Brown dan Stevinson, 200  
*Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*,  
153  
*Bushido*, 82

## C

*Carita Parahyangan*, 12  
Collins, 195  
Corneille, 43  
*Cultural Universals*, xii, 325-326  
*Culture Matters: How Values  
Shape Human Progress*, 299

## D

Daisaku Ikeda, 91  
Dandan S, 267  
Daniel Sparingga, 325  
David Kilcullen, 275-276  
David Miller, 288  
*Defense et Illustration de la  
Langue Francaise*, 42  
Deklarasi Hak-hak Manusia dan  
Warganegara, 43  
Dhaniel Dhakidae, 328  
*Di Bawah Bendera Revolusi*, 47  
Diderot, 43  
dluwang, 254-260

Dr. EFE Dowes Dekker, 171  
Dr. Tjipto Mangunkusumo, 171  
Du Bellay, 42  
Dulang Mangap, 25

## E

Edict de Nantes, 41  
Ernest Renan, 39-40  
Erucakra, 125  
*Etika Jawa*, 158  
*Evolusi Pendidikan di Indonesia*,  
48

## F

F.C. Kamma, 126  
Falconer Madan, 247  
filologi, 247-260  
Francois Mitterand, 44  
Franz Magnis Suseno, 158, 333-  
334

## G

G.J. De Casparis, 309  
G.W.J. Drewes, 125  
Gatot Nuramntyo, 266

*Genyousha*, 85  
 George Mc Turnan Kahin, 275  
 Gerald Ford, 270  
 globalisasi, xii, 60-61, 63, 73, 78,  
     85, 89, 102, 105, 108, 112,  
     154, 161, 183, 217, 220, 223,  
     238, 242, 287, 294-296, 301,  
     305, 318, 337-339  
 Goffman, 197  
 Gramsci, 39-40  
 Guillaume Bude, 41

## H

H. Gobard, 70  
 "Hindu Ecology", 106  
 H.J. van Mook, 274, 276  
 H.P. Grice, 197-198  
*habitus*, 58  
 Hariani Santiko, 125  
 Harmanato Bratasiswara, 177,  
     179, 180  
 Hasthabrata, 165  
 Hayam Wuruk, 23-24, 32  
 Henry Chambert-Loir, 250-251  
 Henry Kessinger, 270  
 Heyne, 257  
*Hiding from Humanity*, 335  
*Hikayat Banjar dan Kota*  
     *Waringin*, 250

*Hikayat Pandawa Jaya*, 309  
*Hikayat Pandawa Panca Kelima*,  
     309  
*Hikayat Sang Boma*, 309  
*Hikayat Sri Rama: Suntingan*  
     *Naskah Disertai Telaah*  
     *Amanat dan Struktur*, 311, 349  
 Hobbers, 100

## I

I Ketut Surajaya, 83, 86-87, 91,  
     101  
 I Kuntara Wiryamartana, 250  
*imagined community*, 287  
 Imam Mahdi, 125  
*Indie Werbaar*, 272  
 Indische Party, 171

## J

J. Baudrillard, 60-61, 71  
 J.A.B. Wisselius, 125  
 J.J. Ras, 250  
 J.L.A. Brandes, 125  
 Jakob Oetama, 299  
*Javaans papier*, 257  
 Jean-Paul Sartre, 38-39  
 Jenderal Douglas MacArthur, 85

John Locke, 100-101  
Joko Widodo, *viii*, 54, 91, 107  
Jong-Java, 207  
Jong-Selebes, 207  
Jong-Sumatra, 207  
Jurgen Habermas, 220, 225, 242

## K

Kaisar Hirohita, 85  
*Kakawin Arjunawijaya*, 152  
Kakawin Bharatayuddha, 125  
*Kakawin Ramayana Sarga III*, 152  
*Kakawin Ramayana Sarga XXIV*, 152  
*Kakawin Ramayana*, 6, 165  
*Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid III A-B: Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, 250  
*Katalog Naskah Palembang*, 250  
Kautilya, 27  
Kebudayaan Barat, 72  
Kebudayaan Timur, 72  
Ken Angrok, 18-19  
Kennichi O'Mae,  
Ki Hadjar Dewantara, 171, 173, 212, 290.  
kiamat besar, 125  
*kiamat kubra*, 125

Kitab Agama, 23  
kodikologi, 247, 252-253, 260  
Koentjaraningrat, *xii*, 127, 137, 325, 327  
*Kokka Shinto*, 79  
*kokolot*, 31  
*Kokugaku*, 82  
*Kokuryukai*, 85  
Komaruddin Hidayat, 299  
kompradorisasi, 81  
Konstitusi Meiji, 101  
Koreri, 127  
krisis budaya, *x*, 58, 61, 65, 73-74, 131, 134, 141-143, 147, 219, 245  
krisis kultural, 325-327  
krisis multidimensional, 325-326, 328, 340  
krisis semiosis, 58  
*Kunjarakara*, 249  
Kyai Ranggawarsita, 153  
Kyai Wirasendjaja, 126

## L

*La belle Epoque*, 44  
Lawrence Harrison, 299  
*Le Siecle des Intellectuels*, 38

Leech, ix, 202  
Leonardo da Vinci 41  
*Les Provinciales*, 43  
Levinson, 197  
liyan, 209-210, 213,  
lontar, 249, 254

## M

M. Tabrani, 316  
*ma lima*, 159-160  
Majapahit, 23-24  
Makarand R. Paranjape, 106  
Mamat, 247, 249, 259  
Manarmakeri, 127  
*manuscript*, 247  
Martha Nussbaum, xii, 333, 335  
Martin Luther King Jr, 231-232  
Maurice Barres, 38-39  
Max Weber, 287  
Mercer, 219  
messianisme, 123, 126  
*messianistis*, 123-124, 126-128  
Michael Adas, 125  
Michel Winock, 38-40  
Mike Featherstone, 220, 223  
Miterramses, 44  
Mochammad Tauchid, 172-174  
Mochtar Buchori, 48-50  
Mochtar Pabotinggi, xii

Moebiyarto, 337-339  
Moliere, 43  
Montaigne, 41  
Montesquieu, 43  
Mpu Panuluh, 125  
Mpu Sedah, 125  
Mumford, 267  
Musso, 275

## N

Nakae Choomin, 101-102  
naskah kuna, 245-246  
negara terbuka, 81-84  
negara tertutup, 81-84  
Nicholas Evans, 318  
*Ningen Kakumei*, 91  
Noorduyn, 257

## O

obyek, 57  
Oda Nobunaga, 79  
Ookuma Shigenobu, 101-102

## P

P. Bourdieu, 40, 52-53, 58  
 P.J. Worsley, 250  
 Pakuan Pajajaran, 24  
*panggorit*, 258  
 Pararaton, 18-19, 21, 311  
 Parwati Wahjono, ix, 154  
 Pascal, 43  
*patron-client*, 59  
 Peirce, 57  
 pendekatan keamanan, 274-275  
 pendekatan kesejahteraan, 274-275  
*Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, 153  
 Perang Diponegoro, 125  
 Perang Paregreg, 24  
 peristiwa Cilegon, 126  
 peristiwa Malangyuda, 126  
 peristiwa Tambakmerang, 126  
 Permadi, 128  
 Petisi Soetarjo, 272  
 Petisi Wiwoho, 272  
 Pierre Bourdieu, 40, 52, 58, 75  
 Pigeaud, 250  
 Poerbatjaraka, 8  
 politik gaduh, 187  
 Politik hiruk-pikuk, ix, 187-189

Pollock, 308, 318  
*Pralambang Jayabaya*, 124-125  
 Prasasti Dinoyo, 13-14, 30  
 Prasasti Gunung Wukir, 11-12  
 Prasasti Tugu, 10  
*proxy war*, xi, 265-268, 273-274, 279-280, 282,

## R

R. Barthes, 59  
 R. Ng. Jasadipura, 152  
 R.M. Sudiro, 175  
 Rabelais, 41  
 Racine, 43  
 Raja Hayam Wuruk, 129  
 Raja Jayabaya, 124  
     Kerajaan Kediri, 124  
 Ramalan Jayabaya, 125  
*Rationality and Freedom*, 335-336  
 Ratu Adil, 125  
 RCRS, 123  
 reaksi mental, 57-59  
 register, 193, 195  
 Rene Teygeler, 258  
*representamen*, 57-59  
 Restorasi Meiji, 83, 101  
 revolusi mental, xii, 54, 90, 94, 98, 272

Ricklefs dan P. Voorhoeve, 250  
Ricklefs, 313  
Robert J. Lieber, 218  
Roger Brown, 200  
Rogers Brubaker, 287  
Roland Robertson, 294  
Rousseau, 101  
Ruth E. Weisberg, 218

## S

S. Radharkrishnan, 106  
S.O. Robson, 249-250  
*sakoku*, 82  
Samuel P. Huntington, 299  
Sartono Kartodirdjo, 124-125  
Sastracetha, 152  
Sastraprateja, 294  
Satrio Pininggit, 128  
Saya San, 127-128  
semiosis khaotis, 58  
*Serat Arjunasasrabahu*, 152  
Simuh, 129  
Singh, 270  
Singhasari, 4, 18-19  
Siti Maryam R. Salahuddin, 250  
Smith, 287-288  
Soedjatmoko, 128-129  
Soeharto, 48-54, 149, 195

Soetikna, 257  
Soewito-Santoso, 6  
Soka Gakkai Internasional, 91  
Sri Edi Swasono, 238, 338  
Sri Mangkunagara III, 175  
Sri Mangkunagara IV, 175, 177, 179  
Sri Waturenggong, 25-27  
Stamford Raffles, 125  
strategi kesopanan, 200  
Stuart Mill, 101  
Sukarno, 46-51, 67, 99, 102, 104, 109-110, 116, 269, 275  
Sukatno, 313  
supremasi individu, 335  
Suratminto, 61  
Suryadinata, 314  
Suryo Prabowo, 279

## T

T. Iskandar, 308, 311  
Tanjung Putih, 125  
Teilhard de Chardin, 39-40  
Tennoisme, 85-86, 90  
*terra belica*, 265  
*the book of dead*, 259  
*The End of Nation*, 300  
*The Principal Upanish*, 106-107

*tinta jafaron*, 259-260

tinta jelaga, 259

Titik Pudjiastuti, x, 245, 250

Tokugawa, 82-83

*Trias Politica*, 43, 58, 104, 114,  
328

## U

Uli Kozok, 311-312

Urip Sumohardjo, 270

## V

Van der Tuuk, 308-310

Veritas, Probitas, Iustitia, 53

Von Magnis Suseno, 123

## W

W. van der Molen, 249-250

W.P. Groeneveldt, 314

Wallerstein, 294

*Wangbang Wideya: A Javanese  
Panji Romance*, 250

wawasan kebangsaan, xi, 285,  
298, 300-301

Wexler, 220

## Y

Yupa, 8

## Z

*Zaman Edan*, 153

Zaman Kalabendu, 125